

**STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN POLEHAN  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLPBK (PENATAAN  
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS)**

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Teknik



**MUAMMAL  
NIM. 135060600111047**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
MALANG  
2018**

repository.ub.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN POLEHAN**

**DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLPBK (PENATAAN**

**LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS)**

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Ditujukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik



**MUAMMAL**  
**NIM. 135060600111047**

Skripsi ini telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing  
pada Tanggal 4 Desember 2018

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT**  
**NIP. 19760122 200312 1 003**

**Deni Agus Setiyono, ST., M.Eng**  
**NIP. 201405 860828 1 001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota**

**Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP.**  
**NIP. 19651218 199412 1 001**



*Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada:*

*Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta*

*Terima kasih atas doa-doa dan segala perjuangannya  
dalam meringankan beban penulis selama masa perkuliahan.*

*Semoga gelar Sarjana ini bisa membuat kalian bangga*

**IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI****JUDUL SKRIPSI:**

Struktur Sosial Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK  
(Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)

Nama Mahasiswa : Muammal  
NIM : 135060600111047  
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

**KOMISI PEMBIMBING:**

Ketua : Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT  
Anggota : Deni Agus Setiyono, ST., M.Eng

**TIM DOSEN PENGUJI:**

Dosen Penguji : Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT., Ph.D  
Tanggal Ujian : 5 November 2018  
SK Penguji : 2501/UN10.F07/KP/2018



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan, dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam Naskah Skripsi/Tugas Akhir ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi/ Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi/ Tugas Akhir dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Desember 2018

Mahasiswa,

Muammal

NIM. 135060600111047

Tembusan:

1. Kepala Laboratorium Skripsi/ Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Dua (2) Dosen Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir yang bersangkutan
3. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan

## RINGKASAN

**MUAMMAL**, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Desember 2018, *Struktur Sosial Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)*, Dosen Pembimbing: Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT dan Deni Agus Setiyono, ST., M.Eng.

*Key performance indicator* “100-0-100” yang berjalan hingga saat ini menggunakan model pendekatan partisipatif. Program PLPBK atau Neighbourhood Development merupakan upaya intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman menggunakan pendekatan *bottom up planning*. Keberhasilan pelaksanaan Program PLPBK sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam siklus PLPBK dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pembangunan dan tahap keberlanjutan. Pada tahun 2014, RW 04 Kelurahan Polehan merupakan salah satu kawasan prioritas Program PLPBK yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selama ini program pembangunan dengan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan berdasarkan kapabilitas masyarakat lokal terutama interelasi sosial masyarakatnya, padahal untuk mencapai tujuan pembangunan partisipatif dalam Program PLPBK, diperlukan pemahaman yang baik atas jaringan sosial yang terbangun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur sosial dalam pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan. Pemetaan dan pengukuran relasi antar aktor dalam pelaksanaan Program PLPBK di Kelurahan Polehan menggunakan *Social Network Analysis*. Struktur sosial yang terbentuk dianalisis melalui 3 indeks, yaitu *density*, *rate of participation* dan *centrality*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tingkat partisipasi terkategori rendah pada seluruh tahap. Kegiatan lebih banyak diikuti oleh lembaga pengelola pembangunan, seperti BKM, TIPP dan KSM. Setiap responden memiliki ikatan satu sama lain melalui keikutsertaan mereka di setidaknya satu 1 kegiatan. Berdasarkan nilai *density*, sebesar 2,4% sampai 91% masyarakat merupakan *co-member* dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat 25 aktor sentral yang tersebar ke seluruh RT secara konsisten memiliki kontribusi yang besar dari awal hingga akhir pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan. Berdasarkan nilai *centrality*: (i) Aktor sentral yang menempati sebagai pemimpin informal, yaitu TIPP ataupun KSM yang mungkin memiliki kemampuan tinggi untuk mempengaruhi warga melalui langkah-langkah minimum ketika berhubungan dengan yang lain, (ii) tidak terdapat aktor yang berperan sebagai mediator atau penghubung dengan aktor lain, (iii) tingkat kedekatan yang tinggi antar aktor sentral satu sama lain.

Kata Kunci : Struktur sosial, PLPBK, Analisis jaringan sosial.

## SUMMARY

**MUAMMAL**, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, University of Brawijaya, December 2018, Community Social Structure in Polehan Sub-District in The Implementation of PLPBK (Neighborhood Development Program), Academic Supervisor: Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT and Deni Agus Setiyono, ST., M.Eng.

*Key performance indicator “100-0-100” which is ongoing today uses the participative approach model. Neighbourhood Development Program (PLPBK) is the effort to intervene in the arrangement of settlement which uses the bottom-up planning. The success of the PLPBK Program is largely determined by community participation from the preparation, planning, development and sustainability phases. In 2014, RW 04 Polehan Sub-District was one of the priority areas of PLPBK that was appointed by the Directorate General of Human Settlement. All this time, the development program with the public participation has not considered about the local community’s capability particularly the social interrelation, whereas to achieve the goals of participative development in PLPBK needs a deep understanding of social network that is formed. As a result, this study aims to identify the social structure in the implementation of PLPBK in Polehan Sub-District. Mapping and measurement of the relationship between actors in the implementation of PLPBK in Polehan Sub-District use The Social Network Analysis. The social structure which is formed is measured uses 3 indicators which are density, the rate of participation and centrality. The results of this study show that the participation rate is categorized as low in all phases. More activities are followed by development management institutions, such as BKM, TIPP and KSM. Each respondent has ties to each other through their participation in at least one activity. Additionally, the density rate shows that 2.4% to 91% of the community are the co-members. Meanwhile, 25 central actors spread in 8 RT has a big contribution in the whole time of PLPBK consistently. Based on the centrality rate: (i) Central actors who occupy informal leaders, namely TIPP or KSM who may have a high ability to influence community through minimum steps when dealing with others, (ii) there is no actor who acts as a mediator or liaison with other actors, (iii) a high level of closeness between central actors with each other.*

**Keywords:** Social structure, Neighbourhood development, Social network analysis.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahwata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Struktur Sosial Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)” yang disusun sebagai salah satu syarat wajib kelulusan studi strata-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, (Almh.) Salmah dan Abdul Ghofir sera kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis selama perkuliahan dan khususnya saat penyusunan skripsi
2. Bapak Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT dan Bapak Deni Agus Setiyono, ST., M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses tugas akhir ini.
3. Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT., Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
4. Para Dosen serta Staf Karyawan Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan selama proses perkuliahan.
5. Nadhia Maharany Siara, yang selalu memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dari masa awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Teman-teman “*Sustain*” PWK FT-UB 2013 yang telah menemani selama proses perkuliahan sampai saat ini.

Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap masukan dan saran dari berbagai pihak agar terciptanya penelitian yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Malang, Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.6.1 Ruang Lingkup Materi .....	4
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah .....	5
1.7 Kerangka Penelitian .....	7
1.8 Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Lingkungan Bertetangga ( <i>neighborhood</i> ) dan Komunitas ( <i>community</i> ) .....	9
2.1.1 Tujuan dan Aspek-aspek Perencanaan Lingkungan Bertetangga .....	10
2.1.2 Aktifitas-aktifitas dan Proses Perencanaan Lingkungan Bertetangga secara Partisipatif .....	11
2.2 Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) .....	13
2.2.1 Sekilas Program PLPBK.....	13
2.2.2 Tujuan Program PLPBK .....	13
2.2.3 Siklus PLPBK .....	14
2.2.4 Pelaku Program PLPBK .....	19
2.3 Jaringan ( <i>Network</i> ).....	23
2.4 <i>Social Network Analysis</i> (SNA).....	26
2.4.1 Konsep <i>Social Network Analysis</i> .....	26
2.4.2 <i>Incidience Matrix</i> (Matriks Insiden) .....	28
2.4.3 <i>Adjacency Matrix</i> (Matriks Ketetanggaan).....	29
2.4.4 Jaringan Afiliasi ( <i>Affiliation Network</i> ).....	31

2.4.5	<i>Density</i> .....	33
2.4.6	Tingkat Partisipasi dan Ukuran <i>Event</i> .....	34
	A. Tingkat Partisipasi.....	34
	B. Ukuran <i>Event</i> .....	35
2.4.7	<i>Centrality</i> .....	35
	A. <i>Degree centrality</i> .....	36
	B. <i>Closeness centrality</i> .....	36
	C. <i>Betweenness centrality</i> .....	37
2.5	Studi Terdahulu.....	41
2.6	Kerangka Teori.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>47</b>
3.1	Definisi Operasional.....	47
3.2	Jenis Penelitian.....	48
3.3	Variabel Penelitian .....	48
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	49
	3.4.1 Survei Primer.....	49
	3.4.2 Survei Sekunder .....	50
3.5	Populasi dan Sampel Penelitian .....	51
3.6	Metode Analisis Data .....	51
	3.6.1 Data jaringan afiliasi .....	51
	3.6.2 <i>Density</i> .....	56
	3.6.3 <i>Rate of Participation</i> .....	57
	3.6.4 <i>Centrality</i> .....	58
	A. <i>Degree centrality</i> .....	58
	B. <i>Closeness centrality</i> .....	59
	C. <i>Betweenness centrality</i> .....	60
3.7	Kerangka Analisis .....	63
3.8	Desain Survei .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>67</b>
4.1	Gambaran Umum Kelurahan Polehan .....	67
	4.1.1 Karakteristik Fisik Dasar Kelurahan Polehan .....	67
	A. Letak Geografis .....	67
	B. Kondisi Topografi .....	69
	C. Kondisi Klimatologi.....	69



D. Kondisi Hidrologi .....	69
4.1.2 Karakteristik Kependudukan Kelurahan Polehan .....	69
A. Mata Pencarian Penduduk .....	69
B. Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	70
4.1.3 Gambaran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Polehan .....	71
4.1.4 Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Polehan .....	72
4.2 Gambaran Umum Permukiman Kumuh RW 04 Kelurahan Polehan .....	76
4.2.1 Kondisi Demografis .....	78
4.2.2 Kondisi Bangunan Hunian .....	80
4.2.3 Aksesibilitas Lingkungan .....	83
4.2.4 Drainase Lingkungan .....	85
4.2.5 Pelayanan Air Minum .....	87
4.2.6 Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi .....	89
4.2.7 Pengelolaan Persampahan .....	92
4.2.8 Legalitas Bangunan .....	94
4.3 Atribut Demografis .....	97
4.3.1 Atribut Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia .....	97
4.3.2 Atribut Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	98
4.3.3 Atribut Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan .....	99
4.3.4 Atribut Responden Berdasarkan Pendidikan .....	99
4.3.5 Atribut Responden Berdasarkan Status Penduduk .....	100
4.4 Intervensi Program PLPBK pada Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan Polehan .....	101
4.4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan .....	101
4.4.2 Hasil Pembangunan Program PLPBK RW 04 Kelurahan Polehan .....	105
A. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan/Sirkulasi .....	106
B. Pembangunan Sarana Permukiman .....	110
C. Pembangunan Prasarana Permukiman .....	114
D. Pengembangan Kelembagaan .....	122
4.5 Struktur Sosial Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK .....	122
4.5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PLPBK .....	123
4.5.2 Kerapatan Antar Masyarakat pada Pelaksanaan Program PLPBK .....	134

4.5.3 Aktor Sentral Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK.....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>159</b>
5.1 Kesimpulan .....	159
5.2 Saran.....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>169</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tahap Kegiatan PLPBK.....	15
Tabel 2.2	Keterangan Aktor Sentral dalam Ilustrasi <i>Centrality</i> .....	39
Tabel 2.3	Ringkasan Istilah Kunci dan Pengukuran Jaringan .....	40
Tabel 2.4	Studi Terdahulu.....	41
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	48
Tabel 3.2	Desain Kuesioner Berdasarkan Definisi Teori dan Penelitian Sebelumnya ...	50
Tabel 3.3	Jenis Data Sekunder Penelitian .....	50
Tabel 3.4	Kode Kegiatan pada Tiap Tahap Pelaksanaan Program PLPBK.....	55
Tabel 3.5	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program PLPBK Kelurahan Polehan .....	58
Tabel 3.6	Desain Survei .....	64
Tabel 4.1	Kesimpulan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Polehan .	73
Tabel 4.2	Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh RW 04 Kelurahan Polehan .....	75
Tabel 4.3	Kondisi Demografis RW 04 Kelurahan Polehan .....	78
Tabel 4.4	Kondisi Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan .....	80
Tabel 4.5	Kondisi Aksesibilitas Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan .....	83
Tabel 4.6	Kondisi Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan .....	85
Tabel 4.7	Kondisi Pelayanan Air Minum RW 04 Kelurahan Polehan .....	87
Tabel 4.8	Kondisi Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi RW 04 Kelurahan Polehan.....	89
Tabel 4.9	Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 04 Kelurahan Polehan .....	92
Tabel 4.10	Kondisi Legalitas Bangunan RW 04 Kelurahan Polehan .....	94
Tabel 4.11	Hasil Usulan Kegiatan Pembangunan Fisik Program PLPBK Kelurahan Polehan.....	105
Tabel 4.12	Tingkat Partisipasi Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Program PLPBK .....	125
Tabel 4.13	Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Persiapan.....	127
Tabel 4.14	Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	129
Tabel 4.15	Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	131
Tabel 4.16	Jenis dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Program PLPBK	

	Kelurahan Polehan .....	132
Tabel 4.17	Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Keberlanjutan.....	134
Tabel 4.18	Nilai <i>Density</i> RW 04 Kelurahan Polehan.....	135
Tabel 4.19	Hasil Perhitungan <i>Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Keseluruhan Tahap Pelaksanaan Program PLPBK .....	137
Tabel 4.20	Profil Aktor Sentral Keseluruhan Tahap Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan .....	147



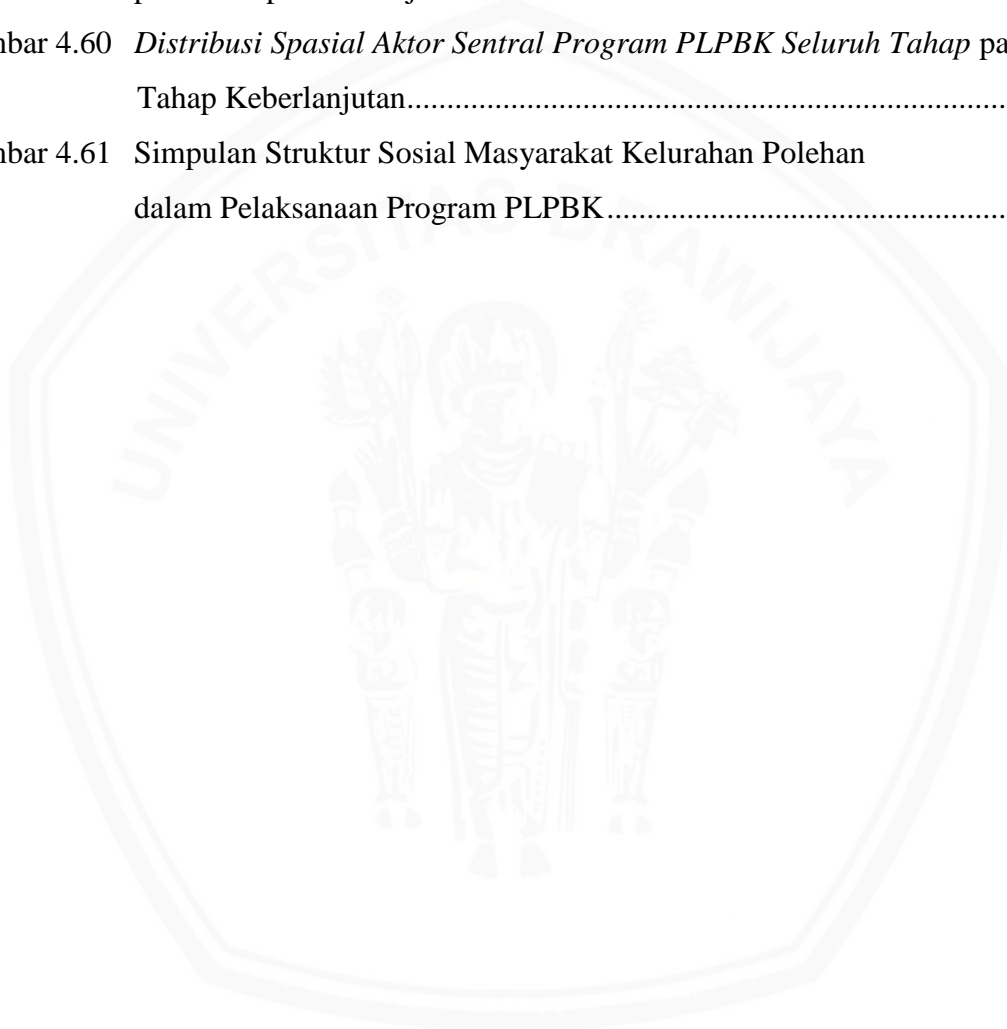
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah Studi Penelitian .....	6
Gambar 1.2	Kerangka Penelitian.....	7
Gambar 2.1	Siklus PLPBK.....	14
Gambar 2.2	Interrelasi Modal Sosial dengan Berbagai Faktor .....	24
Gambar 2.3	Ilustrasi Graf A .....	29
Gambar 2.4	Ilustrasi Graf G .....	30
Gambar 2.5	Ilustrasi Matriks Jaringan Afiliasi .....	32
Gambar 2.6	Ilustrasi <i>Degree Centrality</i> .....	36
Gambar 2.7	Ilustrasi <i>Closeness Centrality</i> .....	37
Gambar 2.8	Ilustrasi <i>Betweenness Centrality</i> .....	38
Gambar 2.9	Ilustrasi <i>Centrality</i> .....	39
Gambar 2.10	Kerangka Teori Penelitian .....	45
Gambar 3.1	<i>Incidence Matrix</i> .....	52
Gambar 3.2	<i>Adjacency Matrix</i> .....	53
Gambar 3.3	Skema Pengaplikasian <i>Social Network Analysis</i> pada Penelitian .....	54
Gambar 3.4	Skema Pengerjaan pada <i>Social Network Analysis</i> .....	55
Gambar 3.5	Kerangka Analisis Penelitian.....	63
Gambar 4.1	Wilayah Administrasi Kelurahan Polehan .....	68
Gambar 4.2	Komposisi Penduduk Kelurahan Polehan Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Gambar 4.3	Komposisi Penduduk Kelurahan Polehan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Gambar 4.4	Struktur Kepengurusan BKM Polehan .....	71
Gambar 4.5	<i>Spiderweb</i> Penanganan Kumuh Kelurahan Polehan.....	74
Gambar 4.6	Wilayah Administrasi RW 04 Kelurahan Polehan .....	77
Gambar 4.7	Peta Kepadatan Penduduk RW 04 PLPBK Kelurahan Polehan .....	79
Gambar 4.8	Peta Kepadatan Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan .....	81
Gambar 4.9	Kelayakan Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan .....	82
Gambar 4.10	Perkerasan Prasarana Jalan RW 04 Kelurahan Polehan .....	84
Gambar 4.11	Peta Saluran Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan.....	86
Gambar 4.12	Penggunaan Air Bersih RW 04 Kelurahan Polehan .....	88
Gambar 4.13	Kepemilikan MCK RW 04 Kelurahan Polehan .....	90
Gambar 4.14	Peta Kepemilikan Septic Tank RW 04 Kelurahan Polehan .....	91
Gambar 4.15	Peta Pelayanan Petugas Kebersihan RW 04 Kelurahan Polehan .....	93

Gambar 4.16	Peta Kepemilikan IMB Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan .....	95
Gambar 4.17	Peta Legalitas Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan .....	96
Gambar 4.18	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia.....	97
Gambar 4.19	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	98
Gambar 4.20	Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	99
Gambar 4.21	Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	100
Gambar 4.22	Komposisi Responden Berdasarkan Sataus Penduduk .....	101
Gambar 4.23	Periode Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan.....	102
Gambar 4.24	Alur Hubungan Kerja Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan.....	103
Gambar 4.25	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pembangunan Gapura ..	106
Gambar 4.26	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pembangunan Gapura .....	107
Gambar 4.27	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Lampu Penerangan Jalan .....	108
Gambar 4.28	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Lampu Penerangan Jalan.....	109
Gambar 4.29	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	110
Gambar 4.30	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	111
Gambar 4.31	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pusat Pelayanan Masyarakat .....	112
Gambar 4.32	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pusat Pelayanan Masyarakat.....	113
Gambar 4.33	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Saluran Drainase.....	115
Gambar 4.34	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Saluran Drainase.....	116
Gambar 4.35	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Penanganan Persampahan .....	118
Gambar 4.36	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Penanganan Persampahan .....	119
Gambar 4.37	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan	

	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) .....	120
Gambar 4.38	Foto <i>Mapping</i> Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan IPAL.....	121
Gambar 4.39	Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pelatihan Linmas Tindak Rawan Bencana .....	122
Gambar 4.40	Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam tiap Tahap Program PLPBK .....	124
Gambar 4.41	<i>Netdraw</i> Keikutsertaan Masyarakat pada Tahap Persiapan .....	126
Gambar 4.42	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Program PLPBK kepada Masyarakat Kelurahan Polehan .....	127
Gambar 4.43	<i>Netdraw</i> Keikutsertaan Masyarakat pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	128
Gambar 4.44	Dokumentasi Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	129
Gambar 4.45	<i>Netdraw</i> Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan .....	130
Gambar 4.46	Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Lingkungan.....	132
Gambar 4.47	<i>Netdraw</i> Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan .....	133
Gambar 4.48	<i>Netdraw Degree Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Persiapan .....	139
Gambar 4.49	<i>Netdraw Betweenness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Persiapan .....	139
Gambar 4.50	<i>Netdraw Closeness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Persiapan .....	140
Gambar 4.51	<i>Netdraw Degree Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	141
Gambar 4.52	<i>Netdraw Betweenness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	141
Gambar 4.53	<i>Netdraw Closeness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	142
Gambar 4.54	<i>Netdraw Degree Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan .....	144
Gambar 4.55	<i>Netdraw Betweenness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan .....	144

Gambar 4.56	<i>Netdraw Closeness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	145
Gambar 4.57	<i>Netdraw Degree Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan .....	145
Gambar 4.58	<i>Netdraw Betweenness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan .....	146
Gambar 4.59	<i>Netdraw Closeness Centrality</i> Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan .....	146
Gambar 4.60	<i>Distribusi Spasial Aktor Sentral Program PLPBK Seluruh Tahap</i> pada Tahap Keberlanjutan.....	154
Gambar 4.61	Simpulan Struktur Sosial Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK.....	156





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	169
Lampiran 2	Atribut Demografis Responden Penelitian.....	171
Lampiran 3	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 01 Tiap Tahap Program.....	184
Lampiran 4	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 02 Tiap Tahap Program.....	185
Lampiran 5	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 03 Tiap Tahap Program.....	186
Lampiran 6	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 04 Tiap Tahap Program.....	188
Lampiran 7	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 05 Tiap Tahap Program.....	189
Lampiran 8	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 06 Tiap Tahap Program.....	190
Lampiran 9	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 07 Tiap Tahap Program.....	191
Lampiran 10	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 08 Tiap Tahap Program.....	192
Lampiran 11	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 09 Tiap Tahap Program.....	193
Lampiran 12	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 10 Tiap Tahap Program.....	195
Lampiran 13	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 11 Tiap Tahap Program.....	196
Lampiran 14	Matriks 2 <i>Mode</i> Keikutsertaan RT 12 Tiap Tahap Program.....	198
Lampiran 15	Nilai Tingkat Partisipasi Tiap RT pada Tahap Persiapan.....	199
Lampiran 16	Nilai Tingkat Partisipasi Tiap RT pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran.....	200
Lampiran 17	Nilai Tingkat Partisipasi Tiap RT pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	201
Lampiran 18	Nilai Tingkat Partisipasi Tiap RT pada Tahap Keberlanjutan .....	202
Lampiran 19	Nilai <i>Density</i> Tahap Persiapan .....	203
Lampiran 20	Nilai <i>Density</i> Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	204
Lampiran 21	Nilai <i>Density</i> Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	205
Lampiran 22	Nilai <i>Density</i> Tahap Keberlanjutan .....	206
Lampiran 23	<i>Degree Centrality</i> Tahap Persiapan.....	207
Lampiran 24	<i>Closeness Centrality</i> Tahap Persiapan .....	209
Lampiran 25	<i>Betweenness Centrality</i> Tahap Persiapan .....	211
Lampiran 26	<i>Degree Centrality</i> Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	213
Lampiran 27	<i>Closeness Centrality</i> Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran .....	215
Lampiran 28	<i>Betweenness Centrality</i> Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran...	217
Lampiran 29	<i>Degree Centrality</i> Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	219
Lampiran 30	<i>Closeness Centrality</i> Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	221

Lampiran 31	<i>Betweenness Centrality</i> Tahap Pelaksanaan Pembangunan .....	223
Lampiran 32	<i>Degree Centrality</i> Tahap Keberlanjutan .....	225
Lampiran 33	<i>Closeness Centrality</i> Tahap Keberlanjutan.....	227
Lampiran 34	<i>Betweenness Centrality</i> Tahap Keberlanjutan .....	229





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh dialami oleh hampir di semua kota besar di Indonesia, termasuk Kota Malang. Berdasarkan SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015 terkait dengan sebaran permukiman kumuh yang ada di Kota Malang, sebanyak 29 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang terkategori sebagai perumahan dan permukiman kumuh. Total luas permukiman kumuh di Kota Malang berdasarkan SK tersebut, yaitu sebesar 608,6 Ha (Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh, 2016).

Merujuk pada RPJMN 2015-2019, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk menjadikan Kota Malang “tanpa kumuh” pada tahun 2019. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh dan pengembangan *livelihood* perkotaan.

Penanganan skala unit lingkungan (*neighbourhood*) menjadi salah satu alternatif penanganan masalah pembangunan, karena pada unit tersebut masyarakat sangat mudah mengenali masalah yang dihadapinya langsung. Masyarakat yang bermukim pada suatu tempat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan sehingga membentuk struktur sosial.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menciptakan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman berupa Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program PLPBK atau *Neighbourhood Development* merupakan upaya intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara komprehensif yang menggunakan pendekatan *bottom-up planning*, yaitu mendukung dan memfasilitasi perencanaan langsung dari masyarakat (Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), 2014).

Berdasarkan hasil kegiatan lokakarya pada bulan Oktober 2013, disepakati bahwa RW 04 terpilih sebagai kawasan prioritas Program PLPBK. Program PLPBK telah dilaksanakan di kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan berfokus pada penguatan dan pengembangan modal sosial dan kapasitas masyarakat melalui pelibatan langsung

dalam proses peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan) sebagai media belajar bersama dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman. Modal sosial didefinisikan sebagai keseluruhan sumberdaya yang dapat diakses oleh individu melalui jaringan sosial mereka yang didasarkan pada hubungan saling mengenal. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif (Bourdieu, 1986). Menurut Putnam (2000), adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menciptakan kepercayaan dan kerja sama diantara sesama anggota.

Pelaksanaan Program PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan yang telah berjalan hingga tahun 2016 menggunakan model pendekatan partisipatif. *Participatory planning* dan partisipasi antar *stakeholder* dinilai sebagai suatu kriteria pembangunan yang berhasil di Asia Tenggara (Khang & Moe, 2008). Mubiyarto dan Kartodiharjo (1988) menyebutkan bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk mendukung keberhasilan program pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan mereka, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sama halnya dengan program PLPBK, masyarakat di kawasan prioritas RW 04 Kelurahan Polehan dilibatkan dalam seluruh siklus PLPBK yang terdiri dari tahap persiapan, perencanaan dan pemasaran sosial, pelaksanaan pembangunan hingga tahap keberlanjutan. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakatnya (Conyers, 1991).

Hanya saja selama ini program pembangunan dengan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan berdasarkan kapabilitas masyarakat lokal terutama relasi sosial antar masyarakat, padahal untuk mencapai tujuan pembangunan partisipatif dalam Program PLPBK, diperlukan pemahaman yang baik atas jaringan sosial. Pembentukan serta pemanfaatan jaringan sosial yang telah terbangun merupakan salah satu strategi adaptasi yang utama dan paling efektif (Arsyad, 2015). Pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat (Coleman, 1988). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur sosial masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan yang terbentuk dalam pelaksanaan Program PLPBK. Struktur sosial adalah “keseluruhan sistem, jaringan atau pola” hubungan (Nadel, 1978: 12). Nadel (1978: 16) mengartikan jaringan sebagai hubungan yang saling terkait dimana interaksi tersirat pada satu menentukan interaksi yang terjadi pada lainnya.

Mitchell (1969: 10) menyebut bahwa pola interaksi ini merupakan lingkup dari analisis jaringan.

Pemetaan dan pengukuran hubungan entitas sosial dan interaksi serta relasi antar aktor dalam pelaksanaan Program PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan diukur dengan menerapkan matriks yang dikembangkan dalam *Social Network Analysis*, yaitu jaringan afiliasi. Data jaringan afiliasi dapat berupa laporan kehadiran aktor, keanggotaan, atau beberapa jenis ikatan relasional dengan suatu *event* (Borgatti & Halgin, 2011). Jaringan afiliasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan kehadiran aktor dalam tiap kegiatan Program PLPBK yang telah dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Polehan.

Jaringan sosial antar aktor akan membentuk struktur sosial masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK. Struktur sosial yang terbentuk dapat diidentifikasi dari 3 indeks untuk mengukur modal sosial, seperti yang diusulkan oleh Ari et. Al (2013), yang meliputi *rate of participation*, *density* dan *centrality*. Hubungan atau interaksi antar aktor yang terlibat beserta atribut-atributnya, divisualisasikan dengan *Netdraw* (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002)

## 1.2 Identifikasi Masalah

RW 04 terpilih sebagai kawasan prioritas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kelurahan Polehan atas dasar pertimbangan masalah kondisi bangunan hunian, air bersih, persampahan, usaha ekonomi lokal dan sarana pendidikan/kegiatan sosial. Rencana program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Polehan masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana dan prasarana seperti, bangunan hunian, jalan, pelayanan air minum, sanitasi, persampahan dan penanggulangan kebakaran (Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh, 2016). Sementara mekanisme pelaksanaan program PLPBK yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2014 hingga bulan Februari tahun 2016 menggunakan metode sosialisasi, rembug, lokakarya hingga *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan secara rutin pada tiap tahap kegiatannya. Sehingga keterikatan individu di dalam masyarakat sangat diperlukan di dalam mendukung program tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kondisi relasi sosial masyarakat dan interaksi antar aktor dalam program PLPBK di Kelurahan Polehan. Selama ini aspek sosial dalam melakukan sosialisasi program kurang diperhatikan, padahal dengan diperhatikannya relasi sosial komunitas dapat mendukung keberlanjutan program yang ada dan program yang ada dapat terealisasi dengan baik di masyarakat.

### 1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK yang diukur melalui:

- a. Tingkat partisipasi
- b. Tingkat densitas antar aktor
- c. Tingkat sentralitas aktor

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi 3 penerima manfaat, yaitu:

#### 1. Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui modal sosial dalam pelaksanaan program PLPBK serta sebagai modal masyarakat dalam program selanjutnya terkait peningkatan kualitas permukiman ataupun program lain yang berbasis partisipasi masyarakat.

#### 2. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan evaluasi program PLPBK Pemerintah Kota Malang serta penilaian efektifitas program yang ditinjau dari sisi sosial masyarakat dalam mencapai peningkatan kualitas permukiman yang layak huni.

#### 3. Mahasiswa

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan keilmuan baru yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program/kebijakan.

### 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

#### 1.6.1 Ruang Lingkup Materi

1. Struktur sosial yang dimaksud merujuk pada salah satu dimensi modal sosial, yaitu jaringan. Jadi, pembahasan penelitian ini fokus pada jejaring sosial masyarakat tanpa mendefinisikan aspek modal sosial lainnya, yaitu norma dan kepercayaan (Putnam, 2000).
2. Struktur sosial masyarakat dalam pelaksanaan Program PLPBK diidentifikasi dengan metode *social network analysis* berdasarkan rumus dari Wasserman dan Faust (1994) melalui 3 komponen, yaitu *density*, *rate of participation* dan *centrality*.

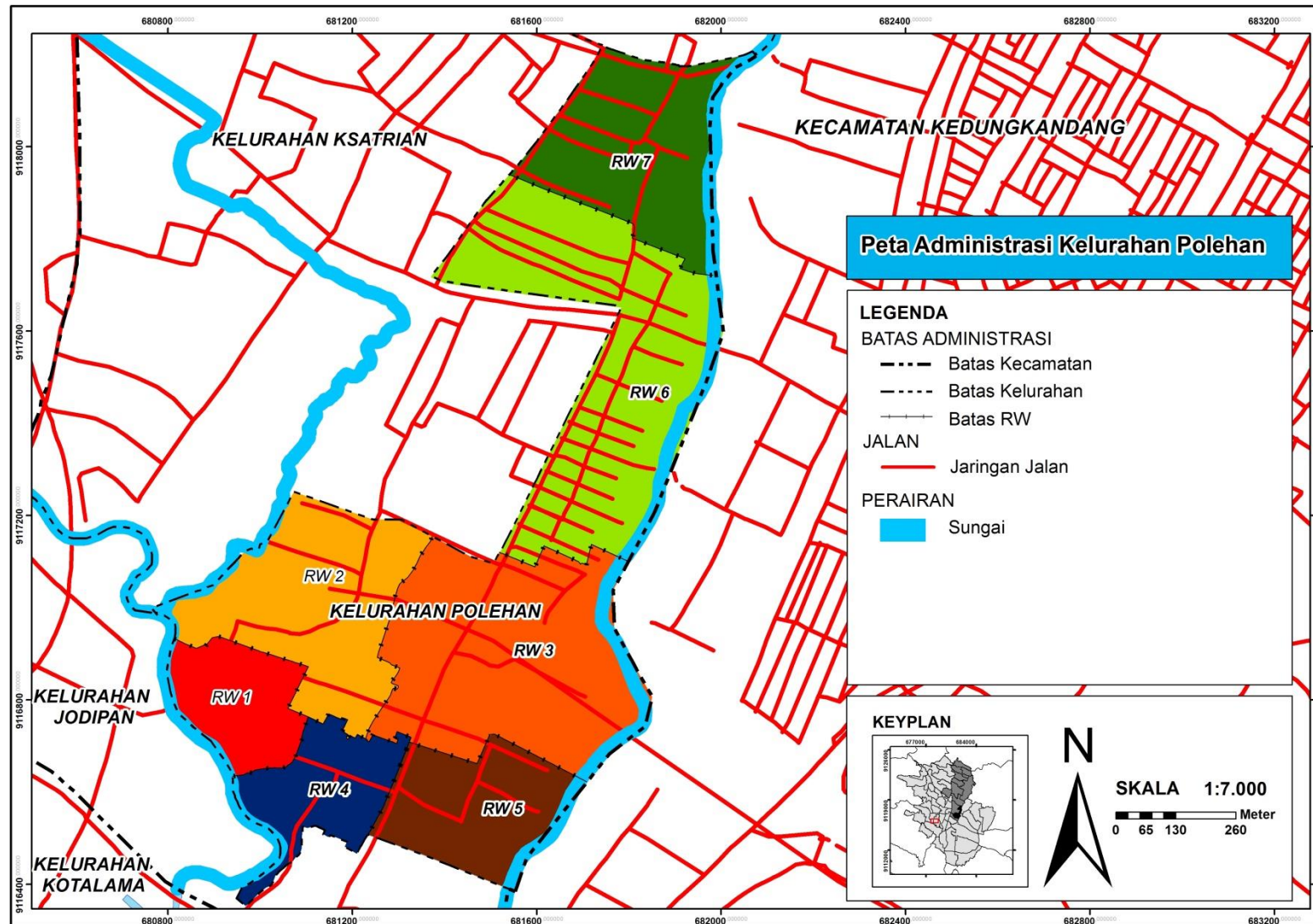
3. Jaringan afiliasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan kehadiran aktor dalam seluruh kegiatan pelaksanaan siklus PLPBK yang tertera dalam Pedoman Teknis PLPBK (2014).
4. *Density* adalah proporsi kehadiran aktor dalam setiap tahap kegiatan PLPBK, dengan menggunakan rumus Wasserman dan Faust (1994).
5. Analisis *rate of participation* digunakan untuk mengetahui rata-rata kegiatan Program PLPBK yang diikuti oleh masyarakat dalam seluruh kegiatan siklus PLPBK yang tertera dalam pedoman teknis PLPBK tahun 2014. Siklus tersebut terdiri dari 4 tahap, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan partisipatif dan pemasaran sosial, pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan.
6. Analisis *centrality* bertujuan untuk menemukan aktor yang paling menonjol atau aktor sentral dalam jaringan pada tiap tahap Program PLPBK melalui 3 indeks, yaitu *degree*, *closeness* dan *betweenness* (Wasserman dan Faust, 1994).
7. Objek amatan adalah kawasan prioritas Program PLPBK Kelurahan Polehan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2016, yaitu RW 04.

### 1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah

Batasan wilayah dalam penelitian ini, yaitu RW 4 Kelurahan Polehan yang merupakan kawasan prioritas dalam program PLPBK Kelurahan Polehan. Secara administratif, Kelurahan Polehan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Blimbing Kota Malang yang memiliki luas 101,4 Ha dan terbagi menjadi 7 RW dan 74 RT. Batas wilayah administrasi Kelurahan Polehan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bunulrejo
- Sebelah Timur : Sungai Bango dan Kelurahan Kedungkandang
- Sebelah Selatan : Sungai Brantas dan Kelurahan Jodipan
- Sebelah Barat : Kelurahan Ksatrian dan Kelurahan Jodipan





Gambar 1.1 Wilayah Studi Penelitian

## 1.7 Kerangka Penelitian

### Latar Belakang

- Program PLPBK atau *Neighbourhood Development* merupakan upaya intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara komprehensif yang menggunakan pendekatan *bottom-up planning*, yaitu mendukung dan memfasilitasi perencanaan langsung dari masyarakat (Pedoman Teknis PLPBK, 2014). Berdasarkan hasil kegiatan lokakarya pada bulan Oktober 2013, disepakati bahwa RW 04 terpilih sebagai kawasan prioritas Program PLPBK Kelurahan Polehan. Program PLPBK berfokus pada penguatan dan pengembangan modal sosial dan kapasitas masyarakat melalui pelibatan langsung dalam proses peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL (sosial, ekonomi, dan lingkungan) sebagai media belajar bersama dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman.
- Modal sosial didefinisikan sebagai keseluruhan sumberdaya yang dapat diakses oleh individu melalui jaringan sosial mereka yang didasarkan pada hubungan saling mengenal. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif (Bourdieu, 1986). Menurut Putnam (1983), adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menciptakan kepercayaan dan kerja sama diantara sesama anggota.
- Pelaksanaan Program PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan yang telah berjalan hingga tahun 2016 menggunakan model pendekatan partisipatif. *Participatory planning* dan partisipasi antar *stakeholder* dinilai sebagai suatu kriteria pembangunan yang berhasil di Asia Tenggara (Khang and Moe 2008). Mubiyarto dan Kartodiharjo (1990) menyebutkan bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama untuk mendukung keberhasilan program pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan mereka, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakatnya (Conyers, 1991).
- Hanya saja selama ini program pembangunan dengan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan berdasarkan kapabilitas masyarakat lokal terutama relasi sosial antar masyarakat, padahal untuk mencapai tujuan pembangunan partisipatif dalam Program PLPBK, diperlukan pemahaman yang baik atas jaringan sosial. Pembentukan serta pemanfaatan jaringan sosial yang telah terbangun merupakan salah satu strategi adaptasi yang utama dan paling efektif (Arsyad 2015). Pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat (Coleman, 1988).
- Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur sosial masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan yang terbentuk dalam pelaksanaan Program PLPBK. Struktur sosial adalah "keseluruhan sistem, jaringan atau pola" hubungan (Nadel, 1957: 12). Nadel (1957: 16) mengartikan jaringan sebagai hubungan yang saling terkait dimana interaksi tersirat pada satu menentukan interaksi yang terjadi pada lainnya. Mitchell (1969: 10) menyebut bahwa pola interaksi ini merupakan lingkup dari analisis jaringan. Pemetaan dan pengukuran hubungan entitas sosial dan interaksi serta relasi antar aktor dalam pelaksanaan Program PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan diukur dengan menerapkan matriks yang dikembangkan dalam *Social Network Analysis*, yaitu jaringan afiliasi.

### Identifikasi Masalah

Rencana program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Polehan masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana dan prasarana seperti, bangunan hunian, jalan, pelayanan air minum, sanitasi, persampahan dan penanggulangan kebakaran (Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh, 2016). Selama ini aspek sosial dalam melakukan sosialisasi program kurang diperhatikan, padahal dengan diperhatikannya relasi sosial komunitas dapat mendukung keberlanjutan program yang ada dan program yang ada dapat terealisasi dengan baik di masyarakat. Mekanisme pelaksanaan program PLPBK yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2014 hingga bulan Februari tahun 2016 menggunakan metode sosialisasi, rembug, lokakarya hingga *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan secara rutin pada tiap tahap kegiatannya. Keterikatan individu di dalam masyarakat sangat diperlukan di dalam mendukung program tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kondisi relasi sosial masyarakat dan interaksi antar aktor dalam program PLPBK di Kelurahan Polehan.

### Rumusan Masalah

- Bagaimana struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK?

#### Density

- Proporsi keikutsertaan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam setiap kegiatan pada tahapan program PLPBK

#### Rate of Participation

- Rata-rata keikutsertaan masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam setiap tahap Program PLPBK
- Jejaring Keikutsertaan Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada setiap tahap Program PLPBK

#### Centrality

- Aktor sentral dalam setiap tahap dan keseluruhan tahap Program PLPBK yang diukur melalui 3 indeks *centrality*, yaitu *degree*, *closeness* dan *betweenness*
- Profil aktor sentral dalam setiap tahap dan keseluruhan tahap Program PLPBK

Struktur Sosial Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan program PLPBK

Gambar 1.2 Kerangka Penelitian

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dari penelitian terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup materi dan wilayah, kerangka penelitian serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi pustaka yang diperoleh dari literatur berbagai media informasi, penelitian dan lainnya yang menjadi pedoman tertulis bagi pembuatan penelitian ini, terutama teori yang berkaitan dengan jaringan sosial.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian dan metode analisis data yang digunakan meliputi definisi operasional, jenis penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, metode analisis data, kerangka analisis, dan desain survei.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang interpretasi hasil dan pembahasan mengenai kondisi atau gambaran umum Kelurahan Polehan dan Program PLPBK, hasil pembangunan Program PLPBK serta hasil analisis jaringan sosial dalam pelaksanaan Program PLPBK.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang hasil dan kesimpulan dari hasil studi yang telah dilakukan dan juga disertai saran-saran penggunaan hasil studi serta perlu tidaknya studi lanjutan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan jaringan sosial.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini disadur dari penelitian Ari et. Al (2013). Selain itu, penelitian Ari et. Al (2013) dijadikan asumsi dan sumber referensi dalam menjawab struktur sosial yang terbentuk dalam pelaksanaan Program PLPBK di Kelurahan Polehan. Struktur sosial tersebut diukur melalui tiga indeks dalam pengukuran modal sosial yang meliputi *rate of participation*, *density* dan *centrality*.

#### 2.1 Lingkungan Bertetangga (*neighborhood*) dan Komunitas (*community*)

Mengacu pada beberapa literatur yang berbahasa Inggris, kata *neighborhood* (lingkungan bertetangga) dan *community* (komunitas) masih sering digunakan secara bergantian. Artinya penggunaan dua kata tersebut di dalam tradisi mereka seolah memiliki makna yang sama atau identik. Akan tetapi Peterman dalam Burkholder, Chupp, & Star (2003) menyatakan ada sedikit perbedaan dari kedua kata tersebut, bahwa bila lingkungan bertetangga (*neighborhood*) biasanya lebih mengacu pada aspek keruangan (*spatial*), maka konsep komunitas lebih mengacu pada aspek kebiasaan, tata cara atau pola perilaku di dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Logan dan Molotch (1987) dalam Rohe (2009) mengartikan suatu lingkungan bertetangga (*neighborhood*) sebagai suatu tempat (*place*) dimana seseorang menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk melakukan berbagai aktifitas kehidupan dan atau penghidupan kesehariannya (*daily lifes* dan *activities*). Dengan demikian orang tersebut tentu saja akan mengenal dan memperhatikan keberadaan tempat tersebut dengan baik. Karena apapun yang terjadi di tempat tersebut akan berhubungan (berdampak) langsung dengan kehidupan dan penghidupan kesehariannya.

Mengacu pada pendapat Logan dan Molotch tersebut, maka dengan demikian makna suatu tempat bagi setiap orang tidaklah sama (bersifat subjektif) sehingga menentukan batasan suatu lingkungan bertetangga secara keruangan yang berlaku umum menjadi tidaklah mudah. Hal ini diakui oleh Jones (1990) karena batasan atau ruang lingkup suatu lingkungan bertetangga ini bersifat subjektif. Subjektif karena dia terkait dengan rasa keintiman (*sense of intimacy*) dan kedekatan seseorang (*sense of innerness*) dengan lingkungan dimana dia mendiaminya. Bagi seseorang lingkungan bertetangga bisa

melengkapi beberapa blok bangunan yang bersebelahan dengan tempat tinggalnya, akan tetapi bagi orang yang lain bisa berupa puluhan bahkan ratusan unit rumah tinggal.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Wheeler (2004) yang menyatakan bahwa istilah “*hood*” mengacu pada karakteristik sosial, ekonomi dan budaya dari sekelompok orang atau komunitas yang hidup berdekatan satu sama lainnya yang tidak terkait atau tidak dapat dibatasi dengan sekat-sekat batasan administrasi. Secara praktis bahkan batasan suatu lingkungan dapat ditentukan dari sejarah terbentuknya suatu lingkungan (*historical self-definition*) atau karena adanya fenomena tertentu yang unik atau bahkan lucu di masa lalu (Wheeler, 2004). Pengalaman ini membentuk simbol atau makna tertentu bagi suatu tempat (*place*). Sehingga secara umum suatu lingkungan biasanya terbentuk secara alami karena adanya sungai, jalan (arteri, kolektor atau lingkungan), kebun, sawah dan sebagainya.

Dalam konteks sistem administrasi, Rohe (2009) berpendapat bahwa suatu lingkungan dapat dipahami sebagai *sub area – sub area* terkecil dari kota-kota (*towns* atau *cities*) yang secara fisik atau sosial memiliki karakteristik yang khas. Di Indonesia *sub area – sub area* terkecil ini dapat berupa Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan atau kelurahan (desa), dengan catatan dia secara sosial maupun fisik dipandang masih memiliki karakteristik atau identitas yang khas. Bila dikaitkan dengan rasa ikatan suatu komunitas maka mereka menghuni suatu lingkungan akan mengembangkan norma-norma yang mereka patuhi sebagai bentuk komitmen keanggotaan pada komunitas tersebut, maka pada akhirnya akan membentuk identitas yang khas (Conyers, 1991; Soekanto, 1982, Soetomo, 2006).

Karena maknanya begitu besar bagi suatu komunitas, maka peran perencana dan atau lembaga yang bekerja pada kegiatan pembangunan sector publik seyognyanya memperhatikan lingkungan (*neighborhood*) sebagai sebuah unit geografis dan sosial yang penting di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pada skala besar. Bahkan lebih jauh lagi bahwa proses perencanaan hendaknya bermula pada tingkatan lokal dengan melibatkan usaha-usaha dari para perencana sector publik, lembaga nonprofit dan sector swasta untuk memperhatikan pada karakter fisik dari suatu lingkungan (Rohe, 2009).

### **2.1.1 Tujuan dan Aspek-aspek Perencanaan Lingkungan Bertetangga**

Mumford (1954) menjelaskan bahwa tujuan dari perencanaan skala lingkungan tidak hanya sebatas perencanaan fisik saja akan tetapi juga untuk menemukan kembali rasa intim (*sense of intimacy*) dan kedekatan seseorang (*sense of innerness*) dengan lingkungan

tempat dimana mereka hidup. Mumford menilai bahwa selama ini keintiman dan kedekatan seseorang dengan lingkungan tempat dimana dia hidup ini semakin sirna karena meningkatnya kegiatan skala kota dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi transportasi. Kemajuan ini telah memberikan kecepatan barang dan orang untuk melakukan perpindahan semakin tinggi dan bahkan dengan skala jangkauan yang lebih luas;

*“in the neighborhood, if anywhere, it is necessary to recover the sense of intimacy and innerness that has been disrupted by increased scale of the city and the speed of transportation”* (Mumford, 1954)

Selanjutnya Rohe (2009) menambahkan bahwa suatu hal penting yang membedakan perencanaan skala lingkungan dengan skala kota (*city planning*) adalah melalui perencanaan skala lingkungan (*planning at the neighborhood scale*) diharapkan dapat ditangani berbagai isu secara lebih luas yang sedang dihadapi di kota-kota baik lokal, provinsi, nasional bahkan internasional, seperti; segregasi sosial, kriminalitas, kemiskinan, apatisme politik dan persepsi tidak berdaya, diskriminasi ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan. Usaha-usaha perencanaan lingkungan itu jauh di luar hanya sebatas usaha mewujudkan perancangan desain fisik atau pengembangan estetika semata, akan tetapi lebih jauh dari itu dia sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kepentingan sosial secara lebih luas (Rohe, 2009) seperti penciptaan komunitas sosial yang sehat, memberdayakan komunitas bermukim, mengembangkan ekonomi masyarakat di dalam suatu lingkungan, atau pelestarian kualitas lingkungan dan semua itu dicapai melalui perubahan lingkungan fisik yang dapat berimplikasi pada proses-proses politik dan sosial (*good governance*).

### **2.1.2 Aktifitas-aktifitas dan Proses Perencanaan Lingkungan Bertetangga secara Partisipatif**

Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu proses terus menerus (*continuous*) dan berulang (*cyclical*) di dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dalam rangka mencapai keputusan yang “terbaik” maka dia harus rasional yang tercermin dari rangkaian aktifitas-aktifitas yang dikelompokkan ke dalam tahapan-tahapan yang saling terkait, sistematis dan teratur (Conyers, 1991). Keputusan yang rasional tersebut baik ditinjau dari sisi “proses” ataupun “hasil” diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu yang maksimum dengan usaha (*input*) tertentu. Ditinjau dari sisi hasil rasionalitas diartikan dengan masukan (*input*) usaha yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keluaran (*output*) semaksimal mungkin. Adapun dari sisi proses pendekatan rasionalitas di dalam

pembuatan keputusan dijelaskan oleh Carley dalam Conyers (1991) melalui serangkaian urutan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menemukanali dan merumuskan masalah (*problem identification and definition*)
2. Mengelompokkan dan mengorganisasikan tujuan-tujuan (*goals*), nilai-nilai (*values*) dan sasaran-sasaran (*objectives*) yang terkait dengan masalah
3. Menemukanali berbagai alternatif tindakan (*alternative courses of action*) untuk menjawab masalah atau mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memperkirakan berbagai dampak sebagai akibat (*consequencies*) dari masing-masing alternatif tindakan dan kemungkinan dari hal itu akan terjadi.
5. Membandingkan dari akibat-akibat yang akan terjadi dari pilihan-pilihan tindakan dalam kaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
6. Memilih suatu tindakan yang berakibat paling dekat dengan tujuan dan sasaran atau yang paling dapat menjawab masalah. Tentu saja pilihan tersebut juga yang paling menguntungkan yang bisa dilihat dari sisi hasil lebih baik dari keluaran biaya yang sama atau dari sisi hasil yang sama dari pengeluaran biaya yang paling ringan (kecil).

Dalam kaitan dengan perencanaan lingkungan bertetangga Burkholder, Chupp, & Star (2003) menekankan sisi lain dari proses rasional diatas bahwa perencanaan lingkungan merupakan sebuah proses pembelajaran sosial (*social learning process*) dimana warga (penduduk) dan pemangku kepentingan lainnya belajar bersama tentang lingkungan mereka, merumuskan visi bersama, dan mengembangkan strategi-strategi untuk mewujudkan hal itu dan menjaga keberlanjutannya dalam waktu yang lama atau jangka panjang (*long term strategic planning*). Adapun secara fisik, produk dari kegiatan perencanaan tersebut adalah pada akhirnya menghasilkan sebuah dokumen rencana (*plan*) yang selanjutnya menjadi acuan bersama dalam mendorong dan mengarahkan investasi sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Tentu saja secara umum tujuan yang diharapkan adalah menuju pembangunan lingkungan yang lebih sehat, asri, serasi, produktif, berkelanjutan dan sebagainya.

Sebagai suatu proses pembelajaran bersama (*social learning process*) maka dia harus dilakukan secara partisipatif. Pengertian partisipasi sendiri memiliki banyak perspektif. Partisipasi masyarakat dapat dari dua sudut pandang (Abers, 2000) pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dan dari sudut pandang instrument (*instrumental participation*). Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat partisipasi dilihat sebagai proses politik yang pada akhirnya membuka akses masyarakat dalam

pengambilan keputusan atau memperkuat posisi masyarakat agar dapat memiliki kekuatan (*borgeinig power*) yang seimbang dengan pemangku kepentingan yang lain untuk ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan sudut pandang instrumen pemahaman partisipasi diletakkan pada pelibatan masyarakat sebagai pengguna akhir (*end user*) untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan, artinya masyarakat pengguna akhir yang berkepentingan akan bahu-membahu menggali dan memobilisasi segala sumber daya yang dimilikinya untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan atau memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.

## **2.2 Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)**

### **2.2.1 Sekilas Program PLPBK**

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, kemudian disingkat PLPBK, pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK. Dalam P2KP, termasuk juga dalam PLPBK, pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL). Kegiatan PLPBK dirancang sebagai proyek pembangunan yang berbasis komunitas dan nilai serta untuk penanggulangan kemiskinan, oleh sebab itu, pelibatan masyarakat utamanya yang miskin secara langsung dan penerapan nilai-nilai luhur menjadi mutlak. Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam PLPBK, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL menjadi media belajar bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli/pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman di tingkat kelurahan. (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, 2014)

### **2.2.2 Tujuan Program PLPBK**

Tujuan pelaksanaan PLPBK menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU adalah: “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”. Tujuan tersebut akan dicapai melalui:



1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;
2. Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang; dan
3. Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

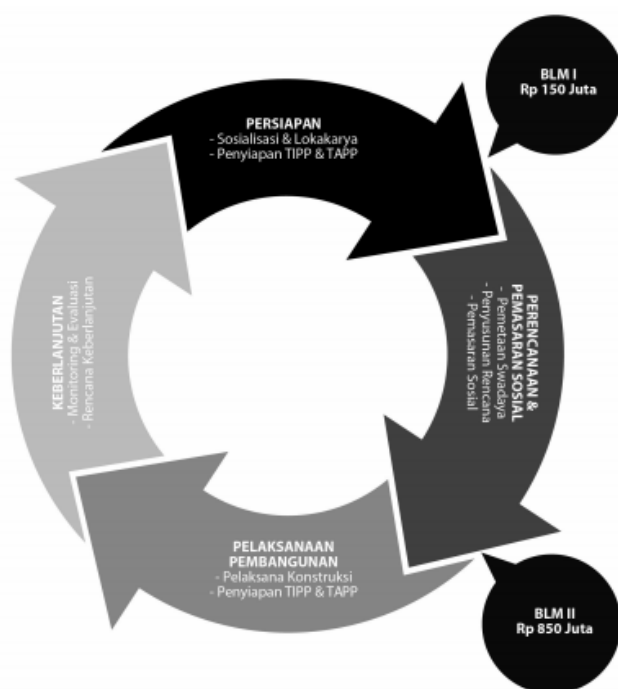
### 2.2.3 Siklus PLPBK

Siklus PLPBK merupakan kelanjutan dan bagian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya terkait dengan penataan kawasan prioritas. Siklus PLPBK terdiri dari 4 (empat) tahap dengan garis besar kegiatan yang meliputi:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial
- c. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas
- d. Tahap Keberlanjutan

Dalam setiap tahap kegiatan dilakukan monitoring secara menerus dan berkala. Secara umum keempat tahap tersebut digambarkan pada siklus PLPBK yang tersaji pada **Gambar 3.1**, sedangkan keterangan peran para pelaku, keluaran (output) setiap tahapan dan durasi waktu yang dibutuhkan dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Berikut adalah siklus PLPBK menurut pedoman teknis PLPBK Ditjen Cipta Karya Kementerian PU:



*Gambar 2.1* Siklus PLPBK

Sumber: Pedoman Teknis PLPBK, 2014

Tabel 2.1 Tahap Kegiatan PLPBK

No	Tahap Kegiatan	Pelaku	Keluaran	Keterangan
1	Tahap Persiapan			
a	Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> BKM, Lurah, Pemerintah Kota/Kabupaten</li> <li>• <b>Peserta:</b> tokoh masyarakat, kelompok peduli, Pemerintah Provinsi</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Satker Kota/kab, Korkot</li> <li>• <b>Metode:</b> Lokakarya/Diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi kawasan prioritas disepakati BKM, Lurah, dan Pemerintah Kota/kabupaten</li> </ul>	Durasi: 3 hari
b	Sosialisasi PLPBK tingkat Kawasan Prioritas dan wilayah yang lebih luas (Kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> Lurah/Kades</li> <li>• <b>Peserta:</b> RT, RW Kawasan Prioritas terpilih, tokoh strategis kelurahan</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Fasilitator</li> <li>• <b>Metode:</b> Sosialisasi massal dan lokakarya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RT, RW di Kawasan Prioritas dan tokoh strategis kelurahan terpilih paham dan siap melaksanakan PLPBK</li> <li>• Masyarakat paham konsep PLPBK</li> </ul>	Durasi: 5 hari  Upayakan melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten
c	Penguatan dan Penguatan Kapasitas Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> BKM/LKM dan Lurah</li> <li>• <b>Peserta:</b> anggota TIPP</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Fasilitator &amp; Askot <i>Urban Planner</i></li> <li>• <b>Metode:</b> Rembug dan FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPP paham konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PLPBK</li> <li>• TIPP mampu mengorganisasi masyarakat untuk melakukan perencanaan partisipatif</li> </ul>	Durasi: 5 hari  Upayakan melibatkan narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten
d	Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TIPP, BKM, Lurah</li> <li>• <b>Peserta:</b> Calon Tenaga Ahli</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Korkot bersama Tim Teknis</li> <li>• <b>Metode:</b> Rekrutmen, Pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAPP terpilih</li> <li>• SPK TAPP telah ditandatangani oleh BKM dan Lurah</li> </ul>	Durasi: 21 hari  TAPP terpilih diharapkan sudah memahami karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan di Kawasan Prioritas Proses rekrutmen dirinci dalam Suplemen Tata Cara Rekrutmen TAPP
2	Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial			
a	Membangun Visi Kawasan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TIPP</li> <li>• <b>Peserta:</b> Seluruh warga, terutama warga kawasan prioritas</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim fasilitator kelurahan, Tim Teknis, BKM/UP, perangkat Lurah, TAPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi kawasan prioritas bertitik tolak dari issue/kendala utama</li> <li>• Visi kawasan prioritas disepakati warga</li> </ul>	Durasi: 5 hari  Visi kawasan prioritas disusun melalui rembug warga dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga, khususnya warga

No	Tahap Kegiatan	Pelaku	Keluaran	Keterangan
				miskin dan perempuan
b	Pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TIPP, Pokja/Tim PS, UP-UP, Lurah dan perangkatnya, relawan</li> <li>• <b>Peserta:</b> Masyarakat, terutama di kawasan prioritas</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim fasilitator kelurahan, BKM/UP, TAPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kendala dan potensi sosial, ekonomi dan lingkungan kawasan prioritas</li> <li>• Identifikasi kendala dan potensi utama kawasan prioritas</li> <li>• Hasil analisis/kajian penanganan kendala utama dan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan prioritas.</li> <li>• Rumusan rona awal kawasan prioritas.</li> <li>• Hasil PS dipahami oleh tim teknis/SKPD dan disepakati di tingkat Kabupaten/Kota.</li> </ul>	Durasi: 20-30 hari
c	Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TIPP, Pokja/Tim Perencanaan, BKM, UP-UP, dan Lurah</li> <li>• <b>Peserta:</b> Masyarakat, terutama di kawasan prioritas</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> TAPP, Tim fasilitator Kelurahan dan Tim Korkot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternatif gagasan/konsep penanganan kawasan prioritas</li> <li>• Pengembangan gagasan bersama warga kawasan prioritas</li> <li>• Pemilihan konsep terpilih</li> <li>• Arahan pengembangan sosial dan ekonomi atau pengembangan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat</li> <li>• Rencana tata ruang kawasan prioritas (termasuk penataan bangunan dan lingkungan)</li> <li>• Rencana sistem sarana dan prasarana dasar kawasan prioritas</li> <li>• Rencana investasi</li> <li>• Dokumen <i>Detail Engineering Design</i> (DED)</li> <li>• Aturan bersama</li> <li>• Rencana pengelolaan kawasan prioritas</li> </ul>	Durasi: 50 hari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft RTPLP Kawasan prioritas, wajib disepakati warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>• Sebagai pelaku utama, warga dilibatkan dalam rembug di tingkat kawasan prioritas maupun skala kelompok yang lebih kecil (RT, cluster rumah tangga dst)</li> <li>• Gagasan warga dapat disampaikan dalam forum dan dibantu penyajiannya oleh TAPP &amp; fasilitator, atau mengajukannya lewat usulan atau sketsa pada papan komunikasi.</li> </ul>



No	Tahap Kegiatan	Pelaku	Keluaran	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAPP / fasilitator mengaktifkan proses ini dengan foto atau rancangan dari tempat lain, bila perlu, kunjungan ke lokasi lain.</li> <li>• TAPP &amp; fasilitator menggambarkan lingkup penataan yang mungkin di konteks setempat, untuk disepakati</li> </ul>
d	Uji publik hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPLP Kawasan Prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> BKM, Lurah</li> <li>• <b>Peserta:</b> TAPP, TIPP, tim teknis, warga kawasan prioritas, warga kelurahan dan kelompok peduli</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Fasilitator kelurahan bersama tim Korkot</li> </ul>	Masyarakat kelurahan sepakat dengan isi RTPLP Kawasan Prioritas	Durasi: 5 hari  Uji publik dilakukan secara terbuka dengan menyajikan hasil-hasil perencanaan, data dan peta-peta yang lengkap dan informatif, agar mudah dipahami warga
e	Forum konsultasi : RTPLP Kawasan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TKPKD, Tim Teknis PLPBK</li> <li>• <b>Peserta:</b> TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, SKPD terkait dan kelompok peduli</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Korkot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTPLP Kawasan Prioritas di pahami, disepakati dan selaras dengan Rencana/ kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota</li> <li>• Aturan bersama dipahami dan didukung</li> </ul>	Durasi: 5 hari  Hasil konsultasi segera ditindaklanjuti oleh TAPP dan TIPP untuk penyempurnaan dan segera sosialisasikan ke warga
f	Pengesahan dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan disosialisasikan di tingkat Kawasan prioritas dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> TAPP, TIPP dan Tim Teknis</li> <li>• <b>Peserta:</b> Warga kawasan prioritas dan warga kelurahan</li> <li>• <b>Fasilitator:</b> Tim Fasilitator kelurahan</li> </ul>	Warga siap merealisasikan dan atau mendayagunakan dokumen perencanaan tersebut secara berkelanjutan	Proses pengesahan dokumen perencanaan, sekurang-kurangnya ditandatangani koordinator tim teknis, Lurah/ Kepala desa, dan BKM
g	Pemasaran Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelaksana:</b> BKM/UP, Lurah, Tim Teknis, TAPP, TIPP</li> <li>• <b>Peserta:</b> Pemda, kelompok peduli, masyarakat di kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Strategi Pemasaran Sosial disepakati warga</li> <li>• RTPLP diakomodasi dalam perencanaan Kota/ Kabupaten</li> </ul>	Dilakukan secara menerus

No	Tahap Kegiatan	Pelaku	Keluaran	Keterangan
		prioritas, kelurahan/desa, dan Kota/Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi Pembangunan (<i>In-Cash</i> dan <i>In-Kind</i>)</li> <li>Perubahan sikap dan perilaku</li> </ul>	
3	Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas			
a	Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> TIPP, TAPP</li> <li><b>Peserta:</b> KSM terpilih</li> <li><b>Fasilitator:</b> Fasilitator Kelurahan/desa dan Tim Teknis</li> </ul>	KSM terbentuk dan telah diberikan penguatan kapasitas	Durasi: 5 hari
b	Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Penyusunan Proposal Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> KSM terpilih</li> <li><b>Pendamping:</b> Fasilitator Kelurahan/desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposal diterima BKM/LKM dan UP-UP</li> <li>Proposal telah diverifikasi fasilitator kelurahan/desa</li> </ul>	Durasi: 15 hari
c	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> KSM</li> <li><b>Pendamping:</b> TAPP dan Fasilitator kelurahan/ desa</li> </ul>	Pelaksanaan pembangunan fisik telah selesai dengan kualitas baik	Durasi: 90 hari
d	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> BKM/LKM &amp; UP-UP</li> <li><b>Peserta:</b> KSM</li> <li><b>Pendamping:</b> Fasilitator kelurahan/desa &amp; Tim Teknis</li> </ul>	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan	Durasi: 30 hari
4	Tahap Keberlanjutan			
a	Melakukan evaluasi awal	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> BKM dan UP-UP, Lurah, TIPP dan Kelompok Peduli</li> <li><b>Fasilitator:</b> Tim Fasilitator Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rencana dan strategi pemasaran sosial yang disempurnakan</li> <li>Teridentifikasinya kekurangan hasil pelaksanaan kegiatan pemasaran sosial dan pembangunan</li> </ul>	
b	Melakukan evaluasi berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> BKM, Lurah, Lembaga Pengelola pembangunan kawasan dan Tim teknis</li> <li><b>Fasilitator:</b> Tim Korkot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teridentifikasi berbagai kekurangan pelaksanaan kegiatan PLPBK serta pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pengelola</li> <li>Pembenahan kegiatan</li> </ul>	Menerus dan berkala
c	Menyusun laporan akhir dan program kerja minimal 1 tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksana:</b> BKM dan Lurah difasilitasi Tim Korkot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya laporan akhir</li> <li>Tersusunnya program dan rencana kerja</li> <li>Tersusunnya rencana kebutuhan anggaran untuk melaksanakan rencana program</li> </ul>	

No	Tahap Kegiatan	Pelaku	Keluaran	Keterangan
			minimal 1 tahun ke depan	
d	Melakukan sosialisasi program kerja 1 tahun ke depan	• <b>Pelaksana:</b> BKM, Lurah, TIPP dan Tim Teknis	• Warga setempat mengetahui, sepakat, dan mendukung isi program kerja	
e	Penyusunan dan penyepakatan rencana kerja perencanaan, pemasaran sosial, dan pelaksanaan pembangunan	• <b>Pelaksana:</b> BKM, Lurah, Lembaga Pengelola Pembangunan dan Tim teknis • <b>Fasilitator:</b> Tim Korkot	• Masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten melaksanakan proses perencanaan partisipatif, pemasaran sosial dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri	
f	Penguatan lembaga pengelola pembangunan kawasan		• Lembaga pengelola siap melaksanakan proses kegiatan PLPBK secara mandiri	

Sumber: Pedoman Teknis PLPBK, 2014

Pada penelitian ini, afiliasi atau kehadiran responden pada tiap tahap kegiatan pada siklus PLPBK dari tahap persiapan hingga tahap keberlanjutan menjadi himpunan ikatan (*set of ties*).

#### 2.2.4 Pelaku Program PLPBK

Sebagai salah satu kegiatan dalam PNPM MP maka pengelola PLPBK adalah sama dengan pengelola PNPM-MP. Sedangkan khusus untuk kegiatan PLPBK akan dibentuk tim/pokja/panitia sesuai kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan PLPBK terbagi menjadi pelaku tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Berikut adalah penjelasan peran pelaku pada tingkat kelurahan dalam kegiatan PLPBK menurut Petunjuk Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, 2014)

##### 1. Lurah/Kepala Desa

Peran utama Lurah atau Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PLPBK di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan PLPBK dapat tercapai dengan baik.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab lurah dalam pelaksanaan PLPBK adalah sebagai berikut:

- a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan menggalang warga kelurahan/desa, untuk siap mendukung dan melaksanakan PLPBK;

- b. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, TAPP, TIPP, relawan masyarakat dan BKM/LKM dalam penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kerjanya;
- c. Membantu BKM/LKM dalam menegakkan nilai-nilai luhur sebagai landasan tindak dalam pelaksanaan PLPBK;
- d. Memfasilitasi terselenggaranya proses setiap tahapan kegiatan PLPBK.
- e. Memfasilitasi RTPLP Kawasan Prioritas sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas di dalam Musrenbang kelurahan/desa;
- f. Menyediakan dan menjelaskan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan kepada TIPP; dan
- g. Bersama BKM/LKM merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan.

## 2. BKM/LKM dan UP-UP

Peran utama BKM/LKM adalah:

- a. Bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dalam setiap tahapan pelaksanaan PLPBK;
- b. Memfasilitasi dan mendorong TIPP dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan PLPBK;
- c. Memfasilitasi TIPP mengorganisasikan warga;
- d. Ikut serta dalam mengembangkan jaringan BKM/LKM sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;
- e. Wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
- f. Bersama kepala kelurahan/desa merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan;
- g. Mengawal proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam kegiatan PLPBK di kelurahan/desanya; dan
- h. Peran lain sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman, petunjuk teknis, SOP, KAK dll

Peran tambahan UP-UP dalam PLPBK adalah:

- a. Mengoordinasikan pengelolaan dan pengendalian Aturan Bersama; dan
- b. Mengoordinasikan Lembaga Pengelola

## 3. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP)

TAPP adalah tenaga ahli yang menjalankan fungsi mendampingi masyarakat dalam menyusun RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan Strategi Pemasaran Sosial. TAPP direkrut oleh BKM dan

Lurah/Kepala Desa. Peran TAPP tidak menggantikan pengambil keputusan tetapi memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. TAPP bertanggungjawab secara langsung kepada BKM/LKM.

Tugas utama TAPP adalah:

- a. Bekerjasama dengan tim fasilitator, konsultan dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran sosial;
  - b. Membantu masyarakat menyusun RTPLP Kawasan Prioritas, dan Aturan Bersama sesuai hasil kesepakatan rembug, sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman dan tepat sasaran;
  - c. Memastikan keterlibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif;
  - d. Membantu masyarakat merumuskan strategi, rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pemasaran sosial; dan
  - e. Mempersiapkan materi yang diperlukan untuk Uji Publik hasil perencanaan di tingkat Kelurahan/desa dan Kabupaten/Kota.
4. Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP)

Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP) adalah tim yang terdiri dari pelaku tingkat kelurahan/desa antara lain, anggota BKM/LKM, perangkat kelurahan/desa, kelompok peduli tingkat kelurahan/desa. TIPP dibentuk dan ditetapkan melalui SK bersama antara BKM/LKM dan Lurah/Kepala Desa. TIPP bertanggungjawab kepada BKM/LKM dan kepala kelurahan/desa.

TIPP pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan/desa beserta stafnya, BKM/LKM dan kelompok peduli setempat mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan/desa dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan PLPBK.

TIPP menjalankan fungsi dan perannya selama pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BKM/LKM bersama Lurah/Kepala Desa dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang TIPP apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program PLPBK di kelurahan/desanya.

Tugas utama TIPP adalah:



- a. Berkoordinasi dengan BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa, tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan PLPBK;
- b. Bekerjasama dengan TAPP yang akan memberikan dampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan dan pemasaran sosial;
- c. Menyusun rencana kerja, RAB dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PLPBK, bekerjasama dengan BKM/LKM;
- d. Didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan bersama secara partisipatif dan penyusunan strategi pemasaran dengan melibatkan masyarakat; dan
- e. Mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil-hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat.

#### 5. Relawan

Relawan masyarakat adalah penggerak masyarakat yang mengabdikan dengan ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.

Peran utama relawan adalah:

- Pelopor perubahan
- Penggerak masyarakat
- Pengawasan nilai-nilai luhur

Terkait pelaksanaan PLPBK relawan dapat menjadi bagian dari TIPP, KSM, lembaga pemeliharaan ataupun secara aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PLPBK.

#### 6. KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

KSM adalah pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat hasil kegiatan terkait dengan kegiatan/investasi PLPBK yang didanai dari berbagai sumber. Secara umum tugas pokok KSM sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Dalam hal pekerjaan konstruksi cukup besar dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu KSM, maka dapat dimungkinkan kerjasama beberapa KSM untuk mengelola pelaksanaan konstruksi.



## 7. Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel)

Tugas Faskel adalah:

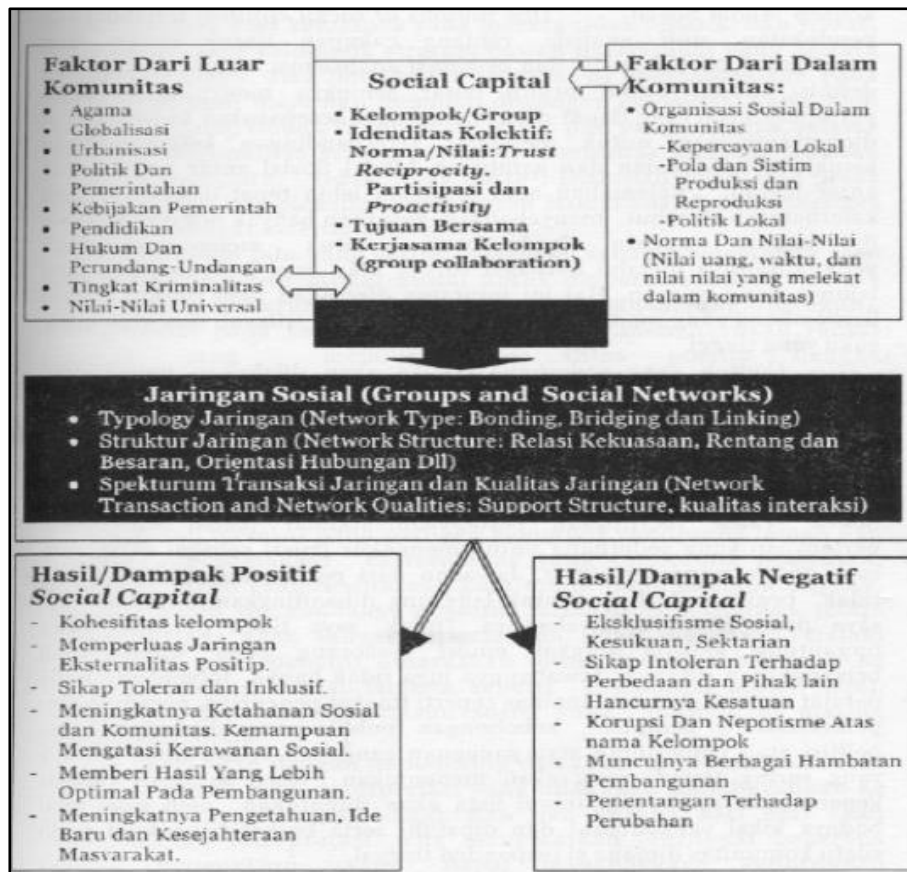
- a. Mendampingi BKM/LKM, UP-UP, TIPP dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. Memediasi BKM, UP-UP, dan TIPP dengan pemangku kepentingan lain, seperti pihak swasta, pemerintah, kelompok peduli;
- c. Mengadvokasi BKM, UP-UP, TIPP dan pemangku kepentingan lain;
- d. Berperan seperti TAPP (bersama Tim Korkot) bila tidak ada TAPP di kelurahan yang bersangkutan;
- e. Bekerjasama dengan TAPP untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan PLPBK dan bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- f. Bekerjasama dengan Tim Korkot untuk memastikan program PLPBK terlaksana sesuai peraturan yang berlaku; dan
- g. Memberikan peningkatan kapasitas kepada BKM/LKM, UP-UP, TIPP, dan masyarakat dalam program PLPBK.

Pada penelitian ini keseluruhan pelaku atau aktor pada tingkat kelurahan dalam kegiatan PLPBK Kelurahan Polehan yang terdiri atas pelaksana, pendamping peserta dan fasilitator menjadi himpunan simpul (*set of nodes*).

### 2.3 Jaringan (*Network*)

Jaringan-jaringan kerjasama antar manusia merupakan wujud dari infrastruktur dinamis dari modal sosial (Putnam, 2000). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu orang lain, mereka kemudian membangun interrelasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal (Onyx, 1996). Putnam (2000) menyatakan bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.

Hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut akan menentukan komposisi, kualitas, pola transaksi dan tipologi jaringan yang pada akhirnya akan menentukan kualitas hasil dari modal sosial tersebut, sebagaimana tergambar berikut ini.



Gambar 2.2 Interrelasi Modal Sosial dengan Berbagai Faktor

Sumber: Hasbullah, 2006

**Gambar 2.2** menunjukkan bahwa modal sosial pada praktiknya tidak hanya membawa dampak positif tapi juga dampak negatif bila tidak dikelola dengan baik. Munculnya dampak negatif ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki modal sosial, antara lain akibat dari pendekatan, unit analisis, rentang cakupan, dan orientasi analisis modal sosial yang masih sangat luas dan multidimensional, sehingga menyulitkan dalam pengukuran dan pengembangan kapasitas modal sosial untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Konsep jaringan dalam modal sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang berupa orang atau kelompok (organisasi).

*Conseptualisation of the wider benefits of learning* yang dikemukakan oleh Schuller juga mencantumkan mengenai jaringan/teman ke dalam konsep tersebut, sehingga jaringan/teman juga mempunyai peran yang penting dalam suatu modal, baik modal manusia, modal sosial maupun modal identitas (Schuller, Grundy, Green, Hammond, & Preston, 2002).

Jaringan menekankan pada pentingnya organisasi vertikal dan horisontal antar manusia serta hubungan inter dan intra organisasi tersebut. Granvotter (1973) menyatakan

bahwa ikatan kuat antar masyarakat (*strong ties*) diperlukan untuk memberikan identitas pada keluarga dan masyarakat serta tujuan bersama. Pandangan ini juga menganggap bahwa lemahnya ikatan antar masyarakat (*weak ties*) yang menghubungkan berbagai organisasi sosial akan mendorong ikatan horizontal yang kuat (*strong ties*) menjadi dasar untuk mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas.

Coleman (1988) berpendapat bahwa kepadatan jaringan kerja sosial akan meningkatkan efisiensi penguatan perilaku kerjasama dalam suatu organisasi. Menurutnya, modal sosial adalah jumlah dari “*relational capital*” yang dimiliki beberapa individu dan dibangun berdasarkan norma resiprositas. Hubungan sosial yang terbangun dalam suatu penutupan (*closure*) struktur sosial, tidak hanya penting untuk membangun norma yang efektif tetapi juga membangun kepercayaan karena *network closure* tersebut menghasilkan eksternalitas positif melalui proses fasilitasi terhadap aksi bersama (*collective action*).

Menurut Kashudin (2004) jaringan merupakan kumpulan dalam suatu hubungan. Kumpulan yang berisi *node* dan pemetaan atau deskripsi antara benda atau *node* dalam sebuah jaringan. Jaringan sederhana berisikan dua benda (benda 1 dan 2). Sebuah jaringan memberikan gambaran interaksi antara *nodes*. Interaksi atau hubungan yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi hubungan yang *directional* (dua arah) dan hubungan yang *non-directional* (satu arah) dan *transitive* (seimbang).

Pendapat lain mengatakan bahwa jaringan merupakan sesuatu yang mengatur hubungan antara seperangkat orang dengan karakteristik hubungan secara keseluruhan dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat (Mitchell, 1969)

Menurut Agusyanto (2007) Komponen-komponen sebuah “jaringan” adalah sebagai berikut:

1. Sekumpulan orang, objek, atau kejadian; minimal berjumlah tiga satuan-yang berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasanya direpresentasikan dengan titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan disebut sebagai aktor dan *node*.
2. Seperangkat ikatan yang menghubungkan suatu titik ke titik-titik lainnya dalam jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan “garis”, yang merupakan suatu saluran atau jalur. Berupa “mata rantai” atau “rangkaian”. Ikatan ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (a) ikatan yang tampak; (b) ikatan yang tidak tampak.

3. Arus, yang dalam diagram digambarkan dengan “anak panah”, ada sesuatu yang “mengalir” dari satu titik ke titik-titik lainnya, melalui saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik di dalam “jaringan”.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang mendasar sebuah “jaringan” adalah sebagai berikut:

1. Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik-titik lainnya, saluran atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, artinya bisa memilih sekehendaknya (secara acak).
2. Rangkaian “ikatan-ikatan” itu menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai “suatu kesatuan” yang berbeda dengan “satu kesatuan” yang lain.
3. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah “durasi”)
4. Ada “hukum” yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik di dalam jaringan, ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing titik (anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik-titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik-titik pusat dan sebagainya.

## 2.4 *Social Network Analysis (SNA)*

Teknik analisis *Social network analysis* dalam studi ini terdapat 3 indeks seperti yang diusulkan oleh Ari et. al (2013), yaitu *rate of participation*, *density*, dan *centrality*. Ketiga indeks tersebut diasumsikan dapat menjelaskan struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan program PLPBK.

### 2.4.1 Konsep Social Network Analysis

Konsep umum *Social network analysis (SNA)* dapat didefinisikan sebagai studi tentang relasi sosial di antara himpunan (*set*) aktor atau individu atau agen. Wasserman dan Faust (1994), mendefinisikan jaringan sosial sebagai "perspektif jaringan sosial meliputi teori, model, dan aplikasi yang dinyatakan dalam konsep atau proses relasional. Artinya, relasi yang didefinisikan oleh hubungan (*linkages*) antar unit adalah komponen mendasar dari teori jaringan." Analisis jaringan tidak secara individu, tetapi dengan entitas yang terdiri dari individu-individu dan hubungan yang tercipta diantara mereka. Empat prinsip *Social network analysis* yang dikemukakan oleh Wasserman & Faust (1994) adalah sebagai berikut:

- Aktor dan tindakannya dipandang sebagai unit mandiri yang saling bergantung daripada independen. Perilaku manusia tertanam dalam jaringan hubungan interpersonal;
- Ikatan relasional (*linkages*) antar aktor adalah saluran untuk transfer "aliran" sumber daya (baik material maupun non material). Koneksi jaringan merupakan modal sosial, dan jaringan yang kaya dan terstruktur dengan baik dapat memberikan tingkat modal sosial yang tinggi kepada para pelaku di dalamnya;
- Model jaringan yang berfokus pada individu memandang lingkungan struktural jaringan sebagai ketersediaan peluang, atau kendala pada tindakan individu; dan
- Model jaringan mengkonseptualisasikan struktur (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) sebagai pola hubungan yang kekal di antara para aktor.

*Social network analysis (SNA)* mengacu pada penelitian yang berusaha menjelaskan bagaimana struktur sosial secara kolektif dibangun melalui interaksi atau hubungan antar individu dan dampak dari hasil struktur sosial ini dan fenomena lainnya. Analisis jaringan muncul sebagai pendekatan interdisipliner yang kuat untuk mempelajari struktur relasi dalam ilmu sosial dan ilmu alam (Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, 2009; Butts, 2008, 2009; Easley&Kleinberg, 2010; Freeman, 2000, 2004; Marin&Wellman, 2010; Monge & Contractor, 2003; Newman, 2010; Oliveira & Gama, 2012). Sedangkan, menurut Hanneman & Riddle (*Introduction to social network methos*, 2005) analisis jaringan sosial merupakan teknik untuk mempelajari hubungan atau relasi sosial antar anggota dalam sebuah kelompok.

Borgatti mendefinisikan jaringan sosial sebagai himpunan *nodes* (disebut juga sebagai *vertices* atau *actors*) bersama dengan himpunan (*set*) *ties* (dikenal juga sebagai *edges* atau *links*) yang menghubungkan pasangan *nodes*."

Serrat (2009) mendefinisikan jaringan sosial sebagai "simpul (*node*) individu, kelompok, organisasi, dan sistem terkait yang mengikat dalam satu atau lebih jenis interdependensi: ini termasuk nilai-nilai, visi, dan ide-ide bersama; kontak sosial; kekerabatan; konflik; pertukaran keuangan; perdagangan; keanggotaan bersama dalam organisasi; dan partisipasi kelompok dalam berbagai *event*, di antara banyak aspek lain dari hubungan manusia.

Dalam SNA, sebuah jaringan dibangun oleh himpunan (*set*) aktor sebagai *nodes* dan himpunan ikatan relasional jenis tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ikatan (*ties*) bisa merepresentasikan:



1. Lokasi bersama, keanggotaan atau sikap (misalnya: partisipasi);
2. Hubungan yang disebabkan karena peran/*role* (misalnya: orang tua dan anak);
3. Hubungan yang disebabkan karena persepsi (misalnya: suka, tahu);
4. Interaksi (misalnya, berbicara dengan seseorang, mendapatkan saran dari seseorang); atau
5. *Flows of things* (misalnya: informasi, penyakit).

Robins & Kashima (2008) menganjurkan integrasi analisis jaringan sosial dengan psikologi sosial untuk mendapatkan keuntungan dari kedua perspektif individualis dan strukturalis. *Social network analysis* atau analisis jaringan sosial adalah sebuah pendekatan struktural untuk melihat aktor sosial dalam sebuah sistem yang saling tergantung, serta berusaha untuk memahami pola relasional dan menghasilkan *social outcomes* mereka.

*Node* khusus untuk aktor individu memiliki atribut bawaan (misalnya: jenis kelamin, usia, kewarganegaraan) dan tidak tergantung pada jaringan. Dengan kata lain, aktor yang sama dapat dicirikan dengan atribut yang sama di seluruh jaringan yang berbeda, akan tetapi ikatan yang menghubungkan mereka pada masing-masing jaringan dapat didefinisikan secara berbeda sebagai mewakili persahabatan, kerjasama atau komunikasi. Studi hubungan dapat timbal balik/*reciprocal* (misalnya: persahabatan antara A dan B) atau terarah/*directional* (misalnya: A meminjam uang dari B). Mereka dapat dinilai untuk mengindikasikan kekuatan hubungannya.

Klaim yang dibuat dalam penelitian jaringan seringkali mengenai: (1) apa yang menyebabkan pola relasional tertentu (yaitu struktur) yang diamati pada sebuah jaringan dan apa dampak (misalnya, peluang dan kendala) jaringan pada kelompok atau hasil individu/*social outcomes* (Borgatti & Halgin, 2011).

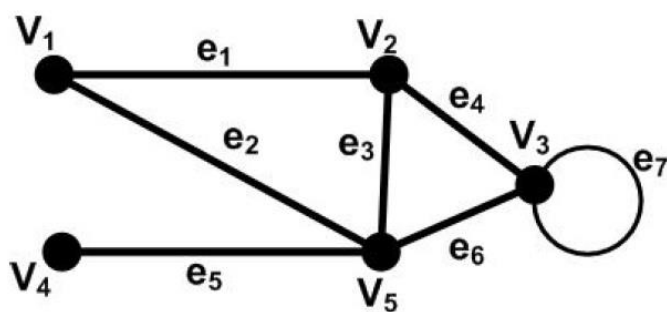
Penelitian ini berfokus pada jaringan sosial untuk mewakili relasi sosial antara himpunan aktor (*set of nodes*) dan himpunan ikatan (*a set of ties*) melalui kehadiran aktor dalam berbagai kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK.

#### 2.4.2 Incidence Matrix (Matriks Insiden)

Matriks insiden menyatakan kebersisian verteks dengan *edge*. Misalkan  $G = (V, E)$  adalah graf dengan  $n$  verteks dan  $m$  *edge*, maka matriks kebersisian  $A$  dari  $G$  adalah matriks berukuran  $m \times n$  dimana  $A = [a_{ij}]$ ,  $[a_{ij}]$  menjadi 1 bila verteks  $i$  dan *edge*  $j$  bersisian dan  $[a_{ij}]$  menjadi 0 bila verteks  $i$  dan *edge*  $j$  tidak bersisian.

Berikut merupakan ilustrasi graf yang merepresantasikan kebersisian.





Gambar 2.3 Ilustrasi Graf A

Berikut adalah matriks insiden untuk graf pada Gambar 2.3.

	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$e_6$	$e_7$
$V_1$	1	1	0	0	0	0	0
$V_2$	1	0	1	1	0	0	0
$V_3$	0	0	0	1	0	1	1
$V_4$	0	0	0	0	1	0	0
$V_5$	0	1	1	0	1	1	0

Pada matriks diatas, sebuah kolom  $e_7$  dapat diwakilkan sebagai *loop*. Pada sebuah graf tanpa *loop*, masing-masing kolom mempunyai dua entri 1, dan jumlah dari sebuah baris menyatakan derajat dari verteks yang didefinisikan dengan baris tersebut.

Pada penelitian ini, mengacu pada teori graf, *incidence matrix* atau matriks jaringan afiliasi *2-mode* mencatat afiliasi responden atau kehadiran responden pada tiap tahap kegiatan pelaksanaan Program PLPBK (responden x kegiatan).

### 2.4.3 Adjacency Matrix (Matriks Ketetanggaan)

Matriks utama yang digunakan dalam *social network analysis* disebut *adjacency matrix* atau *sociomatrix* dan dinotasikan dengan  $X$ . Teori graf mengacu pada matriks ini sebagai sebuah matriks kedekatan atau ketetanggaan (*adjacency matrix*), karena entri dalam matriks ini menunjukkan apakah dua simpul bersebelahan atau tidak.

Entri pada *sociomatrix*,  $(x_{ij})$  mencatat pasangan simpul yang berdekatan (*adjacent*). Dalam *sociomatrix*, terdapat nilai 1 pada  $(i, j)$  sel (*baris i, kolom j*) jika terdapat garis diantara  $n_i$  dan  $n_j$ , dan 1 jika pada sel sebaliknya. Dengan kata lain, jika

simpul  $n_i$  dan  $n_j$  berdekatan (*adjacent*), maka  $x_{ij} = 1$  dan jika simpul  $n_i$  dan  $n_j$  tidak berdekatan (*adjacent*), maka  $x_{ij} = 0$ .

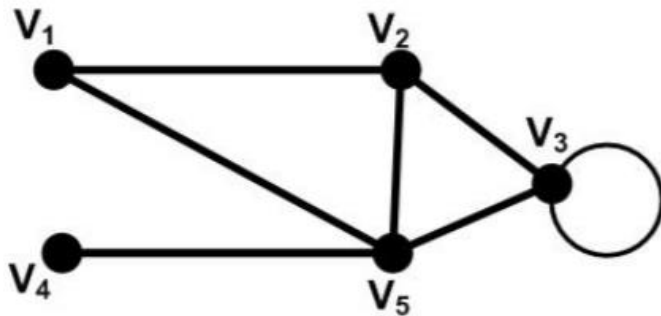
Matriks *adjacency* menggambarkan tabel yang baris dan kolomnya menunjukkan relasi antar *node*. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah *node* ( $n$ ). Matriks *adjacency*  $A$  dari  $G$  adalah matriks  $n \times n$  dimana  $A = [a_{ij}]$ . Sebuah matriks *adjacency*  $A(G) = [a_{ij}]$  dari graf  $G = (V, E)$  merupakan suatu graf dengan  $n$  verteks,  $n > 1$ , dimana  $V = \{V_1, V_2, \dots, V_h\}$  didefinisikan dengan:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } (V_i, V_j) \in E(G) \\ 0, & \text{jika } (V_i, V_j) \notin E(G) \end{cases}$$

Hal ini berlaku  $[a_{ij}]$  menjadi 1 bila verteks  $i$  dan  $j$  bertetangga dan  $[a_{ij}]$  menjadi 0 bila verteks  $i$  dan  $j$  tidak bertetangga. Atau dalam kata lain adalah nilai 1 pada matriks *adjacency* merepresentasikan hubungan/afiliasi, artinya jika *node*  $A$  dan *node*  $B$  bernilai 1 maka *node*  $A$  berafiliasi.

Keuntungan representasi dengan matriks *adjacency* adalah elemen matriksnya dapat langsung diakses dari indeks. Selain itu juga apakah verteks  $i$  dan verteks  $j$  bertetangga dapat ditentukan dengan langsung.

Berikut merupakan ilustrasi graf yang merepresantasikan ketetangaan.



Gambar 2.4 Ilustrasi Graf G

Bentuk Matriks *adjacency* dari graf Gambar 2.4 adalah sebagai berikut:

	$V_1$	$V_2$	$V_3$	$V_4$	$V_5$
$V_1$	0	1	0	0	1
$V_2$	1	0	1	0	1
$V_3$	0	1	1	0	1
$V_4$	0	0	0	0	1
$V_5$	1	1	1	1	0

Pada penelitian ini, mengacu pada teori graf, *adjacency matrix* atau matriks jaringan afiliasi *1-mode*, yang berbentuk simetris  $x_{ij} = x_{ji}$  untuk semua  $i$  dan  $j$ . Sehingga entri pada segitiga kanan atas dan kiri bawah adalah identik. Entri pada diagonal, nilai  $x_{ii}$  tidak terdefinisi. *Adjacency matrix* mencatat relasi antar responden pada tiap tahap kegiatan pelaksanaan Program PLPBK (responden x responden).

#### 2.4.4 Jaringan Afiliasi

Secara umum, terdapat 2 jenis jaringan sosial *2-mode* (Wasserman dan Faust, 1994). Pertama adalah hubungan dalam *2-mode* jaringan yang mengukur ikatan antara 2 himpunan (*set*) aktor. Kedua adalah jaringan sosial *2-mode* dimana 1 himpunan (*set*) aktor diukur sehubungan adanya afiliasi dengan 1 himpunan (*set*) *event*. Dalam penelitian ini berfokus pada jenis kedua *2-mode* jaringan sosial untuk mewakili jaringan afiliasi.

Jaringan afiliasi juga dapat didefinisikan sebagai jaringan *2-mode* antara 1 *set* aktor dan kumpulan *sub-set* aktor (Everett dan Borgatti, 1999). Kolektivitas ini menciptakan ikatan jaringan diantara para aktor melalui beragam keanggotaan aktor.

Pentingnya mempelajari jaringan afiliasi didasarkan pada pentingnya teoritis keanggotaan individu dalam kolektivitas (Wasserman dan Faust, 2008: 292). Jaringan afiliasi berisi informasi mengenai himpunan responden yang berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang sama. Dari jaringan afiliasi dapat mengetahui hubungan diantara aktor atau hubungan diantara *event* atau hubungan keduanya (antar aktor dan *event*). Menurut Wasserman dan Faust (2008) di dalam jaringan afiliasi terdapat hubungan 3 hal, yaitu:

1. Jaringan afiliasi menunjukkan bagaimana aktor dan *event* berhubungan satu sama lain.
2. *Event* menciptakan hubungan diantara aktor
3. Aktor menciptakan hubungan diantara *event*

Mengacu pada Borgatti, et.al (2002) membedakan istilah “*mode*” data sesuai dengan kelas entitas, maka terdapat dua jenis jaringan, yaitu (i) jaringan *2-mode*: yang anggotanya memiliki ikatan sosial dengan anggota kelas lain; dan (ii) jaringan *1-mode*: yang anggotanya memiliki ikatan sosial dengan anggota lain.

Secara umum, terdapat dua jenis jaringan afiliasi, yaitu *one-mode networks* dan *two-mode networks*. Dalam *one-mode networks*, analisis fokus pada hubungan antara aktor, dua aktor memiliki hubungan jika mereka berafiliasi pada *event* yang sama. Pada *two-mode networks*, mempelajari aktor, *event* dan hubungan diantara mereka pada saat yang sama.

Menurut Everett dan Borgatti, et.al (2002), jaringan *2-mode* terdiri dari 2 jenis entitas, yaitu aktor dan *event* dan sebuah relasi biner, yang menghubungkan antara aktor dan *event*. Dalam bentuk matriks afiliasi *2-mode*, dimana baris mewakili aktor dan kolom mewakili *event*. Wasserman dan Faust (1994) menyebut matriks afiliasi,  $X = \{x_{ij}\}$  adalah matriks *2-mode* dimana setiap aktor dalam baris berafiliasi dengan *event* pada kolom.

$$x_{ij} = \begin{cases} \text{Bernilai 1, jika aktor } i \text{ berafiliasi dengan event } j; \text{ dan} \\ \text{Bernilai 0, jika sebaliknya.} \end{cases}$$

Jaringan afiliasi dalam matriks mencatat afiliasi dari masing-masing aktor dengan setiap *event*. Matriks tersebut disebut matriks afiliasi  $X = \{x_{ij}\}$ , merupakan kode untuk masing-masing aktor dengan *event* yang berafiliasi. Matriks  $X$  merupakan *two-mode sociomatriks* dimana baris merupakan aktor dan kolom merupakan *event*. Terdapat entri 1 di sel  $(i, j)$ , jika aktor baris  $i$  berafiliasi dengan acara kolom  $j$ , dan entri 0 jika sebaliknya aktor baris  $i$  tidak berafiliasi dengan *event* kolom  $j$ .

Dari istilah “*mode*” mengacu pada kelas entitas, bentuk kedua adalah jaringan *1-mode*; yang mana anggotanya memiliki ikatan sosial dengan anggota lain. Wasserman & Faust (1994) mendefinisikan jaringan afiliasi sebagai himpunan (*set*) aktor yang dinotasikan dengan  $N = \{n_i, n_2, \dots, n_g\}$  dan himpunan (*set*) *event* yang dinotasikan dengan  $M = \{m_i, m_2, \dots, m_g\}$ . Dengan demikian, terdapat aktor  $g$  dan *event*  $h$  dalam mempelajari jaringan afiliasi. Menurut Breiger (1974) yang disebutkan oleh Wasserman & Faust (1994), sebuah jaringan *1-mode* matriks aktor *co-membership*, dinotasikan dengan  $X^N = AA'$  baik dalam hubungan bernilai maupun biner.

Aktor ( $i$ )	Event ( $j$ )		
	1	2	3
A	1	0	1
B	0	1	0
C	0	1	1
D	0	0	1
E	1	1	1
F	1	1	0

Total kolom marjinal  $\{a_{i+}\}$

Total baris marjinal  $\{a_{j+}\}$

Gambar 2.5 Ilustrasi Matriks Jaringan Afiliasi

Setiap baris pada **Gambar 2.5** menggambarkan afiliasi aktor dengan *event* tersebut. Demikian pula, setiap kolom  $A$  menggambarkan keanggotaan suatu *event*. Total kolom marjinal matriks  $A$  disimbolkan dengan  $\{a_{i+}\}$ , yang merepresentasikan jumlah *event* dimana masing-masing aktor berafiliasi. Jika jumlah kolom marjinal sama dengan 0, berarti aktor tersebut sama sekali tidak menghadiri suatu *event*. Sebaliknya, jika jumlah kolom marjinal sama dengan  $h$  (jumlah total *event*), berarti aktor tersebut menghadiri semua *event*. Demikian pula dengan jumlah baris marjinal matriks  $A$  yang disimbolkan dengan  $\{a_{j+}\}$ , yang merepresentasikan jumlah aktor yang berafiliasi dengan setiap *event*. Total baris marjinal sebesar 0 menandakan bahwa *event* tersebut tidak memiliki aktor yang berafiliasi dengannya, dan sebaliknya jika Total baris marjinal sama dengan  $g$  menandakan bahwa semua aktor berafiliasi dengan *event* tersebut.

Penelitian ini menyelidiki jaringan sosial responden yang berfokus pada jaringan afiliasi kehadiran atau partisipasi responden pada tiap tahap kegiatan program PLPBK pada hubungan *1-mode co-membership* aktor untuk properti aktor, serta pada hubungan *2-mode* untuk kedua properti aktor dan *event* secara bersamaan. Mengacu pada Wasserman dan Faust (1994), jaringan afiliasi diteliti sebagai hubungan *nondirectional* di mana baris  $i$  dari matriks  $X$ ,  $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ig})$ , identik dengan kolom  $i$ .

#### 2.4.5 Density

Analisis densitas dilakukan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden dalam suatu wilayah studi. Menurut Wasserman & Faust (1994) nilai densitas dalam sebuah hubungan antar responden di masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata-rata aktivitas yang terjadi setiap pasang aktor (Wasserman & Faust, 1994). Nilai densitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi responden yang berbagi keanggotaan dalam setiap *event*.

*Density* menyatakan kerapatan atau kepadatan suatu jaringan yang merupakan satu langkah dasar dalam analisis jaringan dan salah satu gagasan yang paling umum digunakan dalam jaringan terluar dari struktur sosial masyarakat. Secara umum nilai densitas jaringan dapat dilihat dari jumlah total hubungan relasi berbanding dengan total kemungkinan hubungan relasi yang terjadi, dapat dilihat dari persamaan rumus berikut:

$$\Delta_{(N)} = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^g x_{ij}^N}{g(g-1)}; \text{ dimana } i \neq j \dots\dots\dots (2-1)$$

Dimana:

$\Delta_{(N)} = \text{density}$

$g = \text{jumlah individu}$



$x_{ij}$  = relasi sosial  $i$  dan  $j$

Nilai densitas berkisar antara 0-1. Nilai densitas 1 menunjukkan bahwa kerapatan yang terjadi dalam sebuah jaringan masyarakat tinggi, sedangkan nilai densitas 0 menunjukkan kerapatan dalam jaringan rendah.

#### 2.4.6 Tingkat Partisipasi dan Ukuran *Event*

Pada bagian ini, akan menyelidiki keterkaitan lebih dalam dari jaringan afiliasi melalui tingkat partisipasi oleh para aktor dan ukuran *event*.

##### A. Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan (Alfitri, 2011).

Mengacu pada catatan McPherson (1982) dalam Wasserman dan Faust (1994), ukuran tingkat partisipasi dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Selain itu, tingkat partisipasi adalah tingkat rata-rata afiliasi bagi para aktor dalam matriks *bipartite* yang mungkin dapat membandingkan tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sukarela antara masyarakat (Wasserman dan Faust, 1994).

Menurut Wasserman dan Faust (1994), ukuran tingkat partisipasi ditentukan oleh total baris matriks afiliasi,  $A$  atau entri pada diagonal utama matriks *co-membership* aktor,  $X^N$  dalam hubungan matriks bernilai. Jumlah *event* dengan aktor mana yang berafiliasi dinotasikan dengan  $a_{i+} = \sum_{j=1}^h a_{ij} = x_{ii}^N$ . Sementara itu,  $h$  didefinisikan sebagai jumlah atau ukuran *event*,  $M$ , dimana aktor itu berpartisipasi.

Jumlah rata-rata keanggotaan untuk para aktor dalam matriks *bipartite* dapat digunakan untuk membandingkan tingkat partisipasi aktor dalam organisasi sukarela diantara masyarakat. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{a}_{i+} = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^h a_{ij}}{g} = \frac{a_{++}}{g} = \frac{\sum_{i=1}^g x_{ii}^N}{g}$$

$\bar{a}_{i+}$  = rata-rata keterlibatan aktor dalam sebuah *event* terhadap keseluruhan aktor dalam seluruh *event*

$g$  = banyaknya aktor yang terlibat

$h$  = banyaknya *event* yang diikuti

$i$  = jumlah aktor yang terlibat dalam *event*



$j$  = jumlah *event* yang diikuti oleh aktor

$x_{ij}^N$  = nilai dari diagonal utama dalam matriks (hubungan relasi antar aktor *event*)

Pada penelitian ini, analisis *rate of participation* digunakan untuk mengetahui rata-rata kegiatan Program PLPBK yang diikuti oleh masyarakat dalam seluruh tahap pelaksanaan Program PLPBK. *Event* dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan pada tiap 4 tahap pelaksanaan Program PLPBK.

## B. Ukuran *Event*

Menurut Wasserman dan Faust (1994), ukuran setiap *event* mengacu pada jumlah aktor yang berafiliasi dengan *event*  $j$  diberikan oleh total kolom matriks afiliasi,  $A$ , atau entri pada diagonal utama dari matriks *event overlap*,  $X^M$ , yang dinotasikan dengan  $a_{+j} = \sum_{i=1}^g a_{ij} = x_{jj}^M$ .

Lebih jauh lagi, ukuran *event* didefinisikan sebagai jumlah *event* yang berafiliasi dengan aktor sama dengan derajat simpul yang mewakili *event* dalam matriks *bipartite*. Kemudian, untuk menyelidiki ukuran rata-rata organisasi sukarela di masyarakat yang berbeda, jumlah rata-rata aktor di setiap *event* dihitung dengan rumus:

$$\bar{a}_{+j} = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^h a_{ij}}{h} = \frac{a_{++}}{h} = \frac{\sum_{i=1}^g x_{ii}^M}{h}$$

Wasserman dan Faust (1994) memberikan catatan penting bahwa sampel dalam penelitian haruslah semua aktor atau *event* dalam himpunan (*set*) data, sehingga ukuran tingkat partisipasi dan ukuran *event* akan memberikan deskripsi yang sesuai untuk jaringan afiliasi.

Pada penelitian ini, analisis ukuran *event* digunakan untuk mengetahui rata-rata masyarakat yang terlibat dalam tiap tahap kegiatan Program PLPBK.

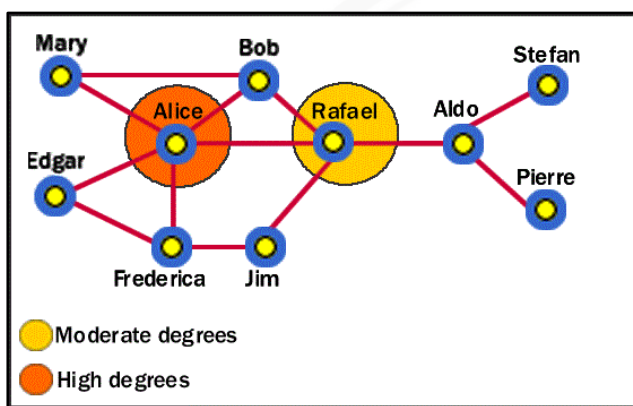
### 2.4.7 *Centrality*

Wasserman dan Faust (1994), gagasan *centrality* bertujuan untuk mengidentifikasi aktor terpenting dalam jejaring sosial yang terletak di lokasi *centrality* dalam jaringan. Atau dengan kata lain, Borgatti mendefinisikan sentralitas sebagai konsep yang mencirikan pentingnya struktural posisi aktor dalam suatu jaringan. Ini berarti bahwa *centrality* aktor adalah aktor sentral harus menjadi yang paling aktif karena mereka memiliki ikatan paling banyak dengan aktor lain dalam jaringan. Dengan kata lain, seorang aktor akan dianggap menonjol jika ikatan aktor membuat aktor sangat terlihat oleh aktor lain dalam jaringan. Penggunaan ukuran-ukuran *centrality* adalah untuk memahami struktur kelompok dimana aktor-aktor dengan akses terbanyak akan menjadi yang paling sentral dalam jaringan. Tiga

indeks untuk mengukur keunggulan responden individu yang tertanam dalam jaringan adalah *degree*, (ii) *closeness*, and (iii) *betweenness*. Nilai indeks sentralisasi adalah antara 0 dan 1.

#### A. *Degree centrality*

*Degree centrality* merupakan derajat keberadaan dan posisi aktor dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain *Degree centrality* merupakan pengukuran pada aktor dalam jaringan yang memiliki kedudukan sebagai *channel* (Wasserman dan Faust, 1994). Atau dalam arti lain, *degree centrality* bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang akan dengan cepat menyebarkan pengetahuan dan inisiatif yang kompleks (Centola & Macy 2007, Valente et al., 2008, Karsai et al., 2014).



Gambar 2.6 Ilustrasi *Degree Centrality*

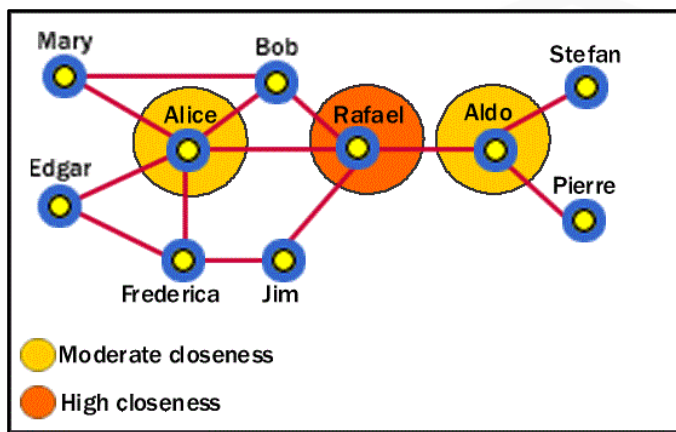
Sumber: <http://fmsasg.com/fmsasg/SocialNetworkAnalysis/>

Berdasarkan **Gambar 2.6** diketahui bahwa aktor yang memiliki *degree centrality* tertinggi adalah Alice, yang berarti Alice cukup aktif dalam jaringan. Alice merupakan aktor pusat yang memiliki hubungan terbanyak terhadap setiap aktor. Apabila Alice memiliki informasi dan memberikan informasi kepada aktor lain, maka informasi akan berjalan terhadap aktor yang terdapat di jaringan, tetapi apabila Alice tidak memberikan informasi yang diperoleh terhadap aktor lain, maka jaringan tersebut tidak akan mendapatkan informasi. Dalam Gambar 2.6 Alice belum tentu merupakan aktor yang paling kuat, karena Alice hanya langsung terhubung dalam satu derajat aktor di dalam kelompoknya, Alice harus melalui aktor lain untuk sampai ke kelompok lain.

#### B. *Closeness centrality*

Menurut Wasserman dan Faust (1994), aktor *closeness centrality* aktor mengukur seberapa dekat "jarak" aktor dengan semua aktor lain dalam jaringan karena telah dikembangkan dalam enam makalah seminal oleh Bavelas (1950), Harary (1959), Beauchamp (1974), Sabidussi (1966), Moxley dan Moxley (1974), dan Rogers (1974).

Lebih lanjut, anggapan bahwa seorang aktor adalah pusat jika ia dapat dengan cepat berinteraksi dengan yang lain, sehingga *centrality* itu berbanding terbalik dengan jarak. Ini berarti bahwa peningkatan jarak *geodesics* antara aktor mengurangi sentralitas dari aktor. Dalam pengertian ini, dapat dilihat bahwa ukuran *closeness centrality* bergantung pada hubungan langsung dan tidak langsung, terutama untuk pasangan aktor yang tidak berdekatan (*non-adjacency*). *Closeness centrality* penting dalam mengidentifikasi orang-orang yang memiliki posisi terbaik untuk menyebarkan informasi baru dengan cepat dan efisien ke seluruh jaringan (Beauchamp, 1965, Costenbader & Valente 2003).



Gambar 2.7 Ilustrasi *Closeness Centrality*

Sumber: <http://fmsasg.com/fmsasg/SocialNetworkAnalysis/>

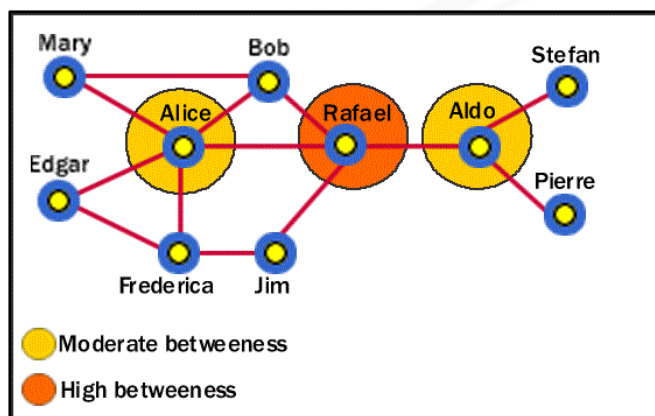
Berdasarkan **Gambar 2.7** menunjukkan bahwa Rafael merupakan aktor yang memiliki *closeness centrality* yang tinggi, karena Rafael dapat dengan cepat berinteraksi dengan semua aktor melalui jalur yang pendek. Penempatan aktor seperti Rafael memungkinkan untuk terhubung ke entitas dalam kelompok sendiri dan entitas kelompok lain.

*Closeness centrality* menunjukkan sejauh apa informasi bisa tersebar dalam jaringan dan jarak terpendek antara aktor-aktor (*node* satu dengan *node* lainnya) yang terjangkau dalam jaringan. Penyebaran informasi yang mudah ditunjukkan dengan nilai *closeness* yang tinggi, sedangkan nilai *closeness* yang rendah menunjukkan penyebaran informasi semakin sulit dalam jaringan. Aktor yang memiliki kemudahan dalam menyebarkan informasi memiliki nilai *closeness* yang tinggi dari antara aktor lainnya. Untuk mengukur jarak terpendek antar *node* digunakan *minimum distance*.

### C. *Betweenness centrality*

Gagasan *betweenness centrality* adalah aktor dikatakan sentral jika terletak di antara aktor-aktor lain di *geodesic* mereka, menyiratkan bahwa untuk memiliki *betweenness centrality* yang besar, aktor harus berada diantara banyak aktor melalui

*geodesic* mereka. Dalam pengertian ini, aktor yang terletak di banyak jalur terpendek (*shortest path*) antara pasangan aktor lain – “aktor lain” ini berpotensi memiliki kontrol atas interaksi antara dua aktor yang tidak bersebelahan (*non-adjacent*) (Wasserman dan Faust, 1994). *Betweenness centrality* bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang akan menjadi perantara informasi atau inisiatif antara kelompok yang terputus atau terisolasi (Stephenson & Zelen, 1989). Dalam arti lain, *betweenness centrality* bertujuan untuk mengidentifikasi *boundary spanners*, yaitu responden atau *node* yang berperan sebagai penghubung (jembatan) antar masyarakat. *Betweenness centrality* adalah *node* yang dihitung dengan menjumlahkan semua *shortest path* yang mengandung *node* tersebut.

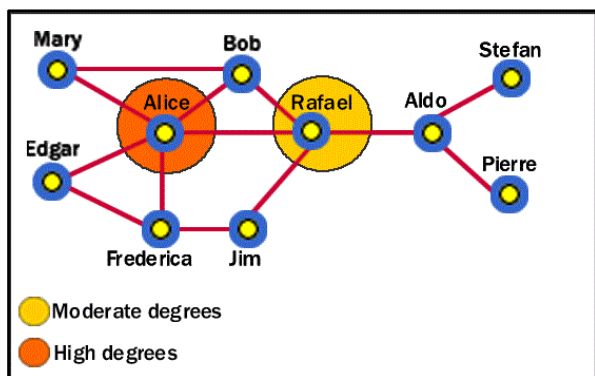


Gambar 2.8 Ilustrasi *Betweenness Centrality*

Sumber: <http://fmsasg.com/fmsasg/SocialNetworkAnalysis/>

Aktor yang memiliki *betweenness centrality* pada **Gambar 2.8** adalah Rafael, karena Rafael berada diantara Alice dan Aldo, yang berada diantara entitas lainnya. Alice dan Aldo memiliki *betweenness centrality* yang rendah karena hanya berada pada kelompok sendiri. Sehingga meskipun Alice memiliki *degree centrality* tinggi, Rafael lebih penting dalam jaringan dalam hal tertentu. Berdasarkan **Gambar 2.8**, Rafael memiliki fungsi untuk mentransfer informasi yang diperoleh oleh Aldo, sehingga Aldo dapat mentransferkan informasi terhadap aktor lain dalam kelompoknya. Apabila Rafael tidak mentransfer informasi, maka aktor yang terdapat dalam kelompok lain tidak mendapatkan informasi.

*Betweenness centrality* menunjukkan seberapa jauh aktor dapat mengendalikan informasi diantara aktor-aktor yang lain serta aktor yang merupakan fasilitator dalam jaringan. Dengan demikian seorang aktor dengan nilai *betweenness* yang tinggi, merupakan aktor yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi ke aktor-aktor yang tidak terhubung langsung dengannya atau dengan kata lain aktor tersebut merupakan fasilitator atau penghubung bagi aktor-aktor lain dalam jaringan.



Gambar 2.9 Ilustrasi Centrality

Sumber: <http://fmsasg.com/fmsasg/SocialNetworkAnalysis/>

Keterangan mengenai Gambar 2.9 mengenai aktor sentral pada sebuah jaringan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Keterangan aktor sentral dalam ilustrasi centrality

Aktor	Keterangan
Alice	<p><i>Degree centrality</i></p> <p>Alice merupakan aktor yang memiliki <i>degree centrality</i> yang tinggi dibandingkan aktor lain, karena Alice memiliki hubungan terbanyak terhadap setiap aktor dalam jaringan. Apabila Alice memiliki informasi dan memberikan informasi tersebut terhadap aktor lain dalam jaringan, maka informasi akan menyebar terhadap aktor yang terdapat di jaringan, tetapi apabila Alice tidak memberikan informasi yang diperoleh terhadap aktor lain, maka jaringan tersebut tidak akan mendapatkan informasi</p>
Rafael	<p><i>Closeness centrality</i></p> <p>Rafael merupakan aktor yang memiliki <i>closeness centrality</i> yang tinggi dibandingkan aktor yang lain, karena Rafael dapat dengan cepat berinteraksi dengan semua aktor melalui jalur yang lebih pendek. Penempatan aktor Rafael memungkinkan untuk terhubung ke entitas dalam kelompok sendiri dan entitas kelompok lain</p> <p><i>Betweenness centrality</i></p> <p>Selain memiliki nilai <i>closeness centrality</i> yang tinggi, Rafael juga merupakan aktor yang memiliki nilai <i>betweenness centrality</i> yang tinggi dibandingkan aktor yang lain. Rafael merupakan aktor yang memiliki nilai <i>betweenness centrality</i> yang tinggi dikarenakan Rafael berada diantara Alice dan Aldo yang berada diantara entitas lainnya. Rafael memiliki fungsi untuk mentransfer informasi yang diperoleh terhadap Aldo, sehingga Aldo dapat mentransferkan informasi terhadap aktor lain dalam kelompoknya</p>
Aldo	<p>Dalam jaringan Aldo bukan merupakan aktor sentral yang memiliki <i>degree centrality</i>, <i>closeness centrality</i> dan <i>betweenness centrality</i> yang tinggi. Jika dibandingkan dengan Alice, Alice memiliki hubungan yang lebih banyak terhadap aktor lain dalam jaringan, sehingga Alice memiliki <i>degree centrality</i> yang lebih tinggi dibandingkan Aldo</p> <p>Aldo bukan merupakan aktor yang memiliki nilai <i>closeness centrality</i> yang paling tinggi dalam jaringan, karena untuk mencapai aktor yang lain dalam jaringan, Aldo harus melalui perantara yang lebih banyak dibandingkan dengan Rafael, sehingga Rafael memiliki nilai <i>closeness centrality</i> yang lebih tinggi dibandingkan Aldo.</p> <p>Aldo memiliki nilai <i>betweenness centrality</i> yang lebih rendah dibandingkan dengan Rafael, karena Aldo hanya berada dalam entitasnya sendiri</p>

Pada penelitian ini, mengacu pada Wasserman dan Faust (1994), jaringan afiliasi diteliti sebagai hubungan *nondirectional* di mana baris  $i$  dari matriks  $X$ ,  $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ig})$ , identik dengan kolom  $i$ . Penelitian ini berfokus pada hubungan *nondirectional*, sejalan dengan Knoke dan Burt (dalam Wasserman and Faust, 1994), *centrality* mungkin merupakan indeks yang paling tepat untuk mendefinisikan lebih baik aktor-aktor penting



sebagai mereka yang memiliki lebih banyak visibilitas dan memahami makna konsep yang lebih baik. Dengan demikian, untuk hubungan *nondirectional*, aktor sentral didefinisikan sebagai salah satu yang terlibat dalam banyak ikatan, tanpa memandang penerima (menjadi penerima) serta transmisi (menjadi sumber) dari banyak ikatan.

Tabel 2.3 Ringkasan Istilah Kunci dan Pengukuran Jaringan

Terminologi	Definisi	Teori	Level Analisis
<i>Node</i>	Entitas sosial (individu, kelompok)		-
<i>Link</i>	Representasi hubungan antara 2 <i>nodes</i> (simpul)		-
<i>Affiliation networks</i>	Jenis jaringan sosial yang menjelaskan hubungan antara entitas dan kegiatan ( <i>events</i> )	Data jaringan afiliasi dianalisis untuk memahami sistem hubungan sosial dalam <i>bounded community</i> (Wasserman & Faust, Social network analysis: Methods and applications, 1994)	-
<i>Degree centrality</i>	Jumlah koneksi langsung <i>focal node</i> yang satu dengan <i>node</i> lain dalam jaringan	Mengidentifikasi <b>individu yang akan dengan cepat menyebarkan pengetahuan</b> dan inisiatif yang kompleks (Centola & Macy 2007, Valente et al., 2008, Karsai et al., 2014)	Individual
<i>Closeness centrality</i>	Jumlah jalur terpendek ( <i>shortest paths</i> ) yang menghubungkan <i>focal node</i> ke semua <i>node</i> lain dalam jaringan	<i>Closeness centrality</i> penting dalam mengidentifikasi orang-orang yang memiliki posisi terbaik untuk <b>menyebarkan informasi baru dengan cepat dan efisien ke seluruh jaringan</b> (Beauchamp, 1965, Costenbader & Valente 2003).	Individual
<i>Betweenness centrality</i>	Proporsi jalur terpendek ( <i>shortest paths</i> ) antara dua <i>node</i> dalam jaringan yang melewati <i>focal node</i>	Mengidentifikasi individu yang akan menjadi <b>perantara informasi</b> atau inisiatif antara kelompok yang terputus (Stephenson & Zelen 1989)	Individual
<i>Density</i>	Proporsi semua kemungkinan koneksi yang ada dalam jaringan		Jaringan
<i>Rate of Participation</i>	Tingkat rata-rata afiliasi bagi para aktor dalam matriks <i>bipartite</i> . Rata-rata keterlibatan aktor dalam sebuah <i>event</i> terhadap keseluruhan aktor dalam seluruh <i>event</i>		Individual



## 2.5 Studi Terdahulu

Tabel 2. 4 Studi Terdahulu

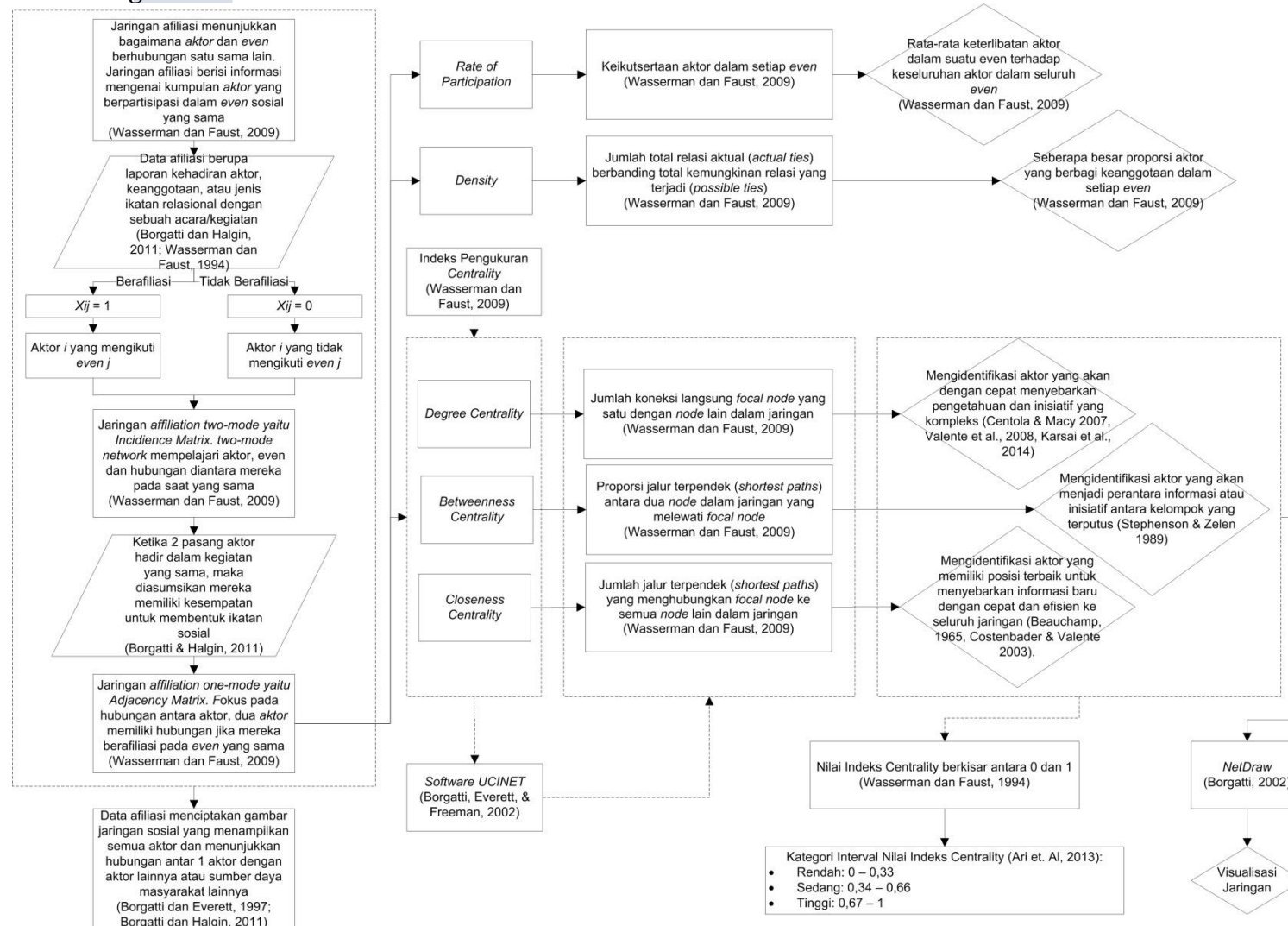
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis yang Digunakan	Unit Analisis	Kontribusi dalam Penelitian
1	<i>Community participation on water management; Case Singosari District, Malang Regency, Indonesia</i>	Ismu Rini Dwi Ari, Kenshiro Ogi, Kakuya Matshushima, Kiyoshi Kobayashi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui ikatan sosial di masyarakat sehingga dapat berdampak pada keputusan untuk memilih bergabung atau tidak di dalam sebuah upaya kegiatan penyediaan air bersih berbasis masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur Sosial: Sentralitas (<i>degree, closeness, betweenness</i>), rate of participation, density.</li> <li>Klasifikasi kelas untuk 3 indeks struktur sosial</li> <li>Faktor ketergantungan pemilihan penyediaan air bersih berbasis masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Social Network Analysis (SNA)</i></li> <li><i>Spatial Autoregressive Probit Model</i></li> </ul>	Rumah tangga	Pengaplikasian <i>social network analysis</i> dalam melihat struktur sosial masyarakat
2	Menuju Pembangunan Berbasis Tata Ruang Melalui Perencanaan Lingkungan Bertetangga Secara Partisipatif. Studi Kasus Pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Kelurahan Pringapus Kabupaten Semarang	Asnawi Manaf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa sejauh mana konsep-konsep partisipatif ini diterapkan di dalam program tersebut</li> <li>Mengidentifikasi kendala dan tantangan apa yang ditemui di lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan partisipatif dalam program PLPBK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus ini mengambil kasus pelaksanaan program PLP-BK</li> </ul>	masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada program PLP-BK dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program PLP-BK di wilayah studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi terkait aspek-aspek dalam <i>neighborhood planning</i></li> <li>Adopsi pendekatan dan metode penelitian</li> </ul>
3	<i>Applying Affiliation Social Network Analysis to Understand</i>	Nathan R. Todd, Jaclyn D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi ini menggunakan analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sumberdaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Social Network</i></li> </ul>	Kelompok lintas agama di seluruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi tinjauan pustaka untuk <i>social</i></li> </ul>

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis yang Digunakan	Unit Analisis	Kontribusi dalam Penelitian
	<i>Interfaithgroups</i>	Houston, Rachael L.	jejaring sosial afiliasi untuk memahami bagaimana kelompok antaragama menyediakan sumber daya kepada kelompok masyarakat lainnya dan menghubungkan anggota kelompok antaragama dengan sumber daya untuk perubahan masyarakat setempat.	untuk kelompok masyarakat • Keterhubungan orang dengan sumberdaya	<i>Analysis</i> dengan menggunakan <i>Netdraw</i> 2.090	USA	<i>network analysis</i> • Pengaplikasian analisis
4	<i>Assessing Intercultural Communication Competence As a Relational Construct Using Social Network Analysis</i>	Ruobing Chia, Daniel Suthers	• penilaian kompetensi komunikasi antarbudaya (ICC) dari perspektif relasional dengan menggunakan analisis jaringan sosial	• Variabel bebas: <i>In-degree centrality</i> , <i>Eigenvector centrality</i> , <i>Host-national connectivity</i> , <i>Co-national connectivity</i> . • Variabel terikat: 17 item terpilih dalam adaptasi sosio-kultural	• <i>Social Network Analysis</i> dengan menggunakan <i>software UCINET 6.0</i>	Peserta Institusi Pendidikan USA	• Referensi tinjauan pustaka untuk <i>social network analysis</i> • Pengaplikasian analisis dan <i>UCINET 6.0</i>
5	<i>Integrating Social Network Analysis With Analytic Network Process For International Development Project Selection</i>	Caitlin A. Grady, Xiaozheng He, Srinivas Peeta	• Mengintegrasikan analisis jaringan sosial ke dalam proses pengambilan keputusan multi kriteria untuk meningkatkan efektivitas pemilihan	• Interaksi antar entitas kelembagaan	• <i>Social Network Analysis</i> • <i>Analytic Network Process</i>	Kelembagaan formal dan informal	• Referensi latar belakang, identifikasi masalah dan tinjauan pustaka untuk <i>social network analysis</i> • Pengaplikasian analisis

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis yang Digunakan	Unit Analisis	Kontribusi dalam Penelitian
6	<i>Penerapan Teori Graph Untuk Analisis Masalah Pada Grup Gelanggang-UGM di Facebook</i>	Yuniar Indrihapsari	proyek • mengetahui relasi sosial yang terjadi di dalam salah satu grup di Facebook yaitu Grup Gelanggang-UGM.	• Kedekatan hubungan antar anggota. • Aktivitas yang telah terjadi pada Grup Gelanggang-UGM di Facebook	• <i>Social Network Analysis</i>	Grup Gelanggang-UGM di Facebook	• Referensi untuk tinjauan pustaka dan metode analisis jaringan sosial • Pengaplikasian analisis
7	<i>The Density of Social Networks Moderates Effects of Intergroup Contact</i>	Tobias H. Stark	• Studi ini menguji bagaimana <i>density</i> (kepadatan) jaringan sosial di mana kontak antar kelompok dapat mempengaruhi sejauh mana kontak meningkatkan sikap antar kelompok.	• Variabel sentral: Sikap • Variabel tambahan: intensitas pertemuan • Variabel kontrol: umur, jenis kelamin, ideologi politik, ukuran jaringan	• <i>Network Density</i>	sampel online non-probabilitas penduduk A.S. yang direkrut melalui Amazon Mechanical Turk (MTurk)	• Referensi tentang kepadatan jaringan • Adopsi pertanyaan untuk kuesioner
8	<i>Understanding The Mechanism of Food Waste Management by Usingstakeholder Analysis and Social Network Model: An Industrial Ecology Perspective</i>	Wanying Xua, Chuanbin Zhoua, Aixin Caoa, Min Luo	• Penerapan metodologi analisis <i>stakeholder</i> dan model jaringan sosial dalam daur ulang dan pengomposan potensi limbah pangan rumah tangga.	• Minat • Kekuatan • Pengetahuan • Sikap • Informasi • Interaksi	• <i>Social Network Analysis</i> dengan menggunakan <i>software UCINET 6.237</i>	<i>Stakeholder</i> pada kategori <i>downstream</i> , <i>midstream</i> dan <i>upstream</i>	• Referensi tentang tinjauan pustaka dan metode analisis jaringan sosial • Pengaplikasian analisis dan <i>UCINET 6.0</i>
9	<i>A Social Networks Approach to Understanding Preferences Location In Indonesia</i>	Mustika Anggraeni, Ismu Rini Dwi Ari and Endratno Budi	• menyelidiki tipologi struktur sosial masyarakat untuk mengetahui mengapa masyarakat memilih	• Kerentanan • Histori kejadian banjir • Ketinggian air • Umur	• <i>Structur Equation Modelling</i> • <i>Social Network</i>	Desa-desa dengan kerentanan rendah, sedang, tinggi	• Indikator untuk <i>Density</i> dan <i>Rate of Participation</i> • Adopsi variabel dalam tipologi struktur sosial

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Variabel yang Digunakan	Metode Analisis yang Digunakan	Unit Analisis	Kontribusi dalam Penelitian
		Santosa	untuk tetap tinggal di daerah risiko bencana banjir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendapatan</li> <li>• Tingkat pendidikan</li> <li>Variabel SEM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alam</li> <li>• Manusia</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• Jaringan</li> </ul> </li> <li>Variabel SNA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil kelompok masyarakat</li> <li>• Keanggotaan kelompok masyarakat</li> </ul> </li> </ul>	<i>Analysis</i> menggunakan <i>UCINET 6 for Windows version 6.523</i> .		masyarakat
10	Pengaruh Sentralitas Aktor Dalam Jaringan Sosial <i>Game Online Massive Multiplayer Online Role Playing Game</i> Menggunakan <i>Social Network Analysis</i>	Ofir Victor Soumokil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan gambaran mengenai pengaruh sentralitas aktor yang terhubung dalam jaringan sebelum dan sesudah aktor sentral tersebut dihilangkan</li> <li>• Melihat pengaruh serta efek dari keputusan aktor sentral terhadap jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan-hubungan antar aktor dalam jaringan pemain game online MMORPG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Social Network Analysis</i> dengan menggunakan <i>software UCINET 6.0</i></li> </ul>	Pemain <i>game online MMORPG</i> dalam komunitas <i>game online Perfect World</i> di Jawa Tengah, Jakarta dan Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi tinjauan pustaka tentang jaringan dan jaringan sosial</li> <li>• Referensi tinjauan pustaka dan metode analisis tentang <i>social network analysis</i></li> </ul>

## 2.6 Kerangka Teori



Gambar 2.10 Kerangka Teori Penelitian





*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional dari kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur sosial pada penelitian ini merujuk pada struktur jaringan yang terdiri dari aktor yang disebut simpul “*node*”, yang terhubung oleh sebuah ikatan “*link*” oleh satu atau lebih jenis interdependensi tertentu. Simpul adalah aktor dalam jaringan dan ikatan adalah relasi antar aktor. Simpul adalah aktor yang terlibat dalam kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK dan ikatan adalah hubungan antar aktor yang terlibat dalam kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK yang sama. Hubungan sosial antar aktor dalam penelitian ini dianalisis melalui *social network analysis*, yang dapat memahami hubungan aktor dalam jaringan dan menghasilkan representasi visual struktur sosial antar aktor dalam jaringan. *Social network analysis* dinilai melalui tiga komponen, yaitu *density*, *rate of participation* dan *centrality*. Berikut penjelasannya:

- a. *Density*

*Density* digunakan untuk melihat hubungan seorang responden saling mengenal satu sama lain. Secara umum nilai *densitas* dapat dilihat dari jumlah total hubungan relasi berbanding dengan total kemungkinan hubungan relasi yang terjadi. Nilai densitas berkisar antara 0-1. Nilai 1 menunjukkan bahwa kerapatan yang terjadi dalam sebuah jaringan masyarakat tinggi, sedangkan nilai densitas 0 menunjukkan kerapatan dalam jaringan rendah.

- b. *Rate of Participation*

Analisis *RoP* digunakan untuk menghitung rata-rata keterlibatan aktor dalam suatu kegiatan terhadap keseluruhan aktor dalam seluruh kegiatan Program PLPBK.

- c. *Centrality*

Analisis yang digunakan untuk menentukan aktor terpenting yang berada dalam posisi strategis dalam jaringan, atau dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi

aktor sentral masyarakat dalam pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan.

2. PLPBK merupakan singkatan dari Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Program PLPBK merupakan tranformasi atau intervensi lanjutan dari PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan) yang menggunakan pendekatan *bottom up planning*. Program PLPBK telah dilaksanakan di Kelurahan Polehan pada tahun 2014 hingga 2016. RW 4 terpilih sebagai kawasan prioritas Program PLPBK atas dasar pertimbangan masalah kondisi bangunan hunian, air bersih, persampahan, usaha ekonomi lokal dan sarana pendidikan/kegiatan sosial.
3. Jaringan afiliasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan kehadiran aktor dalam seluruh kegiatan pelaksanaan siklus PLPBK yang tertera dalam Pedoman Teknis PLPBK (2014).

### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini terkategori dalam “*instrumental case study*” (Creswell, 1998). Pemilihan metode *case study research* dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki suatu fenomena kontemporer melalui sebuah kasus. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Polehan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 hingga 2016. Fokus permasalahan khusus pada penelitian ini adalah bagaimana struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan terbentuk dalam pelaksanaan Program PLPBK.

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Parameter	Sumber
Mengidentifikasi struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan program PLPBK	Jaringan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Density</i></li> <li>• <i>Rate of Participation</i></li> <li>• <i>Centrality</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Degree centrality</i></li> <li>▪ <i>Betweenness centrality</i></li> <li>▪ <i>Closeness centrality</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Density</i>: jumlah total hubungan relasi berbanding dengan total kemungkinan hubungan relasi yang terjadi</li> <li>• <i>Rate of participation</i>: Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pada tiap tahapan pelaksanaan Program PLPBK</li> <li>• <i>Centrality</i></li> </ul>	Wasserman, S., & Faust, K. (1994)

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Parameter	Sumber
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Degree</i>: posisi suatu aktor yang memiliki banyak relasi langsung atau jumlah hubungan dengan aktor-aktor lain dalam jaringan</li> <li>▪ <i>Closeness</i>: kedekatan antar aktor yang memiliki jalur komunikasi lebih pendek (<i>shortest path</i>)</li> <li>▪ <i>Betweenness</i>: Jumlah kehadiran seorang aktor dalam <i>geodesic</i> (<i>shortest path</i>) setiap pasangan aktor lainnya dibandingkan dengan jumlah <i>geodesic</i> pasangan aktor tersebut dalam <i>network</i>.</li> </ul>	

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan kaidah penelitian studi kasus, maka penelitian terbuka terhadap semua data-data yang dipandang relevan dan dapat menjelaskan kasus yang sedang diteliti sehingga teknik pengumpulan data menggunakan berbagai pendekatan (*multiple sources of evidence*) baik melalui pengamatan langsung dan pengumpulan dokumen terkait.

#### 3.4.1 Survei Primer

Survei primer melalui observasi lapangan yang digunakan untuk mengetahui kondisi kondisi sarana dan prasarana hasil pembangunan Program PLPBK. Selain itu, pengumpulan data jaringan sosial dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data paling umum yang digunakan dalam penelitian jaringan sosial terutama saat aktor jaringan yang dimaksud adalah individu atau orang. Perancangan kuesioner penelitian ini merujuk pada Wasserman dan Faust (1994), format pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dimana kuesioner tersebut berisikan pertanyaan mengenai hubungan responden dengan responden lainnya. Dalam hal ini relasi yang sedang diteliti adalah yang dapat dilaporkan oleh responden berupa afiliasi responden terhadap kegiatan dalam pelaksanaan Program PLPBK. Responden diminta untuk menyatakan kehadiran responden pada tiap kegiatan dalam seluruh tahap Program PLPBK. Responden yang hadir pada kegiatan tertentu diberi tanda “x”, dan sebaliknya diberi tanda

“-“. Artinya data yang terkumpul dapat menggambarkan tentang siapa yang memiliki relasi sosial dengan siapa dalam tiap tahap pelaksanaan Program PLPBK.

Tabel 3.2 Desain Kuesioner Berdasarkan Definisi Teori dan Penelitian Sebelumnya

Penulis	Penjelasan	Pertanyaan dalam kuesioner
Wasserman dan Faust (1994)	Sebuah jaringan dibangun oleh kumpulan aktor sebagai <i>nodes</i> dan ikatan relasional jenis tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. <i>Node</i> khusus untuk aktor memiliki <b>atribut bawaan</b> (misalnya: jenis kelamin, usia, kewarganegaraan) dan tidak tergantung pada jaringan	Atribut responden: a. Jenis Kelamin b. Usia c. Suku d. Status penduduk e. Pekerjaan f. Pendidikan g. Lama tinggal
Wasserman dan Faust, (2008); Borgatti & Halgin, (2011); Wasserman & Faust, (1994).	Data afiliasi dapat mengetahui hubungan diantara aktor atau hubungan diantara <i>even</i> atau hubungan keduanya (antar aktor dan <i>even</i> ). Data afiliasi dapat berupa <b>laporan kehadiran aktor, keanggotaan atau jenis ikatan relasional dengan sebuah acara/kegiatan.</b>	Keikutsertaan responden dalam kegiatan pada tahap Program PLPBK: a. Tahap persiapan program b. Tahap perencanaan dan pemasaran sosial c. Tahap pelaksanaan pembangunan d. Tahap keberlanjutan
(Tausch, et al., 2011)	Sebagai bentuk penilaian jaringan sosial, responden juga akan diberikan pertanyaan mengenai <b>kedekatan sosial</b> responden dengan responden lain	"Siapakah orang-orang di luar rumah anda yang merasa paling dekat dengan anda? a. Teman b. Rekan kerja c. Tetangga d. Kerabat e. atau siapa pun yang tidak tinggal dengan responden Responden dapat memasukkan nama-nama terdekatnya hingga lima orang.
	Setiap kontak jaringan, responden bisa menunjukkan <b>seberapa sering mereka berbicara satu sama lain.</b> Pertanyaan tentang <b>frekuensi pertemuan anggota jaringan</b> yang digunakan untuk menguji apakah orang dengan jaringan sosial yang lebih padat memenuhi kontak mereka lebih sering.	Frekuensi pertemuan anggota jaringan 1. "kurang dari sekali sebulan" 2. "setidaknya sekali sebulan" 3. "setidaknya sekali seminggu" 4. "setiap hari, atau hampir setiap hari"

### 3.4.2 Survei Sekunder

Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber, yang berupa studi literatur dan studi ke instansi terkait. Data sekunder pada studi instansi meliputi:

Tabel 3.3 Jenis Data Sekunder Penelitian

No	Lembaga atau Instansi	Data yang Dibutuhkan
1	Kelurahan Polehan	Monografi Kelurahan Polehan
2	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Polehan	Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas Program PLPBK Kelurahan Polehan
3	Koordinator Kota (Korkot) Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen penyusunan strategi pencapaian akses universal 100-0-100 Kota Malang</li> <li>Dokumen kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman Kota Malang</li> </ul>



No	Lembaga atau Instansi	Data yang Dibutuhkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kota Malang</li> <li>• Baseline P2KKP Kelurahan Polehan</li> </ul>

### 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi pada penelitian ini adalah semua aktor atau pelaku RW 04 Kelurahan Polehan yang terlibat dalam siklus Program PLPBK yang terdiri atas pelaksana, pendamping dan peserta. Aktor-aktor tersebut mewakili unsur-unsur sebagai berikut:

1. BKM;
2. TIPP;
3. Relawan; dan
4. KSM.

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Social Network Analysis* yang bertujuan untuk mengetahui struktur sosial masyarakat dalam pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan. *Social Network Analysis* memiliki beberapa ukuran dasar yang sering digunakan, yaitu *centrality*, *betweenness*, *closeness*, dan *density*. *Centrality*, *betweenness*, dan *closeness* merupakan pengukuran jaringan secara individual. Sedangkan *density* merupakan pengukuran jaringan secara kelompok (Borgatti, 1997).

#### 3.6.1 Data jaringan afiliasi

Pertanyaan penelitian dalam penelitian dijawab dengan menggunakan data afiliasi (*affiliation*) sebagai *input* dari *social network analysis*. Terdapat dua jenis jaringan afiliasi, yaitu *one-mode networks* dan *two-mode networks*. Data afiliasi dapat mengetahui hubungan diantara aktor atau hubungan diantara *event* atau hubungan keduanya (antar aktor dan *event*) (Wasserman & Faust, 2008). Data afiliasi dapat berupa laporan kehadiran aktor, keanggotaan atau jenis ikatan relasional dengan sebuah acara/kegiatan (Borgatti & Halgin, 2011; Wasserman & Faust, 1994). *Event* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pada tiap tahap pelaksanaan Program PLPBK yang tertera dalam Pedoman Teknis Program PLPBK tahun 2014.

Berikut merupakan metode pengelolaan data afiliasi dalam *Social Network Analysis* (Carrington & Scott, 2000)

### 1. Incidence matrix

*Incidence matrix* secara tipikal berbentuk matriks persegi panjang yang merepresentasikan afiliasi responden ke dalam suatu jaringan sosial.

	A	B	C	...	T
1	0	1	1	1	0
2	1	1	0	0	1
3	1	1	0	1	0
...	0	1	1	1	1
285	0	1	1	0	1

Gambar 3.1 Incidence Matrix

Jaringan afiliasi sebagai himpunan (*set*) aktor yang dinotasikan dengan  $N = \{n_1, n_2, \dots, n_g\}$  yang merupakan baris dan himpunan (*set*) *event* yang dinotasikan dengan  $M = \{m_1, m_2, \dots, m_g\}$  yang merupakan kolom. Pada penelitian ini himpunan aktor terdiri dari 285 aktor yang tersebar ke dalam 12 RT, serta himpunan *event* sebanyak 20 kegiatan pada ke empat tahap PLPBK. *Incidence matrix* atau matriks jaringan afiliasi 2-mode mencatat afiliasi responden atau kehadiran responden pada tiap tahap kegiatan pelaksanaan siklus Program PLPBK (responden x kegiatan). Data afiliasi kehadiran aktor dalam kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK akan dicatat ke dalam matriks  $X$ . Matriks afiliasi  $X = \{x_{ij}\}$ , merupakan kode untuk masing-masing aktor, *event* dengan aktor yang berafiliasi. Matriks jaringan afiliasi 2-mode dicatat dengan format “responden-kegiatan”. *Incidence matrix* merupakan sebuah relasi biner yang menghubungkan antara aktor dan *event*. Sehingga, matriks tersebut mempunyai keterangan:

$$x_{ij} = \begin{cases} \text{Bernilai 1, jika responden } i \text{ mengikuti kegiatan } j; \text{ dan} \\ \text{Bernilai 0, jika responden } i \text{ tidak mengikuti kegiatan } j. \end{cases}$$

Matriks yang masih berupa jaringan afiliasi-2 mode tersebut kemudian diubah menjadi matriks jaringan afiliasi 1 mode dengan menggunakan rumus  $X^N = AA'$  sehingga matriks awal yang berupa perkalian (responden x kegiatan) atau *incidence matrix*, kemudian akan diubah menjadi matriks perkalian (responden x responden) atau *adjacency matrix*.

### 2. Adjacency matrix

*Adjacency matrix* merupakan suatu matriks berbentuk bujur sangkar yang merepresentasikan hubungan antar responden di dalam suatu jaringan sosial.

	1	2	3	...	285
1	9	15	12	16	2
2	3	3	3	3	2
3	9	13	10	13	2
...	2	2	2	2	2
285	1	1	1	1	1

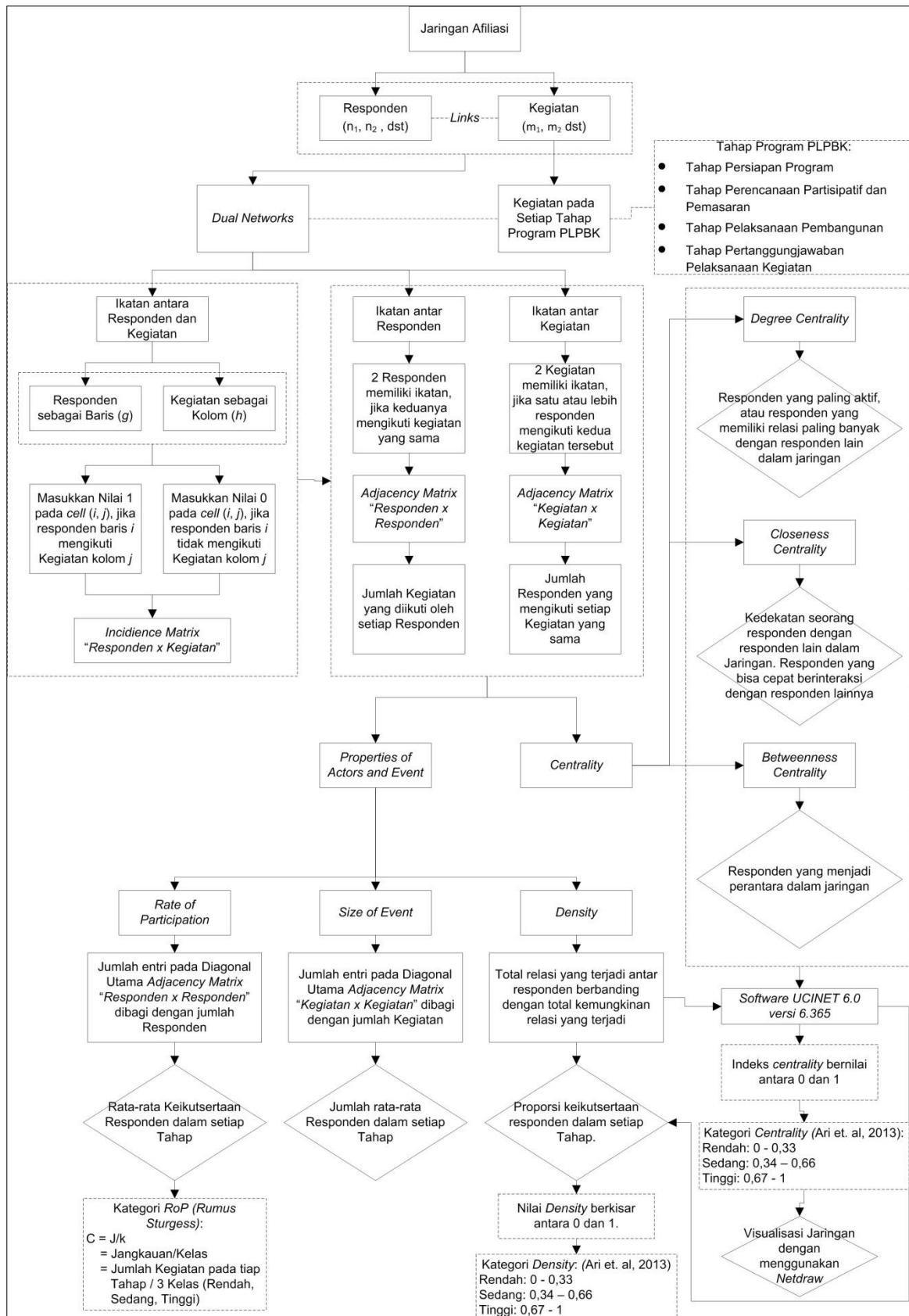
Gambar 3. 2 Adjacency Matrix

*Adjacency matrix* atau matriks jaringan afiliasi *1-mode*, yang berbentuk simetris  $x_{ij} = x_{ji}$  untuk semua  $i$  dan  $j$ . Sehingga entri pada segitiga kanan atas dan kiri bawah adalah identik. Entri pada diagonal, nilai  $x_{ii}$  tidak terdefinisi. *Adjacency matrix* mencatat relasi antar responden pada seluruh kegiatan pada siklus Program PLPBK (responden x responden).

Data afiliasi dianalisis untuk memahami sistem hubungan sosial dalam *bounded community* (Wasserman & Faust, 1994). Ketika 2 pasang aktor hadir dalam kegiatan yang sama, maka diasumsikan mereka memiliki kesempatan untuk membentuk ikatan sosial (Borgatti & Halgin, 2011). Artinya jenis jaringan afiliasi ini merupakan *one-mode sociomatriks* dimana dua aktor memiliki hubungan jika mereka berafiliasi pada seluruh kegiatan pada siklus Program PLPBK. Data afiliasi tersebut dapat menciptakan gambar jaringan sosial yang menampilkan semua aktor dan menunjukkan hubungan antara 1 aktor dengan aktor lainnya atau sumber daya masyarakat lainnya (Borgatti, et al., 2002). Sehingga, merujuk pada Wasserman dan Faust (1994), jaringan afiliasi diteliti sebagai hubungan *nondirectional* di mana baris  $i$  dari matriks  $X$ ,  $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ig})$ , identik dengan kolom  $i$ .

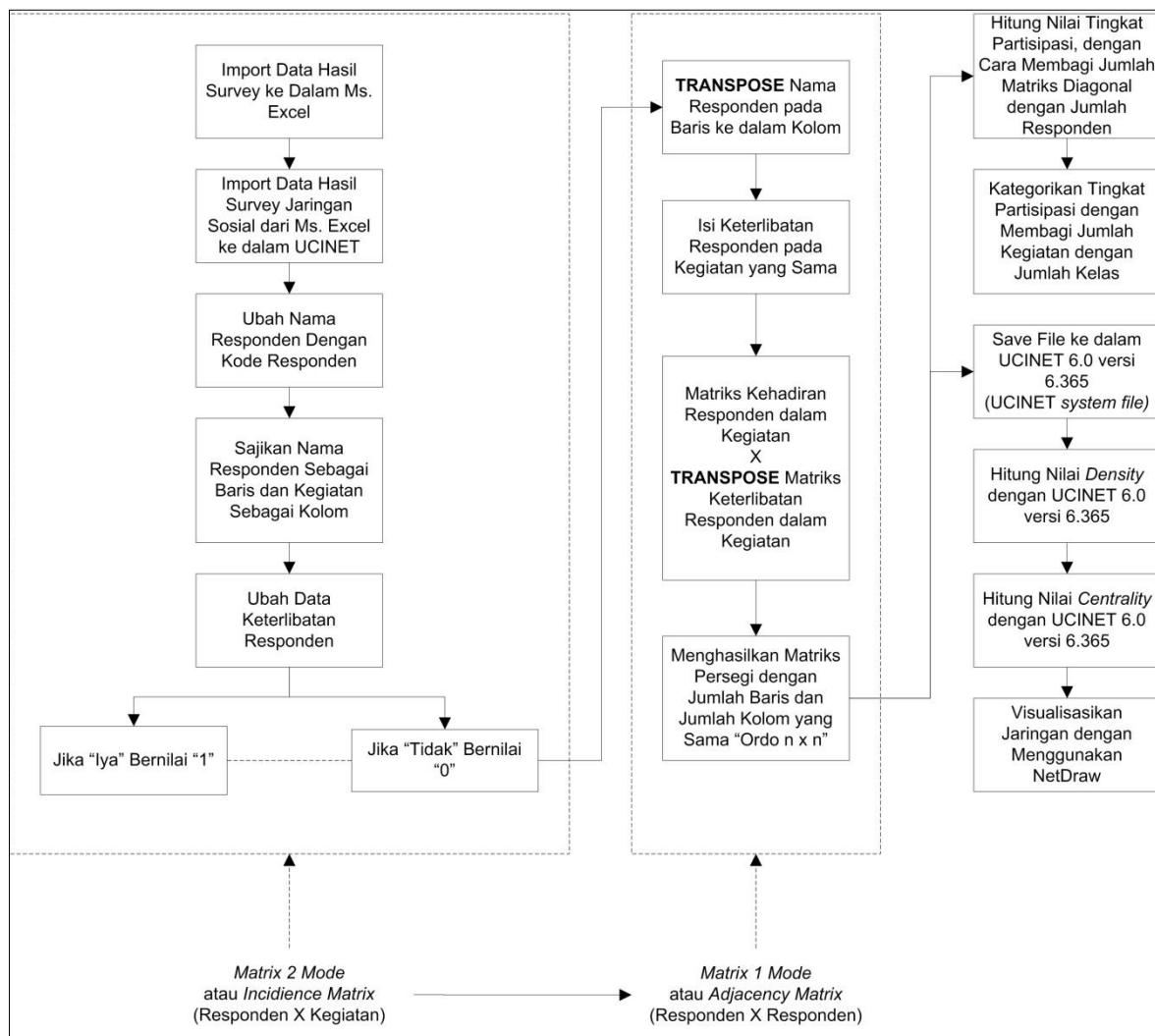
Kemudian, proses pengelolaan dan proses *social network analysis* dibuat dengan menggunakan *software UCINET* (Borgatti, et al., 2002). *Software UCINET* merupakan suatu analisis statistik untuk mengukur karakteristik jaringan yang menggunakan matriks interaksi antar aktor beserta atribut-atributnya. *Software UCINET* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *UCINET 6.0* versi 6.365. Selanjutnya data dari *UCINET* digunakan di *NetDraw* (Borgatti, et al., 2002). untuk memvisualisasikan jaringan.

Gambar 3.2 berikut merupakan skema pengaplikasian *social network analysis* dalam penelitian ini.



Gambar 3.3 Skema Pengaplikasian Social Network Analysis pada Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk mempermudah pemahaman, Gambar 3.3 berikut skema teknis pengerjaan *social network analysis* dalam penelitian ini.



Gambar 3.4 Skema Pengerjaan pada *Social Network Analysis*

Guna meningkatkan efisiensi pencatatan dalam pemrosesan *social network analysis* serta agar lebih ringkas dan sistematis, maka disusun kode yang diwakili oleh karakter berupa angka dan huruf. Tabel 3.4 berikut merupakan penyajian kode kegiatan dan kode responden penelitian.

Tabel 3.4 Kode Kegiatan pada Tiap Tahap Pelaksanaan Program PLPBK

Tahap Kegiatan	Kode
<b>Tahap Persiapan Program</b>	<b>A</b>
Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK	A1
Sosialisasi PLPBK tingkat Kawasan Prioritas dan wilayah yang lebih luas (Kelurahan)	A2
Penguatan dan Penguatan Kapasitas Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP)	A3
Perekutan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP)	A4
<b>Tahap Perencanaan dan Pemasaran Sosial</b>	<b>B</b>
Membangun Visi Kawasan prioritas	B1



<b>Tahap Kegiatan</b>	<b>Kode</b>
Pelaksanaan Pemetaan Swadaya (PS)	B2
Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan	B3
Uji publik hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPLP Kawasan Prioritas)	B4
Forum konsultasi : RTPLP Kawasan prioritas	B5
Pengesahan dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan disosialisasikan di tingkat Kawasan prioritas dan Kelurahan	B6
Pemasaran Sosial	B7
<b>Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas</b>	<b>C</b>
Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM	C1
Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Penyusunan Proposal Kegiatan	C2
Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	C3
<b>Tahap Keberlanjutan</b>	<b>D</b>
Melakukan evaluasi awal	D1
Melakukan evaluasi berkala	D2
Menyusun laporan akhir dan program kerja minimal 1 tahun ke depan	D3
Melakukan sosialisasi program kerja 1 tahun ke depan	D4
Penyusunan dan penyepakatan rencana kerja perencanaan, pemasaran sosial, dan pelaksanaan pembangunan	D5
Penguatan lembaga pengelola pembangunan kawasan	D6

### 3.6.2 Density

Analisis *density* dilakukan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden Kelurahan Polehan. Secara keseluruhan kepadatan jaringan dihitung sebagai jumlah koneksi antar anggota jaringan dibagi dengan jumlah hubungan potensial antara semua anggota jaringan (Wasserman & Faust, 1994). Menurut Wasserman & Faust (1994) nilai densitas dalam sebuah hubungan antar responden di masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata-rata aktifitas yang terjadi oleh setiap pasang aktor. Nilai densitas juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi responden yang berbagi keikutsertaan dalam setiap kegiatan. Nilai densitas berada pada kisaran 0-1. Semakin mendekati 1, maka nilai densitas mengindikasikan bahwa kerapatan hubungan masyarakat Kelurahan Polehan semakin baik.

*Density* dapat dihitung menggunakan rumus dari (Wasserman & Faust, 1994) sebagai berikut:

$$\Delta(N) = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^g x_{ij}^N}{g(g-1)} ; i \neq j \dots\dots\dots (3-4)$$

$$= \frac{2L}{g(g-1)}$$

Keterangan:

$\Delta(N)$  = nilai densitas hubungan masyarakat

- $g$  = responden yang mempunyai kehadiran pada kegiatan yang sama dengan responden lainnya  
 $(g - 1)$  = responden - 1 (diri sendiri)  
 $X_{ij}^N$  = matriks primer dari responden  $i$  hingga  $j$   
 $L$  = jumlah garis terhubung antar responden

### 3.6.3 Rate of Participation

Analisis *rate of participation* dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan program PLPBK. Tingkat partisipasi masyarakat dihitung dengan menggunakan rumus (Wasserman & Faust, 1994).

$$\bar{a}_{i+} = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^h a_{ij}}{g} = \frac{a_{++}}{g} = \frac{\sum_{i=1}^g x_{ij}^N}{g} \dots\dots\dots(3-5)$$

Keterangan:

$\bar{a}_{i+}$  = rata-rata keterlibatan aktor dalam sebuah *event* terhadap keseluruhan aktor dalam seluruh *event*

$g$  = banyaknya aktor yang terlibat

$h$  = banyaknya *event* yang diikuti

$i$  = jumlah aktor yang terlibat dalam *event*

$j$  = jumlah *event* yang diikuti oleh aktor

$x_{ij}^N$  = nilai dari diagonal utama dalam matriks (hubungan relasi antar aktor *event*)

Pada tingkat operasional, perhitungan tingkat *rate of participation* atau tingkat partisipasi didapatkan dari **Sum of Diagonal Matrix / Numb of Responden**. Nilai tingkat partisipasi diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan menggunakan Rumus Sturgess sebagai berikut:

1. Menentukan jangkauan

$$\text{Jangkauan (J)} = \text{Datum terbesar} - \text{Datum terkecil}$$

Keterangan:

J = Jangkauan

Datum besar = jumlah kegiatan pada tiap tahapan Program PLPBK

Datum terkecil = 0

2. Menentukan kelas

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

k = kelas  
n = banyak data

### 3. Panjang interval kelas

$$c = J/k$$

Keterangan:

c = Panjang interval kelas  
J = Jangkauan  
k = Banyaknya kelas interval

Berdasarkan Rumus Sturges yang telah dijelaskan sebelumnya, perhitungan tingkat partisipasi ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahap, berdasarkan jumlah tahap Program PLPBK yang telah dilaksanakan. Tabel 3.5 berikut merupakan klasifikasi tingkat partisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

*Tabel 3.5 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program PLPBK Kelurahan Polehan*

Tahap	Jangkauan (Jumlah Kegiatan)	Interval	Klasifikasi
Persiapan Program	4	1,33	Rendah: $0 < X \leq 1,33$ Sedang: $1,34 < X \leq 2,66$ Tinggi: $2,67 < X \leq 4$
Perencanaan dan Pemasaran Sosial	7	2,33	Rendah: $0 < X \leq 2,33$ Sedang: $2,34 < X \leq 4,66$ Tinggi: $4,67 < X \leq 7$
Pelaksanaan Pembangunan	3	1	Rendah: $0 < X \leq 1$ Sedang: $1,1 < X \leq 2$ Tinggi: $2,1 < X \leq 3$
Keberlanjutan	6	2	Rendah: $0 < X \leq 2$ Sedang: $2,1 < X \leq 4$ Tinggi: $4,1 < X \leq 6$

#### 3.6.4 Centrality

Analisis sentralitas digunakan untuk mengetahui aktor sentral dalam pelaksanaan program PLPBK Kelurahan Polehan. Untuk mengukur peran dan pengaruh aktor-aktor dalam jaringan adalah sebagai berikut: (Hanneman & Riddle., 2005).

##### A. Degree Centrality

Gagasan *degree centrality* adalah untuk menemukan aktor yang menempati posisi penting karena tingkat aktivitasnya yang tinggi atau jumlah tautan yang mereka miliki. *Degree centrality* mengukur aktivitas para aktor, bahwa aktor yang sangat aktif harus memiliki indeks sentral maksimal.

Wasserman dan Faust (1994), dalam data *2-mode*, tingkat sentralitas untuk seorang aktor adalah tingkat simpul,  $(n_i)$ . Oleh karena itu,  $C_D(n_i)$  didefinisikan sebagai tingkat aktor indeks tingkat sentralitas. Selain itu, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan hubungan *non-directional*, maka  $x_{ij} = x_{ji}$  berbentuk matriks *adjacency* yang simetris.

$$C_D(n_i) = d(n_i) = x_{i+} = \sum_j x_{ij} = \sum_j x_{ji} \dots\dots\dots (2-3)$$

Kemudian, untuk mengukur tingkat *centrality* yang dapat dibandingkan di seluruh jaringan dengan ukuran data yang berbeda, maka derajat baku *node* perlu dinormalisasi. Ukuran ini tergantung pada ukuran *event* ( $g$ ), dimana nilai maksimumnya adalah  $g - 1$ . Dengan demikian, level *centrality* yang dinormalisasi adalah proporsi *node* yang berdekatan dengan  $n_i$ .

$$C'_D(n_i) = \frac{d(n_i)}{g-1} \dots\dots\dots (2-4)$$

*Degree centrality* dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Wasserman & Faust, 1994), yaitu:

$$C'_D(n_i) = \frac{d(n_i)}{g-1} \dots\dots\dots (3-6)$$

Keterangan:

$g - 1$  = jumlah responden - 1 (diri sendiri)

$d(n_i)$  = nilai *degree centrality*

$x_{ij} - x_{ji}$  = matriks *adjacent* responden  $i$  hingga  $j$  dan sebaliknya

## B. *Closeness centrality*

Merujuk Freeman (1979), Wasserman dan Faust (1994) mendefinisikan ukuran sederhana untuk *closeness centrality* sebagai fungsi jarak *geodesic* seperti yang diusulkan oleh Sabidussi (1966). Jarak antara aktor  $i$  dan  $j$ , dinotasikan dengan  $d(n_i, n_j)$  menjadi jumlah garis dalam *geodesic* yang menghubungkan aktor  $i$  dan  $j$ , sebagai fungsi jarak dan itu adalah panjang jalur terpendek (*shortest path*) di antara para aktor. Oleh karena itu, jarak total dari semua aktor lainnya adalah  $\sum_{j=1}^g d(n_i, n_j)$ , dimana jumlahnya adalah diambil alih semua  $i \neq j$ . Dengan demikian, indeks *closeness* aktor sebagaimana didefinisikan oleh Sabidussi (1966) adalah:

$$C_C(n_i) = \left[ \sum_{j=1}^g d(n_i, n_j) \right]^{-1} \dots\dots\dots (2-5)$$

$C_C(n_i)$  merupakan *closeness centrality*,  $d(n_i, n_j)$  merupakan jumlah baris dalam aktor *geodesic* menghubungkan  $i$  dan  $j$ .  $\sum_{j=1}^g d(n_i, n_j)$  merupakan total jarak  $i$  dari semua aktor lain.

Nilai maksimum yang dicapai oleh indeks ini tergantung pada  $g$ , maka diambil saran dari Beauchamp (1965) Wasserman dan Faust (1994) mendefinisikan *closeness centrality* yang distandarisasi untuk membuat perbandingan nilai di seluruh jaringan dengan ukuran yang berbeda seperti yang dinyatakan sebagai berikut.

$$C'_C(n_i) = \frac{g-1}{\sum_{j=1}^g d(n_i, n_j)} = (g-1)C_C(n_i) \dots \dots \dots (2-6)$$

Indeks normalisasi berkisar antara 0 dan 1, dan dapat dilihat sebagai *inverse* jarak rata-rata antara aktor dan dan semua aktor lainnya (Faust and Wasserman, 1994).

Sejalan dengan para peneliti sebelumnya, Wasserman dan Faust (1994) juga mendefinisikan *closeness centrality* didasarkan pada jarak *geodesic* - jalur terpendek (*shortest path*) dari aktor utama dari aktor lain dalam jaringan, dan hanya berlaku untuk hubungan dikotomis. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus beberapa pasang aktor tidak memiliki hubungan di antara mereka, maka jarak antara mereka akan tak terbatas dan *closeness centrality* akan tidak terdefinisi. Dengan kata lain, seperti yang didefinisikan oleh Wasserman dan Faust (1994), jarak *geodesic* dari aktor yang terisolasi,  $n_k$  - dengan *degree* 0 karena aktor tidak dapat dijangkau dari aktor lain dari semua aktor lain yang panjangnya tak terbatas,

$$d(n_i, n_j) = \infty \text{ for all } i \neq k$$

Semua responden berada pada indeks maksimum sama  $(g-1) - 1$  dan memiliki indeks  $C'_C(n_i) = 1.0$ . Dalam hal mentransfer informasi, semua responden mungkin memiliki kemampuan untuk membuat komunikasi yang efisien secara merata tanpa salah satu dari mereka yang menempati lokasi pusat dan menjadi yang paling dinamis dalam mengkomunikasikan informasi kepada responden lain dalam jaringan.

### C. *Betweenness Centrality*

Wasserman dan Faust (1994) berpendapat bahwa "aktor di tengah" ini, yang satu di antara yang lain memang penting bagi jaringan seperti yang disampaikan oleh Bavelas (1948) dan Shaw (1954), yang mereka memainkan peran penting dalam jaringan. Sebagaimana dicatat oleh Shimbel (1953) dan Cohn & Marriot (1958) dalam Wasserman dan Faust (1994). Sebagai konsekuensinya, para aktor diantara mereka mungkin memiliki kekuatan interpersonal yang lebih besar terhadap yang lain.

Untuk mengukur gagasan *betweenness*, pertama Wasserman dan Faust (1994) mempertimbangkan kemungkinan aliran komunikasi, dengan mengusulkan dua asumsi:

1. bentuk *paths* dimana komunikasi akan berjalan sepanjang rute terpendek untuk mencapai aktor  $k$  dari aktor  $j$  memiliki bobot yang sama, sehingga komunikasi semacam itu akan mempunyai satu jarak *geodesic*.



2. Kemudian, Freeman (1979) memperkirakan bahwa kemungkinan komunikasi dari aktor  $k$  untuk aktor  $j$  mengambil rute tertentu dinotasikan dengan  $g_{jk}$  menjadi jumlah *geodesic* yang menghubungkan dua aktor.

Jadi, kemungkinan komunikasi menggunakan salah satu jalur yang dipilih adalah inverse dari  $g_{jk}$ . Mereka menganggap probabilitas aktor yang berbeda,  $i$ , adalah "terlibat" dalam komunikasi antara dua aktor dimana  $g_{jk}$  menjadi jumlah *geodesic* yang menghubungkan dua aktor yang mengandung aktor  $i$ . Dengan demikian, bersama dengan estimasi Freeman (1977), indeks *betweenness* aktor untuk  $n_i$  adalah jumlah dari estimasi probabilitas atas semua pasangan aktor yang tidak termasuk aktor  $i$  untuk  $i$  berbeda dari  $j$  dan  $k$ .

$$C_B(n_i) = \sum_{j < k} g_{jk}(n_i) / g_{jk} \dots\dots\dots (2-7)$$

Mengacu pada persamaan 2.6, Wasserman dan Faust (1994) menyarankan untuk terlebih dahulu menghitung jumlah *geodesic* yang menghubungkan aktor  $j$  dan  $k$ , dimana  $d(n_j, n_k)$  akan memiliki panjang yang sama, dan kemudian menentukan berapa banyak dari geodesik ini yang mengandung aktor  $i$ , untuk semua yang berbeda indeks  $i, j, k$ .

*Betweenness of centrality* aktor adalah jumlah probabilitas bahwa nilai minimum adalah 0 ketika  $n_i$  jatuh pada tidak ada *geodesic*. Dan kemudian, jumlah pasangan aktor yang tidak termasuk  $n_i$  adalah nilai maksimum  $(g - 1)(g - 2)/2$ . Dengan demikian, nilai *betweenness* aktor adalah antara 0 dan 1 sebagai formulasi dalam model berikut.

$$C'_B(n_i) = C_B(n_i) / [(g - 1)(g - 2)/2] \dots\dots\dots (2-8)$$

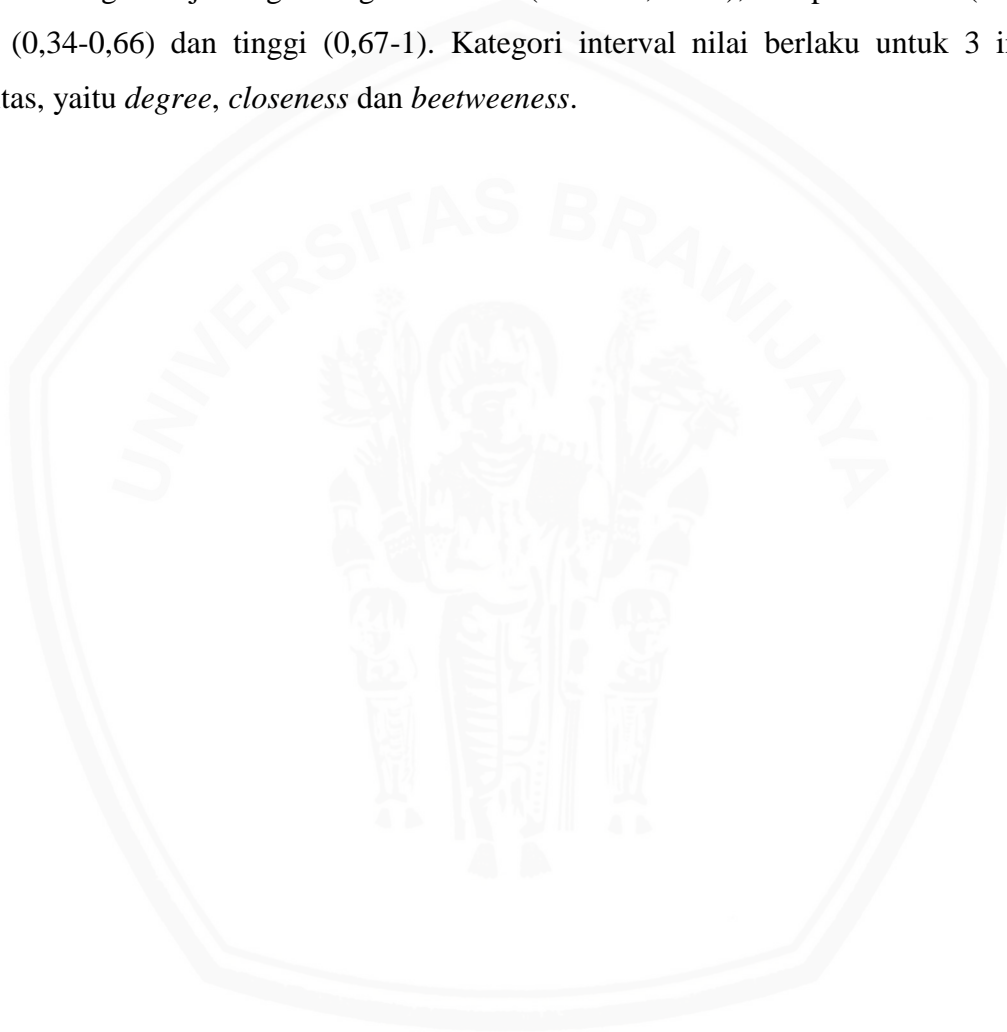
Sama halnya dengan *degree centrality*, indeks *betweenness* dapat dihitung bahkan walaupun graf tidak terhubung atau berbeda dari indeks *closeness* yang harus dicapai aktor dalam jaringan.

Nilai *betweenness* 0, menunjukkan bahwa setiap responden bersebelahan (*adjacent*) dengan setiap responden lain dan tidak satupun dari mereka menempati posisi mediator yang tidak ada jalur terpendek antara pasangan aktor melalui aktor lain. Jadi, dalam contoh ini, tidak ada responden yang memiliki pengaruh interpersonal yang lebih banyak pada yang lain karena tidak ada responden yang berperan sebagai "aktor di tengah".

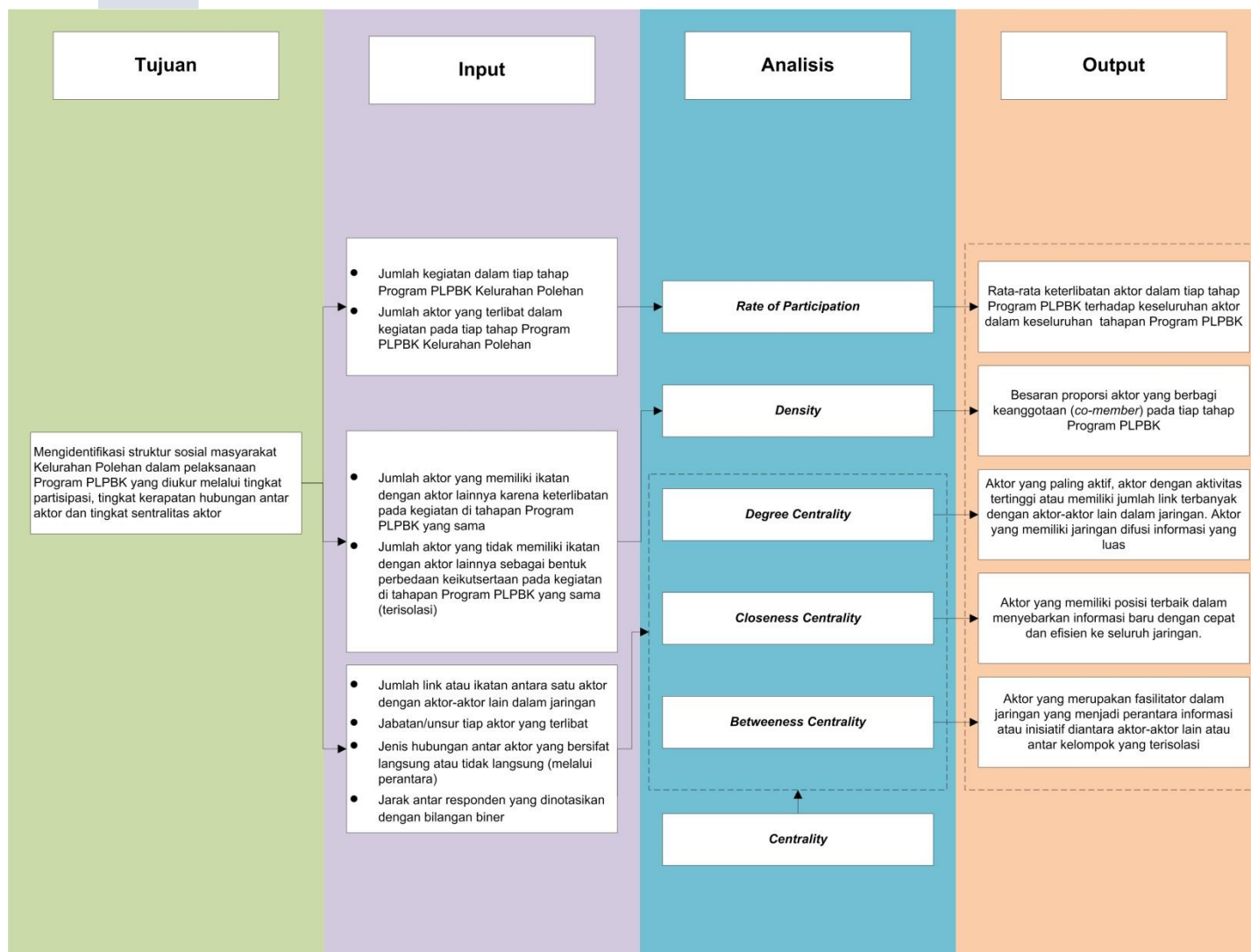
Merujuk pada Brandes, et.al (2006), *closeness centrality* dan *betweenness centrality* didasarkan pada jarak *path* terpendek (jarak *geodesic*). Selain itu, Borgatti dan Everett (2002) mendefinisikan matriks jarak *geodesic* sebagai matriks jarak *geodesic* diantara pasangan *node*. Itu adalah jumlah *link* di jalur terpendek diantara mereka. Oleh karena itu,

pengaruh atau komunikasi dari setiap jenis satu *node* pada penurunan lain dengan jarak di antara mereka. Oleh karena itu, matriks jarak geodesik dapat digunakan sebagai indeks pengaruh atau kohesi. Sebagai akibatnya, seorang aktor memiliki *closeness centrality* yang tinggi ketika jarak total (dan karena itu juga rata-rata) aktor untuk semua aktor lainnya kecil, sementara aktor memiliki *betweenness centrality* yang tinggi ketika aktor berada di jalur terpendek yang menghubungkan pasangan yang lain.

Nilai indeks sentralitas berkisar antara 0 dan 1 (Wasserman & Faust, 1994). Tingkat sentralitas dibagi menjadi tiga kategori interval (Ari et.al, 2013), meliputi rendah (0-0,33), sedang (0,34-0,66) dan tinggi (0,67-1). Kategori interval nilai berlaku untuk 3 indeks sentralitas, yaitu *degree*, *closeness* dan *betweenness*.



### 3.7 Kerangka Analisis



Gambar 3.5 Kerangka Analisis Penelitian

### 3.8 Desain Survei

Tabel 3.6 Desain Survei

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Parameter	Indikator	Data yang Dibutuhkan	Metode pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Output
Mengidentifikasi struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK berdasarkan tingkat partisipasi, kerapatan hubungan dan sentralitas.	Jaringan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Density</i></li> <li>• <i>Rate of Participation</i></li> <li>• <i>Centrality</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Degree centrality</i></li> <li>▪ <i>Betweenness centrality</i></li> <li>▪ <i>Closeness centrality</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Density</i>: jumlah total hubungan relasi berbanding dengan total kemungkinan hubungan relasi yang terjadi</li> <li>• <i>Rate of participation</i>: Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pada tiap tahapan pelaksanaan Program PLPBK</li> <li>• <i>Centrality</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Degree</i>: posisi suatu aktor yang memiliki banyak relasi langsung atau jumlah hubungan dengan aktor-aktor lain dalam jaringan</li> <li>▪ <i>Closeness</i>: kedekatan antar aktor yang memiliki jalur komunikasi lebih pendek (<i>shortest path</i>)</li> <li>▪ <i>Betweenness</i>: Jumlah kehadiran seorang aktor dalam <i>geodesic</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendah = 0 – 0,33</li> <li>• Sedang = 0,34 – 0,66</li> <li>• Tinggi = 0,67 – 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kegiatan pada tiap tahapan dalam pelaksanaan program PLPBK</li> <li>• Jumlah individu masyarakat yang memiliki ikatan dengan individu masyarakat yang lain</li> <li>• Jumlah individu masyarakat yang tidak memiliki ikatan dengan individu masyarakat yang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei sekunder</li> <li>• Survei primer <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kuesioner</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Social Network Analysis</i></li> </ul>	Struktur sosial masyarakat Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan program PLPBK yang dilihat dari jumlah rata-rata jenis aktivitas, tingkat partisipasi masyarakat dan peran aktor sentral ( <i>key person</i> )

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Parameter	Indikator	Data yang Dibutuhkan	Metode pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Output
			( <i>shortest path</i> ) setiap pasangan aktor lainnya dibandingkan dengan jumlah <i>geodesic</i> pasangan aktor tersebut dalam jaringan.					





*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kelurahan Polehan**

##### **4.1.1 Karakteristik Fisik Dasar Kelurahan Polehan**

###### **A. Letak Geografis**

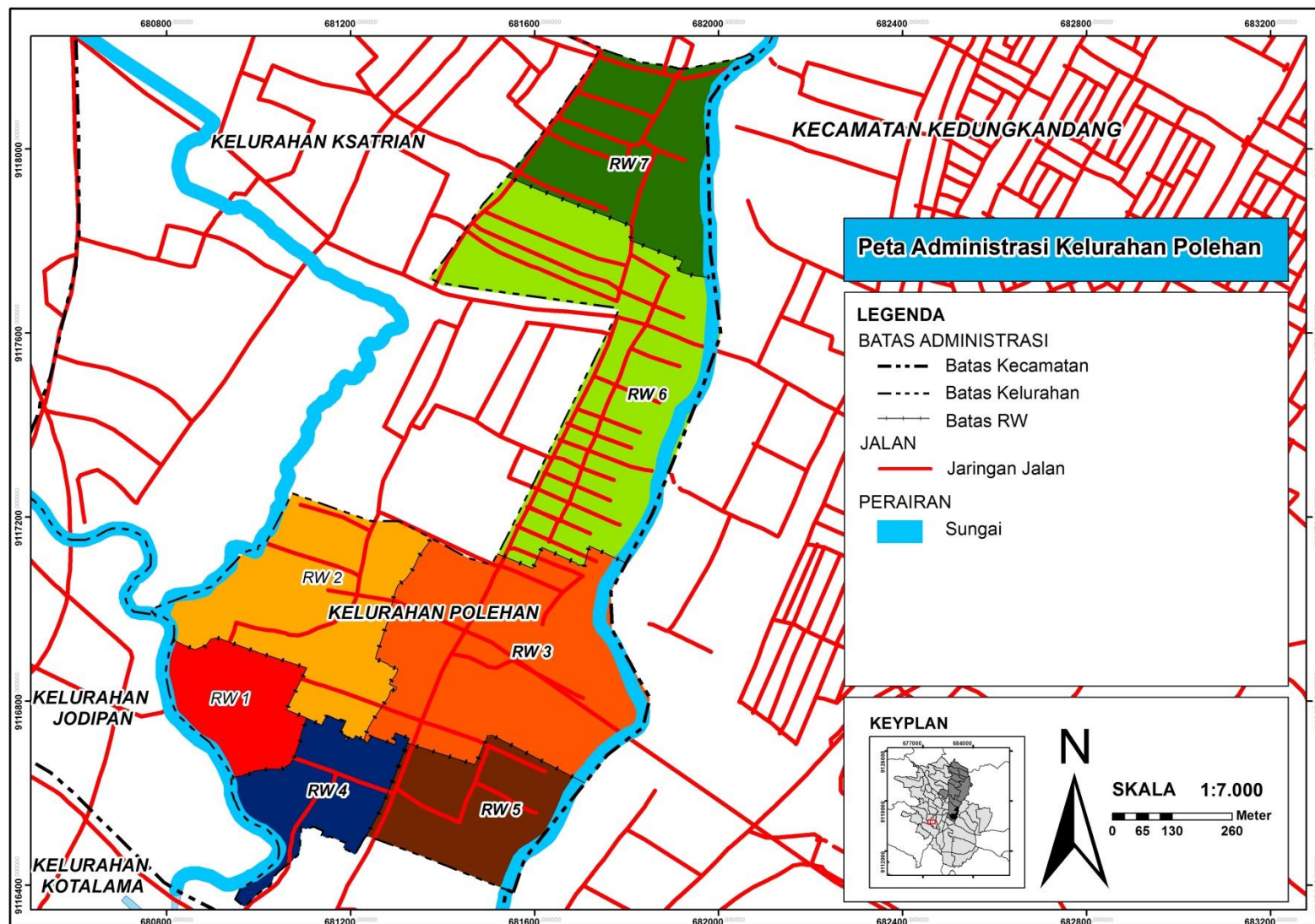
Kelurahan Polehan merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Blimbing, mempunyai wilayah seluas 101,4 Ha. Kelurahan Polehan memiliki 7 RW dan 74 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bunulrejo
- Sebelah Timur : Sungai Bango dan Kelurahan Kedungkandang
- Sebelah Selatan : Sungai Brantas dan Kelurahan Jodipan
- Sebelah Barat : Kelurahan Ksatrian dan Kelurahan Jodipan

Sementara untuk orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan Kelurahan Polehan adalah:

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Blimbing : 6 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kota Malang : 4 km
- Jarak dari ibukota Provinsi Jawa Timur : 95 km

Kelurahan Polehan berada di pusat Kota Malang merupakan salah satu daerah industri dan perdagangan, memiliki dominasi penggunaan lahan berupa perdagangan dan jasa, letaknya yang terhubung langsung dengan akses jalan utama Kota Malang. Sebagian besar lahan permukiman Kelurahan Polehan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Wilayah yang jauh dari jalan utama merupakan kawasan permukiman yang padat



Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Kelurahan Polehan

## B. Kondisi Topografi

Dilihat dari kondisi topografi wilayah BWP Malang Timur Laut, secara topografis berada pada wilayah dengan ketinggian antara 500-600 m di atas permukaan laut (mdpl), Kelurahan Polehan berada pada ketinggian 446 m diatas permukaan air laut (mdpl). Kemiringan tanah menurun ke arah Timur dan Selatan, sedangkan di sebelah Selatan Kali Mewek miring ke arah Utara. Besaran kemiringan rata-rata adalah 0–8%.

## C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di wilayah Kelurahan Polehan sama seperti kondisi klimatologi Kota Malang pada umumnya. Berdasarkan sistem Schimdt dan Ferguson Kota Malang memiliki tipe iklim C. Kelurahan Polehan mempunyai temperatur suhu udara rata-rata berkisar antara 24° - 36° C. Kondisi klimatologi wilayah BWP Malang Timur Laut pada tahun 2016 mendukung pengembangan kegiatan perkotaan di wilayah tersebut dengan curah hujan di BWP Malang Timur Laut sebanyak 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan adalah 180 hari.

## D. Kondisi Hidrologi

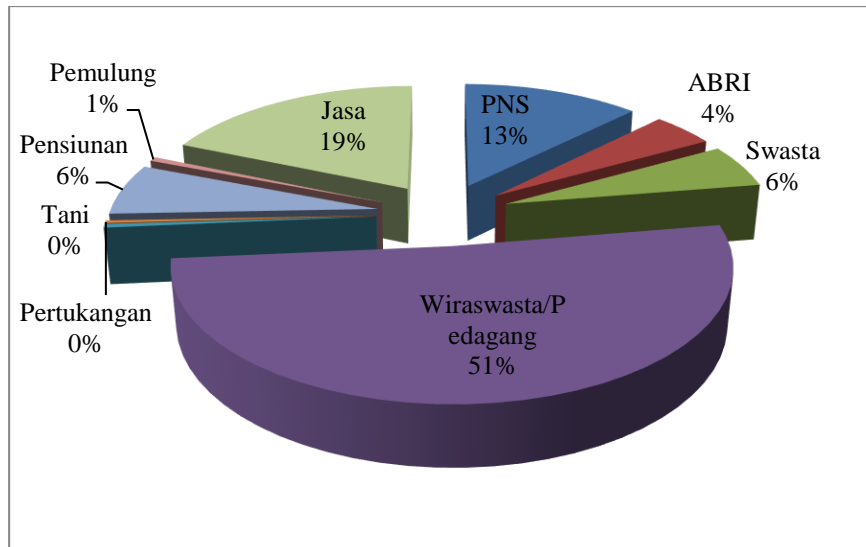
Kondisi hidrologi di Kelurahan Polehan terdiri dari air permukaan yang berupa sungai dan air tanah yang berupa sumur. Secara umum kondisi hidrologi cukup memadai oleh adanya sungai besar dan sungai kecil yang mendukung drainase kota. Kedalaman air tanah memadai untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Kelurahan Polehan dialiri Sungai Brantas di sebelah Selatan dan Anak Sungai Bango di bagian Timur.

### 4.1.2 Karakteristik Kependudukan Kelurahan Polehan

Jumlah penduduk Kelurahan Polehan pada tahun 2017 awal tercatat 17.294 jiwa dan 4.318 KK, dengan rincian komposisi penduduk 9.175 laki-laki dan 8.119 perempuan. Sebanyak 14. 206 jiwa berada pada usia produktif. Berikut penjelasan komposisi penduduk Kelurahan Polehan berdasarkan mata pencaharian dan pendidikan.

#### A. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kelurahan Polehan bekerja pada berbagai macam profesi, baik yang bekerja di pemerintahan, swasta ataupun wiraswasta. **Gambar 4.2** berikut merupakan jumlah penduduk Kelurahan Polehan berdasarkan mata pencahariannya.

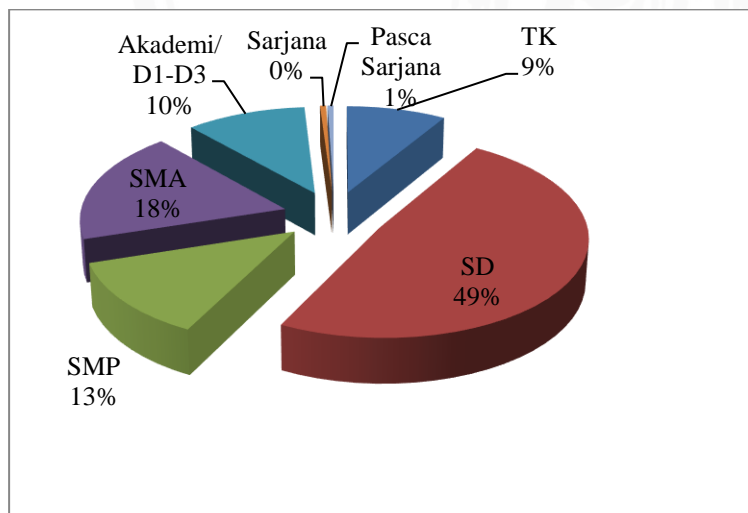


*Gambar 4.2* Komposisi Penduduk Kelurahan Polehan Berdasarkan Pekerjaan  
Sumber: Monografi Kelurahan Polehan, 2016

Sebagian besar penduduk Kelurahan Polehan bekerja sebagai wiraswasta/pedagang. Penduduk Kelurahan Polehan yang bekerja sebagai wiraswasta sejumlah 2.267 orang. Kemudian kedua terbanyak, bekerja pada sektor jasa, yaitu sejumlah 822 orang.

#### **B. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Komposisi penduduk Kelurahan Polehan ditinjau dari latar belakang pendidikan, dibagi menjadi 7 kategori jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Secara detail, **Gambar 4.3** berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya.



*Gambar 4.3* Komposisi Penduduk Kelurahan Polehan Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sumber: Monografi Kelurahan Polehan, 2016

Sebagian besar pendidikan akhir yang ditempuh penduduk Kelurahan Polehan merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), yaitu sejumlah 8.878 orang. Kemudian kedua terbesar sebanyak 3.336 orang merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hanya

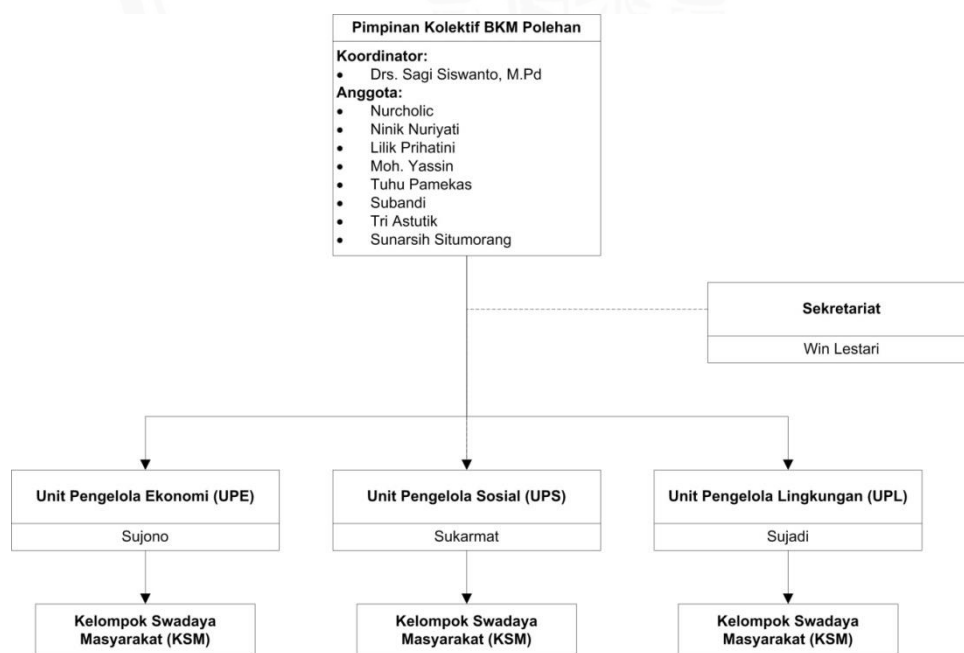


190 orang penduduk yang mampu mengenyam pendidikan tinggi berupa pendidikan sarjana dan pascasarjana.

#### 4.1.3 Gambaran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Polehan

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “BKM Polehan” berawal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) I Tahap 1 yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara bersama, mandiri dan berkelanjutan, melalui suatu pendekatan kelembagaan masyarakat yang berbasis pada prinsip dan nilai-nilai serta penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat di kelurahan sasaran.

Melalui serangkaian proses Pemilihan Calon Anggota BKM di level basis, hingga akhirnya dilaksanakan Pemilihan Anggota di level Kelurahan pada tanggal Oktober 2009, yang diikuti oleh calon anggota BKM hasil pemilihan di level Basis, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Kelurahan, Wakil lembaga NGO, warga peduli dan lain-lain. Sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BKM di level Kelurahan, dilaksanakan penyepakatan AD/ART BKM. Warga masyarakat yang hadir memasuki bilik-bilik tertutup untuk memilih anggota BKM dan memasukkan kertas pilihan ke Kotak Suara. Setelah semua warga yang hadir memberikan suaranya, dilakukan perhitungan suara dan perangkingan jumlah suara bagi calon anggota BKM. Hasil perangkingan itu menjadi dasar untuk menentukan anggota BKM yang terpilih dan Koordinator BKM. Gambar 4.4 berikut merupakan struktur kepengurusan BKM Polehan.



Gambar 4.4 Struktur Kepengurusan BKM Polehan

Rencana program yang tertuang dalam PJM Pronangkis (Program Jangka Menengah penanggulangan kemiskinan) Kelurahan Polehan adalah hasil kesepakatan bersama antara BKM, Unit Pengelola dan Kelompok Peduli (seperti LPMK, RW/RT, PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu) dan dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Unit Pengelola di BKM.

Setiap program sesuai bidangnya ditempatkan dan dikoordinasikan pada unit pengelola yang dibentuk di BKM, yaitu Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Ekonomi (UPE).

Dalam pelaksanaan program akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan data masyarakat miskin penerima manfaat, kemudian dibentuk KSM penerima manfaat, dan panitia pendamping sebagai tim ahli/supervisi pelaksana program.

Panitia pendamping berasal dari Unit Pengelola, tenaga sukarelawan yang berkompeten di bidangnya, kelompok peduli, dan pengurus lembaga masyarakat seperti LPMK, RW/RT, PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu

Berdasarkan pada hasil pemetaan swadaya dan PJM Pronangkis, masyarakat diajak melakukan diskusi kelompok terarah/FGD tentang perlunya membentuk kelompok-kelompok swadaya. Diskusi dimulai dari tingkat RT atau RW tergantung kondisi kewilayahannya

Calon-calon anggota KSM melakukan diskusi terarah di tingkat RW yang difasilitasi oleh BKM, UPK, dan kader masyarakat.

#### **4.1.4 Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Polehan**

Berdasarkan SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015 terkait dengan sebaran permukiman kumuh di Kota Malang, sebanyak 29 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang terkategori sebagai perumahan dan permukiman kumuh, termasuk salah satu diantaranya adalah Kelurahan Polehan. Total luas permukiman kumuh di Kota Malang berdasarkan SK tersebut, yaitu sebesar 608,6 Ha, dimana Kelurahan Polehan memiliki luas 3,19 Ha atau 0,52% dari luas permukiman kumuh di Kota Malang dan 7,56% dari luas lingkungan permukiman Kelurahan Polehan (2016).

Dokumen penyusunan strategi pencapaian akses universal 100-0-100 Kota Malang tahun 2017 memuat hasil perhitungan analisis permukiman kumuh pada seluruh 29 kelurahan yang terindikasi kumuh. Analisis permukiman kumuh didasarkan pada beberapa aspek, kriteria, indikator dan parameter yang juga digunakan dalam pembuatan *spider web* dari *baseline* permukiman kumuh Kota Malang pada tahun 2015 dengan data penanganan

terkait pengurangan kumuh di Kota Malang yang berhasil dikumpulkan sampai pada tahun 2017. *Spider web* digunakan untuk melihat diagram yang menggambarkan kondisi sebelum dan pasca penanganan sehingga diketahui capaian penanganan kumuh di Kelurahan Polehan.

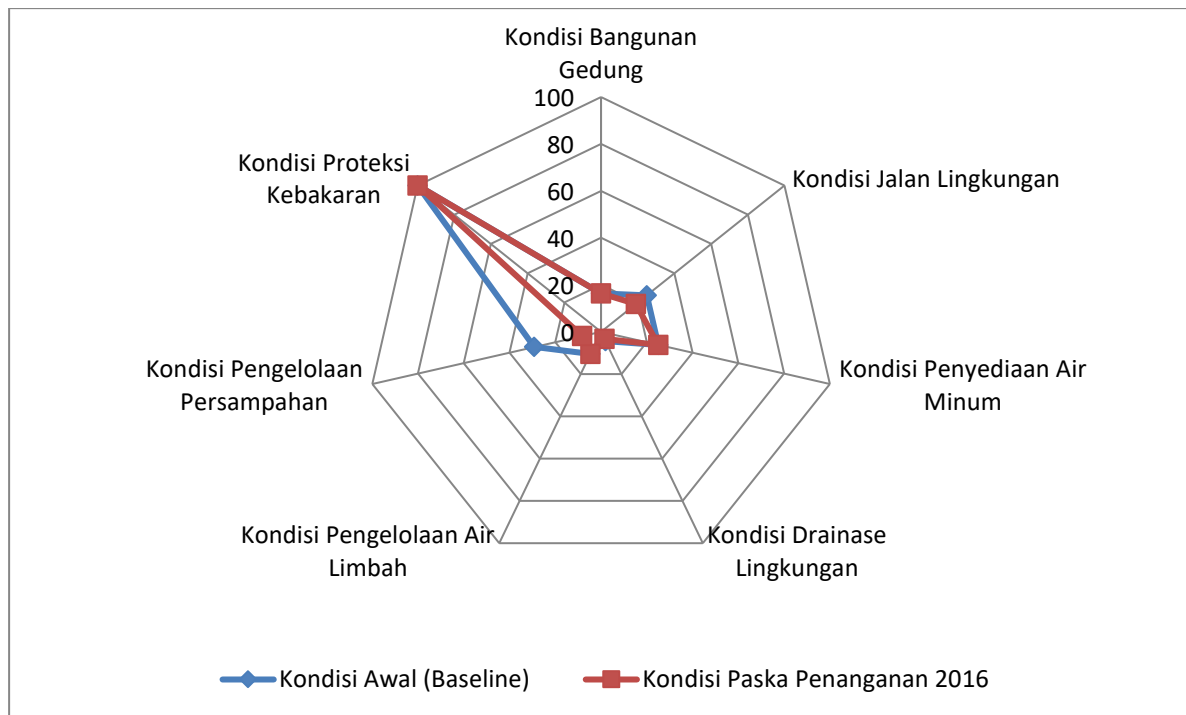
Kelurahan Polehan telah mendapatkan program/kegiatan yang masuk dalam penanganan permukiman kumuh pada aspek jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Berdasarkan data yang diperoleh dan diinputkan pada perhitungan penanganan kumuh maka didapatkan persentase penanganan kumuh pada kondisi awal, kondisi paska penanganan, dan besaran pengurangan. Berikut Tabel 4.1 merupakan kesimpulan capaian penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Polehan.

*Tabel 4.1* Kesimpulan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Polehan

No	Rerata Kondisi	Persen (%) Kondisi Awal (Baseline)	Kondisi Paska Penanganan 2016	Pengurangan
1	Kondisi Bangunan Gedung	16,33	16,33	-
2	Kondisi Jalan Lingkungan	24,93	19,02	5,91
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	25,00	24,99	0,01
4	Kondisi Drainase Lingkungan	4,40	3,31	1,09
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	10,50	10,50	-
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	29,22	8,33	20,89
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	100,0	100,00	-

Sumber: Dokumen Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 Kota Malang, 2017

Berdasarkan kondisi pencapaian tersebut, Gambar 4.5 berikut merupakan *Spiderweb* penanganan kumuh di Kelurahan Polehan.



Gambar 4.5 Spiderweb Penanganan Kumuh Kelurahan Polehan

Sumber: Dokumen Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal 100-0-100 Kota Malang, 2017

Tabel 4.2 berikut merupakan berbagai komponen realisasi kegiatan penanganan permukiman kumuh RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.2 Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh RW 04 Kelurahan Polehan

No	Komponen	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan
1	Ruang Terbuka Publik	Ruang Terbuka Hijau (Taman lingkungan, Taman rekreasi/hiburan)	Gg. Permadi	480	m <sup>2</sup>
			Gg. Permadi	20	m <sup>2</sup>
			Gg. Permadi	480	m <sup>2</sup>
		Sarana penunjang taman/RTH (pagar gapura, bangku, papan info, prasasti, lampu taman, pot)	Gg. Permadi	1	unit
			Gg. Permadi	11	unit
2	Jalan Lingkungan	Jalan <i>paving block</i>	Semua RT, kecuali RT 08	928	meter
			RT 09	377	meter
		Tembok penahan (siring/plengsengan/bronjong)	RT 09	18	meter
			RT 10	30	meter
		Penerangan umum	Gg. Permadi	12	unit
3	Pengelolaan Persampahan	Bak sampah 3R	RW 04	290	unit
		Gerobak/Motor sampah	RW 04	2	unit
4	Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan	RT 05	65	meter
			RT 09	166	meter
		Penampung Air Hujan (PAH)	RT 05	63	meter
			RT 09	73	meter
		Saluran pembuangan limbah Rumah Tangga, industri, sarana komersial, sarana umum ( <i>green water</i> )	RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11	468	meter
			RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	209	meter
5	Penyediaan Air Minum	Sumur Bor	RT 03	1	unit
		Perpipaan	RT 03, 04, 05, 07	500	meter
			RT 01, 03, 04, 06	400	meter
		Bak Pembagi	RT 03	1	unit

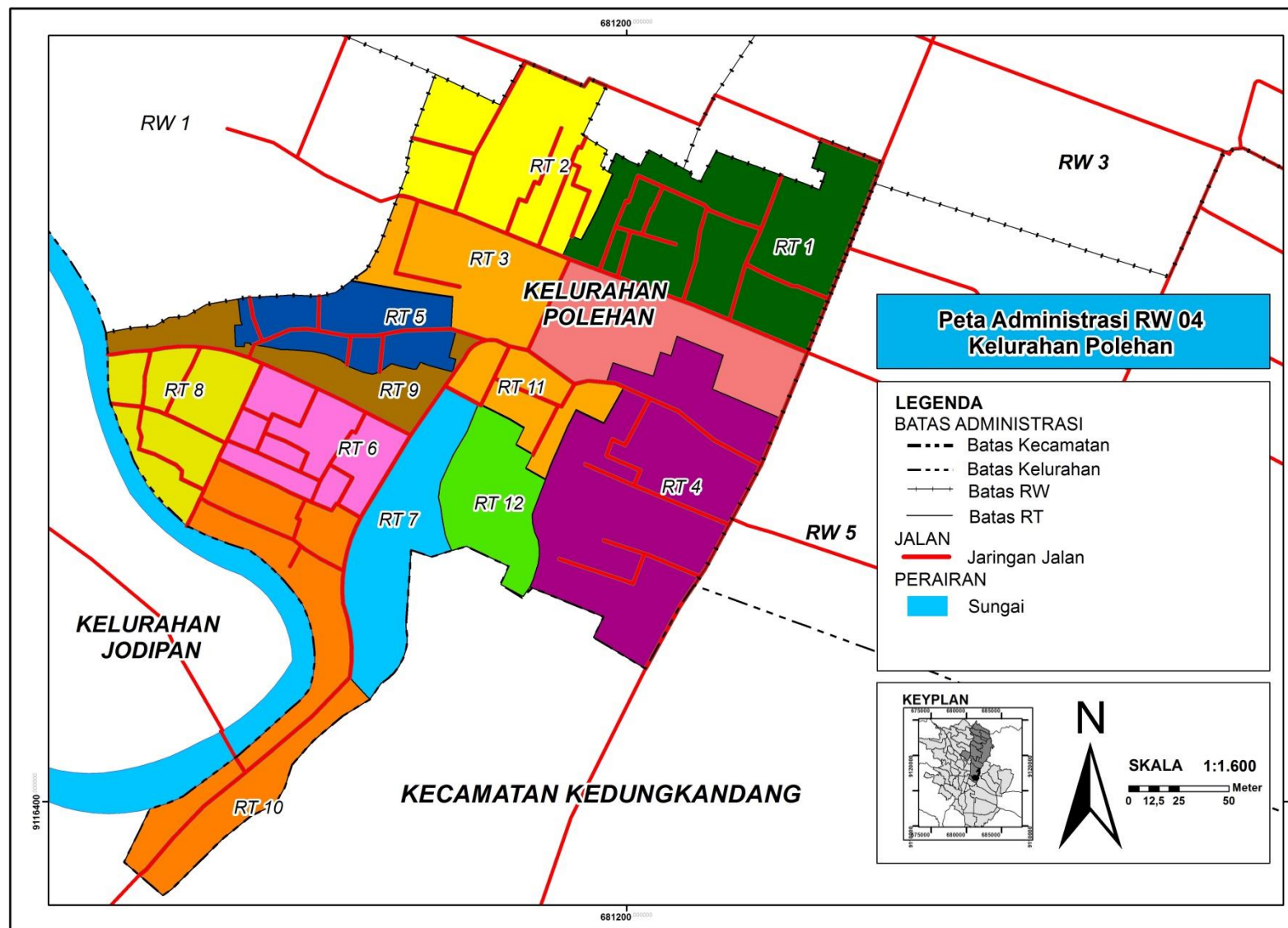
Sumber: Kegiatan Penanganan Kumuh Kota Malang, 2017



#### **4.2 Gambaran Umum Permukiman Kumuh RW 04 Kelurahan Polehan**

Berdasarkan hasil usulan masyarakat Kelurahan Polehan dan Pemerintah Kota Malang kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, RW 04 terpilih sebagai kawasan prioritas Program PLPBK yang didasarkan pada pertimbangan karakteristik permukiman yang padat, kumuh, dan kantong kemiskinan. Gambar 4.6 berikut letak administrasi RW 4 Kelurahan Polehan.





Gambar 4.6 Wilayah Administrasi RW 04 Kelurahan Polehan

Berikut disajikan profil permukiman RW 04 Kelurahan Polehan pada beberapa aspek berdasarkan *Baseline Data* 100-0-100 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Malang.

#### 4.2.1 Kondisi Demografis

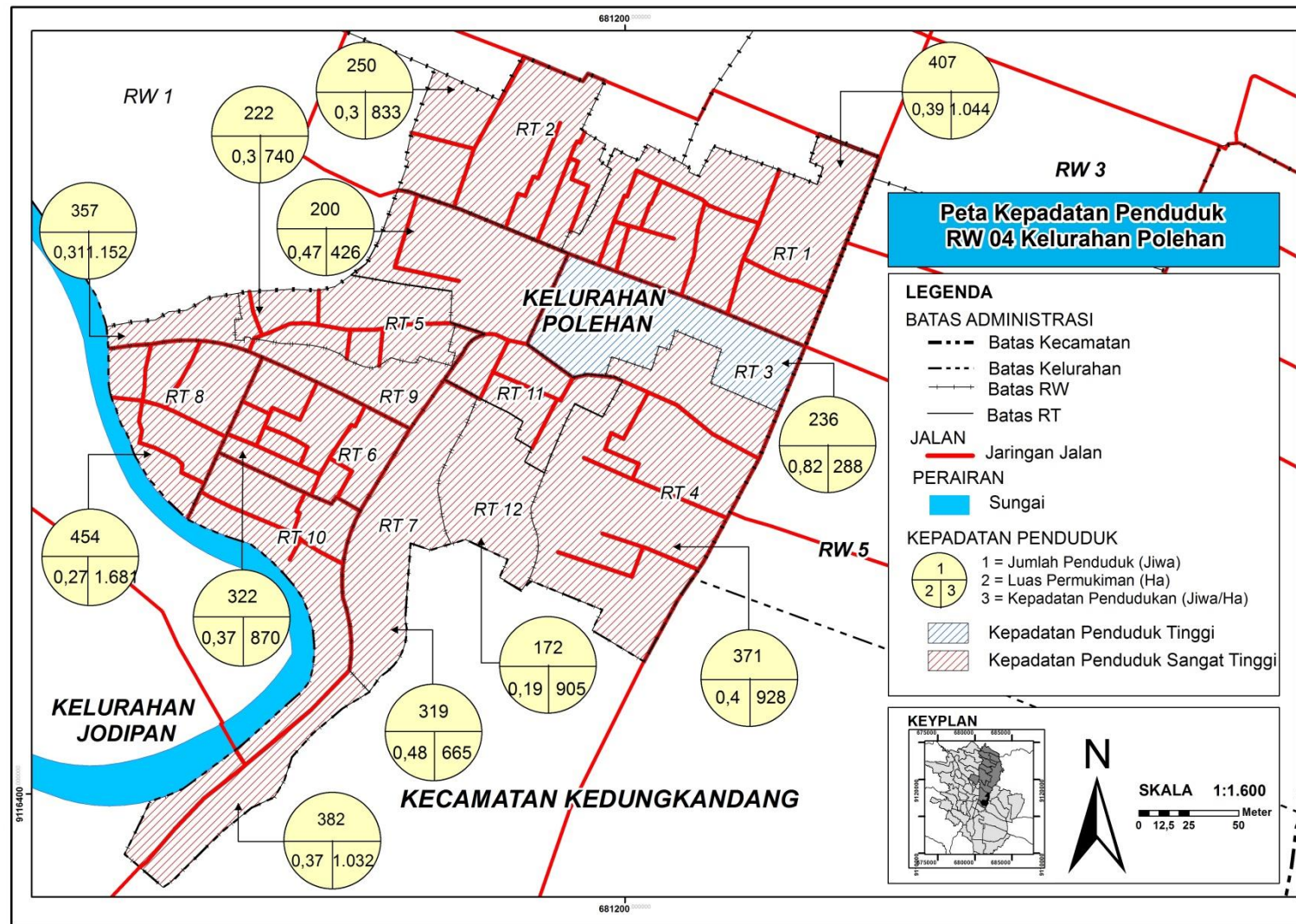
Jumlah penduduk RW 04 Kelurahan Polehan tercatat sebanyak 3.692 jiwa yang terdiri atas 1.726 penduduk laki-laki dan 1.966 penduduk perempuan. Persebaran penduduk tertinggi terletak pada RT 08, dengan jumlah penduduk 454 jiwa, atau mencapai 12,3% dari jumlah penduduk total. Sedangkan persebaran terendah terletak pada RT 12, yang hanya berjumlah 172 jiwa atau hanya 4,66% dari jumlah penduduk total.

Kepadatan penduduk jika merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, semua RT terkategori sangat tinggi (>400 jiwa/Ha), kecuali RT 03 yang terkategori tinggi (201-400 jiwa/Ha). Tabel 4.3 berikut merupakan profil detail kondisi demografis RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.3 Kondisi Demografis RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk			Luas Permukiman	Kepadatan Penduduk	Kategori Kepadatan Penduduk
	KK	L/P (Jiwa)	Total	%	Ha	Jiwa/Ha	
1	97	195/212	407	11,02	0,39	1.044	Sangat Tinggi
2	63	122/128	250	6,77	0,3	833	Sangat Tinggi
3	56	113/123	236	6,39	0,82	288	Tinggi
4	98	170/201	371	10,05	0,4	928	Sangat Tinggi
5	67	113/109	222	6,01	0,3	740	Sangat Tinggi
6	78	164/158	322	8,72	0,37	870	Sangat Tinggi
7	78	135/184	319	8,64	0,48	665	Sangat Tinggi
8	106	200/254	454	12,30	0,27	1.681	Sangat Tinggi
9	88	170/187	357	9,67	0,31	1.152	Sangat Tinggi
10	91	171/211	382	10,35	0,37	1.032	Sangat Tinggi
11	53	94/106	200	5,42	0,47	426	Sangat Tinggi
12	45	79/93	172	4,66	0,19	905	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>	<b>920</b>	<b>1726/1966</b>	<b>3692</b>	<b>100</b>	<b>4,67</b>	<b>10563</b>	
<b>Rata-Rata</b>	<b>77</b>	<b>144/164</b>	<b>307</b>	<b>8,33</b>	<b>0,39</b>	<b>1.625</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016



Gambar 4.7 Peta Kepadatan Penduduk RW 04 PLPBK Kelurahan Polehan



#### 4.2.2 Kondisi Bangunan Hunian

Berdasarkan klasifikasi tingkat kepadatan untuk kota besar dan kota metropolitan, kepadatan bangunan tiap RT terkategori rendah ( $<250$  unit/Ha). Kepadatan bangunan dihitung dengan membagi jumlah total bangunan tiap RT dengan jumlah luas lahan di RT tersebut.

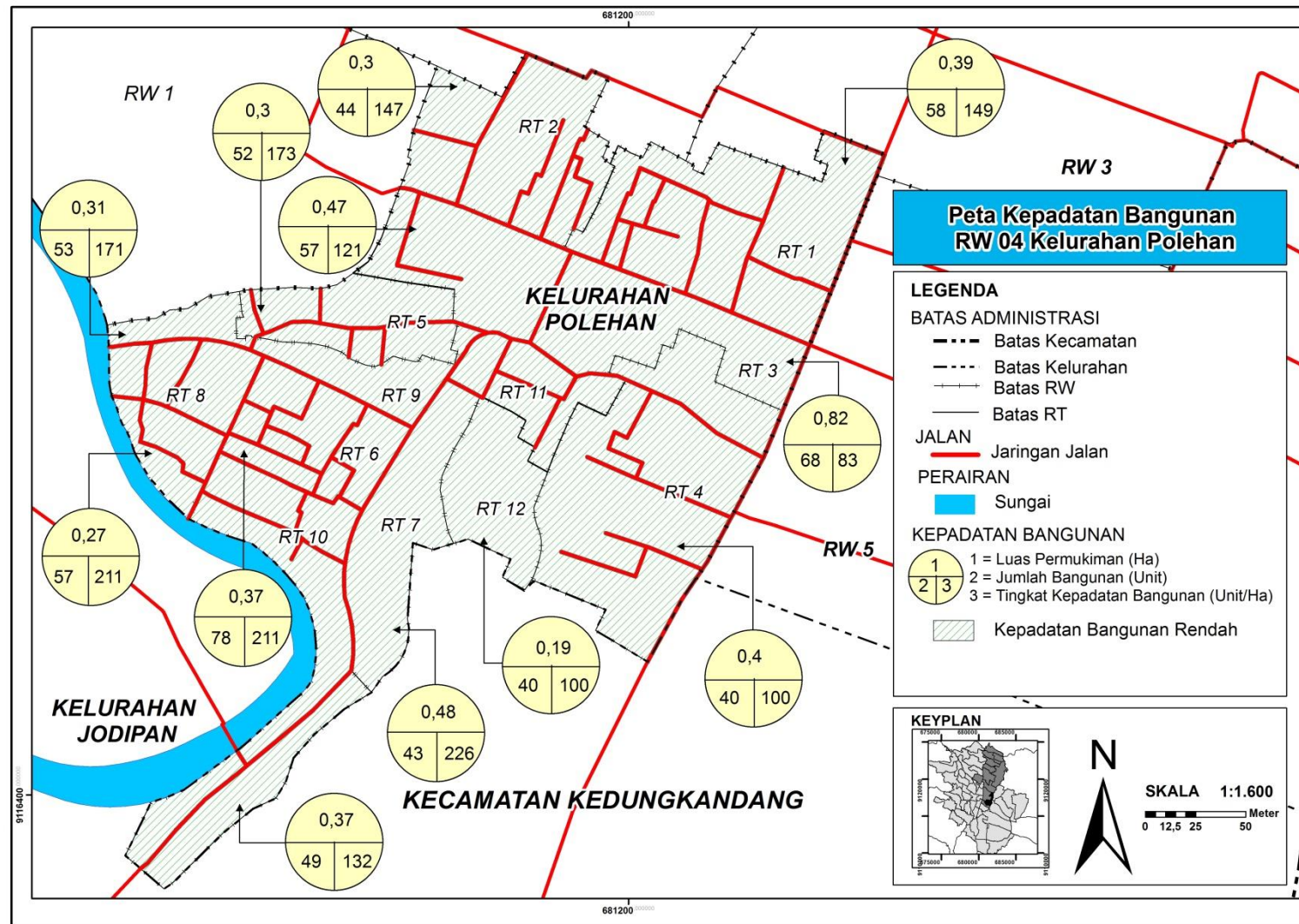
Berdasarkan aspek kelayakan bangunan, yaitu 91,25% rumah tangga memiliki lantai hunian yang layak. Lantai bangunan hunian dinilai layak ketika memiliki luas lantai  $> 7,2$  meter<sup>2</sup>/ jiwa. 99,5% bangunan hunian rumah tangga dinilai layak, karena memiliki kondisi atap terluas tidak memiliki kebocoran, dinding terluas dalam kondisi baik dan lantai terluas berjenis bukan tanah. Tabel 4.4 merupakan berikut profil detail kondisi bangunan RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.4 Kondisi Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Kepadatan Bangunan Hunian			Jumlah Rumah Tangga	Kelayakan Bangunan Hunian			
	Luas Permukiman	Jumlah Bangunan	Tingkat Kepadatan Bangunan		Bangunan Hunian memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m <sup>2</sup> / Jiwa		Kondisi Atap Lantai Dinding Sesuai persyaratan teknis	
					Ha	Unit	Unit/Ha	Rumah Tangga
1	0,39	58	149	95	86	91	90	95
2	0,3	44	147	63	61	97	63	100
3	0,82	68	83	56	55	98	56	100
4	0,4	40	100	98	95	97	98	100
5	0,3	52	173	67	54	81	67	100
6	0,37	78	211	78	71	91	78	100
7	0,48	78	163	78	73	94	77	99
8	0,27	57	211	106	103	97	106	100
9	0,31	53	171	88	85	97	88	100
10	0,37	49	132	91	74	81	91	100
11	0,47	57	121	53	53	100	53	100
12	0,19	43	226	45	32	71	45	100
Jumlah	4,67	677	1.887	918	842	-	912	-
Rata-Rata	0,39	56	157	76	70	91,25	76	99,5

Sumber: Baseline RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016





Gambar 4.8 Peta Kepadatan Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan



Gambar 4.9 Kelayakan Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan

### 4.2.3 Aksesibilitas Lingkungan

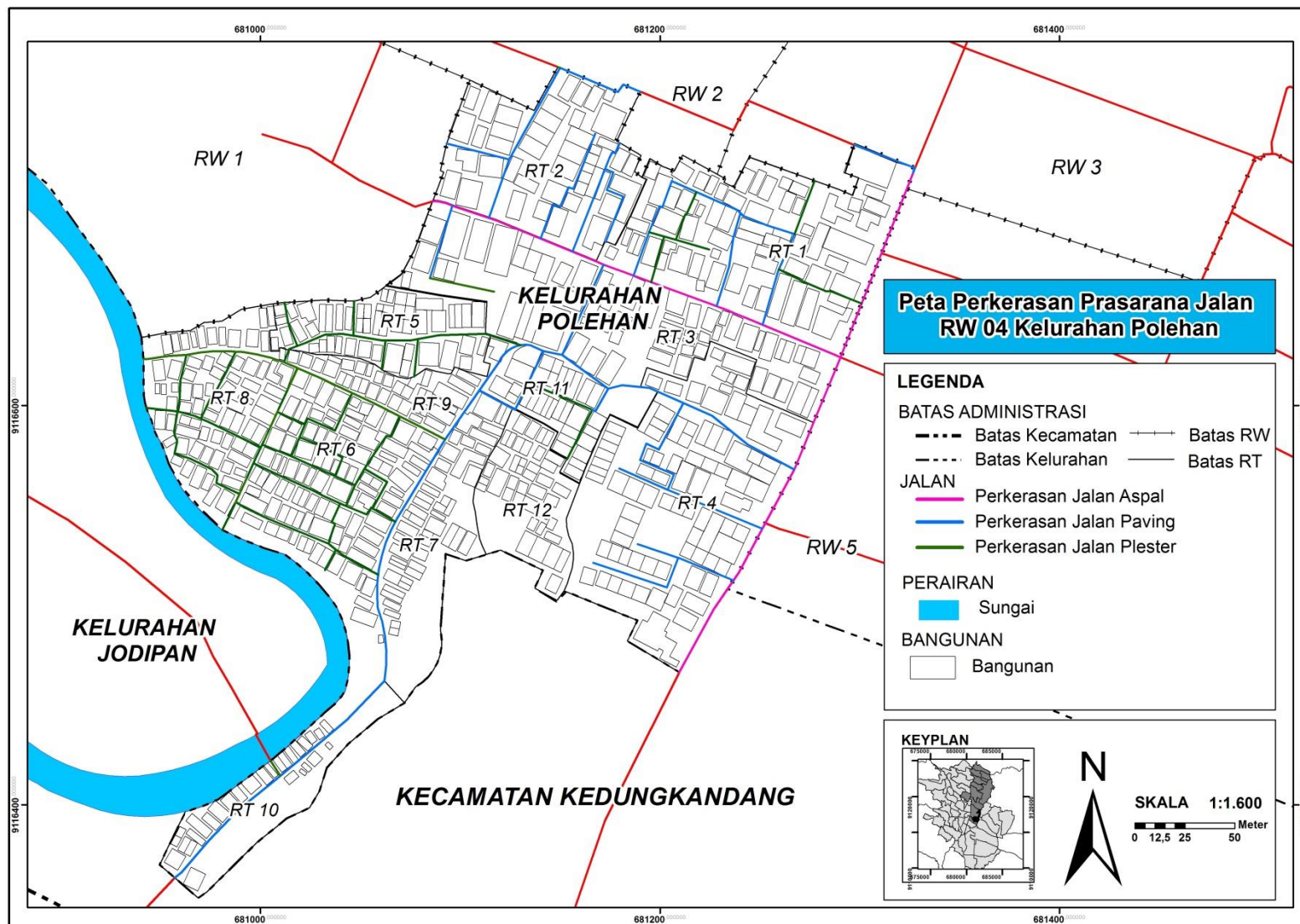
Jalan lingkungan eksisting di RW 04 Kelurahan Polehan memiliki total panjang 4.178 meter. Jaringan jalan eksisting sesuai dengan panjang jaringan jalan lingkungan ideal, sehingga tidak dibutuhkan jaringan jalan baru untuk melayani permukiman. 88,83% kualitas eksisting keseluruhan jalan lingkungan telah sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu memiliki kondisi perkerasan yang baik, serta dilengkapi saluran samping jalan. Tabel 4.5 berikut merupakan profil detail kondisi aksesibilitas lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.5 Kondisi Aksesibilitas Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Jangkauan Jaringan Jalan			Persyaratan Teknis/Kualitas Jalan	
	Jaringan Jalan Lingkungan Eksisting	Panjang Jaringan Jalan Ideal	Persentase Jangkauan Jaringan Jalan	Total panjang keseluruhan Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)	
	meter	meter	%	meter	%
1	700	700	100	430	61
2	194	194	100	164	85
3	500	500	100	410	82
4	326	326	100	256	79
5	287	287	100	287	100
6	560	560	100	560	100
7	282	282	100	282	100
8	229	229	100	225	98
9	237	237	100	237	100
10	375	375	100	230	61
11	306	306	100	306	100
12	182	182	100	182	100
<b>Jumlah</b>	<b>4178</b>	<b>4178</b>	<b>-</b>	<b>3569</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>348,17</b>	<b>348,17</b>	<b>100</b>	<b>297,42</b>	<b>88,83</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016





Gambar 4.10 Perkerasan Prasarana Jalan RW 04 Kelurahan Polehan

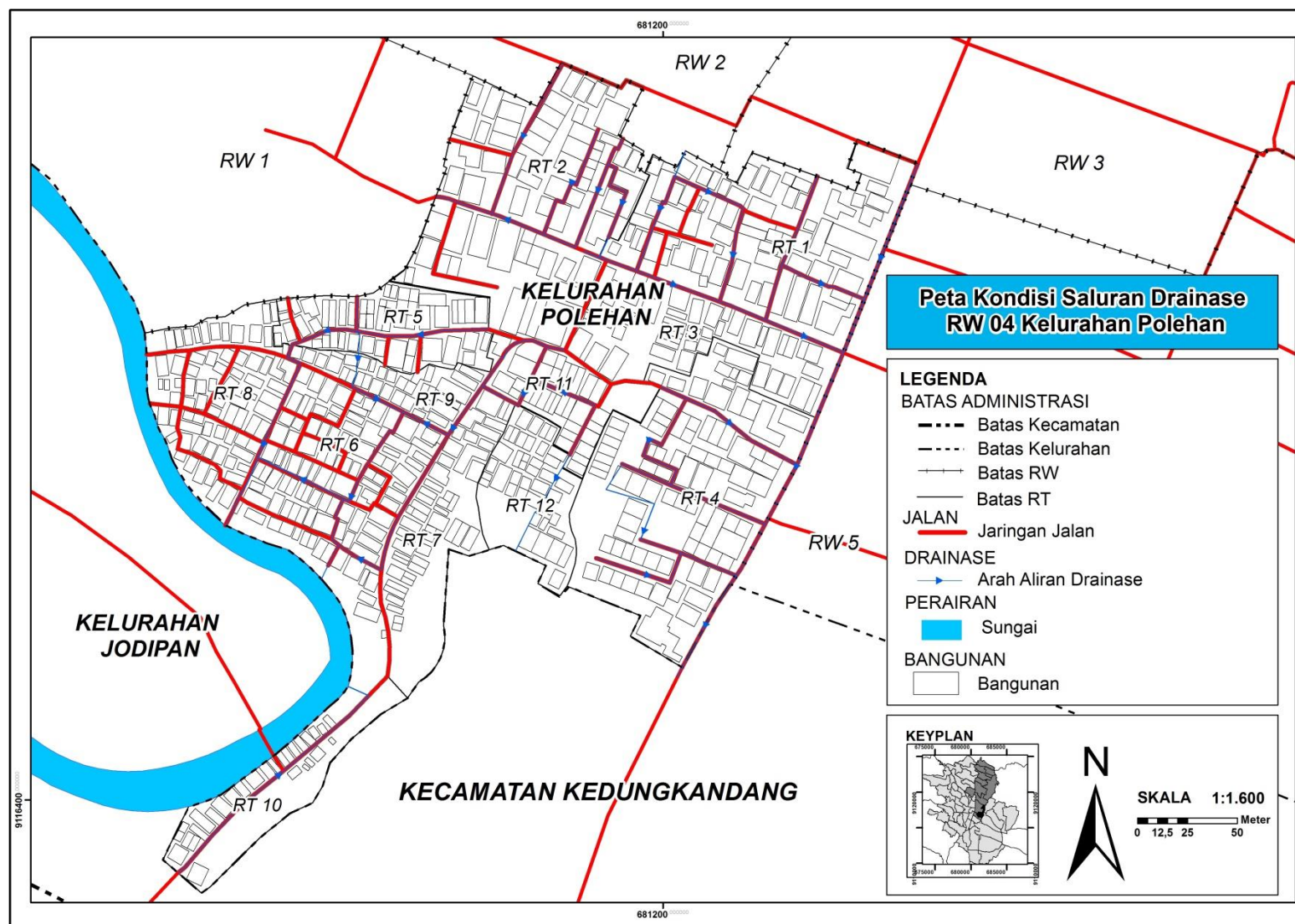
#### 4.2.4 Drainase Lingkungan

Saluran drainase eksisting di RW 04 Kelurahan Polehan memiliki panjang 2.393 meter. RW 04 Kelurahan Polehan tidak memiliki riwayat terjadinya genangan air diatas 30 cm ataupun banjir. Hal ini disebabkan 77,33% kondisi saluran drainase memiliki konstruksi dan fungsi dengan baik. Artinya memiliki kemampuan yang baik dalam mengalirkan limpasan air hujan. 96,88% saluran drainase dinilai bersih, terpelihara dengan baik dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Tabel 4.6 berikut merupakan profil detail kondisi drainase lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.6 Kondisi Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Kejadian Tidak Ada Genangan		Persyaratan Teknis/Kualitas Drainase				
	Luas Area Tidak Ada Genangan (dalam permukiman)		Panjang total drainase eksisting	Panjang drainase dengan kondisi tidak rusak/berfungsi baik		Panjang saluran drainase yang bersih dan tidak bau (terpelihara)	
	ha	%	meter	meter	%	meter	%
1	0,39	100	300	157	52	300	100
2	0,3	100	120	87	73	107	89,17
3	0,82	100	200	140	70	200	100
4	0,4	100	326	276	85	276	85
5	0,3	100	100	90	90	100	100
6	0,37	100	320	121	38	320	100
7	0,48	100	262	187	71	262	100
8	0,27	100	151	151	100	147	97,35
9	0,31	100	193	173	90	193	100
10	0,37	100	220	201	91	200	91
11	0,47	100	151	133	88	151	100
12	0,19	100	50	40	80	50	100
<b>Jumlah</b>	<b>4,67</b>	<b>-</b>	<b>2393</b>	<b>1756</b>	<b>-</b>	<b>2306</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,39</b>	<b>100</b>	<b>199,42</b>	<b>146,33</b>	<b>77,33</b>	<b>192,17</b>	<b>96,88</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016



Gambar 4.11 Peta Saluran Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan



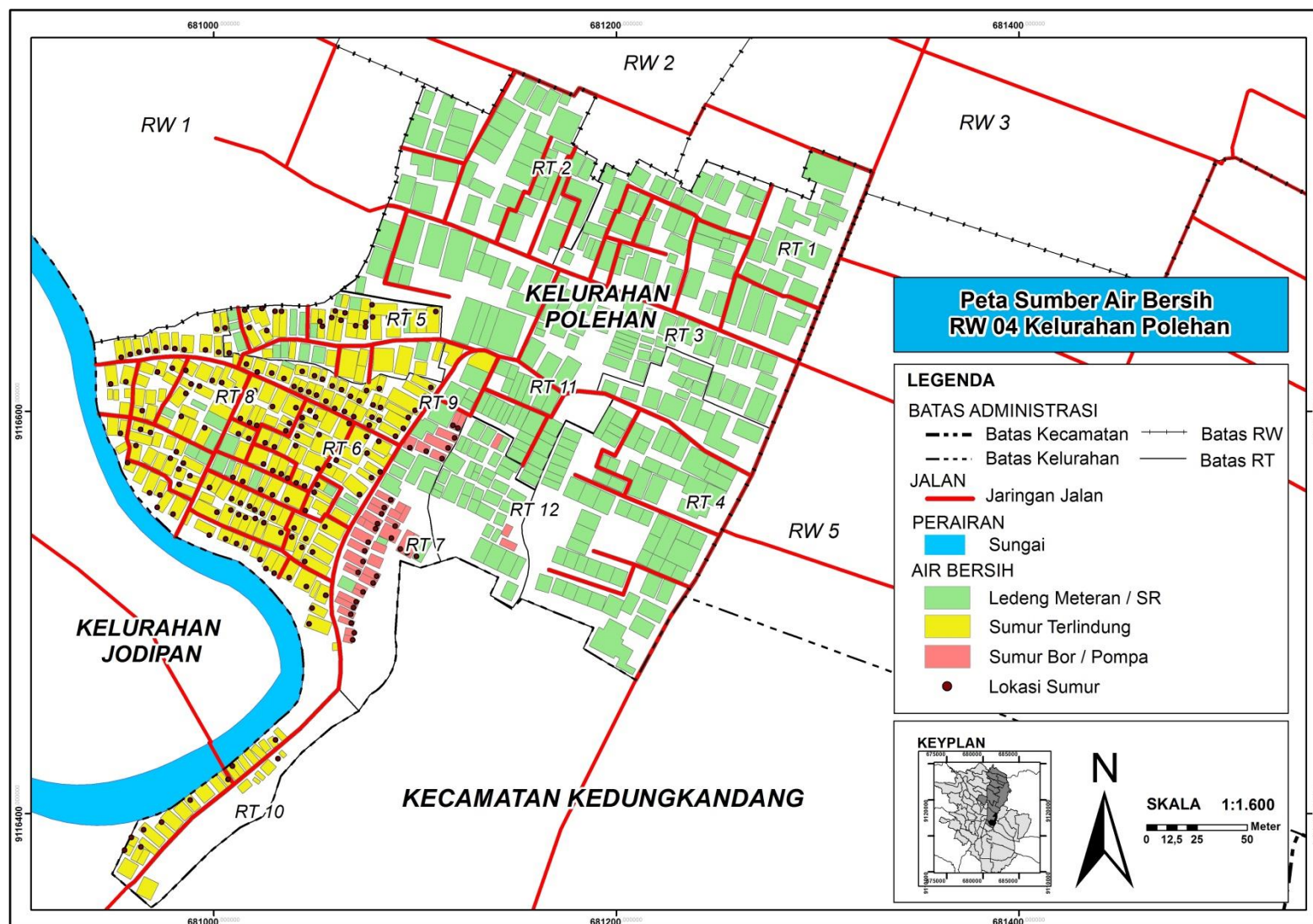
#### 4.2.5 Pelayanan Air Minum

52,98% rumah tangga menggunakan ledeng Sambungan Rumah (SR) sebagai sumber utama air minum, mandi dan cuci. Sedangkan 34% rumah tangga menggunakan sumur terlindung, dan 7,61% lainnya menggunakan sumur bor/pompa. 85,27 rumah tangga sudah tercukupi kebutuhan air untuk minum, mandi dan cuci dengan kebutuhan minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan 20-40 rumah tangga pada tiap RT 6, 7, 8, 9 dan 10 masih terkendala pemenuhan kebutuhan airnya. Pemenuhan kebutuhan hanya tercukupi pada bulan-bulan tertentu, karena mayoritas dari mereka menggunakan sumber utama berupa sumur, baik itu sumur terlindung maupun sumur bor/pompa. Tabel 4.7 berikut merupakan profil detail kondisi pelayanan air minum lingkungan RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.7 Kondisi Pelayanan Air Minum RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Sumber Utama Air Minum, Mandi dan Cuci						Ketercukupan air minum, mandi dan cuci sepanjang tahun			
	Ledeng Meteran / SR		Sumur Terlindung		Sumur Bor / Pompa		Tercukupi		Tercukupi bulan tertentu	
	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
1	95	100	0	0	0	0	95	100	0	0
2	63	100	0	0	0	0	63	100	0	0
3	56	100	0	0	0	0	56	100	0	0
4	98	100	0	0	0	0	98	100	0	0
5	10	15	57	85	0	0	67	100	0	0
6	5	6,4	73	93,6	0	0	53	68	25	32
7	12	15,4	0	0	66	84,6	58	74,4	20	25,6
8	8	7,5	98	92,5	0	0	80	75,5	26	24,5
9	0	0	88	100	0	0	49	55,7	39	44,3
10	0	0	91	100	0	0	53	58,2	38	51,8
11	52	98,1	1	1,9	0	0	52	98,1	1	1,9
12	42	93,3	0	0	3	6,7	42	93,3	3	6,7
<b>Jumlah</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>766</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>36</b>	<b>52,98</b>	<b>34,00</b>	<b>39,42</b>	<b>5</b>	<b>7,61</b>	<b>63</b>	<b>85,27</b>	<b>12</b>	<b>15,57</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016



Gambar 4.12 Penggunaan Air Bersih RW 04 Kelurahan Polehan

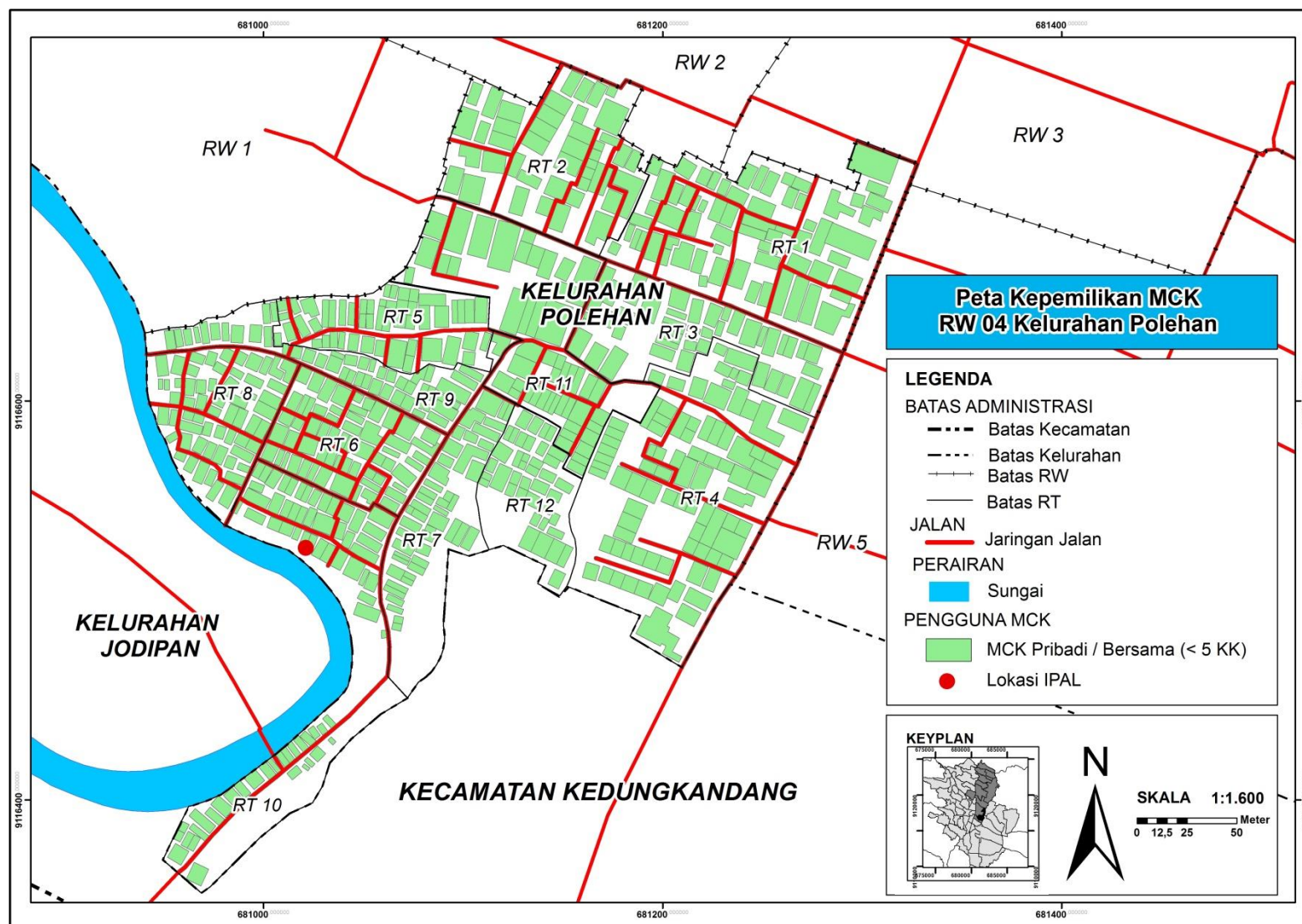
#### 4.2.6 Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi

Seluruh rumah tangga di RW 04 Kelurahan Polehan sudah memiliki akses terhadap sarana tempat Buang Air Besar (BAB) baik berupa jamban pribadi dan atau jamban bersama yang dimiliki oleh <5 KK. Semua rumah tangga juga sudah melakukan pengelolaan air limbah atau *grey water* dengan menggunakan jenis kloset berjenis leher angsa, bukan lagi cumplung atau cubluk. Selanjutnya, sebanyak 73,67% rumah tangga sudah memiliki sarana pembuangan limbah tinja berupa *septic tank* pribadi atau komunal, hanya saja semua rumah tangga pada RT 6, 9 dan 10 tidak layak secara teknis dalam sarana pembuangan limbah tinja, karena tidak memiliki *septic tank* pribadi ataupun komunal. Tabel 4.8 berikut profil detail kondisi pengelolaan air limbah/sanitasi RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.8 Kondisi Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi RW 04 Kelurahan Polehan

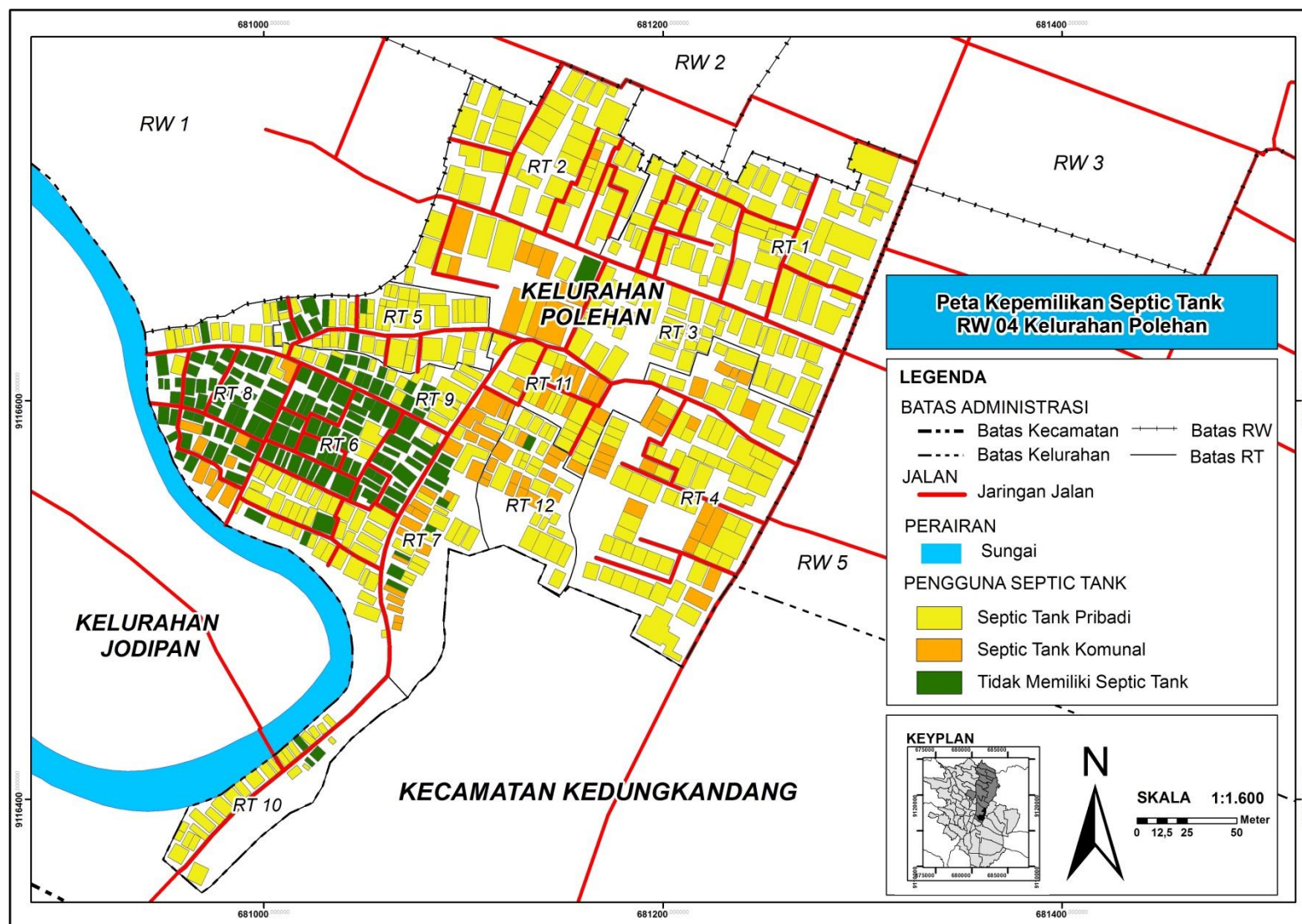
RT	Akses Sarana BAB		Kelayakan Teknis Sarana BAB			
	Jamban Sendiri/ bersama (< 5 KK / jamban bersama)	%	Jenis kloset yang digunakan (leher angsa)	%	Pembuangan limbah tinja ( <i>Septic Tank</i> Pribadi atau Komunal)	%
1	95	100	95	100	95	100
2	63	100	63	100	63	100
3	56	100	56	100	56	100
4	98	100	98	100	98	100
5	67	100	67	100	67	100
6	78	100	78	100	0	0
7	78	100	78	100	78	100
8	106	100	106	100	106	100
9	88	100	88	100	0	0
10	91	100	91	100	0	0
11	53	100	53	100	53	100
12	45	100	45	100	38	84
<b>Jumlah</b>	<b>918</b>	<b>-</b>	<b>918</b>	<b>-</b>	<b>654</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>76,5</b>	<b>100</b>	<b>76,5</b>	<b>100</b>	<b>54,5</b>	<b>73,67</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016



Gambar 4.13 Kepemilikan MCK RW 04 Kelurahan Polehan





Gambar 4.14 Peta Kepemilikan Septic Tank RW 04 Kelurahan Polehan



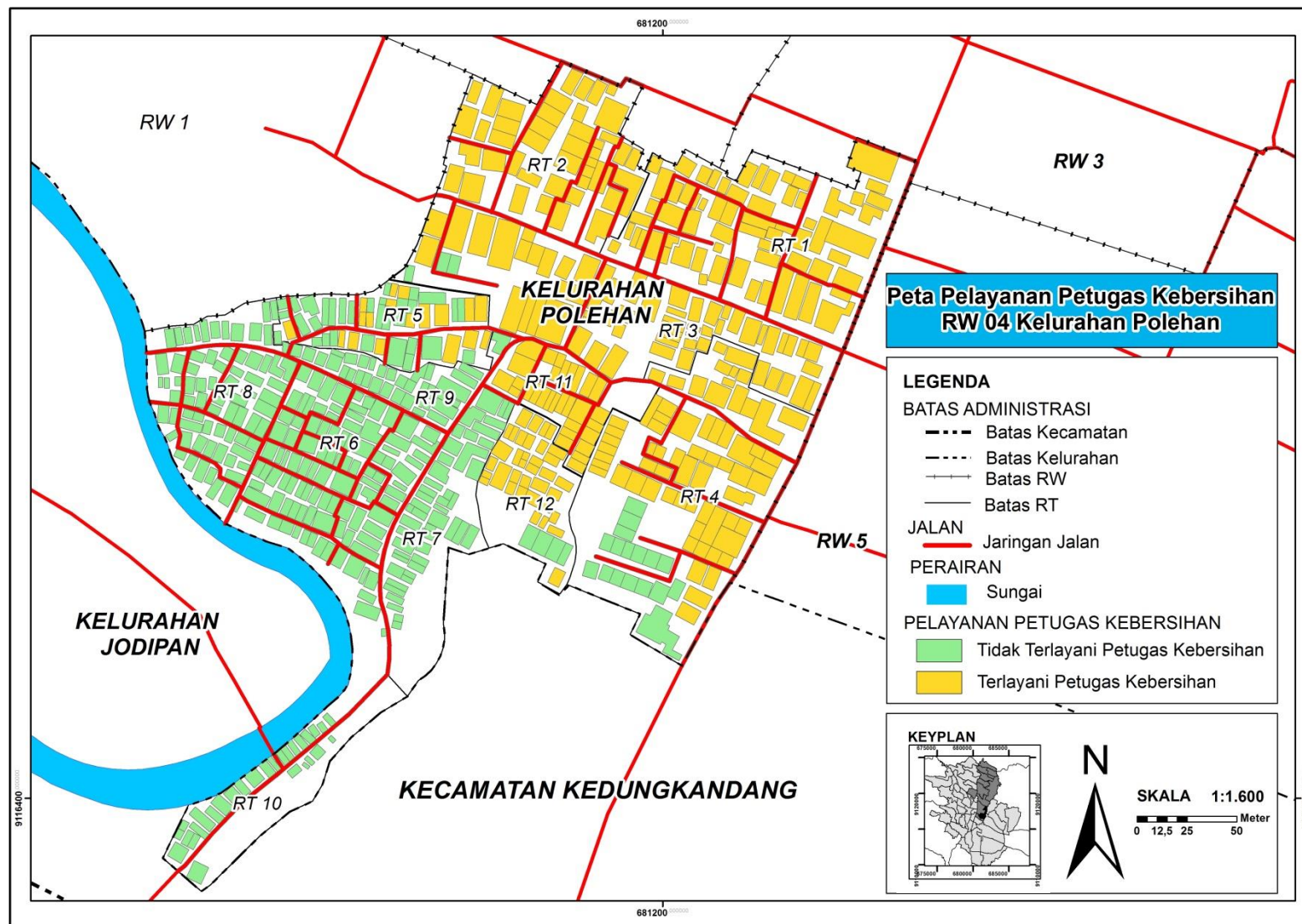
#### 4.2.7 Pengelolaan Persampahan

58,33% sampah domestik rumah tangga di RW 04 Kelurahan Polehan sudah terjangkau dan terlayani oleh pasukan kuning yang diangkut selama 2 kali dalam seminggu dengan bantuan sistem pewadahan tempat sampah pribadi. Hanya saja pada RT 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak terlayani pasukan kuning, karena kondisi topografi yang curam dan dimensi jalan yang sempit. RT 6, 7, 8, 9 dan 10 juga tidak memiliki tempat sampah pribadi. Hal itulah yang membuat masyarakat pada beberapa RT tersebut memilih membuang sampah domestik rumah tangga ke Sungai Brantas. Tabel 4.9 berikut merupakan profil detail kondisi pengelolaan persampahan RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.9 Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 04 Kelurahan Polehan

RT	Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA minimal dua kali seminggu		Pembuangan sampah Rumah Tangga			
	Rumah Tangga	%	Tempat Sampah Pribadi	%	Sungai/ Saluran drainase Got/ Selokan (Rumah Tangga)	%
1	95	100	95	100	0	0
2	63	100	63	100	0	0
3	56	100	56	100	0	0
4	98	100	98	100	0	0
5	67	100	67	100	0	0
6	0	0	0	0	78	100
7	0	0	0	0	78	100
8	0	0	0	0	106	100
9	0	0	0	0	88	100
10	0	0	0	0	91	100
11	53	100	53	100	0	0
12	45	100	45	100	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	<b>441</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>39,50</b>	<b>58,33</b>	<b>39,75</b>	<b>58,33</b>	<b>36,75</b>	<b>41,67</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan, 2016



Gambar 4.15 Peta Pelayanan Petugas Kebersihan RW 04 Kelurahan Polehan

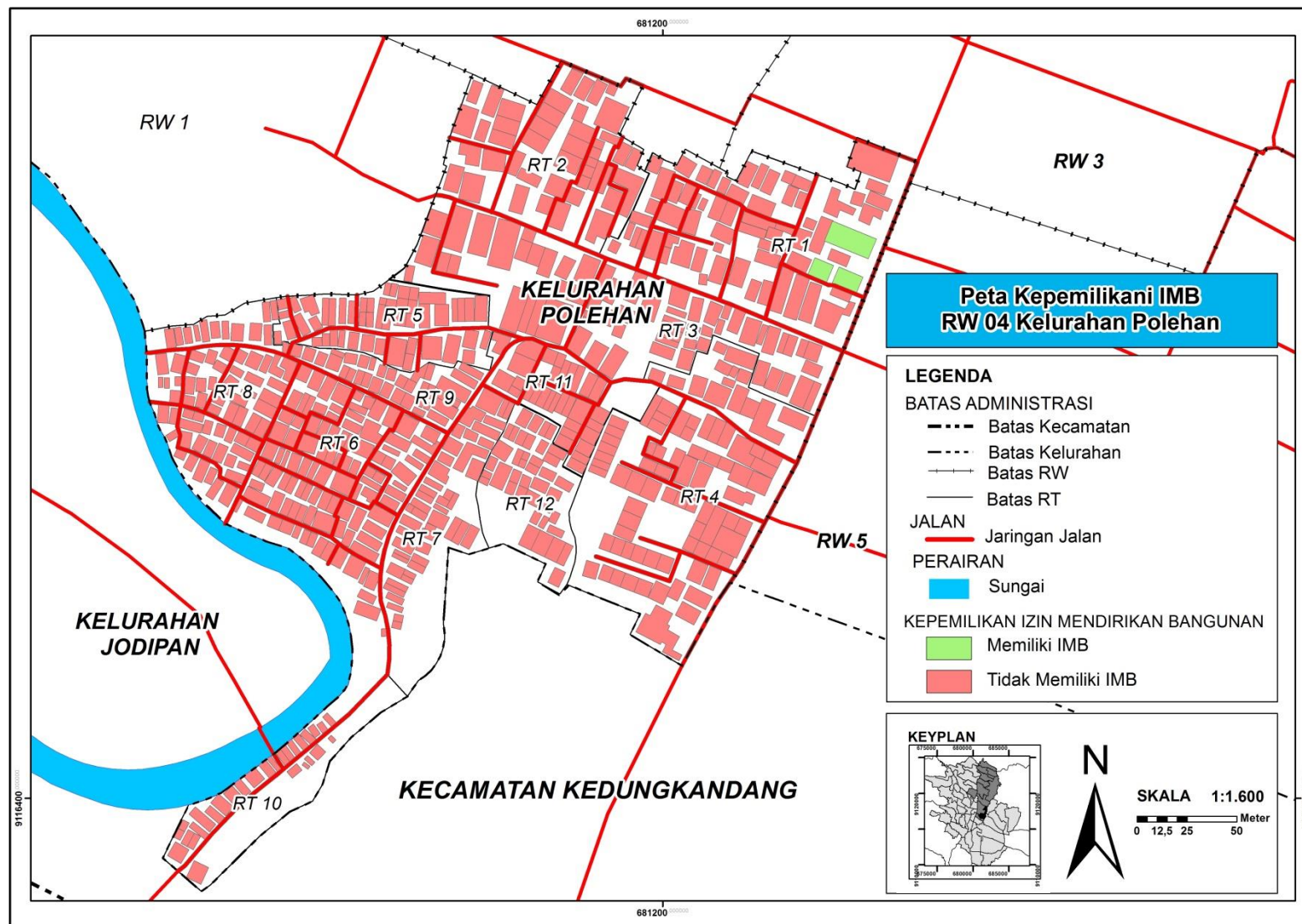
#### 4.2.8 Legalitas Bangunan

Aspek legalitas bangunan hunian merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kekumuhan suatu wilayah. Secara penguasaan bangunan hunian atau aspek legalitas RW 04 Kelurahan Polehan tergolong dalam permukiman *squatter* (liar), karena hampir 100% bangunan hunian tidak atau belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), hanya 3 Rumah Tangga yang memiliki IMB. Hal ini dimungkinkan karena letak geografis yang berada di sempadan Sungai Brantas, yang memang tidak diperuntukkan dibangun permukiman. Sementara dari status legalitas lahan bangunan huniannya, 85,33% rumah tangga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang diakui oleh pemerintah Kota Malang. Hanya saja pada RT 09 dan RT 10, sebanyak 74% dan 96% status legalitas lahan bangunan huniannya masih milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya. Tabel 4.10 berikut merupakan profil detail aspek legalitas bangunan hunian RW 04 Kelurahan Polehan.

Tabel 4.10 Kondisi Legalitas Bangunan RW 04 Kelurahan Polehan

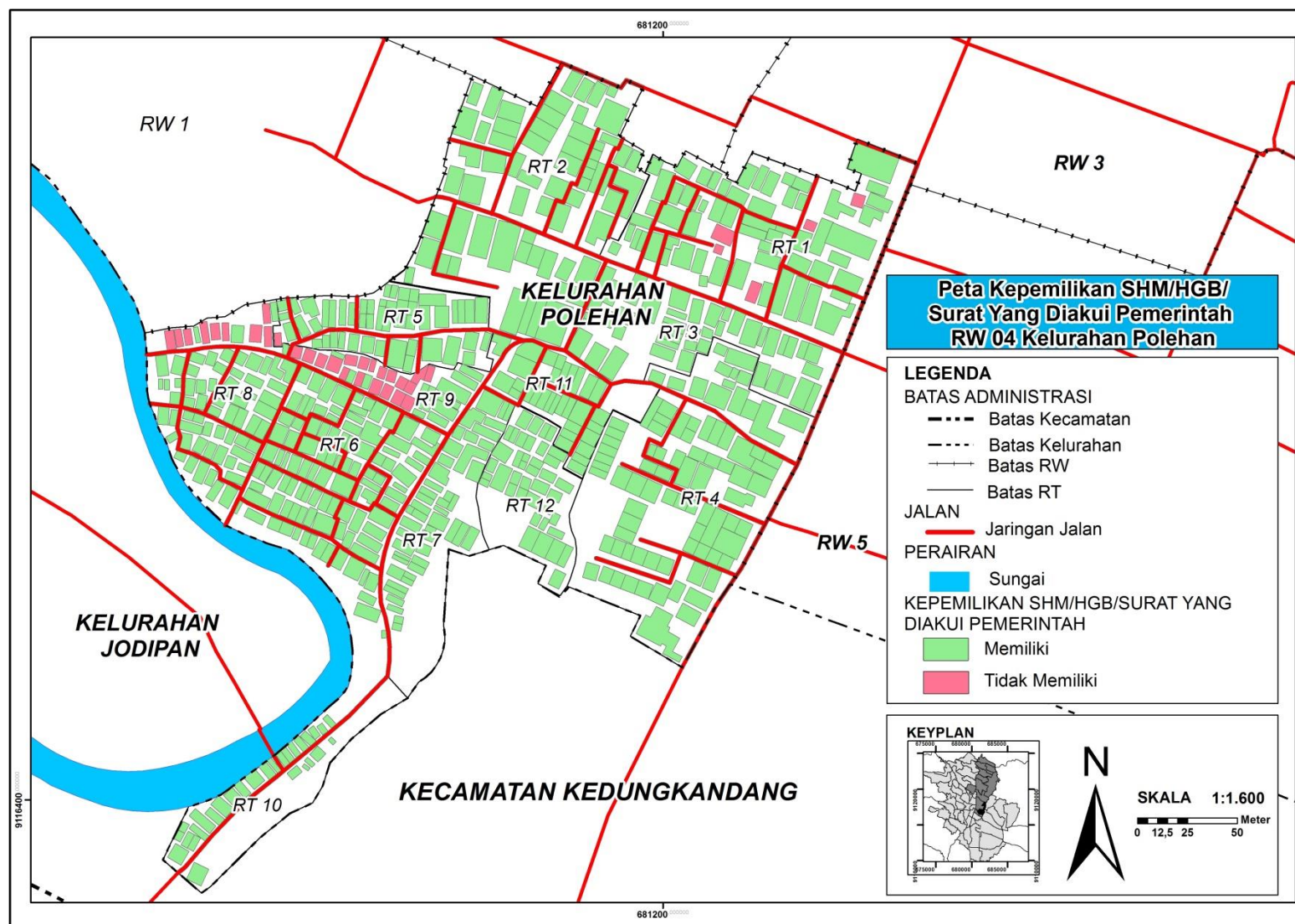
RT	Bangunan Hunian Memiliki IMB		Lahan Bangunan Hunian Memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah	
	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
1	3	3,16	89	94
2	0	0	63	100
3	0	0	56	100
4	0	0	98	100
5	0	0	67	100
6	0	0	78	100
7	0	0	78	100
8	0	0	106	100
9	0	0	23	26
10	0	0	4	4
11	0	0	53	100
12	0	0	45	100
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>760</b>	<b>-</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,25</b>	<b>0,26</b>	<b>62,58</b>	<b>85,33</b>

Sumber: *Baseline* RP2KPKP Kelurahan Polehan (2016)



Gambar 4.16 Peta Kepemilikan IMB Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan





Gambar 4.17 Peta Legalitas Bangunan Hunian RW 04 Kelurahan Polehan

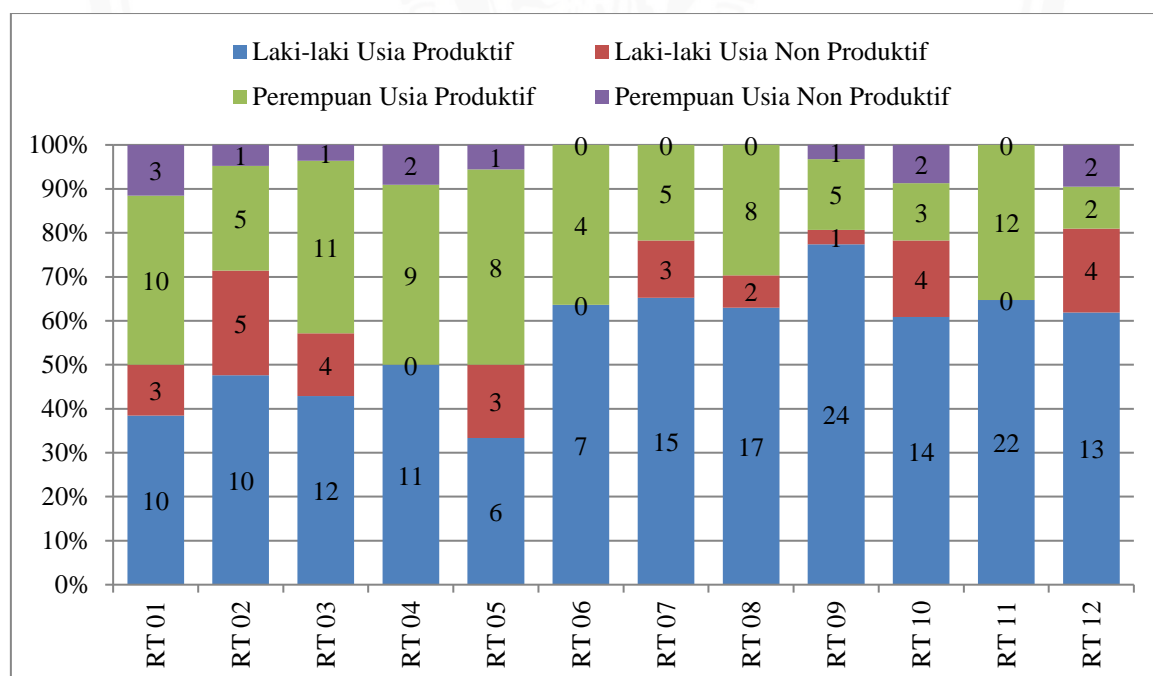


### 4.3 Atribut Demografis

Sebuah jaringan sosial dibangun oleh kumpulan aktor sebagai *nodes* dan jenis ikatan relasional tertentu. Ikatan dalam penelitian ini merepresentasikan suatu simpul atau *nodes* terlibat dalam *even* berupa kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK yang telah dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Polehan. Suatu *node* atau dalam hal ini responden penelitian memiliki atribut bawaan yang melekat pada setiap *node*-nya. Responden dalam penelitian ini berjumlah 285 dengan Karakteristik demografi responden terdiri dari 7 atribut diteliti, yaitu berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, lama tinggal dan status penduduk. Atribut tersebut tidak bergantung pada jaringan, tidak juga mempengaruhi jaringan serta tidak mengindikasikan kekuatan hubungannya. Secara detail berikut atribut responden pada RW 04 Kelurahan Polehan.

#### 4.3.1 Atribut Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Secara umum usia rata-rata responden adalah 51 tahun, responden termuda berusia 25 tahun, serta responden tertua berusia 87 tahun. Berdasarkan struktur penduduknya, jika mengacu pada standar penduduk Indonesia, 85% responden termasuk ke dalam kelompok usia produktif yang berada pada rentang usia 15-64 tahun. Sementara 15% responden lainnya termasuk ke dalam kelompok usia non produktif, yang berada pada rentang usia diatas 64 tahun. Secara detail dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.18 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

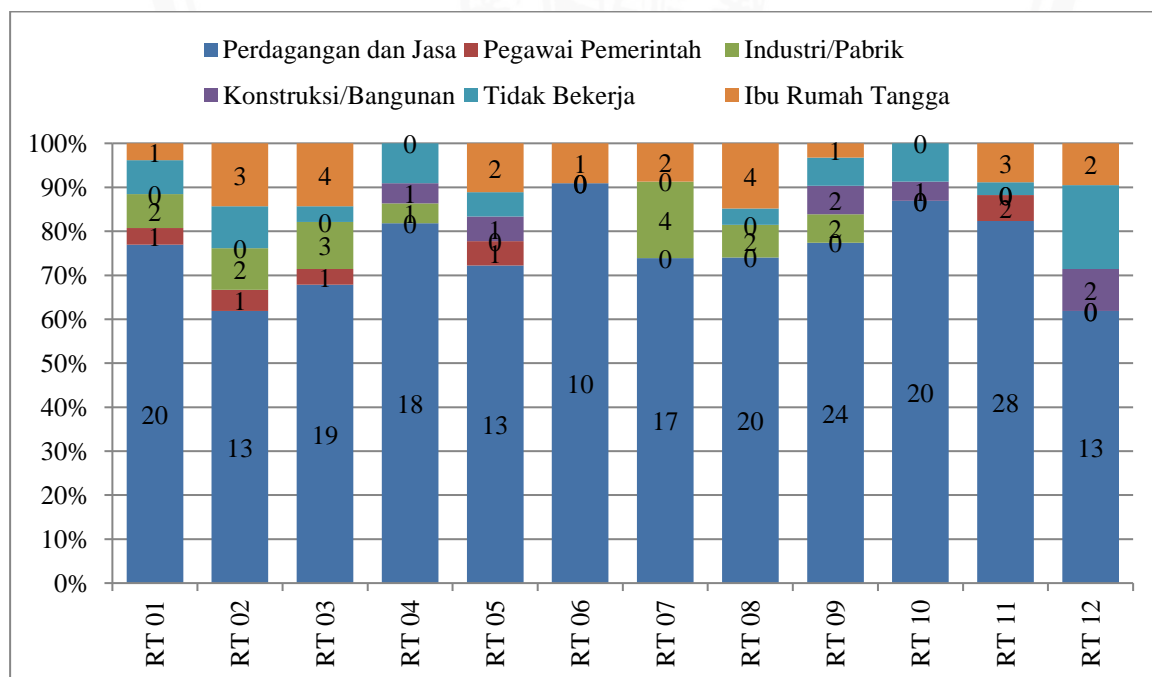
Mengacu pada Tabel 4.18, sebagian besar responden merupakan laki-laki yang mencakup 67%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala keluarga biasa adalah ayah.

Sementara itu, 33% responden perempuan didominasi oleh anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan peserta dari penyusunan Aturan Bersama (AB) dan RTPLP pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran yang memang dikhususkan untuk perempuan.

*Age Dependency Ratio* (ADR) atau angka ketergantungan didefinisikan sebagai proporsi antara usia non produktif dan usia produktif yang dikalikan dengan 100. Nilai *Age Dependency Ratio* RW 04 Kelurahan Polehan adalah 17,28. Hal ini berarti bahwa di setiap 100 orang pada usia kerja (15-64 tahun) terdapat 18 tanggungan. Rasio ini terbilang cukup rendah, akan tetapi rasio tersebut belum termasuk kelompok populasi dengan pekerjaan sebagai pengangguran, ibu rumah tangga, dan pensiunan adalah kelompok usia kerja tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendapatkan uang yang cukup.

#### 4.3.2 Atribut Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

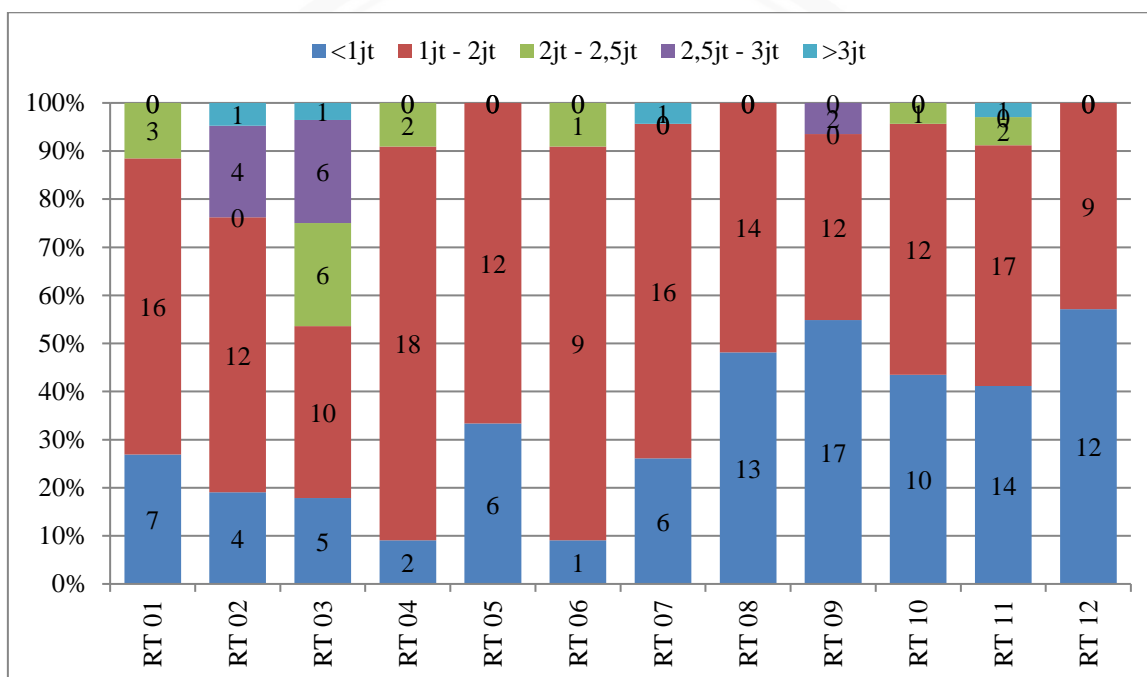
Pembagian jenis pekerjaan berdasarkan pada data Baseline 100-0-100. Tabel 4.19 menggambarkan bahwa mayoritas responden bekerja di sektor perdagangan dan jasa (75%), utamanya sektor informal seperti tukang ojek, supir angkot pedagang asongan, penjaga toko, tukang parkir, tukang reparasi dan lainnya. Sementara 14% responden lainnya berada pada kelompok dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pensiunan dan pengangguran. Di setiap RT menunjukkan bahwa jumlah responden yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa selalu lebih tinggi dibandingkan responden yang bekerja di sektor lainnya. Secara detail dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.19 Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

### 4.3.3 Atribut Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

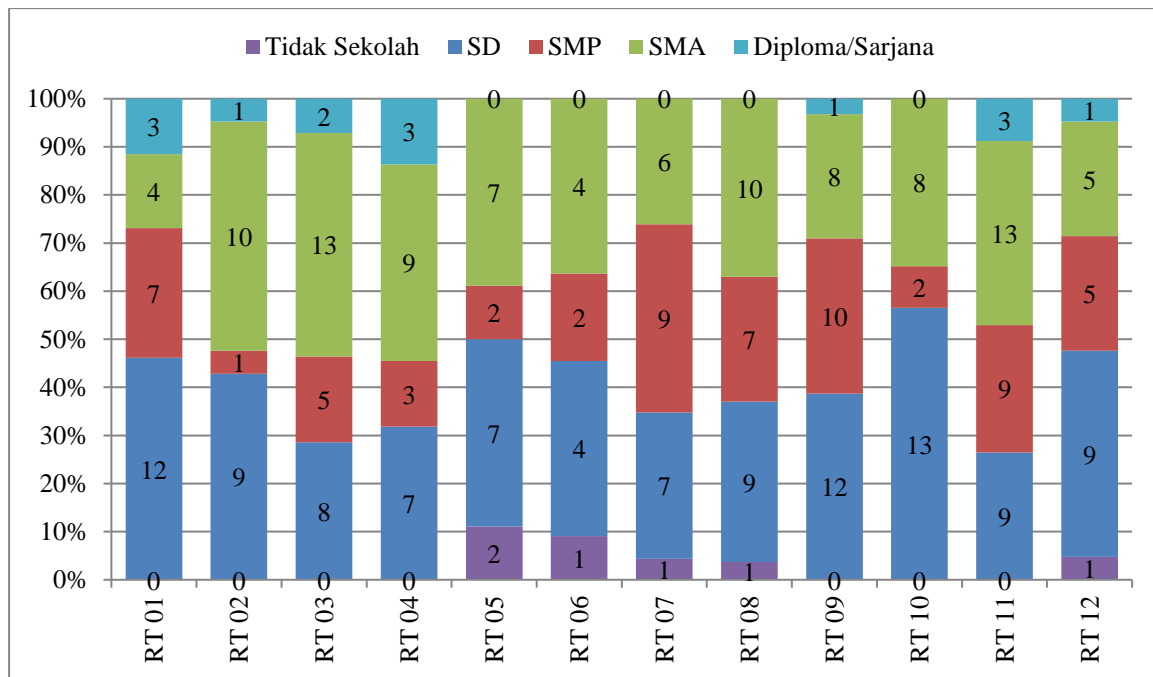
Pendapatan bulanan responden dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sebagai berikut: (i) kurang dari Rp. 1.000.000, (ii) Rp. 1.000.000 - 2.000.000, (iii) Rp. 2.000.000 - 2.500.000, (iv) Rp. 2.500.000 - 3.000.000, dan lebih dari Rp. 3.000.000. Tabel 4.20 menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata responden di RW 04 Kelurahan Polehan berada di tingkat (ii) Rp. 1.000.000 – 2.000.000, yaitu sebesar 55% total responden, 34% lainnya memiliki pendapatan di bawah Rp. 1.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden di RW 04 Kelurahan Polehan hidup dengan penghasilan rumah tangga yang kurang dari standar Upah Minimum Kota Malang pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 2.470.000. Secara detail dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.20 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

### 4.3.4 Atribut Responden Berdasarkan Pendidikan

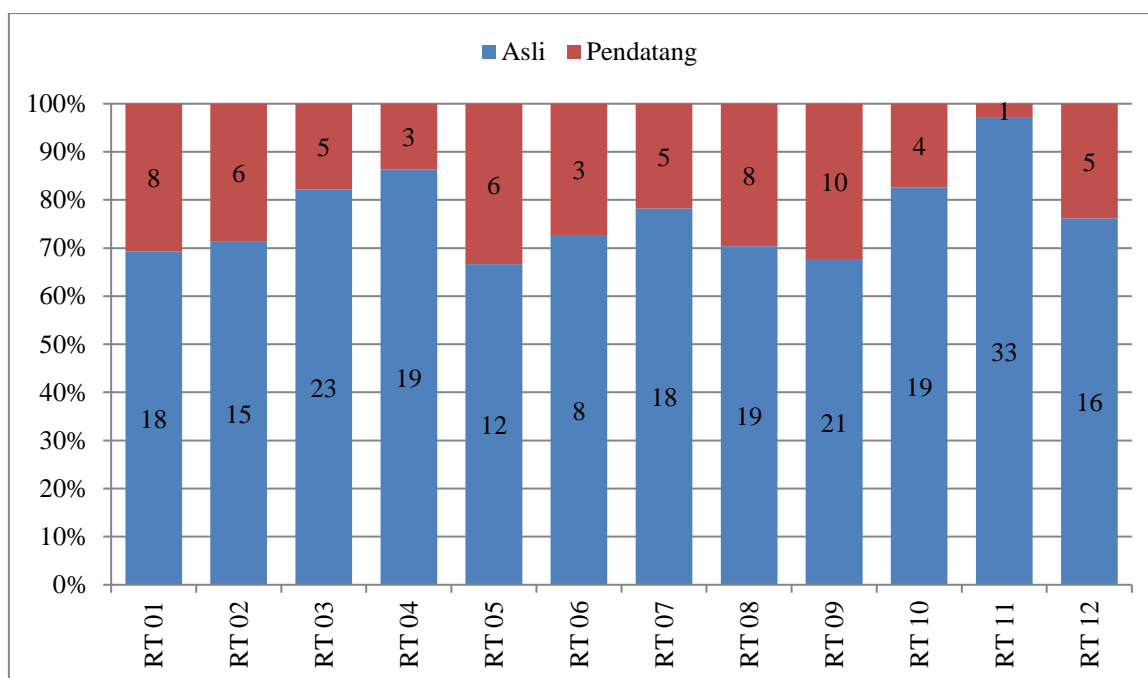
Terdapat lima kelompok latar belakang pendidikan responden meliputi (i) tidak sekolah, (ii) sekolah dasar, (iii) sekolah menengah pertama, (iv) sekolah menengah atas dan (v) tingkat universitas. Tabel 4.21 menunjukkan bahwa rata-rata responden di RW 04 Kelurahan Polehan memiliki latar belakang pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, yaitu sebesar 37%. Artinya persentase tersebut masih berada di bawah rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yaitu 7,6 tahun. Jika merujuk pada pembagian jenjang pendidikan menurut sistem pendidikan nasional, sebesar 58% responden RW 04 Kelurahan Polehan terkategori pada jenjang pendidikan dasar atau program wajib belajar, yaitu jenjang pendidikan awal 9 tahun SD dan SMP. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya akses pendidikan pada masa lampau. Secara detail dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.21 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

#### 4.3.5 Atribut Responden Berdasarkan Status Penduduk

Berdasarkan status asal penduduk, 75% responden merupakan asli dari Kelurahan Polehan, yang memang lahir dan tumbuh besar di wilayah tersebut. Sedangkan 25% responden lainnya merupakan warga pendatang, baik dari Jawa maupun luar Jawa. Pendatang yang berasal dari Jawa, mayoritas berasal dari Jawa Timur, seperti Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Nganjuk, Kudus, Kediri, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan, Trenggalek, Surabaya, Pacitan dan Ponorogo. Sedangkan responden lainnya berasal dari Jawa Tengah, seperti Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Solo, Ambarawa, Brebes, Grobogan. Sementara itu, masyarakat pendatang yang berasal dari luar Jawa mayoritas berasal dari Pulau Madura, seperti dari Pamekasan dan Bangkalan. Sebagian masyarakat pendatang sudah tinggal di lokasi selama lebih dari 15 tahun. Oleh karena itulah komposisi responden berdasarkan suku atau etniknya didominasi oleh suku Jawa dengan 90%, sedangkan 10% sisanya berasal dari suku Madura. Secara detail dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.22 Komposisi Responden Berdasarkan Sataus Penduduk

#### 4.4 Intervensi Program PLPBK pada Peningkatan Kualitas Permukiman Kelurahan Polehan

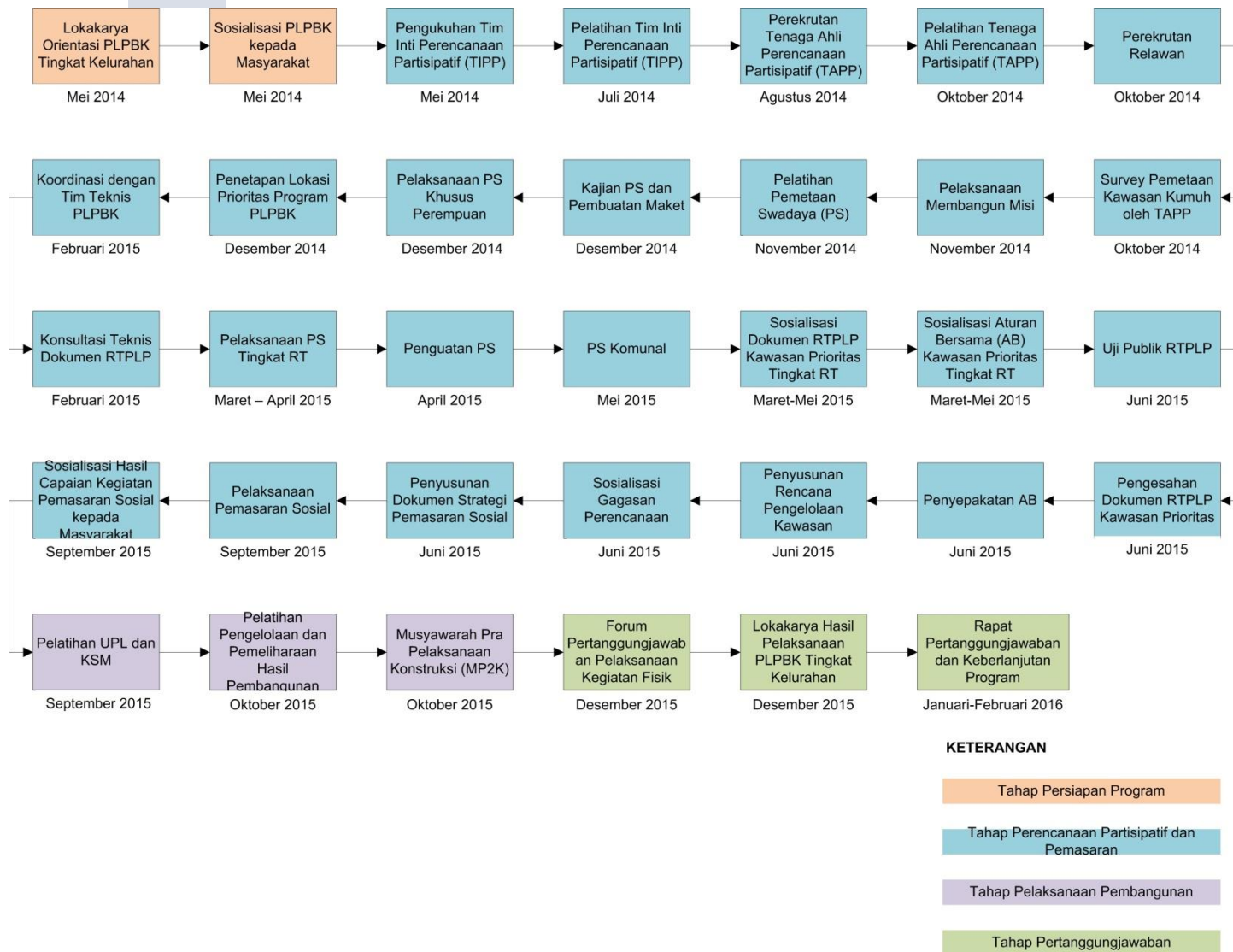
##### 4.4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan

Kegiatan PLPBK mengutamakan harmonisasi sinergi program antara Pemda, masyarakat dan kelompok peduli dalam proses penataan lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. PLPBK bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup dalam permukiman yang bersih, sehat, dan manusiawi. Termasuk memberi penekanan pada proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang dengan maksud menata lingkungan permukiman secara komprehensif dan sistematis.

Kegiatan partisipatif dalam kegiatan PLPBK merupakan serangkaian kegiatan yang bertumpu kepada kegiatan sosialisasi dan pengenalan visi kawasan, pemetaan potensi dan masalah, perumusan tata lingkungan permukiman, serta perumusan rencana tindak bersama masyarakat, dengan ciri utama adalah penanganan persoalan pemukiman melalui perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan hasil-hasil pembangunannya yang dipelihara/ dikelola oleh masyarakat setempat dengan prinsip “*Good Governance*”.

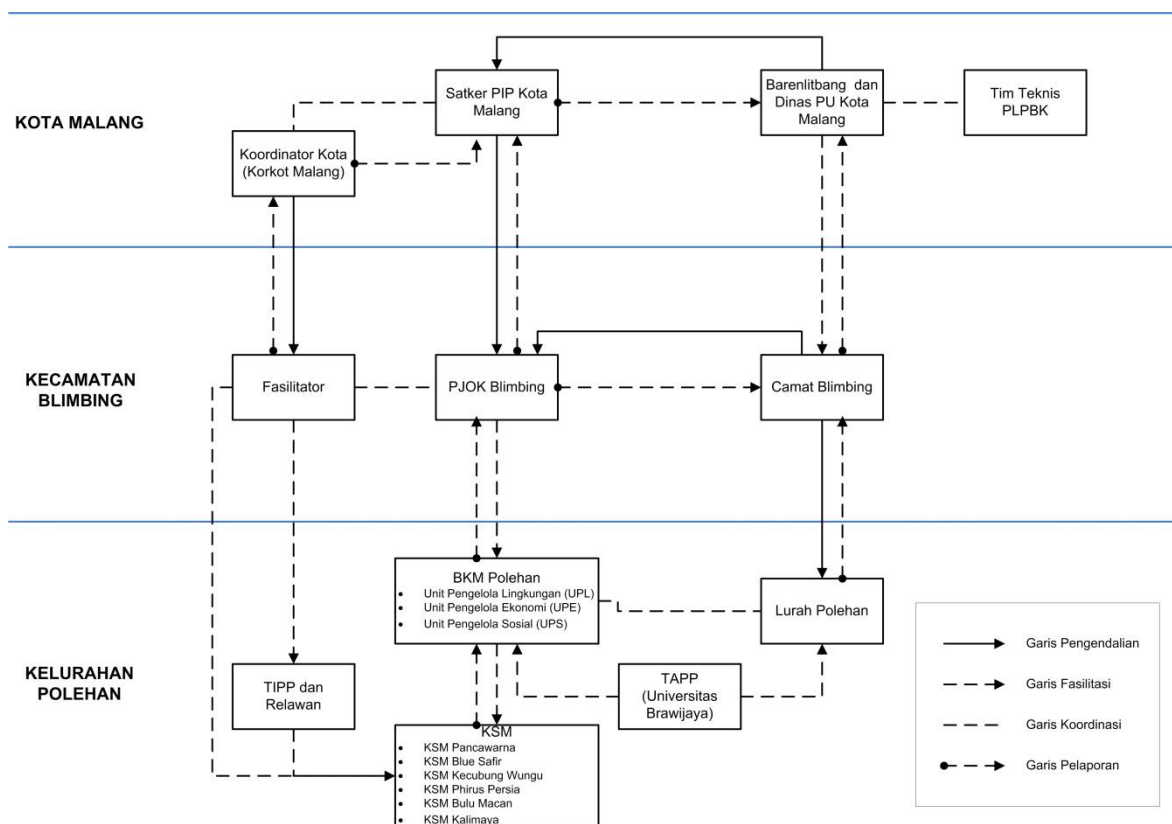
Kegiatan perencanaan hingga pengelolaan hasil pembangunan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Program PLPBK di Kelurahan Polehan berlangsung pada jangka waktu 2014 hingga 2016. Secara detail dijelaskan pada Gambar 4.23 berikut.





Gambar 4.23 Periode Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan

Secara detail Gambar 4.24 berikut merupakan alur hubungan kerja antar *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program PLPBK Kelurahan Polehan dari tingkat kota sampai dengan tingkat masyarakat.



Gambar 4.24 Alur Hubungan Kerja Antar *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan

Pada tingkat masyarakat atau tingkat kelurahan, BKM Polehan menjadi *stakeholder* yang krusial dalam pelaksanaan program PLPBK Kelurahan Polehan. BKM Polehan selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lurah Polehan dalam setiap tahap kegiatan Program PLPBK. BKM Polehan juga merekrut TAPP dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, keputusan tertinggi menjadi wewenang dari BKM Polehan. Selain merekrut TAPP, BKM Polehan juga yang membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selanjutnya, BKM Polehan juga berperan dalam pengembangan jaringan pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Blimbing.

Penanganan permasalahan permukiman yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Program PLPBK di RW 04 Kelurahan Polehan adalah sebagai berikut:

1. Sektor persampahan

- a. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sedangkan warga lainnya masih memanfaatkan sumber air dari sungai untuk keperluan sehari-hari;
- b. Tempat pembuangan sampah yang kurang memadai;
- c. Tidak adanya sarana pengumpul sampah dari setiap rumah tangga;
- d. Banyak RT yang yang tidak terjangkau pasukan kuning; dan
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menjadikan kampung terlihat kumuh.

2. Sektor drainase

- a. Saat musim hujan, saluran drainase menimbulkan bau;
- b. Kapasitas drainase kurang memadai, diakarenakan volume drainase yang ada tidak dapat menampung limpasan air hujan, sehingga sering terjadi banjir;
- c. Tidak ada inlet;
- d. Terdapat drainase yang memiliki banyak endapan, sehingga kapasitas drainase tidak dapat menampung limpasan air hujan secara maksimal;
- e. Beberapa drainase terdapat sampah; dan
- f. Pembuangan air limbah rumah tangga pada saluran drainase terbuka menimbulkan bau.

3. Sektor ekonomi

- a. Kurangnya modal untuk usaha dan *home industry*;
- b. Kurangnya pelatihan dan keterampilan usaha;
- c. Kurangnya bantuan pemasaran hasil usaha;
- d. Kurangnya modal usaha bagi masyarakat miskin;
- e. Masih banyak warga masyarakat miskin dan kurang mampu; dan
- f. Terdapat rumah tidak layak huni/rusak

4. Sektor jalan

- a. Terdapat beberapa jalan dengan kondisi buruk atau berlubang, sehingga saat musim hujan terjadi genangan;
- b. Terdapat jalan yang belum di paving sama sekali, atau belum merata; dan
- c. Masih kurangnya penerangan jalan lingkungan.

5. Sektor sanitasi

- a. Banyaknya rumah yang tidak memiliki septictank, menggunakan saluran drainase sehingga terlihat kotor dan menimbulkan bau;

- b. Terdapat beberapa rumah yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai;
  - c. Beberapa lokasi *septic tank* dekat dengan sumber air, sehingga sering terjadi rembesan *septic tank* ke sumber air;
  - d. Banyak warga yang belum memiliki MCK pribadi; dan
  - e. Banyak warga yang melakukan kegiatan MCK di sungai.
6. Sektor penghijauan
- a. Masih minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kegiatan pembangunan fisik yang telah berhasil dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan pada forum pengambilan keputusan tertinggi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Polehan dan dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Unit Pengelola di BKM. Daftar usulan tersebut telah dimuat dalam Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) dan telah disesuaikan dengan alokasi dana BLM yang tersedia. **Tabel 4.11** berikut merupakan hasil usulan kegiatan pembangunan fisik RW 04 Kelurahan Polehan.

*Tabel 4.11 Hasil Usulan Kegiatan Pembangunan Fisik Program PLPBK Kelurahan Polehan*

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Sumber Dana	Periode Pelaksanaan
1	Persampahan	KSM Pancawarna	BLM dan Swadaya	Oktober-Desember 2015
2	Drainase	KSM Blue Safir	BLM dan Swadaya	Oktober-Desember 2015
3	RTH	KSM Kecubung Wungu	BLM dan Swadaya	-
4	Prasarana Jalan	KSM Phirus Persia	BLM dan Swadaya	Oktober-Desember 2015
5	Jalan dan Saluran	KSM Bulu Macan	BLM dan Swadaya	Oktober-Desember 2015
6	Sarana Pos Pantau	KSM Kalimaya	BLM dan Swadaya	Oktober-Desember 2015

Setiap program sesuai bidangnya ditempatkan dan dikoordinasikan pada unit pengelola yang dibentuk di BKM Polehan, yaitu Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Ekonomi (UPE). Kegiatan PLPBK Kelurahan Polehan dilakukan atas kerjasama kemitraan dengan lembaga lain antara lain: LPPM Universitas Brawijaya dan Kementerian PUPR.

#### **4.4.2 Hasil Pembangunan Program PLPBK RW 04 Kelurahan Polehan**

Pogram penyelesaian permasalahan prioritas yang telah dilaksanakan, dipilih berdasarkan hasil penentuan bobot program masing-masing sektor yang didapatkan dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Pembobotan program pada masing-masing sektor dihitung dengan mempertimbangkan jumlah rumah terdampak dan jumlah keseluruhan rumah pada RW 04 Kelurahan Polehan.

Berikut merupakan program prioritas penyelesaian yang telah berhasil dilaksanakan/dibangun di RW 04 Kelurahan Polehan:

#### A. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan/Sirkulasi

Berikut merupakan bentuk pengembangan sistem jaringan jalan atau sirkulasi yang telah dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Polehan:

##### 1. Pembangunan gapura

Pembangunan gapura bertujuan sebagai upaya untuk menonjolkan identitas dan meningkatkan citra kawasan, sekaligus sebagai bentuk manifestasi kecintaan masyarakat terhadap lingkungan huniannya, karena didesain dengan menonjolkan visi kawasan prioritas penanganan Program PLPBK, yang bertuliskan “Kampung Permadi-Ku Sayang”. Pembangunan gapura telah dilaksanakan pada tahun pertama yang dicanangkan dalam indikasi program PLPBK Kelurahan Polehan. Selain berasal dari dana PLPBK, dana pembangunan gapura juga berasal dari swadaya masyarakat.



Gambar 4.25 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pembangunan Gapura





Gambar 4.26 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pembangunan Gapura

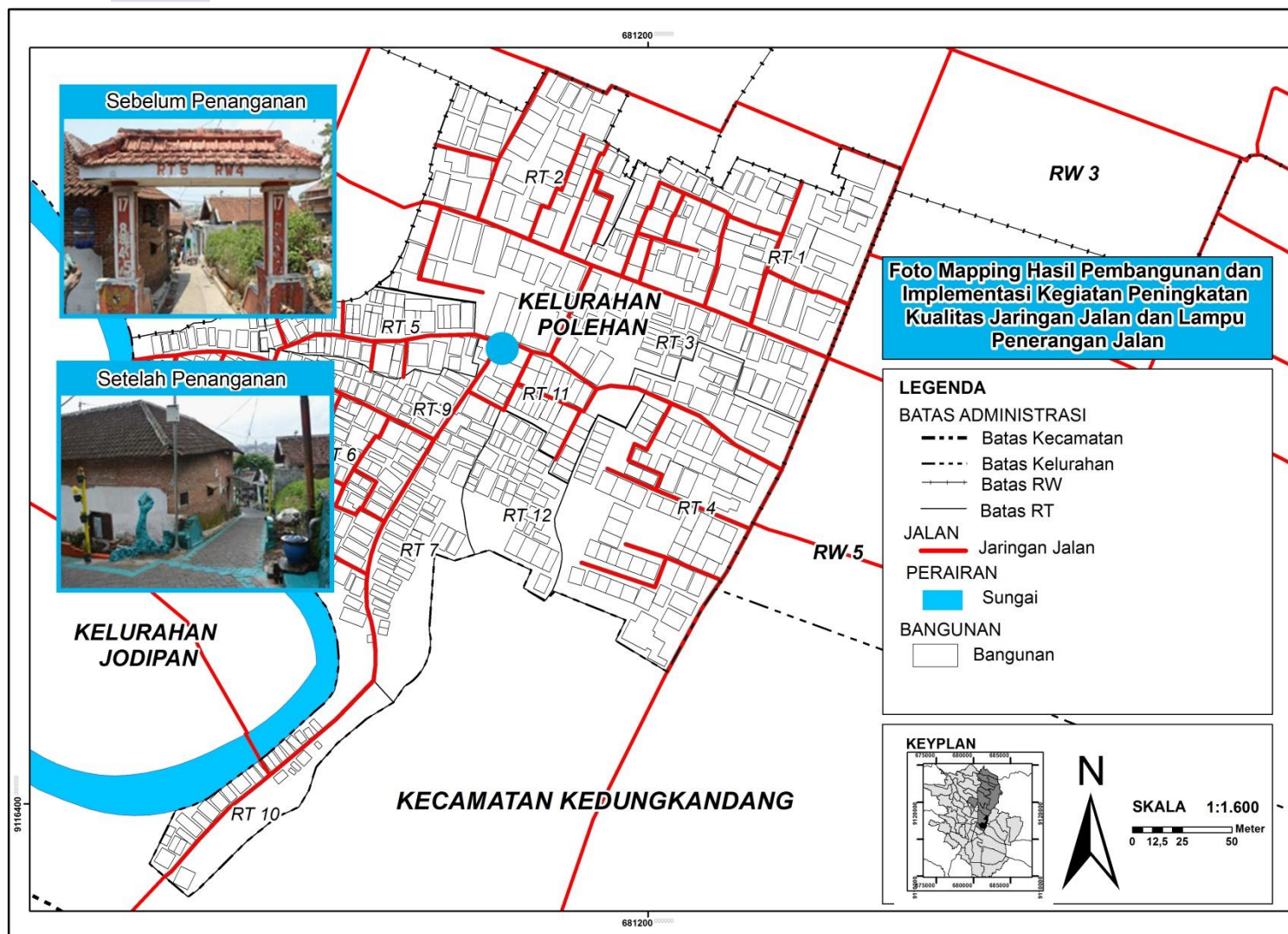
## 2. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan lampu penerangan jalan

Peningkatan kualitas jaringan jalan dilakukan dengan melakukan perbaikan dan peremajaan pada tiap ruas jalan melalui pavingisasi, serta menyediakan penerangan jalan melalui instalasi panel surya pada beberapa titik. Hal ini dilakukan karena kondisi eksisting ruas jalan sebelum penanganan banyak yang berlubang, mengalami keretakan dan adanya genangan air pada saat hujan sehingga mengganggu sirkulasi dan kenyamanan pengguna jalan. Instalasi panel surya pada beberapa titik dilakukan karena minimnya lampu penerangan jalan pada gang-gang kecil. Adanya panel surya diharapkan meminimalisir resiko kecelakaan pengguna kendaraan bermotor, karena membuat jarak pandang lebih jelas pada malam hari.



Gambar 4.27 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Lampu Penerangan Jalan





Gambar 4.28 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Lampu Penerangan Jalan

## B. Pembangunan Sarana Permukiman

Pembangunan sarana permukiman yang telah dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Polehan berupa balai RW dan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan tersebut didasarkan pada kebutuhan penduduk, tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan. Berikut penjelasan masing-masing pembangunan sarana permukiman:

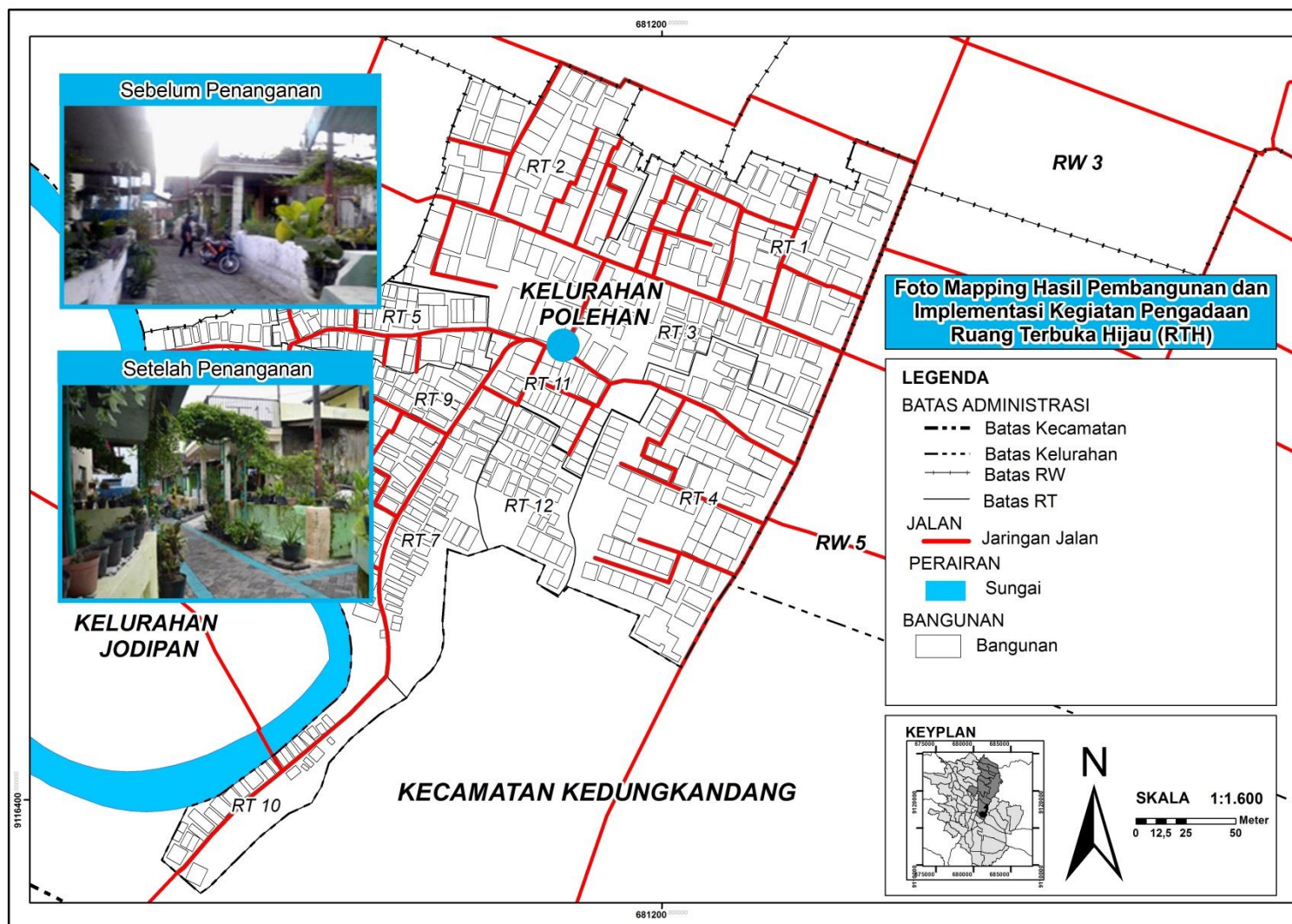
### 1. Pengadaan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kepadatan bangunan yang sangat tinggi mengakibatkan minimnya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemberian kesan hijau diantisipasi melalui pembuatan pergola dengan tanaman produktif serta pengadaan *vertical garden*. Selain pengadaan, dilakukan pula pelatihan perawatan dan pengolahan tanaman pergola. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya *urban gardening* sekaligus upaya peningkatan ekonomi mikro produktif di sekitar rumah warga. Bagi masyarakat yang membantu pengadaan pergola serta masyarakat yang ikut terlibat dalam pemeliharaan dan perawatan pergola, maka akan diberikan insentif atau *reward* berupa dapat memanfaatkan hasil dari panen tanaman produktif pergola.



Gambar 4.29 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)





Gambar 4.30 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

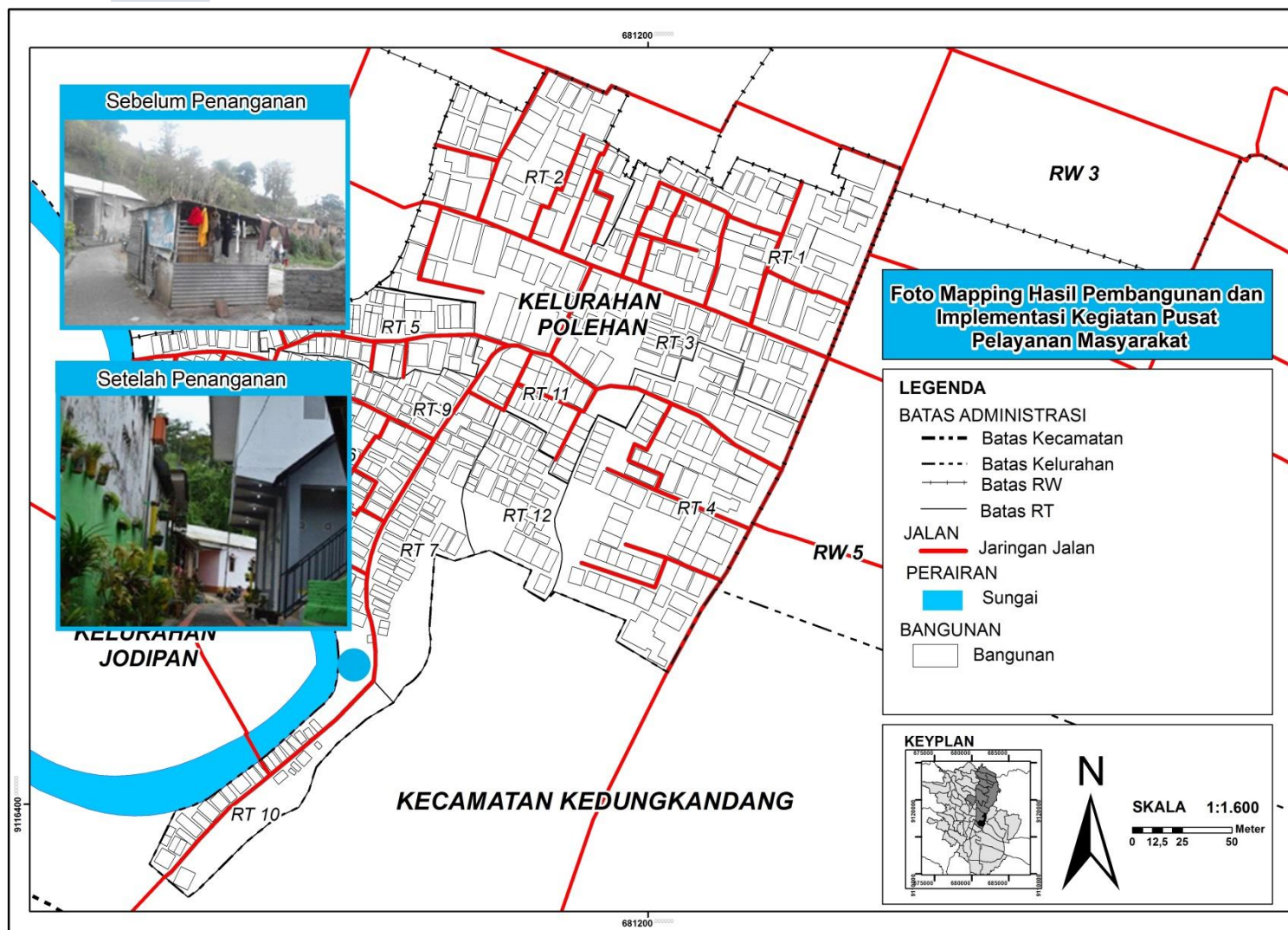


## 2. Pembangunan pusat pelayanan masyarakat

Pembangunan pusat pelayanan masyarakat berupa pos pantau atau balai RW didasarkan pada kebutuhan kondisi eksisting sebelum penanganan yang tidak memiliki wadah pusat kegiatan pelayanan masyarakat untuk pertemuan resmi/formal. Pembangunan pos pantau yang berada pada bantaran Sungai Brantas didasarkan atas pertimbangan minimnya ketersediaan lahan untuk bangunan baru. Selain berfungsi sebagai balai pertemuan warga, pos pantau juga merupakan solusi kreatif yang diinisiasi oleh masyarakat yang juga bertujuan untuk memantau perilaku masyarakat dalam membuang sampah, mengubah persepsi masyarakat dalam membuang sampah dan mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktifitas MCK di Sungai Brantas. Hingga saat ini pos pantau digunakan sebagai sarana pelayanan masyarakat dan pertemuan rutin bulanan warga.



Gambar 4.31 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pusat Pelayanan Masyarakat



Gambar 4.32 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pusat Pelayanan Masyarakat

### C. Pembangunan Prasarana Permukiman

Pembangunan prasarana permukiman yang telah dilakukan berupa pengembangan sistem drainase, pengelolaan persampahan, sistem sanitasi dan air bersih. Berikut merupakan penjelasan masing-masing pembangunan prasarana permukiman:

#### 1. Kegiatan peningkatan kapasitas saluran drainase

Peningkatan kapasitas saluran drainase dilakukan dengan mengadakan kegiatan perbaikan jalan, normalisasi saluran drainase, pembangunan ruas saluran drainase baru serta pengadaan inlet pada beberapa titik. Hal ini dilakukan sebagai upaya respon keluhan banyaknya endapan pada saluran drainase yang mengakibatkan kapasitas saluran drainase yang tidak dapat menampung limpasan air hujan secara maksimal. Pada kondisi eksisting sebelum penanganan, sebagian besar limpasan air hujan dialirkan ke badan jalan. Setelah kondisi penanganan, limpasan air hujan dialirkan menuju drainase tertutup yang bermuara pada Sungai Brantas. Keberlanjutan kegiatan ini dilakukan dengan adanya pembersihan dan perawatan rutin yang dilakukan oleh warga selama 2 minggu sekali sebagai langkah pencegahan tersumbatnya saluran drainase dari tanaman liar maupun sampah.

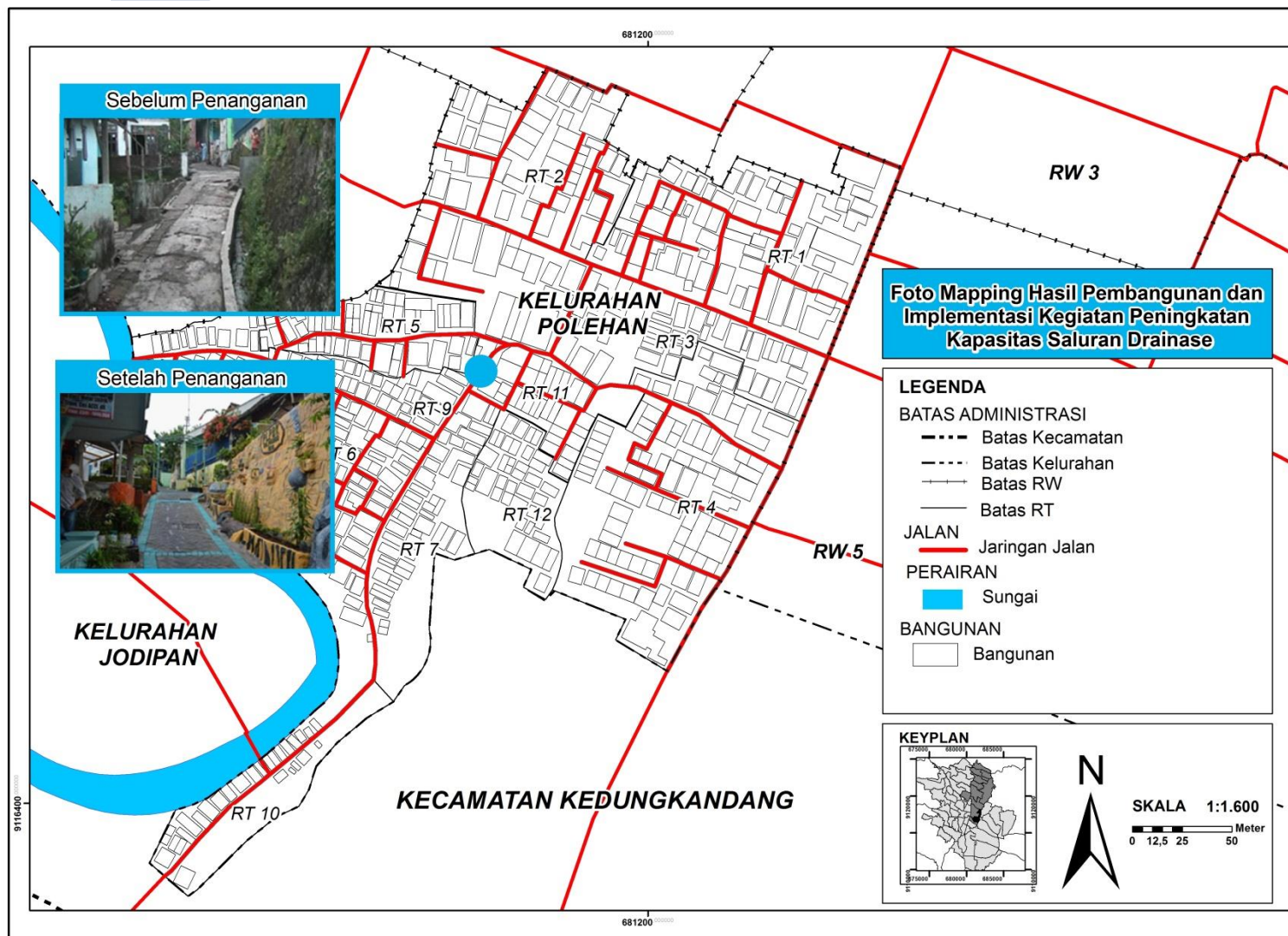






*Gambar 4.33* Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Saluran Drainase





Gambar 4.34 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Saluran Drainase



## 2. Pengelolaan persampahan

Permasalahan utama persampahan di RW 04 Kelurahan Polehan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Penyediaan bak sampah permanen yang terpisah untuk jenis sampah organik dan anorganik dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah pewadahan dan pemilahan sampah, karena pada kondisi eksisting sebelum penanganan sebagian besar masyarakat masih membuang sampah di saluran drainase dan sungai, padahal di lain sisi masih ada beberapa warga yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Penyediaan bak sampah organik dan anorganik sekaligus memudahkan untuk proses pengolahan sampah lebih lanjut. Bak sampah diletakkan pada beberapa titik yang terjangkau oleh pasukan kuning, karena sebagian besar rumah belum terlayani oleh pasukan kuning. Selanjutnya, dilakukan pula pengadaan gerobak motor untuk memudahkan mobilisasi pengangkutan sampah. Selain itu, dilakukan pengadaan alat *composter* untuk pengolahan sampah organik, yang selanjutnya diadakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara *composting*. Program penyelesaian permasalahan persampahan dalam proses pewadahan, pengumpulan dan pengolahan pada skala rumah tangga di RW 04 Kelurahan Polehan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Hasil keberlanjutan penanganan persampahan hingga saat ini, telah disepakati diberlakukan iuran bulanan yang digunakan untuk operasionalisasi pengangkutan sampah dan membayar pasukan kuning, serta pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat melalui *composting* pada skala kecil rumah tangga.

**Sebelum Penanganan**



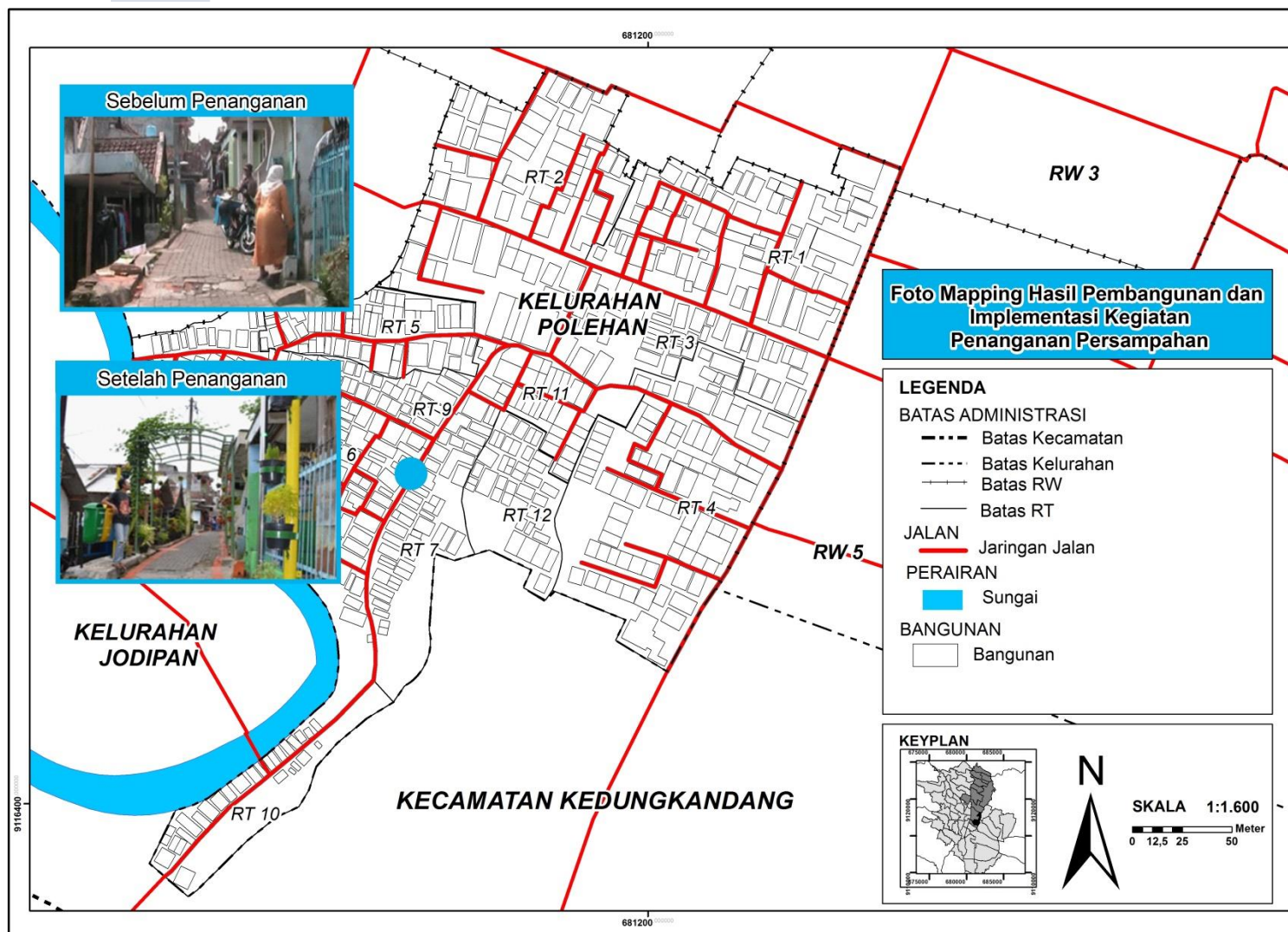
**Setelah Penanganan**





Gambar 4.35 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Penanganan Persampahan



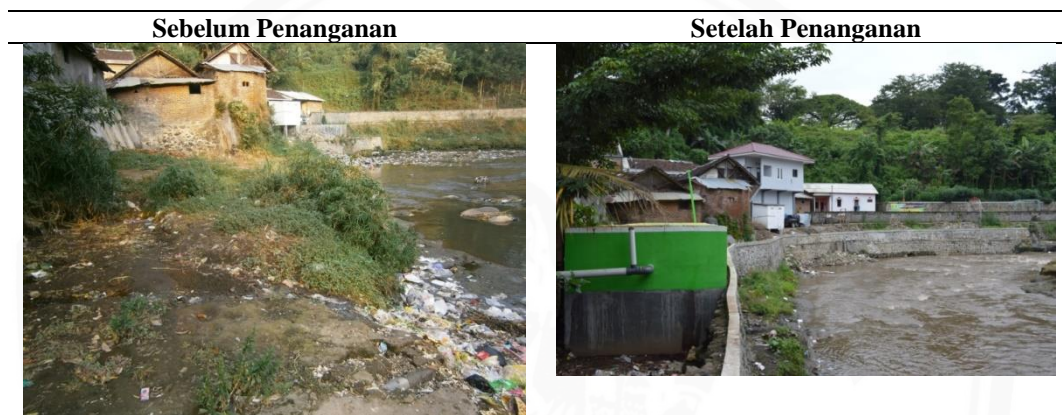


Gambar 4.36 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Penanganan Persampahan

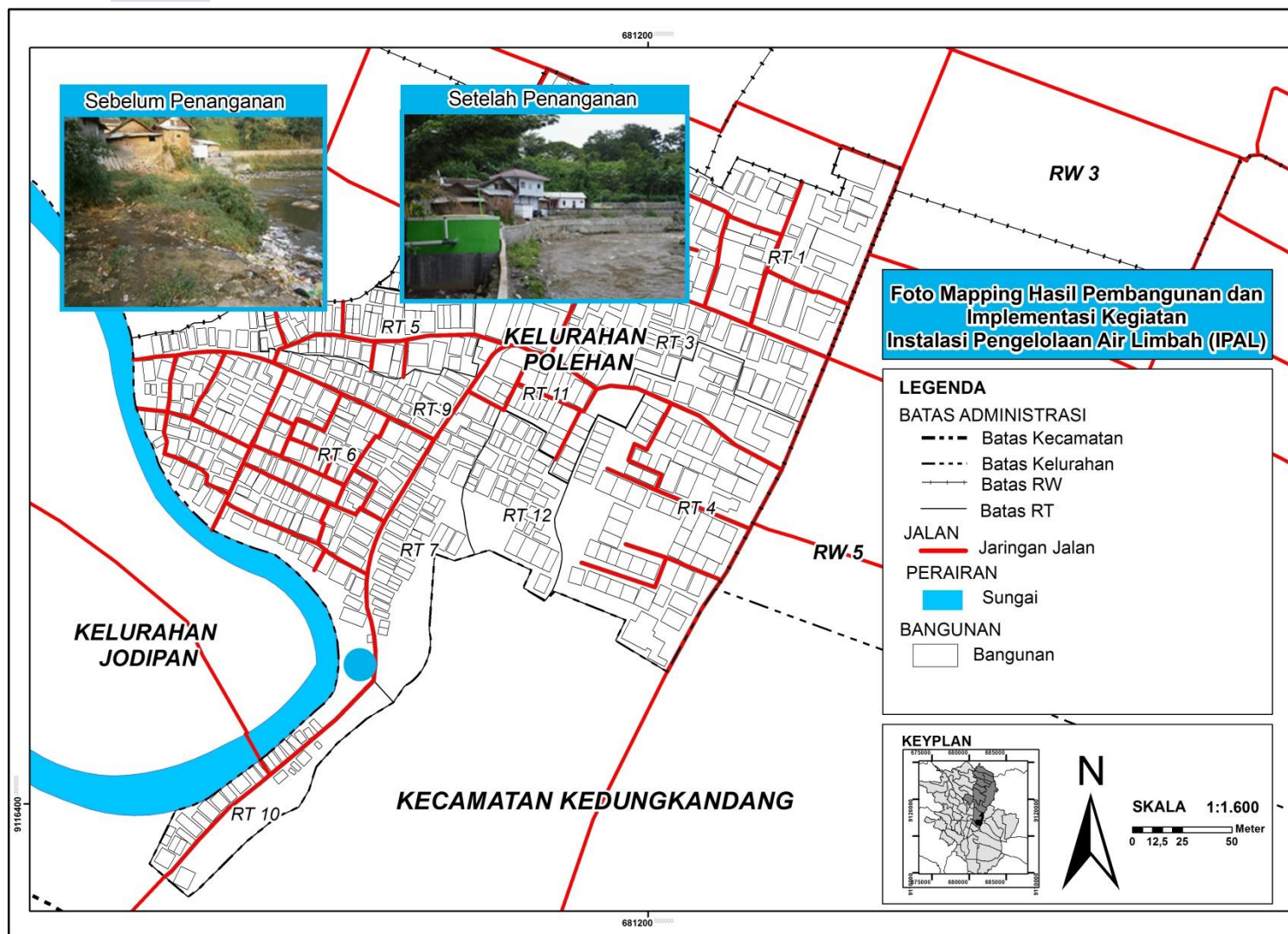


### 3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Kondisi eksisting sebelum penanganan pada RW 04 Kelurahan Polehan telah memiliki sistem sanitasi *off-site* berupa IPAL komunal yang terletak di RT 4. IPAL komunal tersebut dimanfaatkan pembuangan air limbah rumah tangga dan sisa hasil industri. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat masih membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai dan tidak pengelolaan limbah tinja/rumah tangga sebelum dibuang. Maka, alternatif pemecahan permasalahan sistem sanitasi tersebut dibuat IPAL. Pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan kerjasama antara Program PLPBK dengan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH).



Gambar 4.37 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)



Gambar 4.38 Foto Mapping Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan IPAL



#### D. Pengembangan Kelembagaan

Perihal kelembagaan pada skala mikro, pada kondisi sebelum penanganan Linmas (Perlindungan Masyarakat) belum mendapat pengetahuan wawasan mengenai tindak rawan bencana. Maka dari itu, dibentuklah dan dilatih Linmas tim evakuasi RW 04 Kelurahan Polehan yang kemudian dilatih dan didampingi oleh Pemerintah Kota Malang dalam tanggap darurat bencana. Bukti nyata dari program ini adalah diterbitkannya Surat Pembentukan atau Surat Tugas Linmas.



Gambar 4.39 Hasil Pembangunan dan Implementasi Kegiatan Pelatihan Linmas Tindak Rawan Bencana

Sebagai bentuk keberlanjutan hasil pembangunan, rencana tindak lanjut dan memberikan hasil yang efektif untuk pengembangan secara keseluruhan, maka diberlakukan Aturan Bersama (AB) oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan. Aturan Bersama merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang memuat substansi program kegiatan prioritas, bagaimana tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan hasil pembangunannya yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sekaligus adanya mekanisme pengendalian berupa *reward* dan *punishment* bagi yang melaksanakannya. Kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam bentuk Aturan Bersama diantaranya adalah kesepakatan tentang aturan pembangunan yang dilihat dari enam aspek, meliputi kesepakatan dari sisi tata ruang; perumahan dan bangunan; sarana & prasarana; ekonomi; pelayanan publik; dan kelembagaan.

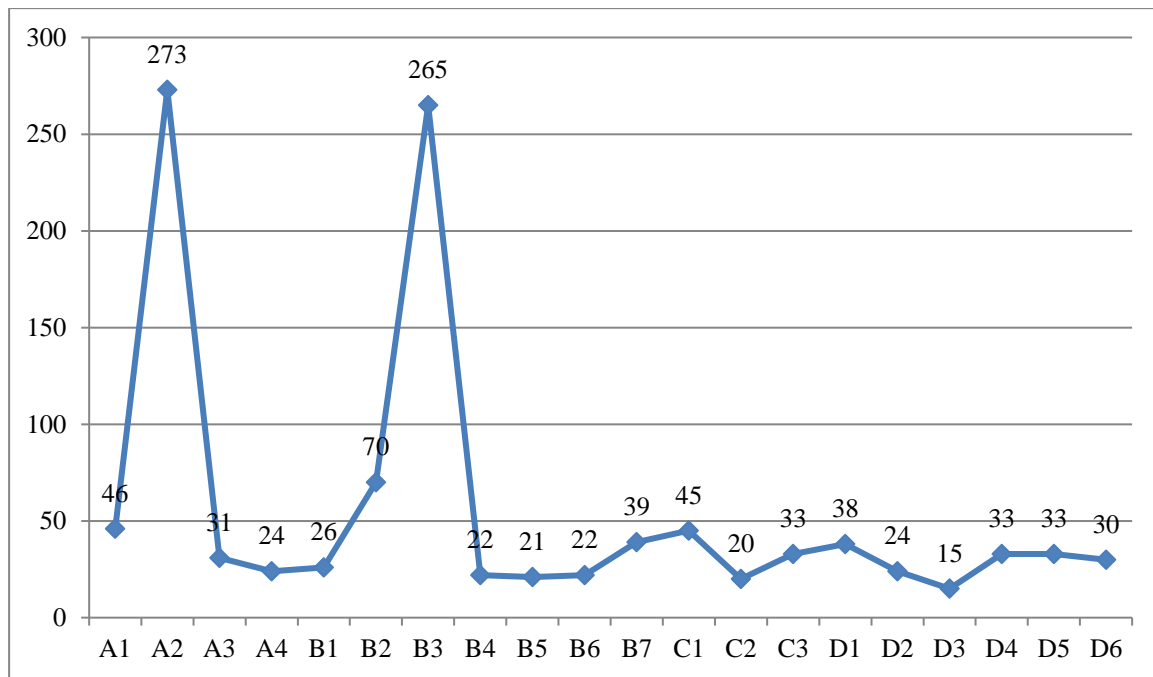
#### 4.5 Struktur Sosial Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK

Adanya ikatan sosial di antara masyarakat yang mungkin memengaruhi mereka untuk tinggal. Semangat kolektif memungkinkan penghuni hidup dengan keadaan ini dalam waktu lama. Keadaan ini mungkin menggambarkan bahwa proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lokasi rumah mewakili (i) perilaku manusia yang

tertanam dalam jaringan hubungan interpersonal **Invalid source specified.** dan (ii) bahwa pilihan yang dibuat oleh individu ditentukan oleh orang lain yang berpengaruh juga sebagai reaksi terhadap kendala dan peluang yang dipaksakan oleh sistem sosial (Leenders, 2002). Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan pola penyebab relasional atau struktur pada sebuah jaringan yang terbentuk dalam kegiatan (Borgatti dan Halgin, 2011). Himpunan aktor yang merupakan gabungan dari tiap RT dinotasikan sebagai  $N$ , dan Himpunan *event* yang dinotasikan sebagai  $M$  dengan  $h$  *event* terdiri dari 20 kegiatan pada ke empat tahap (i) Tahap persiapan, (ii) Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran, (iii) Tahap Pelaksanaan Pembangunan, dan (iv) Tahap Keberlanjutan. Pada bagian ini, struktur sosial digambarkan melalui berbagai keikutsertaan masing-masing responden dalam tiap kegiatan pada 4 tahap Program PLPBK yang telah berlangsung, dengan menganalisa tingkat partisipasi, *density* dan *centrality* jaringan afiliasinya. Berikut merupakan hasil *social network analysis* pada pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan.

#### 4.5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PLPBK

Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan yang terlibat dalam Program PLPBK dilakukan dengan menggunakan analisis *rate of participation*, yang didasarkan pada keikutsertaan masyarakat pada 20 kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap keberlanjutan. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi menunjukkan semakin tingginya jumlah kegiatan Program PLPBK yang diikuti oleh tempat aktor tertentu berada. Hubungan antara aktor dalam kegiatan Program PLPBK memungkinkan aliran sumber daya terjadi. Setiap aktor dapat memperkaya sumber daya mereka melalui ikatan sosial mereka. Oleh karena itu, tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti kemungkinan transfer sumber daya yang lebih tinggi antar aktor terkait. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan dapat dijelaskan dalam Gambar 4.40 berikut.



Gambar 4.40 Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam tiap Tahap Program PLPBK

Keterangan:

**Tahap Persiapan (A)**

- A1 : Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK
- A2 : Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan
- A3 : Penguatan dan Penguatan Kapasitas TIPP
- A4 : Perekrutan dan Penguatan Kapasitas TAPP

**Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (B)**

- B1 : Membangun Visi Kawasan Prioritas
- B2 : Pelaksanaan Pemetaan Swadaya
- B3 : Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan
- B4 : Uji publik hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPLP Kawasan Prioritas)
- B5 : Forum konsultasi : RTPLP Kawasan prioritas
- B6 : Pengesahan dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan disosialisasikan di tingkat Kawasan prioritas dan Kelurahan
- B7 : Pemasaran Sosial

**Tahap Pelaksanaan Pembangunan (C)**

- C1 : Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM
- C2 : Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Penyusunan Proposal Kegiatan
- C3 : Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

**Tahap Keberlanjutan (D)**

- D1 : Melakukan evaluasi awal
- D2 : Melakukan evaluasi berkala
- D3 : Menyusun laporan akhir dan program kerja minimal 1 tahun ke depan
- D4 : Melakukan sosialisasi program kerja 1 tahun ke depan
- D5 : Penyusunan dan penyepakatan rencana kerja perencanaan, pemasaran sosial, dan pelaksanaan pembangunan
- D6 : Penguatan lembaga pengelola pembangunan kawasan

Berdasarkan Gambar 4.42, menunjukkan penurunan tingkat keikutsertaan masyarakat terutama pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan. Titik kulminasi keikutsertaan masyarakat terjadi pada masing-masing 1 kegiatan pada tahap persiapan serta tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran. Kedua kegiatan tersebut

adalah Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan (A2) serta Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan (B3). Berdasarkan *input* keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan di tahap Program PLPBK seperti tertera pada Gambar 4.42, Tabel 4.12 berikut merupakan hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan.

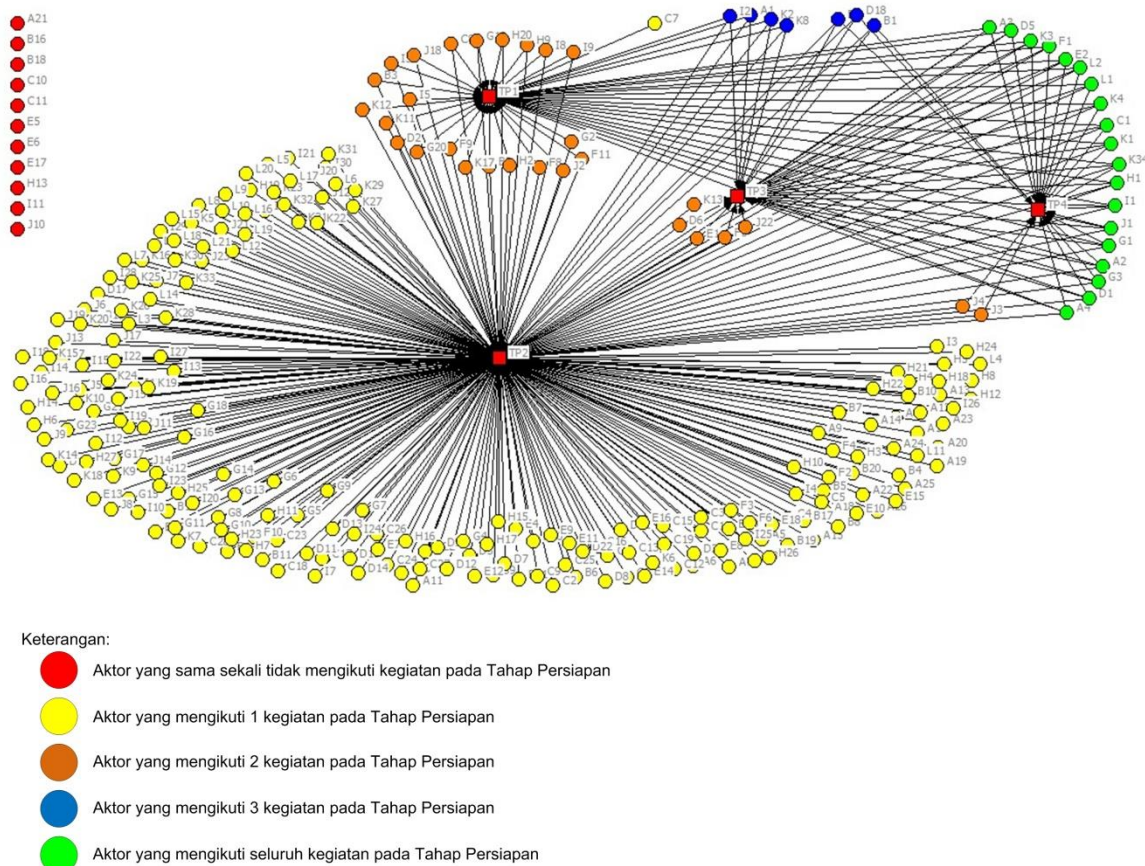
*Tabel 4.12 Tingkat Partisipasi Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Program PLPBK*

Tahap	Klasifikasi	Jumlah Kegiatan	Nilai Tingkat Partisipasi	Kategori
Tahap Persiapan	0 – 1,33 (Rendah) 1,34 – 2,66 (Sedang) 2,67 – 4 (Tinggi)	4	1,31	Rendah
Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran	0 – 2,33 (Rendah) 2,34 – 4,66 (Sedang) 4,67 – 7 (Tinggi)	7	1,63	Rendah
Tahap Pelaksanaan Pembangunan	0 – 1 (Rendah) 1,1 – 2 (Sedang) 2,1 – 3 (Tinggi)	3	0,34	Rendah
Tahap Keberlanjutan	0 – 2 (Rendah) 2,1 – 4 (Sedang) 4,1 – 6 (Tinggi)	6	0,61	Rendah

Tabel 4.20 menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat pada tiap tahap pelaksanaan Program PLPBK. Hasil perhitungan tingkat partisipasi menjelaskan seberapa banyak aktor yang mengikuti kegiatan pada tiap tahap Program PLPBK. Nilai tingkat partisipasi didapatkan dengan membagi jumlah matriks diagonal dengan jumlah responden. Rata-rata responden hanya mengikuti 1 sampai 2 kegiatan dalam tiap tahap program. Semua nilai tingkat partisipasi masyarakat seluruh tahap terkategori rendah, dengan masing-masing nilai, yaitu 1,11; 2,11; 0,34; dan 0,61. Artinya masyarakat rata-rata terlibat dalam 1,11 kegiatan dari 4 kegiatan pada tahap persiapan; 2,11 kegiatan dari 7 kegiatan pada perencanaan partisipatif dan pemasaran; 0,34 kegiatan dari 3 kegiatan pada tahap pelaksanaan pembangunan; serta 0,61 kegiatan dari 6 kegiatan pada tahap keberlanjutan. Nilai tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada tahap persiapan serta tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran mengindikasikan antusiasme masyarakat yang besar terhadap penerimaan Program PLPBK dan turut aktif dalam peningkatan kualitas permukimannya. Hal ini dibuktikan dengan 96% dari total responden terlibat pada sosialisasi Program PLPBK baik di tingkat kelurahan maupun tingkat RW. Selanjutnya responden juga banyak terlibat aktif pada proses perencanaan partisipatif pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran yang menjadi corak Program PLPBK, yaitu penyusunan RTPLP (Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman), aturan bersama dan rencana pengelolaan kawasan.



Sebaliknya, nilai tingkat partisipasi masyarakat yang rendah pada tahap pelaksanaan pembangunan, serta tahap keberlanjutan dimungkinkan karena *scope* kegiatan pada kedua tahap tersebut banyak ditujukan untuk lembaga pengelola pembangunan seperti TAPP, TIPP, BKM dan KSM. Rendahnya nilai tingkat partisipasi pada ke-empat tahap tersebut dimungkinkan karena tingkat partisipasi dihitung dengan memasukkan seluruh responden, tanpa mengecualikan responden yang terisolasi dalam jaringan karena ketidakhadiran mereka dalam kegiatan PLPBK. Dapat diasumsikan nilai tingkat partisipasi yang rendah berbanding lurus dengan kerapatan antar masyarakat yang rendah, jika responden tidak terlibat setidaknya 1 kegiatan pada tahap pelaksanaan Program PLPBK.



Gambar 4.41 Matriks *Bipartite* pada Tahap Persiapan

Keterangan: TP (Tahap Persiapan)

- TP1 : Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK
- TP2 : Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan
- TP3 : Pengukuhan dan Penguatan Kapasitas TIPP
- TP4 : Perekrutan dan Penguatan Kapasitas TAPP

Gambar 4.41 merupakan matriks *bipartite* pada Tahap Persiapan yang terbentuk dengan menggunakan *UCINET 6.0* berdasarkan *input data 2 mode* (responden x kegiatan) keikutsertaan masyarakat pada Tahap Persiapan. Pada Gambar 4.41, tahap persiapan terdiri dari 4 kegiatan (simbol kotak warna merah), yaitu Lokakarya Penyepakatan Kawasan Prioritas PLPBK (TP1), Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan



(TP2), Penguatan dan Penguatan Kapasitas TIPP (TP3) dan Perekrutan dan Penguatan Kapasitas TAPP (TP4) . Sebanyak 96% dari total responden yang berpartisipasi pada tahap persiapan, sedangkan 5% lainnya atau sebanyak 11 responden (bulatan warna merah) sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan pada tahap persiapan. Artinya sejumlah 11 responden tersebut terisolasi dalam jaringan atau tidak terkoneksi dengan responden yang berpartisipasi. Secara detail jumlah responden yang berafiliasi di tiap kegiatan pada tahap persiapan program dijelaskan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Persiapan

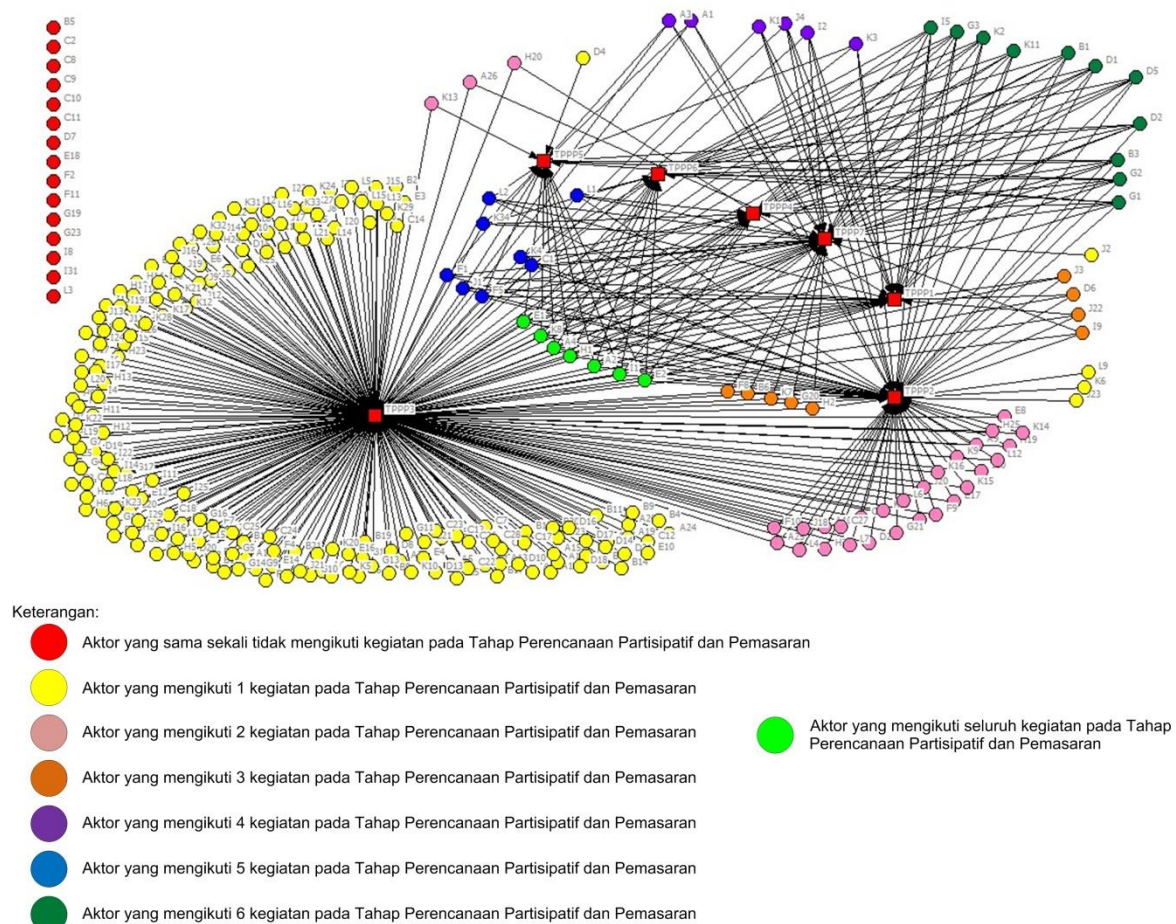
	A1	A2	A3	A4
A1	46	45	23	19
A2	45	273	31	24
A3	23	31	31	22
A4	19	24	22	24

Berdasarkan Tabel 4.13, sebanyak 273 responden atau 96% dari total responden berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan (TP2). Tingginya tingkat partisipasi pada tahap Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan, dikarenakan *scope* kegiatan TP2 memang ditujukan untuk masyarakat RW 04 dan masyarakat Kelurahan Polehan. Sehingga memungkinkan lebih banyak aktor yang terlibat. kegiatan Sosialisasi PLPBK Kawasan Prioritas dan Kelurahan Polehan (TP2) yang disiapkan oleh TIPP dilakukan secara meriah untuk menarik antusias warga, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pengajian dan gerak santai, dengan menggunakan media promosi berupa baliho dan spanduk. Sebaliknya masyarakat tidak banyak terlibat pada tahap TP3 dan TP4, dikarenakan pada kedua tahap tersebut hanya berupa rekrutmen dan pelatihan oleh BKM dan Lurah sebagai pelaksana kepada calon anggota TIPP dan calon anggota tenaga ahli sebagai peserta yang difasilitasi oleh Tim Askot, Askot *Urban Planner* dan Tim Korkot. Berikut dokumentasi kegiatan pada Tahap Persiapan.



Gambar 4.42 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Program PLPBK kepada Masyarakat Kelurahan Polehan

*Output* tahap kegiatan persiapan adalah tokoh strategis pada lingkup Kelurahan Polehan, seperti perangkat kelurahan dan ketua masing-masing RT di RW 04 Kelurahan Polehan memiliki pemahaman yang sama mengenai program PLPBK yang akan dilaksanakan, serta semua *stakeholder* siap melaksanakan dan menyukseskan Program PLPBK.



Gambar 4.43 Matriks *Bipartite* pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

Keterangan: TPPP (Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran)

- TPPP1 : Membangun Visi Kawasan Prioritas
- TPPP2 : Pelaksanaan Pemetaan Swadaya
- TPPP3 : Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan
- TPPP4 : Uji publik hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPLP Kawasan Prioritas)
- TPPP5 : Forum konsultasi : RTPLP Kawasan prioritas
- TPPP6 : Pengesahan dokumen RTPLP Kawasan Prioritas dan disosialisasikan di tingkat Kawasan prioritas dan Kelurahan
- TPPP7 : Pemasaran Sosial

Gambar 4.43 merupakan matriks *bipartite* pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran yang terbentuk dengan menggunakan *UCINET 6.0* berdasarkan *input* data 2 *mode* (responden x kegiatan) keikutsertaan masyarakat pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran. Simbol kotak warna merah pada Gambar 4.43, merepresentasikan 7 kegiatan yang terdapat pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan

Pemasaran. Label TPPP1 sampai dengan TPPP7 menandakan urutan kegiatan pada tahap ini. Nilai tingkat partisipasi pada tahap ini yaitu 1,63 yang terkategori rendah. Artinya rata-rata masyarakat mengikuti 1 atau 2 kegiatan dari 7 kegiatan yang terdapat pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran.

Sebanyak 95% dari total responden atau sejumlah 270 responden hanya mengikuti 1 kegiatan (simbol bulatan warna kuning) pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran. 265 responden diantaranya hanya mengikuti kegiatan Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan (TPPP3). Hanya terdapat 8 responden responden (simbol bulatan hijau) berpartisipasi penuh dalam 7 kegiatan. Sebaliknya sebanyak 15 responden (simbol bulatan warna merah) sama sekali tidak berpartisipasi.

Secara detail jumlah responden yang berafiliasi di tiap kegiatan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran dijelaskan pada Tabel 4.14 berikut.

*Tabel 4.14* Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
B1	26	25	26	14	12	14	21
B2	25	70	67	21	18	21	36
B3	26	67	265	22	20	22	38
B4	14	21	22	22	12	22	22
B5	12	18	20	12	21	12	18
B6	14	21	22	22	12	22	22
B7	21	36	38	22	18	22	39

Berdasarkan Tabel 4.14, jumlah responden tertinggi yang berafiliasi pada jejaring yang terbentuk pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran, terdapat pada kegiatan Penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, Aturan Bersama dan Rencana Pengelolaan Kawasan (B3). Tingginya tingkat partisipasi pada kegiatan B3 dikarenakan pada kegiatan tersebut disosialisasikan, disusun dan disepakati bersama oleh masyarakat yang dilakukan secara simultan ke tiap RT. Sama halnya dengan kegiatan B3, kegiatan B2 atau Pelaksanaan Pemetaan Swadaya juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dikarenakan secara simultan dilakukan ke tiap RT, hanya saja kegiatan pemetaan swadaya ini dibagi menjadi 4 kluster RT, yaitu kluster 1 (RT 01, RT 02 dan RT 03), kluster 2 (RT 05, RT 08 dan RT 09), kluster 3 (RT 06, 07 dan RT 10) dan kluster 4 (RT 04, RT 11 dan RT 12). Pembagian kluster kegiatan pemetaan swadaya dilakukan oleh tim perencanaan partisipatif yang dibentuk oleh BKM Polehan dan dibantu oleh TAPP Universitas Brawijaya. Selain

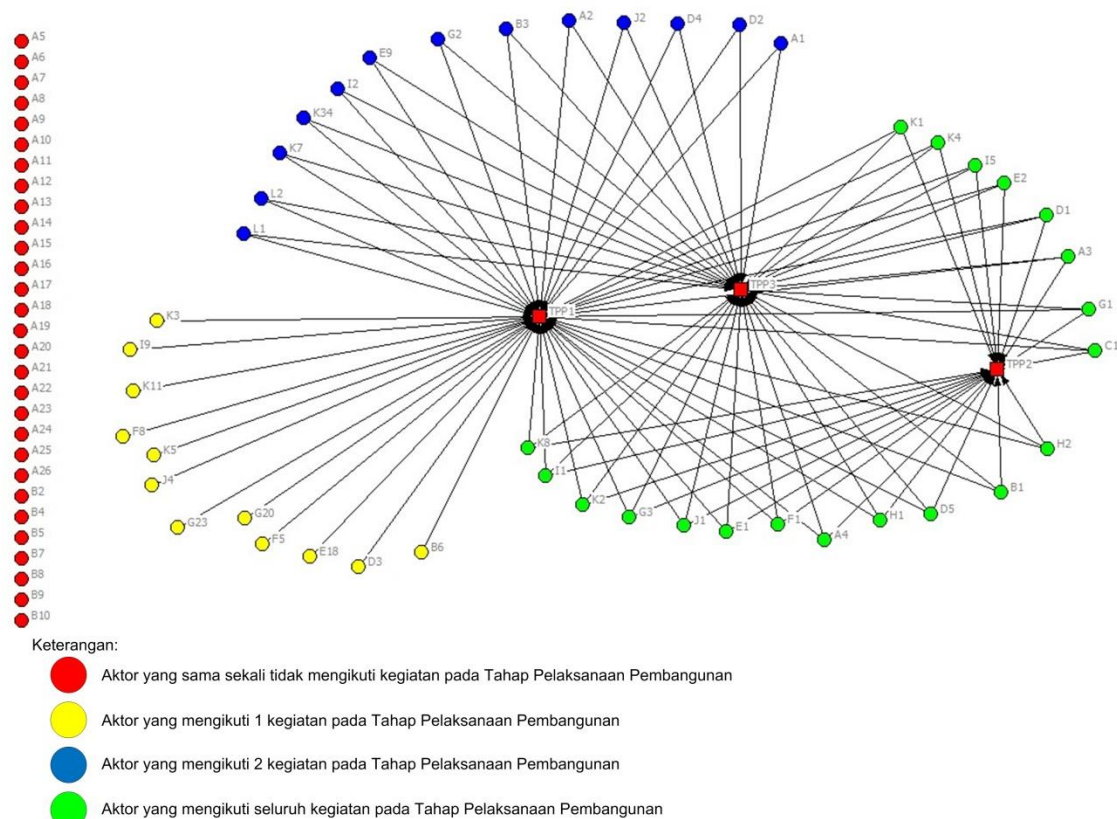


itu, kegiatan pemetaan swadaya dikhususkan juga untuk perempuan. Berikut dokumentasi kegiatan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran.



Gambar 4.44 Dokumentasi Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

*Output* pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran ini adalah terwujudnya gagasan, visi dan harapan oleh masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan, serta masyarakat mampu mengenali dan memetakan potensi dan persoalan-persoalan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Selanjutnya masyarakat memberikan alternatif solusi yang akan dilakukan yang dituangkan melalui RTPLP, kemudian menyepaktinya dengan aturan-aturan yang mengikat melalui Aturan Bersama.



Gambar 4.45 Matriks *Bipartite* pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Keterangan: TPP (Tahap Pelaksanaan Pembangunan)

TPP1 : Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM

TPP2 : Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Penyusunan Proposal Kegiatan

TPP3 : Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Gambar 4.45 merupakan matriks *bipartite* pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan yang terbentuk dengan menggunakan *UCINET 6.0* berdasarkan *input data 2 mode* (responden x kegiatan) keikutsertaan masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan. Simbol kotak warna merah pada Gambar 4.45, merepresentasikan 3 kegiatan yang terdapat pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan. Label TPP1, TPP2 dan TPP3 mengindikasikan urutan kegiatan pada tahap ini. Nilai tingkat partisipasi pada tahap ini yaitu 0,34 yang terkategori rendah dari nilai maksimal 3. Artinya rata-rata masyarakat hanya mengikuti 1 kegiatan dari 3 kegiatan yang terdapat pada tahap pelaksanaan pembangunan. Rendahnya nilai partisipasi ini dikarenakan hanya 45 responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pada tahap ini, sementara itu 240 responden lainnya atau sebesar 84% responden (simbol bulatan merah) tidak berpartisipasi pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan. Sebanyak 12 responden (simbol bulatan kuning) hanya berpartisipasi dalam 1 kegiatan, yaitu kegiatan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM. Sementara itu sebanyak 20 responden (simbol bulatan hijau) berpartisipasi penuh dalam 3 kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan. Secara detail jumlah responden yang berafiliasi di tiap kegiatan pada tahap pelaksanaan pembangunan dijelaskan pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Pelaksanaan Pembangunan

	C1	C2	C3
C1	45	20	33
C2	20	20	20
C3	33	20	33

Berdasarkan Tabel 4.15, jumlah responden tertinggi yang berafiliasi pada jejaring yang terbentuk pada tahap pelaksanaan pembangunan, terdapat pada kegiatan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi: Pembentukan dan Penguatan kapasitas KSM, sebanyak 45 responden berpartisipasi dalam kegiatan C1. Rendahnya tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan dikarenakan jenis dan karakter kegiatannya yang berfokus pada musyawarah teknis pra dan pasca pelaksanaan kegiatan fisik. Kegiatan tersebut didominasi oleh Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) dalam naungan BKM Polehan yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembangunan fisik. Masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan padat karya, yaitu kegiatan gotong-royong atau kerja bakti pembangunan fisik sarana dan prasarana lingkungan. Pelaksana kegiatan sarana dan prasarana berada dalam tanggung jawab masing-masing KSM.



Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat dana BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan. KSM Kelurahan Polehan terdiri atas 3 bidang, yaitu bidang fisik dan sosial, serta bidang ekonomi produktif. Jenis-jenis kegiatan KSM bidang fisik dan sosial, serta pemanfaat ekonomi produktif yang memanfaatkan BLM PLPBK adalah:

*Tabel 4.16* Jenis dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Program PLPBK Kelurahan Polehan

No	Jenis Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Persampahan	KSM Pancawarna
2	Drainase	KSM Blue Safir
3	RTH	KSM Kecubung Wungu
4	Prasarana Jalan	KSM Phirus Persia
5	Jalan dan Saluran	KSM Bulu Macan
6	Sarana Pos Pantau	KSM Kalimaya

Masing-masing KSM memiliki ketua yang memiliki tugas untuk mengadakan musyawarah dengan warga lokasi sasaran dengan harapan meningkatkan kepedulian warga untuk mensukseskan kegiatan pembangunan fisik yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua KSM mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai teknis pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, KSM mengkomunikasikan teknis pelaksanaan kegiatan bersama fasilitator pendamping dan UPL. Gambar 4.46 berikut merupakan dokumentasi kegiatan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan fisik sarana dan prasarana lingkungan.



*Gambar 4.46* Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Lingkungan

Pelaksanaan kerja bakti bukan pada siang hari akan tetapi malam hingga dini hari, dikarenakan pada siang hari masyarakat bekerja. Masyarakat bekerja sesuai dengan membagi peran atas tugas yang sudah di sepakati dalam rembug.

Keterangan: TK (Tahap Keberlanjutan)

TK2 : Melakukan evaluasi berkala

TK4 : Melakukan sosialisasi program kerja 1 tahun ke depan

TK6 : Penguatan lembaga pengelola pembangunan kawasan

Gambar 4.47 merupakan matriks *bipartite* pada Tahap Keberlanjutan yang terbentuk dengan menggunakan *UCINET 6.0* berdasarkan *input* data 2 *mode* (responden x kegiatan) keikutsertaan masyarakat pada Tahap Keberlanjutan. Simbol kotak warna biru pada Gambar 4.47, merepresentasikan 6 kegiatan yang terdapat pada tahap keberlanjutan. Label D1 sampai dengan D6 mengindikasikan urutan kegiatan pada tahap ini. Nilai tingkat partisipasi pada tahap ini yaitu 0,61 yang terkategori rendah dari nilai maksimal 6. Artinya rata-rata masyarakat hanya mengikuti 1 kegiatan dari 6 kegiatan yang terdapat pada tahap pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, hanya 51 responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pada tahap ini, sementara itu 234 responden lainnya atau 82% lainnya (simbol bulatan merah) tidak berpartisipasi pada tahap ini. Sebaliknya terdapat 11

responden (simbol bulatan hijau) berpartisipasi penuh dalam tiap kegiatan pada Tahap Keberlanjutan.

Secara detail jumlah responden yang berafiliasi di tiap kegiatan pada tahap keberlanjutan dijelaskan pada Tabel 4.17 berikut.

*Tabel 4.17* Matriks Jaringan Afiliasi Keikutsertaan Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Tiap Kegiatan di Tahap Keberlanjutan

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	38	20	14	22	30	30
D2	20	24	14	18	23	19
D3	14	14	15	13	15	14
D4	22	18	13	33	22	21
D5	30	23	15	22	33	25
D6	30	19	14	21	25	30

Berdasarkan Tabel 4.17, jumlah responden tertinggi yang berafiliasi pada jejaring yang terbentuk pada Tahap Keberlanjutan, terdapat pada kegiatan Evaluasi Awal (D1), yaitu sebanyak 38 responden. Sedangkan jumlah responden terendah yang berafiliasi pada jejaring yang terbentuk terdapat pada kegiatan Menyusun laporan akhir dan program kerja minimal 1 tahun ke depan (D3), yaitu sebanyak 15 responden. Rendahnya tingkat partisipasi pada tahap keberlanjutan dikarenakan antusiasme masyarakat yang menurun, karena pada tahap ini terhitung berjarak 1 tahun lebih dengan dimulainya Program PLPBK atau tepatnya pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Masyarakat merasa proses ini terlalu panjang, dan lebih mempercayakan kepada perwakilan BKM Polehan. Hal ini dibuktikan dengan unsur yang berpartisipasi dalam tahap ini mayoritas adalah anggota BKM Polehan, KSM, TIPP, ataupun ketua masing-masing RT. Padahal pada tiap kegiatan tiap RT diwajibkan untuk mengirim perwakilannya minimal sebanyak 4 orang.

#### 4.5.2 Kerapatan Antar Masyarakat pada Pelaksanaan Program PLPBK

Perhitungan nilai hubungan kerapatan antar masyarakat dalam pelaksanaan program PLPBK diketahui dengan menggunakan analisis *density*. Kerapatan antar masyarakat (*density*) diasosiasikan dengan kepadatan jejaring dalam kegiatan Program PLPBK yang dihitung dengan membagi jumlah hubungan yang terjadi (*actual ties*) dengan jumlah hubungan yang mungkin terjadi (*possible ties*) (Wasserman dan Faust, 1994). Jaringan yang dihasilkan adalah jaringan tidak berarah (*undirected network*), jaringan yang di dalamnya sebuah *node* memiliki hubungan tidak berarah dengan *node* dalam jaringan tersebut. Hasil dari kerapatan sebuah jaringan dalam kegiatan Program PLPBK akan menginformasikan bagaimana pola penyebaran atau difusi informasi itu terjadi, yang bergerak dari *node* satu ke *node* yang lain dalam sebuah jaringan. Selain itu akan diketahui

pula aktor mana yang memiliki modal sosial yang tinggi dalam sebuah jaringan. Analisis *density* dihitung dengan menghitung proporsi keikutsertaan responden dalam tahap pelaksanaan program PLPBK, dari mulai tahap persiapan program sampai dengan tahap keberlanjutan. Tabel 4.18 berikut merupakan hasil nilai perhitungan *density* RW 04 Kelurahan Polehan menggunakan *UCINET 6.0*.

Tabel 4.18 Nilai *Density* RW 04 Kelurahan Polehan

Tahapan Program	Klasifikasi	Nilai Densitas	Kategori
Persiapan	0 - 0,33 (rendah)	0,919	Tinggi
Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran	0,34 – 0,66 (sedang)	0,871	Tinggi
Pelaksanaan Pembangunan	0,67 – 1 (tinggi)	0,024	Rendah
Keberlanjutan		0,027	Rendah

Tabel 4.18 menggambarkan nilai *density* masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada tiap tahap pelaksanaan Program PLPBK. Dapat dilihat bahwa nilai *density* pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap Keberlanjutan. Nilai *density* pada Tahap Persiapan terkategori tinggi, yaitu sebesar 0,919. Hal ini menunjukkan bahwa 91,9% pasang responden mengikuti kegiatan yang sama pada tahap persiapan atau merupakan *co-member* setidaknya 1 dari 4 kegiatan dalam tahap persiapan. Sama halnya pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran terkategori tinggi, yaitu sebesar 0,871. Hal ini menunjukkan bahwa 87,1% pasang responden mengikuti kegiatan yang sama pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran atau merupakan *co-member* setidaknya 1 sampai 7 kegiatan dalam tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran. Tingginya nilai *density*, mengindikasikan tingginya tingkat interaksi antar masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam difusi informasi kaitannya dengan Program PLPBK. Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan sosial yang terbentuk pada tahap persiapan dan tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran, memiliki ikatan sosial yang kuat. Ikatan sosial yang kuat mampu memobilisasi sumber daya mereka untuk menangani permasalahan permukimannya. Berkaitan dengan pelaksanaan Program PLPBK, artinya bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme, kesiapan dan komitmen yang kuat dalam memahami tujuan pelaksanaan Program PLPBK, membangun visi untuk lingkungannya, memetakan potensi serta permasalahan yang dihadapi, dan merumuskan dan menyusun aturan yang mereka sepakati bersama.

Sebaliknya pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan, nilai *density* pada kedua tahap tersebut terkategori rendah, yaitu sebesar 0,024 dan 0,027. Artinya hanya 2,4% dan 2,7% masyarakat yang mengikuti kegiatan yang sama pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa



antarresponden memiliki afiliasi yang sangat kecil dengan responden lainnya atau tidak memiliki hubungan yang erat antar responden. Hal tersebut dikarenakan tidak semua responden mengikuti proses penyusunan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan. Kegiatan ini hanya didominasi oleh panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

#### **4.5.3 Aktor Sentral Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK**

Pengidentifikasian aktor sentral masyarakat dalam pelaksanaan Program PLPBK di Kelurahan Polehan dianalisis dengan menggunakan analisis *centrality*. *Centrality* dalam sebuah jaringan sosial timbul dari hubungan yang dimiliki dari sebuah *node* terhadap *node* yang lain (Hanneman & Riddle, 2005). Analisis *centrality* digunakan untuk mengidentifikasi aktor terpenting yang berada dalam posisi strategis dalam jaringan, sehingga struktur sosial masyarakat dapat didefinisikan (Wasserman dan Faust, 1994). Selain itu, Hanneman dan Riddle (2005) menyatakan bahwa analisis berdasarkan perantara/penghubung dalam suatu jaringan, bertujuan untuk mengidentifikasi aktor yang menempati posisi strategis dalam penyebaran informasi (aktor yang berperan sebagai penghubung bagi aktor lainnya yang tidak saling terhubung sebelumnya). Artinya analisis *centrality* dalam sebuah jejaring sosial dapat memberikan pengetahuan peran seorang aktor atau individu dalam lingkungannya. Relevansinya dengan penelitian ini, analisis *centrality* digunakan untuk mengetahui responden yang memiliki pengaruh besar terhadap responden lainnya dalam jaringan yang terbentuk dalam pelaksanaan Program PLPBK.

Indeks *centrality* bernilai antara 0 dan 1 (Wasserman dan Faust, 1994). Mengacu pada Ari et al. (2013), tingkat *centrality* dibagi menjadi tiga kategori interval, meliputi rendah (0-0,33), sedang (0,34-0,66) dan tinggi (0,67-1). Kategorisasi ini memungkinkan terbentuknya tipologi struktur sosial untuk setiap jaringan.

Perhitungan nilai *centrality* dikelompokkan menjadi tiga indikator, yaitu *degree centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*. *Degree centrality* mengukur tingkat aktivitas aktor, dengan yang paling aktif memiliki indeks sentralitas maksimal. *Closeness centrality* mengukur jarak antara aktor dalam jaringan, sementara *betweenness centrality* mengukur aktor sentral yang berpotongan dengan jalur terpendek lainnya antara pasangan aktor lainnya, yang berarti aktor utama ini berpotensi memiliki kontrol atas interaksi antara keduanya yang tidak berdekatan aktor (Wasserman dan Faust, 1994).



Sebagai konsekuensinya, aktor utama mungkin memiliki lebih banyak kekuatan interpersonal terhadap orang lain.

Berikut hasil perhitungan analisis *centrality* keseluruhan tahap pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan dengan menggunakan *UCINET 6.0* dan visualisasi jaringan menggunakan *Netdraw*.

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Keseluruhan Tahap Pelaksanaan Program PLPBK

Tahap Persiapan			
	$g = 285$	$g = 274$	$g = 285$
Centrality	$C_D$ (Degree)	$C_C$ (Closeness)	$C_B$ (Betweenness)
Mean	0,915	0,995	0,002
Std Deviasi	0,189	0,027	0,005
Variance	0,358	0,074	0
Min	0	0,544	0
Max	0,957	1	0,013
Level of centrality (jumlah berdasarkan kategori nilai centrality)			
0,00 – 0,33	12	0	285
0,34 – 0,66	0	1	0
0,67 – 1,00	273	273	0
Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran			
	$g = 285$	$g = 270$	$g = 285$
Centrality	$C_D$ (Degree)	$C_C$ (Closeness)	$C_B$ (Betweenness)
Mean	0,867	0,977	0,009
Std Deviasi	0,227	0,058	0,019
Variance	0,514	0,340	0
Min	0	0,519	0
Max	0,944	1	0,068
Level of centrality (jumlah berdasarkan kategori nilai centrality)			
0,00 – 0,33	20	0	285
0,34 – 0,66	0	5	0
0,67 – 1,00	265	265	0
Tahap Pelaksanaan Pembangunan			
	$g = 285$	$g = 45$	$g = 285$
Centrality	$C_D$ (Degree)	$C_C$ (Closeness)	$C_B$ (Betweenness)
Mean	0,024	1	0
Std Deviasi	0,056	0	0
Variance	0,316	0	0
Min	0	1	0
Max	0,154	1	0
Level of centrality (jumlah berdasarkan kategori nilai centrality)			
0,00 – 0,33	285	0	285
0,34 – 0,66	0	0	0
0,67 – 1,00	0	45	0
Tahap Keberlanjutan			
	$g = 285$	$g = 51$	$g = 285$
Centrality	$C_D$ (Degree)	$C_C$ (Closeness)	$C_B$ (Betweenness)
Mean	0,0265	0,8783	0,002
Std Deviasi	0,0577	0,1089	0,006
Variance	0,3336	1,1878	0
Min	0	0,6493	0
Max	0,1754	1	0,021
Level of centrality (jumlah berdasarkan kategori nilai centrality)			
0,00 – 0,33	285	0	285
0,34 – 0,66	0	1	0

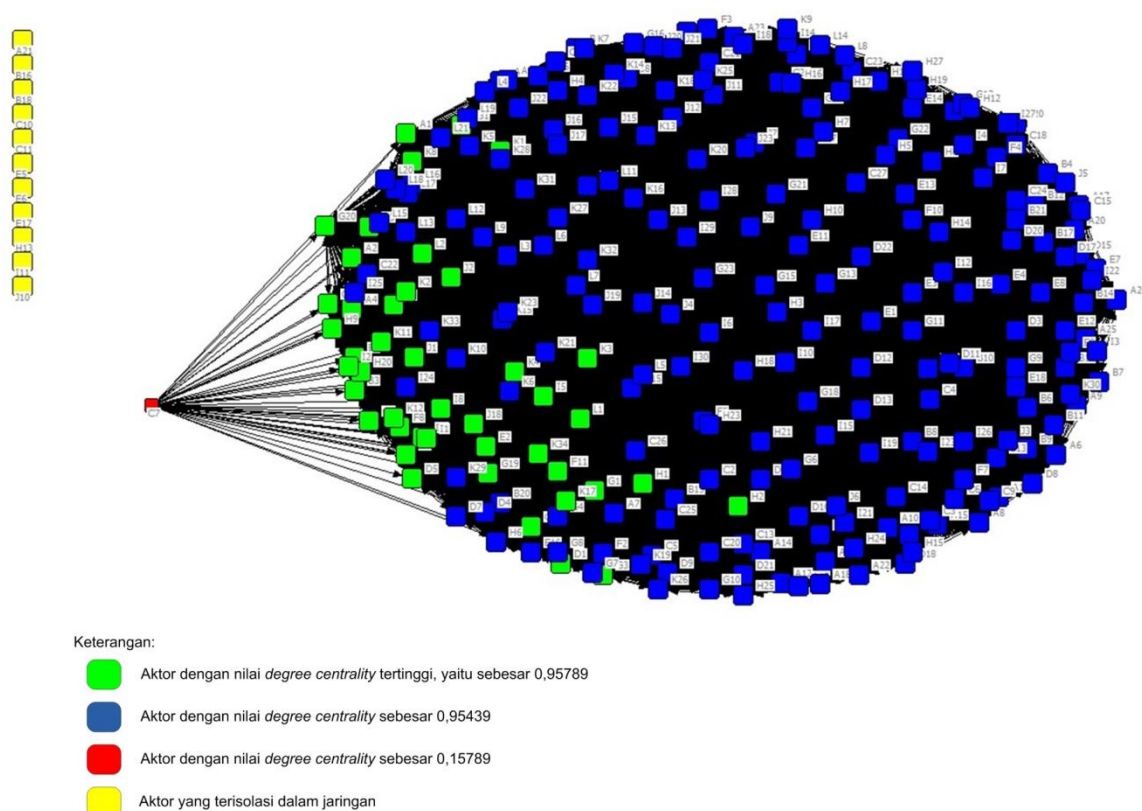
Tahap Persiapan			
	$g = 285$	$g = 274$	$g = 285$
<i>Centrality</i>	$C_D$ ( <i>Degree</i> )	$C_C$ ( <i>Closeness</i> )	$C_B$ ( <i>Betweenness</i> )
0,67 – 1,00	0	50	0

Hasil perhitungan analisis *centrality* pada Tabel 4.19 berdasarkan input matriks keikutsertaan responden dalam seluruh kegiatan pada 4 tahap Program PLPBK, yang terdiri dari (i) 4 kegiatan pada tahap persiapan, (ii) 7 kegiatan pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran, (iii) 3 kegiatan pada tahap pelaksanaan pembangunan, dan (iv) 6 kegiatan pada tahap keberlanjutan.

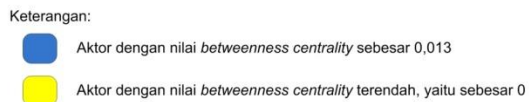
Berdasarkan **Tabel 4.19**, dapat diketahui bahwa nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran cenderung tinggi dengan masing-masing rerata nilai mencapai 0,915 dan 0,867 dari rentang nilai keseluruhan aktor yang terlibat, yaitu 0 sampai 0,957 dan 0 sampai 0,944. Sebanyak 273 aktor pada Tahap Persiapan dan 265 pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran memiliki nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) yang terkategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa antusiasme masyarakat yang besar terhadap penerimaan Program PLPBK, karena mayoritas responden atau 91% responden terlibat aktif turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pada tahap persiapan dan aktif turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran. Masyarakat diposisikan sebagai subjek perencanaan yang aktif turut serta dalam kegiatan pengenalan/sosialisasi program, penggalan visi dan misi kawasan, pemetaan partisipatif dan perencanaan mikro kawasan serta pembuatan aturan-aturan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, aktor sentral memiliki jangkauan yang luas terhadap seluruh masyarakat pada kedua tahap ini. Selanjutnya nilai *closeness centrality* ( $C_C$ ) juga terkategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa kedekatan antar aktor dalam jaringan yang terbentuk dalam Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran adalah sama rata, yang menjadikan difusi informasi Program PLPBK dapat mengalir begitu cepat pada seluruh aktor yang terlibat. Sebanyak 273 aktor pada Tahap Persiapan serta 265 aktor pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran memiliki nilai yang terkategori tinggi mendekati 1. Sebaliknya, nilai *betweenness centrality* pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran ( $C_B$ ) terkategori rendah, semua aktor memiliki nilai mendekati nilai 0, yaitu pada rentang 0 sampai 0,013 dan 0 sampai 0,068. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh sentral pada kedua tahap tersebut mampu menjadi jembatan informasi secara langsung kepada masyarakat, tanpa memerlukan bantuan mediator.

**Gambar 4.48, Gambar 4.49 dan Gambar 4.50** mengilustrasikan jejaring sosial yang terbentuk berdasarkan analisis *centrality* pada tahap persiapan di RW 04 Kelurahan Polehan pada masing-masing indeks *centrality*. Dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai *degree centrality* ( $C_D$ ), *closeness centrality* ( $C_C$ ) dan *betweenness centrality* ( $C_B$ ), pada tahap persiapan tidak terdapat aktor sentral, karena aktor yang terlibat mempunyai nilai indeks *centrality* yang sama rata.

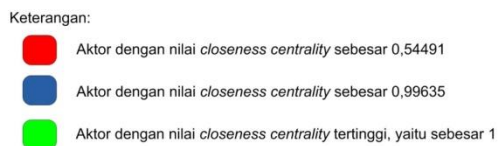
**Gambar 4.51, Gambar 4.52 dan Gambar 4.53** mengilustrasikan jejaring sosial yang terbentuk berdasarkan analisis *centrality* pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran di RW 04 Kelurahan Polehan pada masing-masing indeks *centrality*. Dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai *degree centrality* ( $C_D$ ), terdapat 17 aktor sentral atau aktor yang paling menonjol dalam jejaring sosial (kotak warna hijau), yang memiliki nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) optimal sebesar 0,94386 yang tersebar ke dalam 11 RT. Ke-17 aktor sentral tersebut juga memiliki nilai *closeness centrality* ( $C_C$ ) maksimal, yaitu 1. 17 aktor sentral tersebut terlibat dalam 4 sampai 7 kegiatan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran.



**Gambar 4.48** Netdraw Degree Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Persiapan

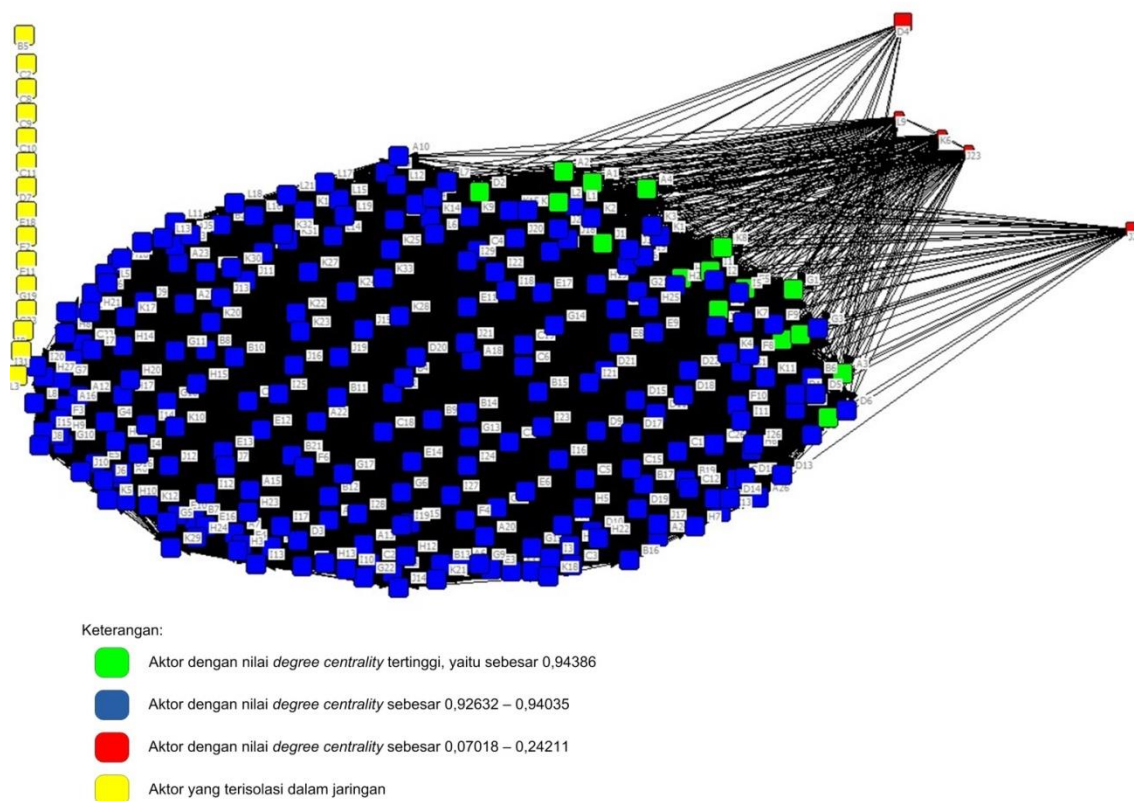


4.49 *Netdraw Betweenness Centrality* Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada 7

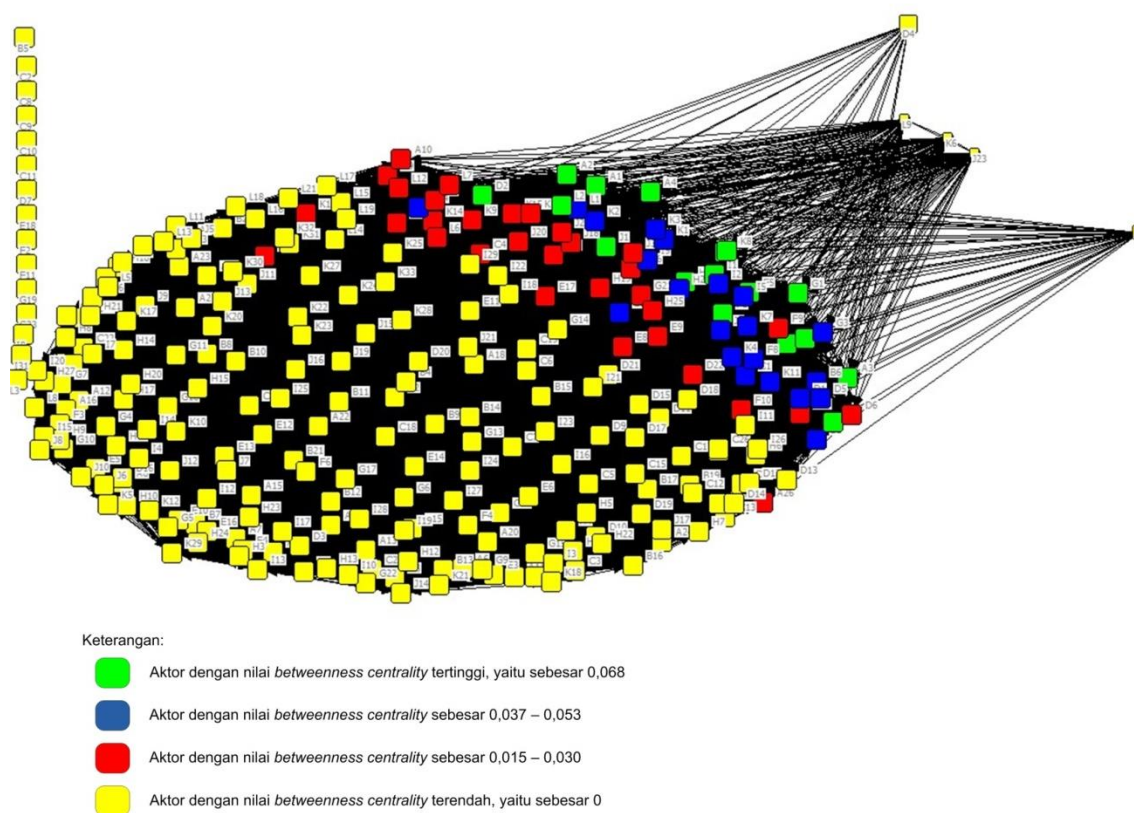


4.50 *Netdraw Closeness Centrality* Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada 7



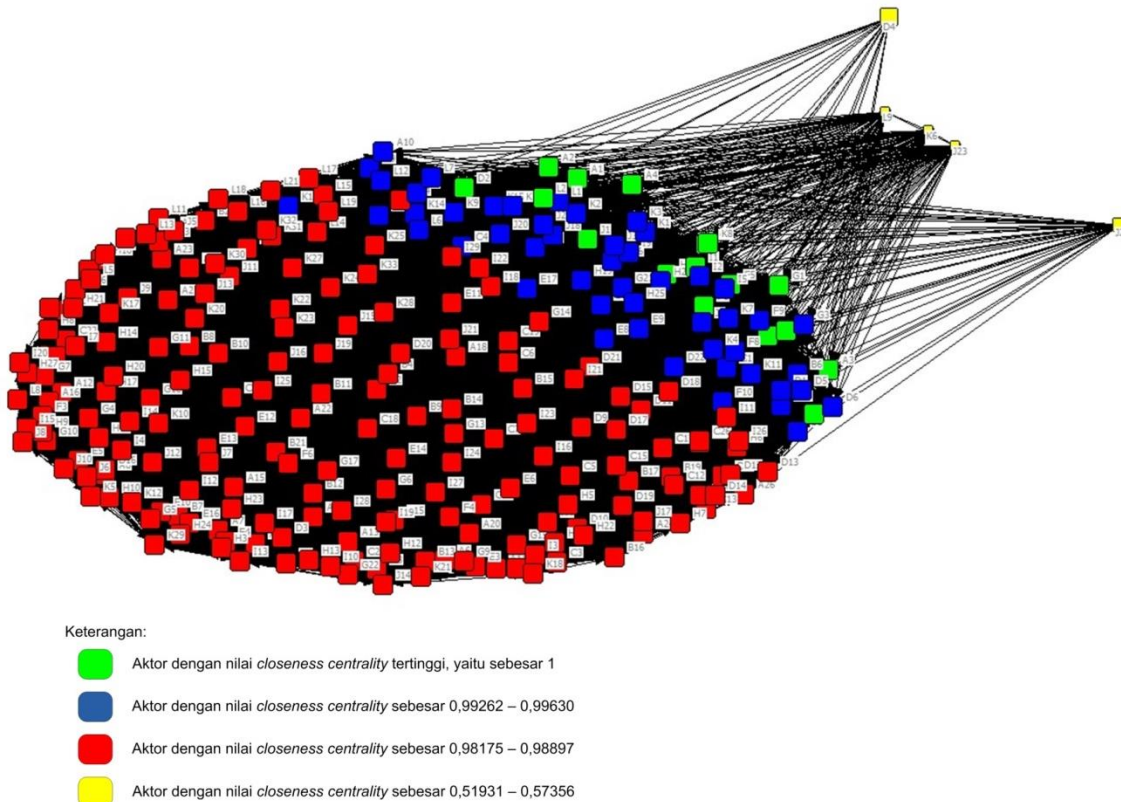


Gambar 4.51 Netdraw Degree Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran



Gambar 4.52 Netdraw Betweenness Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran





Gambar 4.53 Netdraw Closeness Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

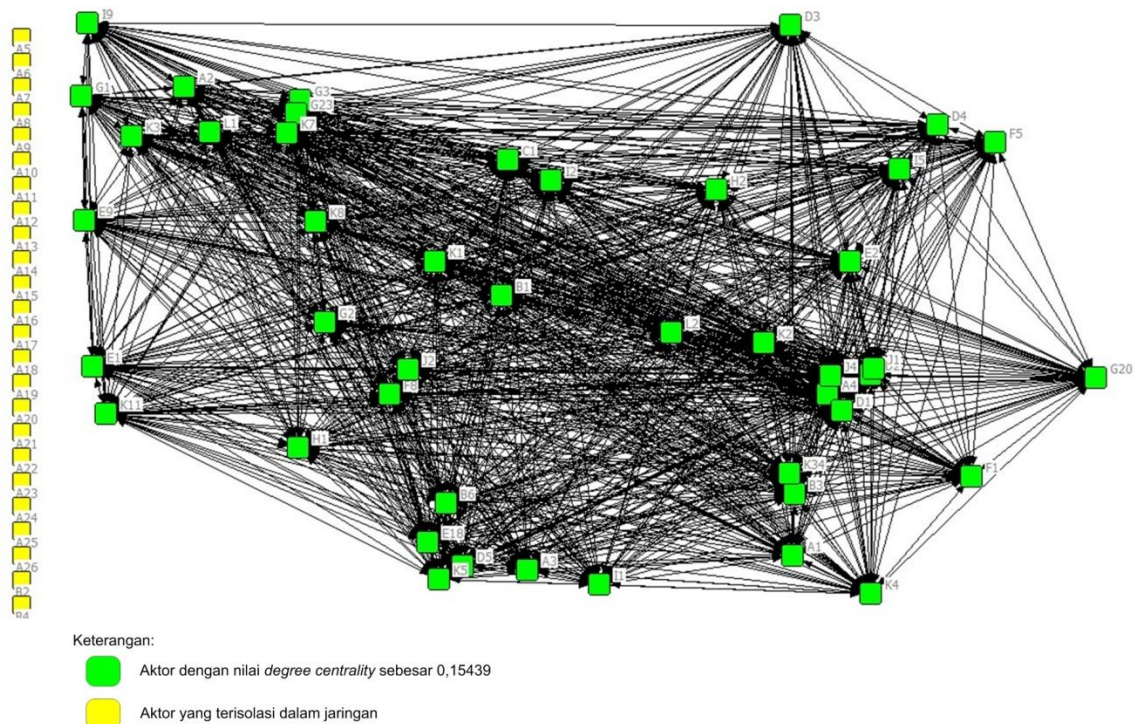
Sebaliknya berdasarkan **Tabel 4.19**, dapat diketahui juga nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap Keberlanjutan sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi pada Tahap Persiapan dan Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran. Nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap Keberlanjutan terkategori rendah dengan masing-masing rerata nilai hanya 0,024 dan 0,0265 dari rentang nilai keseluruhan responden yang terlibat, yaitu 0 sampai 0,154 dan 0,1754. Hal ini dikarenakan tidak banyak aktor yang berpartisipasi dalam kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap Keberlanjutan. Hal ini dimungkinkan karena *scope* kegiatan ini berfokus pada lembaga pengelola pembangunan kawasan, seperti TIPP, TAPP dan KSM baik sebagai pelaksana, peserta, pendamping maupun fasilitator. Hal tersebut terbukti dengan unsur aktor sentral tersebut merupakan TIPP, KSM, TAPP dan BKM. Aktor sentral pada kedua tahap ini tidak dapat menjangkau jaringan secara keseluruhan, karena mayoritas aktor terisolasi dalam jaringan. Akan tetapi, nilai *closeness centrality* ( $C_C$ ) terkategori tinggi, sebanyak 45 aktor yang terlibat dalam kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan 50 aktor yang terlibat dalam kegiatan pada Tahap Keberlanjutan memiliki nilai mendekati 1. Hal ini mengindikasikan bahwa kedekatan antar aktor dalam jaringan yang terbentuk dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap

Keberlanjutan adalah sama rata, yang menjadikan difusi informasi dapat dilakukan dengan cepat. Sebaliknya, nilai *betweenness centrality* ( $C_B$ ) terkategori rendah, seluruh responden nilai 0, dengan rata-rata nilai 0,0065 dan 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa aktor sentral atau mampu menjadi jembatan informasi secara langsung kepada masyarakat, tanpa memerlukan bantuan mediator.

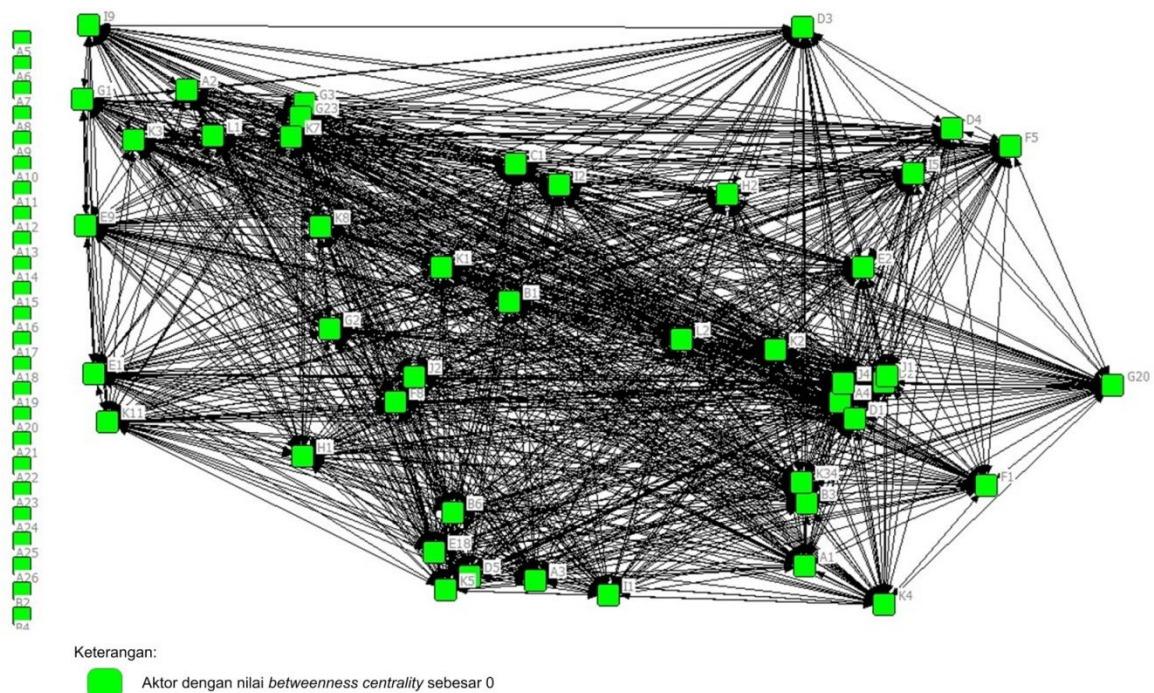
**Gambar 4.54, Gambar 4.55 dan Gambar 4.56** mengilustrasikan jejaring sosial yang terbentuk berdasarkan analisis *centrality* menggunakan program *UCINET 6.0* “*netdraw*”, pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan masing-masing indeks *centrality*. Sebanyak 45 aktor yang terlibat pada tiap kegiatan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan memiliki nilai *degree centrality* ( $C_D$ ), *closeness centrality* ( $C_C$ ) dan *betweenness centrality* ( $C_B$ ) yang identik, yaitu 0,15439 , 1 dan 0. Seluruh aktor sentral pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan setidaknya terlibat dalam 1 sampai 3 kegiatan.

**Gambar 4.57, Gambar 4.58 dan Gambar 4.59** mengilustrasikan jejaring sosial yang terbentuk berdasarkan analisis *centrality* menggunakan program *UCINET 6.0* “*netdraw*”, pada Tahap Keberlanjutan berdasarkan masing-masing indeks *centrality*. Dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai *degree centrality* ( $C_D$ ), terdapat 14 aktor sentral atau aktor yang paling menonjol dalam jejaring sosial (kotak warna hijau), yang memiliki nilai *degree centrality* ( $C_D$ ) optimal sebesar 0,94386 yang tersebar ke dalam 10 RT. Ke-14 aktor sentral tersebut juga memiliki nilai *closeness centrality* ( $C_C$ ) maksimal, yaitu 1. 14 Aktor sentral tersebut terlibat dalam 5 dan 6 kegiatan pada Tahap Keberlanjutan.



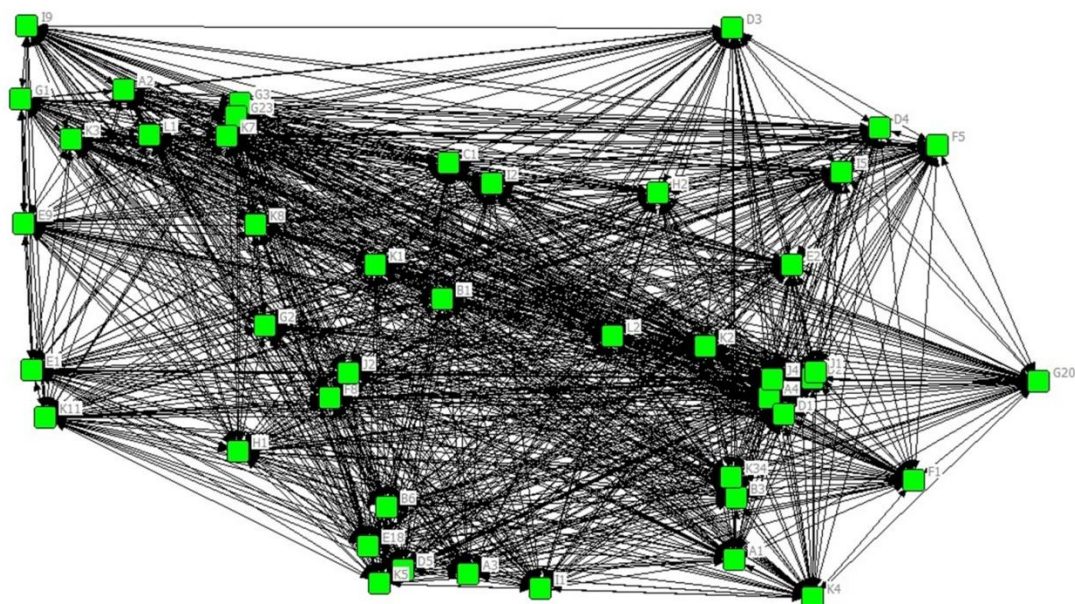


Gambar 4.54 Netdraw Degree Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan



Gambar 4.55 Netdraw Betweenness Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan

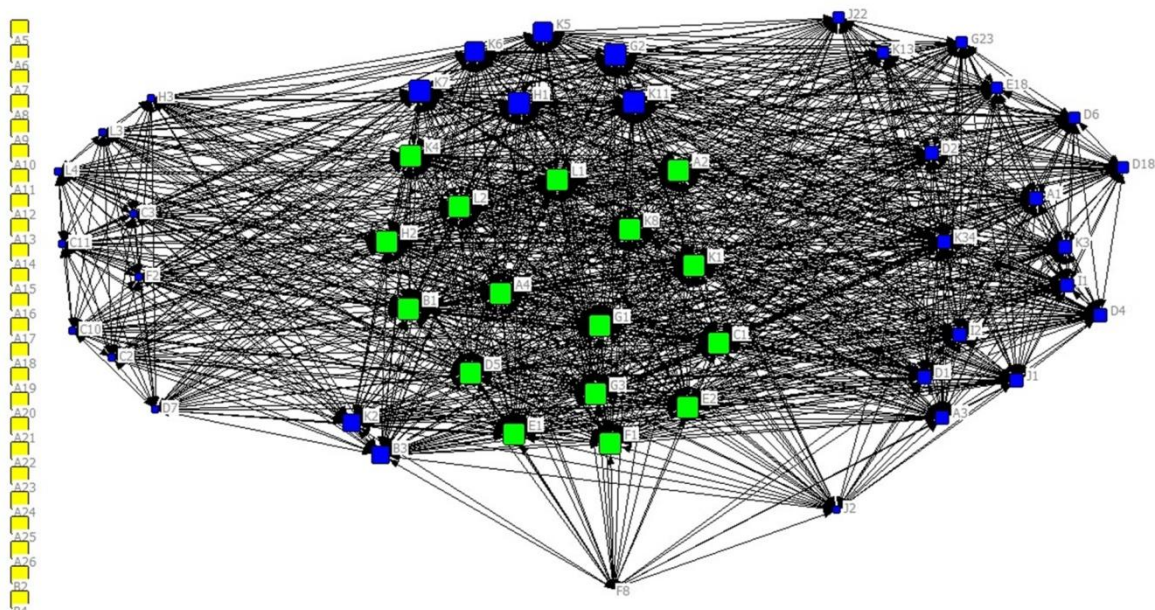




Keterangan:

■ Aktor dengan nilai *closeness centrality* sebesar 1

Gambar 4.56 Netdraw Closeness Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan



Keterangan:

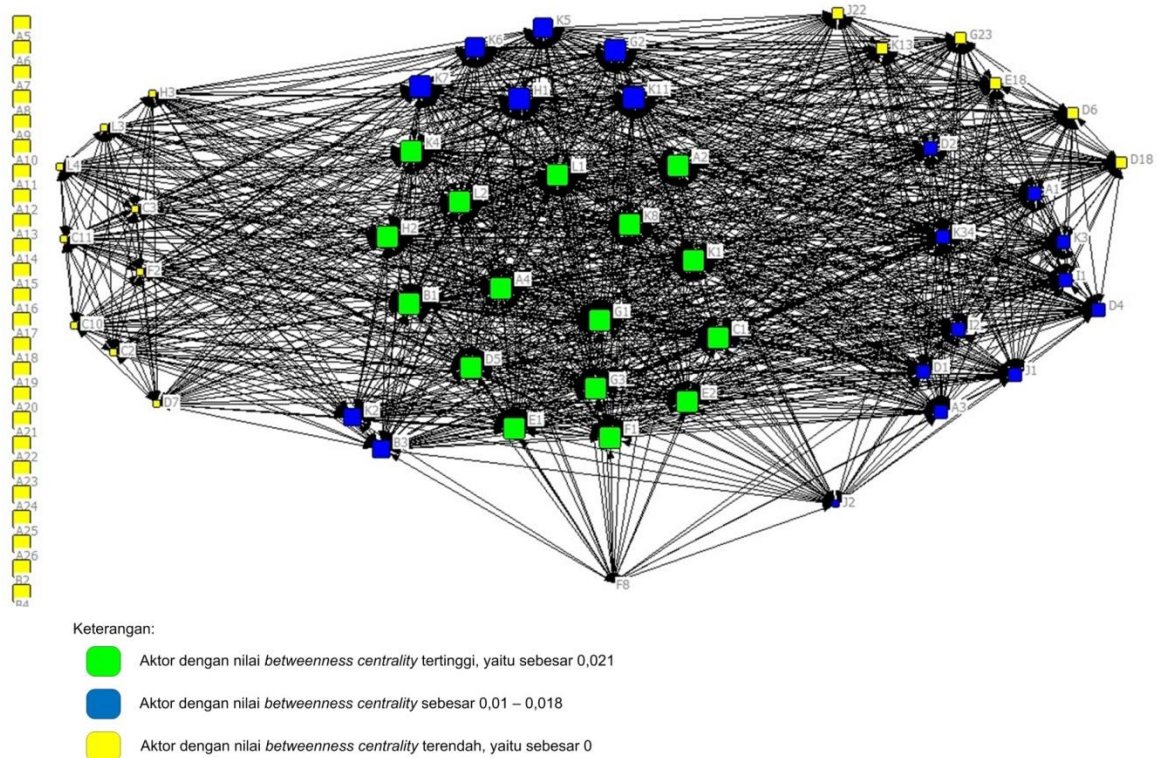
■ Aktor dengan nilai *degree centrality* tertinggi, yaitu sebesar 0,17544

■ Aktor dengan nilai *degree centrality* sebesar 0,08070 – 0,16842

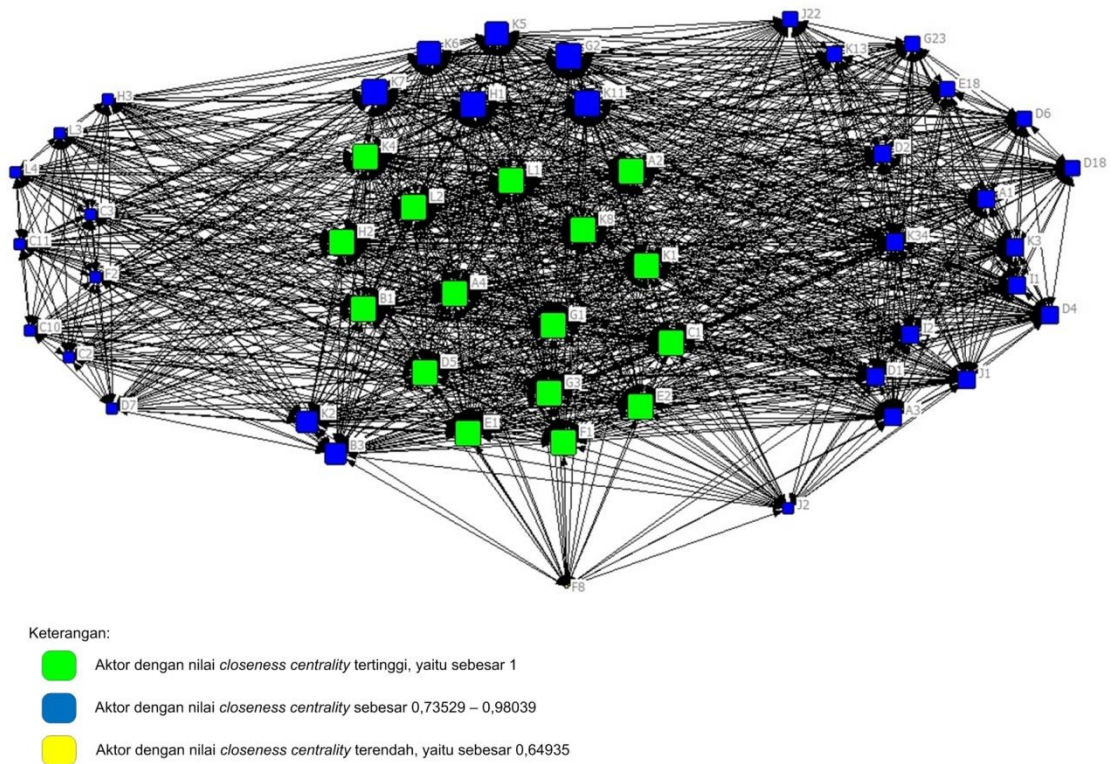
■ Aktor yang terisolasi dalam jaringan

Gambar 4.57 Netdraw Degree Centrality Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan





Gambar 4.58 Netdraw *Betweenness Centrality* Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan



Gambar 4.59 Netdraw *Closeness Centrality* Masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan pada Tahap Keberlanjutan



Tabel 4.20 Profil Aktor Sentral Keseluruhan Tahap Pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan

Kode	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendapatan	Pendidikan	Pekerjaan	Unsur	Intensitas Kehadiran	Aktor Sentral Tahap
A1	Ninik Nuriyati	P	49	2jt - 2,5jt	S1	Guru PAUD	TIPP/KSM	3-4-2-2	2-3
A2	Slamet Sukardji	L	70	2jt - 2,5jt	S1	Pensiunan Bank	TIPP	4-7-2-6	2-3-4
A3	Agus Diadji	L	46	<1jt	SMA	Tukang Ojek	Ketua KSM Pelaksana Perekrutan TAPP	4-4-3-5	2-3
A4	Herwan Purwanto	L	36	<1jt	SMP	Tukang Ojek	TIPP/KSM	4-7-3-6	2-3-4
B1	Agung Sutrisno P	L	42	1jt - 2jt	SMA	Tukang Las Bengkel	TIPP/KSM	3-6-3-4	2-3-4
B3	Sri Kristinah	P	50	<1jt	SMA	Ibu Rumah Tangga	KSM	2-6-2-3	2-3
B6	Ana Suhartono	P	30	<1jt	SMA	Ibu Rumah Tangga	KSM	1-3-1-0	2-3
C1	M. Samsul Arifin	L	49	>3jt	SMA	Toko Kelontong	Ketua KSM Pelaksana Pemasaran	4-5-3-6	2-3-4
D1	Win Lestari	P	49	1jt - 2jt	D3	Penjahit	BKM	4-6-3-5	2-3
D2	Erny Yufaudah	P	52	1jt - 2jt	D3	Pembuat Kue	KSM	2-6-2-3	2-3
D3	Diana Ardhika	P	28	1jt - 2jt	SMA	Wiraswasta	KSM	1-1-1-0	3
D4	Santoso	L	53	1jt - 2jt	SMA	Wiraswasta	TIPP	3-1-2-2	3
D5	Juli Pemilu S	L	46	2jt - 2,5jt	SMP	Pembuat Sofa	Bendahara KSM Pelaksana Pelatihan TIPP	4-6-3-6	2-3-4
E1	Mujayanah	P	60	1jt - 2jt	SD	Wiraswasta	POKJA/TIPP/KSM	2-7-3-6	2-3-4
E2	Aris Setiyono	L	35	1jt - 2jt	SMA	Sales Marketing	Sekretaris KSM Pelaksana Perekrutan TAPP	4-7-3-6	2-3-4
E9	Tri Astutik	P	60	<1jt	SD	Wiraswasta	KSM	1-2-2-0	3
E18	Andi Solvianto	L	29	1jt - 2jt	SMA	Pegawai Pemerintah	KSM	1-0-1-2	3
F1	Sonto	L	63	1jt - 2jt	SD	Penjual Asongan	POKJA/TIPP/KSM	4-5-3-5	2-3-4
F5	Subandi	L	60	1jt - 2jt	TT SD	Tukang Ojek	Anggota KSM Pelaksana Pelatihan TIPP	2-5-1-0	2-3
F8	Susanti	P	47	1jt - 2jt	SMA	Wiraswasta	KSM	2-3-1-1	2-3
G1	Suprpto	L	51	<1jt	TT SD	Tukang Ojek	TIPP/KSM	4-6-3-5	2-3-4
G2	Samila Sueb	P	61	1jt - 2jt	SMP	Penjahit	TIPP/KSM	2-6-2-4	2-3
G3	Gunawan	L	39	1jt - 2jt	SMA	Supir Angkot	TIPP/KSM	4-6-3-6	2-3-4
G20	Usnayati	P	52	1jt - 2jt	SD	Wiraswasta	KSM/PKK	2-3-1-0	2-3
G23	Siti Komarijah	P	40	<1jt	SMP	Ibu Rumah Tangga	KSM	1-0-1-2	3
H1	Sriwati	P	52	<1jt	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sekretaris KSM Pelaksana Pelatihan TIPP	4-7-3-5	2-3
H2	Andi Siswoyo	L	42	<1jt	SMP	Tukang Parkir	KSM	2-3-3-5	2-3-4
I1	Koko Affandi	L	48	1jt - 2jt	SMA	Tukang Bangunan	TIPP/KSM	4-7-3-2	2-3
I2	Meseri	L	50	<1jt	SMP	Tukang Bangunan	TIPP/KSM	3-4-2-4	2-3
I5	Rita Amara	P	45	1jt - 2jt	SMA	Penjual Asongan	Bendahara KSM Pelaksana PS	2-6-3-0	2-3
I9	Ranem	P	49	<1jt	SMP	Ibu Rumah Tangga	KSM	2-3-1-0	2-3
J1	Suswanti	P	27	1jt - 2jt	SMA	Travel Guide	Ketua KSM Pelaksana Pelatihan TIPP	4-5-3-4	2-3
J2	Supeno	L	62	<1jt	SD	Penjual Asongan	KSM	2-1-2-2	3
J4	Sudarmadi	L	54	<1jt	SD	Kondektur	Bendahara KSM Pelaksana Perekrutan TAPP	2-4-1-0	2-3

Kode	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendapatan	Pendidikan	Pekerjaan	Unsur	Intensitas Kehadiran	Aktor Sentral Tahap
K1	Espi Kustiana	P	44	<1jt	S1	Ibu rumah tangga	Ketua KSM Pelaksana PS	4-4-3-6	2-3-4
K2	Indah Setiawati	P	37	<1jt	SMA	Ibu rumah tangga	POKJA/TIPP/KSM	3-6-3-4	2-3
K3	Nur Sawali	P	50	<1jt	SD	Wiraswasta	TIPP/KSM	4-4-1-3	2-3
K4	Sujadi	L	40	1jt - 2jt	SMA	Wiraswasta	UPL BKM	4-5-3-6	2-3-4
K5	Sumardi	L	59	1jt - 2jt	SMP	Wiraswasta	KSM	1-1-1-3	3
K7	Agus Sudibyo	L	54	1jt - 2jt	SMA	Tukang Las Bengkel	KSM	1-3-2-4	2-3
K8	Esti Respati N.	P	53	<1jt	SMA	Ibu Rumah Tangga	TIPP/KSM	3-7-3-6	2-3-4
K11	Supiati	P	38	2jt - 2,5jt	S1	PNS	KSM	2-6-1-4	3
K34	Nurkholiq	L	45	>3jt	SD	Wiraswasta	KSM	4-5-2-2	3
L1	Kristine	P	35	1jt - 2jt	S1	Pekerja Seni	KSM	4-5-2-6	2-3-4
L2	Sugianto	L	48	1jt - 2jt	SMP	Tukang Bangunan	TIPP/KSM	4-5-2-5	2-3-4

Secara umum, dapat dilihat bahwa pada ke-empat tahap pelaksanaan Program PLPBK RW 04 Kelurahan Polehan, seluruh aktor memiliki kontak langsung dengan aktor lainnya. Oleh karena itu, nilai *betweenness centrality* untuk setiap aktor hampir 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor yang menempati posisi strategis sebagai mediator antara aktor-aktor yang lain. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa transfer informasi diantara aktor akan terjadi di *shortest path* mereka, karena setiap aktor berdekatan (*adjacent*) dengan semua aktor lainnya. Seluruh aktor di RW 04 Kelurahan Polehan secara maksimal dekat dengan seluruh aktor lainnya, sehingga memiliki pengaruh yang sama dalam interaksi sosial satu sama lain. Rata-rata kedekatan responden memiliki nilai 0,9. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh aktor memiliki jalur yang menghubungkan ke seluruh aktor lain.

Tabel 4.20 menjelaskan profil aktor sentral berupa karakter demografis, dapat dilihat bahwa terdapat 45 aktor sentral pada pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan. Jumlah aktor sentral cenderung mengalami penurunan dalam tiap tahap programnya. Akan tetapi, terdapat 16 aktor sentral yang tersebar dalam 10 RT yang memang secara konsisten memiliki kontribusi yang besar dari awal hingga akhir pelaksanaan Program PLPBK (*highlight* kuning). Aktor sentral terbanyak tersebar di RT 11, yaitu sejumlah 3 aktor sentral. Mayoritas aktor sentral menjabat sebagai lembaga pengelola pembangunan baik sebagai anggota BKM, TIPP ataupun KSM. Dalam pengertian ini, mereka dapat dikategorikan menduduki posisi sebagai pemimpin informal melalui kontak mereka yang luas kepada orang lain. Sebagian besar aktor sentral bekerja di sektor perdagangan dan jasa dengan rata-rata pendapatan tiap bulannya mencapai 1jt - 2jt yang tergolong masih di bawah standar Upah Minimum Kota Malang pada tahun 2018. Hampir seluruh aktor sentral termasuk ke dalam kelompok usia produktif yang berada pada rentang usia 15-64 tahun. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, mayoritas aktor sentral memiliki pendidikan menengah, yaitu SMA.

Jika dilihat dari Tabel 4.20, aktor sentral terbagi menjadi 2, yaitu aktor sentral yang konsisten/berkesinambungan (*highlight* kuning) dan aktor sentral yang tidak konsisten/tidak berkesinambungan. Berdasarkan aspek spasial dimana aktor sentral tersebut tinggal, aktor sentral yang konsisten/berkesinambungan berlokasi di 10 RT, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 dan 12. Sementara itu aktor sentral yang tidak konsisten/tidak berkesinambungan berlokasi di 2 RT, yaitu 9 dan 10. Tabel 4.21 dan Tabel 4.22 berikut merupakan karakter sosial masing-masing lokasi.

Tabel 4.21 Karakter Sosial Lokasi Aktor Sentral yang Konsisten/Berkesinambungan (%)

Atribut (%)	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06	RT 07	RT 08	RT 11	RT 12	Rerata
<b>Jenis Kelamin</b>											
Laki-Laki	50.00	71.43	57.14	50.00	50.00	63.64	78.26	70.37	64.71	80.95	63.65
Perempuan	50.00	28.57	42.86	50.00	50.00	36.36	21.74	29.63	35.29	19.05	36.35
<b>Usia</b>											
Produktif	76.92	71.43	82.14	90.91	77.78	100.00	86.96	92.59	100.00	71.43	85.02
Non Produktif	23.08	28.57	17.86	9.09	22.22	0.00	13.04	7.41	0.00	28.57	14.98
<b>Rata-rata usia (tahun)</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>51</b>
<b>Pendidikan</b>											
TT SD	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	9.09	4.35	3.70	0.00	4.76	3.30
SD	46.16	42.86	28.57	31.82	38.89	36.36	30.43	33.33	26.47	42.86	35.77
SMP	26.92	4.76	17.86	13.64	11.11	18.18	39.13	25.93	26.47	23.81	20.78
SMA	15.38	47.62	46.43	40.91	38.89	36.36	26.09	37.04	38.24	23.81	35.08
Diploma/Sarjana	11.54	4.76	7.14	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	4.76	5.07
<b>Mata Pencaharian</b>											
Perdagangan dan Jasa	76.92	61.90	67.86	81.82	72.22	90.91	73.91	74.07	82.35	61.90	74.39
Pegawai Pemerintah	3.85	4.76	3.57	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	2.36
Industri/Pabrik	7.69	9.52	10.71	4.55	0.00	0.00	17.39	7.41	0.00	0.00	5.73
Konstruksi/Bangunan	0.00	0.00	0.00	4.55	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	1.96
Tidak Bekerja	7.69	9.52	3.57	9.09	5.56	0.00	0.00	3.70	2.94	19.05	6.11
Ibu Rumah Tangga	3.85	14.29	14.29	0.00	11.11	9.09	8.70	14.81	8.82	9.52	9.45
<b>Pendapatan</b>											
<1jt	26.92	19.05	17.86	9.09	33.33	9.09	26.09	48.15	41.18	57.14	28.79
1jt - 2jt	61.54	57.14	35.71	81.82	66.67	81.82	69.57	51.85	50.00	42.86	59.90



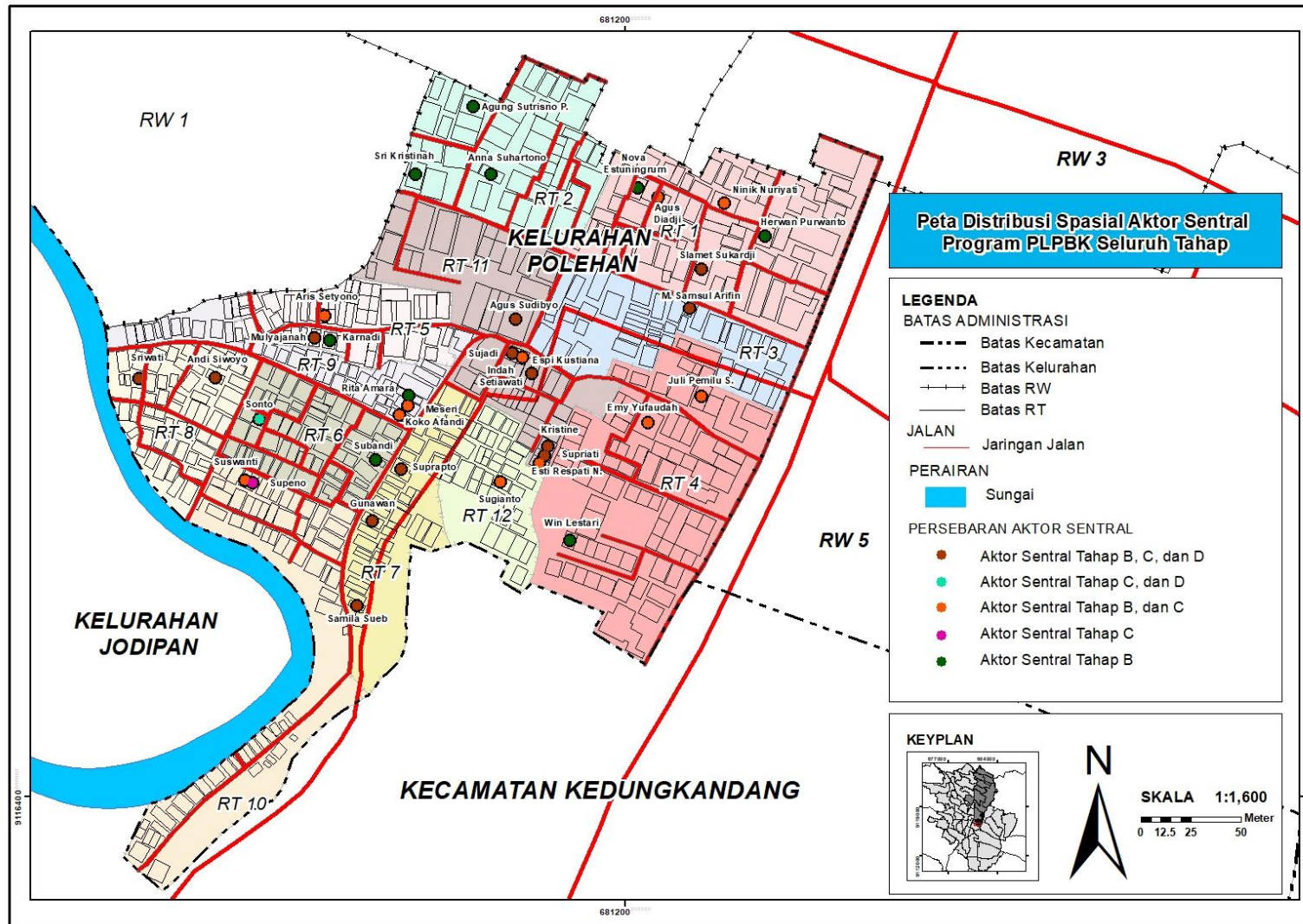
Atribut (%)	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06	RT 07	RT 08	RT 11	RT 12	Rerata
2jt - 2,5jt	11.54	0.00	21.43	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	5.88	0.00	5.70
2,5jt - 3jt	0.00	19.05	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
>3jt	0.00	4.76	3.57	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	2.94	0.00	1.56
<b>Status Penduduk</b>											
Asli	69.23	71.43	82.14	86.36	66.67	72.73	78.26	70.37	97.06	76.19	77.04
Pendatang	30.77	28.57	17.86	13.64	33.33	27.27	21.74	29.63	2.94	23.81	22.96
<b>Suku</b>											
Jawa	96.15	100.00	96.43	100.00	83.33	81.82	86.96	88.89	100.00	90.48	92.41
Luar Jawa	3.85	0.00	3.57	0.00	16.67	18.18	13.04	11.11	0.00	9.52	7.59

Tabel 4.22 Karakter Sosial Lokasi Aktor Sentral yang Tidak Berkesinambungan (%)

Atribut (%)	RT 09	RT 10	Rerata
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-Laki	80.65	78.26	79.45
Perempuan	19.35	21.74	20.55
<b>Usia</b>			
Produktif	93.55	73.91	83.73
Non Produktif	6.45	26.09	16.27
<b>Rata-rata usia (tahun)</b>			
<b>Pendidikan</b>			
TT SD	0.00	0.00	0.00
SD	38.71	56.52	47.62
SMP	32.26	8.70	20.48

Atribut (%)	RT 09	RT 10	Rerata
SMA	25.81	34.78	30.29
Diploma/Sarjana	3.23	0.00	1.61
<b>Mata Pencapaian</b>			
Perdagangan dan Jasa	77.42	86.96	82.19
Pegawai Pemerintah	0.00	0.00	0.00
Industri/Pabrik	6.45	0.00	3.23
Konstruksi/Bangunan	6.45	4.35	5.40
Tidak Bekerja	6.45	8.70	7.57
Ibu Rumah Tangga	3.23	0.00	1.61
<b>Pendapatan</b>			
<1jt	54.84	43.48	49.16
1jt - 2jt	38.71	52.17	45.44
2jt - 2,5jt	0.00	4.35	2.17
2,5jt - 3jt	6.45	0.00	3.23
>3jt	0.00	0.00	0.00
<b>Status Penduduk</b>			
Asli	67.74	82.61	75.18
Pendatang	32.26	17.39	24.82
<b>Suku</b>			
Jawa	74.19	91.30	82.75
Luar Jawa	25.81	8.70	17.25

Jika dilihat dari Tabel 4.21 dan Tabel 4.22, tidak terdapat perbedaan yang signifikan karakter sosial lokasi aktor sentral yang berkesinambungan dengan aktor sentral yang tidak berkesinambungan. Berdasarkan kelompok usia, kedua lokasi tersebut didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan masing-masing persentase mencapai 85,02% dan 83,73%. Kemudian berdasarkan jenis mata pencaharian, kedua lokasi juga memiliki kesamaan berupa dominasi jenis perdagangan dan jasa, dengan masing-masing persentase mencapai 74,39% dan 82,19%. Selanjutnya berdasarkan status penduduk, kedua lokasi juga memiliki kesamaan, yaitu keduanya mayoritas merupakan warga asli Polehan, dengan masing-masing persentase 77,04% dan 75,18%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh, keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu mayoritas menempuh pendidikan hingga jenjang SD, dengan masing-masing persentase 35,77% dan 47,62%. Hanya saja terdapat perbedaan pada atribut tingkat pendapatan diantara kedua lokasi tersebut, dimana lokasi aktor sentral yang berkesinambungan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi aktor sentral yang tidak berkesinambungan. Lokasi aktor sentral yang berkesinambungan mayoritas memiliki pendapatan 1jt - 2jt dengan persentase mencapai 59,90%, sementara lokasi aktor sentral yang tidak berkesinambungan mayoritas memiliki pendapatan di bawah 1jt dengan persentase mencapai 49,16%. Berikut merupakan distribusi spasial aktor sentral Program PLPBK Kelurahan Polehan untuk semua tahap.



Gambar 4.60 Distribusi Spasial Aktor Sentral Program PLPBK Seluruh Tahap



Jika dilihat pada Gambar 4.60, terdapat 45 aktor sentral yang tersebar di tiap RT, distribusi spasial aktor sentral tertinggi terdapat pada RT 11, yaitu sejumlah 9 aktor sentral, sedangkan distribusi spasial aktor sentral terendah terdapat pada RT 03, yaitu hanya 1 aktor sentral. Berikut perbedaan karakter sosial antar lokasi jumlah aktor sentral tertinggi dengan jumlah aktor terendah.

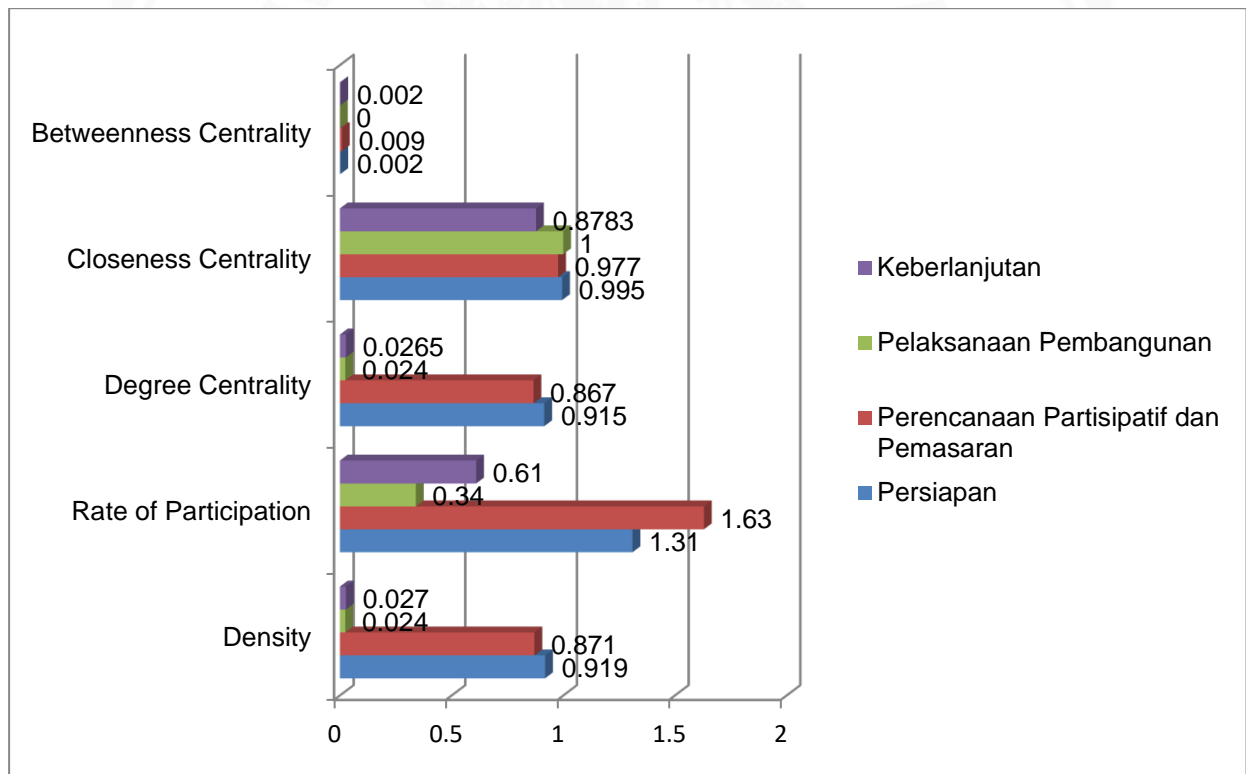
Tabel 4.23 Perbedaan Karakter Sosial Berdasarkan Distribusi Aktor Sentral (%)

Atribut	Proporsi Masyarakat pada RT dengan Distribusi Aktor Sentral Tertinggi (%)	Proporsi Masyarakat pada RT dengan Distribusi Aktor Sentral Terendah (%)
	RT 11	RT 03
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	64.71	57.14
Perempuan	35.29	42.86
<b>Usia</b>		
Produktif	100.00	82.14
Non Produktif	0.00	17.86
<b>Rata-rata (tahun)</b>	<b>47</b>	<b>55</b>
<b>Pendidikan</b>		
TT SD	0.00	0.00
SD	26.47	28.57
SMP	26.47	17.86
SMA	38.24	46.43
D3/S1	8.82	7.14
<b>Mata Pencaharian</b>		
Perdagangan dan Jasa	82.35	67.86
Pegawai Pemerintah	5.88	3.57
Industri/Pabrik	0.00	10.71
Konstruksi/Bangunan	0.00	0.00
Tidak Bekerja	2.94	3.57
Ibu Rumah Tangga	8.82	14.29
<b>Pendapatan</b>		
<1jt	41.18	17.86
1jt - 2jt	50.00	35.71
2jt - 2,5jt	5.88	21.43
2,5jt - 3jt	0.00	21.43
>3jt	2.94	3.57
<b>Status Penduduk</b>		
Asli	97.06	82.14
Pendatang	2.94	17.86

Atribut	Proporsi Masyarakat pada RT dengan Distribusi Aktor Sentral Tertinggi (%)	Proporsi Masyarakat pada RT dengan Distribusi Aktor Sentral Terendah (%)
	RT 11	RT 03
<b>Suku</b>		
Jawa	100.00	96.43
Luar Jawa	0.00	3.57

Jika dilihat pada Tabel 4.23, tidak terdapat perbedaan signifikan karakter sosial antara lokasi aktor sentral tertinggi dengan terendah untuk semua atribut demografis. Atribut demografis tersebut meliputi usia yang terkategori produktif, tingkat pendidikan menengah (SMA), bekerja pada sektor perdagangan dan jasa, tingkat pendapatan 1jt – 2jt, dan merupakan asli warga Polehan.

Secara keseluruhan, kesimpulan hasil *social network analysis* masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan berdasarkan *density*, *rate of participation* dan *centrality* dapat dijelaskan pada Gambar 4.60 berikut.



Gambar 4.61 Simpulan Struktur Sosial Masyarakat Kelurahan Polehan dalam Pelaksanaan Program PLPBK

Berdasarkan Gambar 4.60, dapat dijelaskan bahwa struktur sosial masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK merupakan kombinasi dari (i) aktor sentral yang menempati sebagai pemimpin informal, yaitu TIPP ataupun KSM yang

mungkin memiliki kemampuan tinggi untuk mempengaruhi warga melalui langkah-langkah minimum ketika berhubungan dengan yang lain, (ii) Tidak terdapat aktor yang berperan sebagai mediator atau penghubung dengan aktor lain, (iii) Tingkat kedekatan yang tinggi satu sama lain, dan (iv) Setiap responden memiliki ikatan satu sama lain melalui keanggotaan mereka di setidaknya satu 1 kegiatan pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran. Dapat diasumsikan bahwa perekrutan TIPP hasil aksi kolektif oleh anggota BKM Polehan, perangkat Kelurahan Polehan dan Kelompok Peduli.





*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Struktur sosial masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam pelaksanaan Program PLPBK merupakan kombinasi dari (i) aktor sentral yang menempati sebagai pemimpin informal, yaitu TIPP ataupun KSM yang mungkin memiliki kemampuan tinggi untuk mempengaruhi warga melalui langkah-langkah minimum ketika berhubungan dengan yang lain, (ii) tidak terdapat aktor yang berperan sebagai mediator atau penghubung dengan aktor lain, (iii) tingkat kedekatan yang tinggi satu sama lain, dan (iv) setiap responden memiliki ikatan satu sama lain melalui keanggotaan mereka di setidaknya satu 1 kegiatan pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran.
  - a. Nilai tingkat partisipasi didapatkan dengan membagi jumlah matriks diagonal dengan jumlah responden. Rata-rata responden hanya mengikuti 1 sampai 2 kegiatan dalam tiap tahap program. Semua nilai tingkat partisipasi masyarakat seluruh tahap terkategori rendah, dengan masing-masing nilai, yaitu 1,11; 2,11; 0,34; dan 0,61. Artinya masyarakat rata-rata terlibat dalam 1,11 kegiatan dari 4 kegiatan pada tahap persiapan; 2,11 kegiatan dari 7 kegiatan pada perencanaan partisipatif dan pemasaran; 0,34 kegiatan dari 3 kegiatan pada tahap pelaksanaan pembangunan; serta 0,61 kegiatan dari 6 kegiatan pada tahap keberlanjutan. Nilai tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada tahap persiapan serta tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran mengindikasikan antusiasme masyarakat yang besar terhadap penerimaan Program PLPBK dan turut aktif dalam peningkatan kualitas permukimannya. Hal ini dibuktikan dengan 96% dari total responden terlibat pada sosialisasi Program PLPBK baik di tingkat kelurahan maupun tingkat RW. Selanjutnya responden juga banyak terlibat aktif pada proses perencanaan partisipatif pada Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran yang menjadi corak Program PLPBK, yaitu penyusunan RTPLP (Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman), aturan bersama dan rencana pengelolaan kawasan. Sebaliknya, nilai tingkat partisipasi masyarakat yang rendah pada tahap pelaksanaan pembangunan,

serta tahap keberlanjutan dimungkinkan karena *scope* kegiatan pada kedua tahap tersebut banyak ditujukan untuk lembaga pengelola pembangunan seperti TAPP, TIPP, BKM dan KSM. Rendahnya nilai tingkat partisipasi pada keempat tahap tersebut dimungkinkan karena tingkat partisipasi dihitung dengan memasukkan seluruh responden, tanpa mengecualikan responden yang terisolasi dalam jaringan karena ketidakhadiran mereka dalam kegiatan PLPBK. Dapat diasumsikan nilai tingkat partisipasi yang rendah berbanding lurus dengan kerapatan antar masyarakat yang rendah, jika responden tidak terlibat setidaknya 1 kegiatan pada tahap pelaksanaan Program PLPBK.

- b. Nilai *density* pada Tahap Persiapan serta Tahap Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Tahap Pelaksanaan Pembangunan dan Tahap Keberlanjutan. Nilai *density* pada Tahap Persiapan terkategori tinggi, yaitu sebesar 0,919. Hal ini menunjukkan bahwa 91,9% pasang responden mengikuti kegiatan yang sama pada tahap persiapan atau merupakan *co-member* setidaknya 1 dari 4 kegiatan dalam tahap persiapan. Sama halnya pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran terkategori tinggi, yaitu sebesar 0,871. Hal ini menunjukkan bahwa 87,1% pasang responden mengikuti kegiatan yang sama pada tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran atau merupakan *co-member* setidaknya 1 sampai 7 kegiatan dalam tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran. Tingginya nilai *density*, mengindikasikan tingginya tingkat interaksi antar masyarakat RW 04 Kelurahan Polehan dalam difusi informasi kaitannya dengan Program PLPBK. Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan sosial yang terbentuk pada tahap persiapan dan tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran, memiliki ikatan sosial yang kuat. Ikatan sosial yang kuat mampu memobilisasi sumber daya mereka untuk menangani permasalahan permukimannya. Berkaitan dengan pelaksanaan Program PLPBK, artinya bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme, kesiapan dan komitmen yang kuat dalam memahami tujuan pelaksanaan Program PLPBK, membangun visi untuk lingkungannya, memetakan potensi serta permasalahan yang dihadapi, dan merumuskan dan menyusun aturan yang mereka sepakati bersama. Sebaliknya pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan, nilai *density* pada kedua tahap tersebut terkategori rendah, yaitu sebesar 0,024 dan 0,027. Artinya hanya 2,4% dan 2,7% masyarakat yang mengikuti kegiatan yang sama pada tahap

pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antarresponden memiliki afiliasi yang sangat kecil dengan responden lainnya atau tidak memiliki hubungan yang erat antar responden. Hal tersebut dikarenakan tidak semua responden mengikuti proses penyusunan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap keberlanjutan. Kegiatan ini hanya didominasi oleh panitia KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

- c. Pada ke-empat tahap pelaksanaan Program PLPBK RW 04 Kelurahan Polehan, seluruh aktor memiliki kontak langsung dengan aktor lainnya. Oleh karena itu, nilai *betweenness centrality* untuk setiap aktor hampir 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor yang menempati posisi strategis sebagai mediator antara aktor-aktor yang lain. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa transfer informasi diantara aktor akan terjadi di *shortest path* mereka, karena setiap aktor berdekatan (*adjacent*) dengan semua aktor lainnya. Seluruh aktor di RW 04 Kelurahan Polehan secara maksimal dekat dengan seluruh aktor lainnya, sehingga memiliki pengaruh yang sama dalam interaksi sosial satu sama lain. Rata-rata kedekatan responden memiliki nilai 0,9. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh aktor memiliki jalur yang menghubungkan ke seluruh aktor lain. terdapat 25 aktor sentral pada pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Polehan. Mayoritas aktor sentral menjabat sebagai lembaga pengelola pembangunan baik sebagai anggota BKM, TIPP ataupun KSM. Dalam pengertian ini, mereka dapat dikategorikan menduduki posisi sebagai pemimpin informal melalui kontak mereka yang luas kepada orang lain. Sebagian besar aktor sentral bekerja di sektor perdagangan dan jasa dengan rata-rata pendapatan tiap bulannya mencapai 1jt - 2jt yang tergolong masih di bawah standar Upah Minimum Kota Malang pada tahun 2018. Hampir seluruh aktor sentral termasuk ke dalam kelompok usia produktif yang berada pada rentang usia 15-64 tahun. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, mayoritas aktor sentral memiliki pendidikan menengah, yaitu SMA.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini terdiri atas saran untuk pemerintah, saran untuk masyarakat dan saran untuk akademisi.

### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan acuan penilaian efektifitas program yang ditinjau dari sisi sosial masyarakat dalam mencapai peningkatan kualitas permukiman yang layak huni ataupun program lain yang berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mampu memanfaatkan potensi jaringan sosial masyarakat yang telah terbentuk sebagai bentuk kesiapan program. Pemerintah mengetahui aktor sentral masyarakat yang menjadi jembatan informasi dan penggerak masyarakat untuk ikut turut serta terlibat aktif dalam program yang akan dilaksanakan.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui modal sosial dalam pelaksanaan program PLPBK serta sebagai modal masyarakat dalam program selanjutnya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan dan mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan permukiman layak huni.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan intrerpretasi sederhana lokasi aktor sentral pada masing-masing tahapan program PLPBK. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan analisis tambahan mengenai kedekatan ruang (spasial) antor aktor, sehingga kedekatan sosial dan spasial dapat terdefinisikan.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan input jaringan afiliasi dengan menggunakan keikutsertaan aktor dalam kegiatan pada tiap tahap program PLPBK. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan data input keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan lokal, dan kegiatan informal sehingga jaringan sosial yang terbentuk lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abers, Rebecca Neaera. 2000. *Inventing Local Democracy*. USA: Lynne Rienner Publishers.
- Agusyanto, Ruddy. 2007. *Jaringan-Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggraeni, M., Ari, I. R.D., Santosa, E. B. 2015. A Social Networks Approach to Understanding Location Preferences In Indonesia. *Working Paper Series*. 17.
- Ari, I.R.D., Ogi, K., Matsushima, K., & Kobayashi, K. (2013). Community participation on water management; Case Singosari District, Malang Regency, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 805–813.
- Arsyad, Idham. 2015. *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bappeda Kota Malang. 2016. *Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh*. Malang: Bappeda Kota Malang.
- Brandes, U., Hoefer, M. & Pich, C. 20016. Affiliation Dynamics with an Application to Movie-Actor Biographies. Proc. Eurographics/IEEE-VGTC Symp. *Visualization (EuroVis '06)*, 179-186.
- Beauchamp, M. A. 1965. An improved index of centrality. *Behavioral Science*: 10 (2).
- Borgatti, S. P., dan D. S Halgin. 2011. *Analyzing affiliation networks*. Carrington. London: Sage Publication.
- Borgatti, S.P., A. Mehra, D.J., Brass, dan G Labianca. 2009. Network analysis in the social sciences. *Science*. 323 (5916): 892-895.
- Borgatti, S.P., M. G. Everett, dan L. C Freeman. 2002. *UCINET 6 for Window: Software for social network analysis*. Harvard, MA: Analytic Technologies.
- Bourdieu, Pierre. 1986. *The Forms of Capital*. terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice. dalam Richardson, J.E. (ed.). *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*. New York: Greenword Press:46-58
- Burkholder, S. H., M. Chupp, dan P. Star. 2003. *Principles of neighborhood planning for community development*. Cleveland: Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs.
- Butts, C.T. 2008. Social Network Analysis: A Methodological Introduction. *Asian Journal of Social Psychology* 11: 13-41

- Carrington, P., dan J. Scott. 2000. *Handbook of social network analysis*. London: Sage
- Centola, Damon & Macy, Michael. 2007. Complex Contagions and The Weakness of Long Ties. *American Journal of Sociology*.
- Chia, R. & Suthers, D. 2015. Assessing intercultural communication competence as a relational construct using social network analysis. *International Journal of Intercultural Relations*. 48:1-136.
- Coleman, J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology* 94: 95-120.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Costenbader, E. & Valente, T. W. 2003. The stability of centrality measures when networks are sampled. *Social network*: 25(4).
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PU. 2014. *Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.
- Easley, D., dan J Kleinberg. 2010. *Networks, Crowds and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. . New York: Cambridge University Press.
- Everett, Martin G., dan Stephen P. Borgatti. 1999. Peripheries of cohesive subsets. *Social Networks* 21: 397-407.
- Freeman, L.C.. 2004. *The development of social network analysis: A study in the sociology of science*. Vancouver: Create Space.
- Freeman, L.C. 2000. *Social network analysis: Definition and history Encyclopedia of psychology*. New York: Oxford University Press.
- Freeman, L. C, D Roeder, dan R.R Mulholland. 1979. Centrality in social networks: II Experimental results. *Social Networks* 2 (2): 119-141.
- Grady, C. A., He, X., Peeta, S. 2015. Integrating social network analysis with analytic network process for international development project selection. *Expert Systems with Applications*. 42 (12).
- Granovetter, M.S. 1973. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Social* 78 (1360).
- Hanneman, Robert, A., dan Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methos." *UCI Faculty Profile System*. Diakses 1 2017. <http://www.faculty.uci.edu/hanneman>.

- Indrihapsari, Y. 2013. Penerapan Teori Graph Untuk Analisis Masalah Pada Grup Gelanggang-UGM di Facebook. *TRANSMISI*. 15 (1).
- Jones, B. 1990. *Neighborhood Planning: a guide for citizens and planners*. Chicago: Planner Press: American Planning Association.
- Karsai, M., Perra, N., Vespignani, A. 2014. Time varying networks and the weakness of strong ties. *Sci Re*: 4(4001).
- Kashudin, Charles. 2004. *Introduction to Social Network Theory*. New York: In Press.
- Khang, D, dan T Moe. 2008. Success criteria and factors for international development projects: A life cycle based framework. *Project Management Journal* 39 (1): 72-84.
- Manaf, A. Menuju Pembangunan Berbasis Tata Ruang Melalui Perencanaan Lingkungan Bertetangga Secara Partisipatif. Studi Kasus Pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Kelurahan Pringapus Kabupaten Semarang. *Tataloka*. 13 (3).
- Mitchell, J. C. 1969. *The Concept and Use of Social Networks*. In: Mitchell, J.C. (Ed.): *Social Networks in Urban Situations. Analyses of personal relationships in Central African towns*. Manchester: The University Press.
- Marin, A., dan B. Wellman. 2010. *Social network analysis: An introduction*. London: Sage.
- Monge, P.R., dan N.S Contractor. 2010. *Theories of communication networks`*. NewYork: Oxford University Press.
- Mubyarto dan S. Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Perdesaaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mumford, Lewis. 1954. The Neighborhood and the Neighborhood Unit. *Town Planning Review* 24 (4): 256-270.
- Nadel, S.F.1957. *The Theory of Social Structure*. London: Cohen and West.
- Newman, M.E.J. 2010. *Networks: An introduction*. New York. New York: Oxford University Press.
- Oliveira, M., dan J Gama. 2012. Wiley Online Library. *An overview of social network analysis*. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*. 17 Februari. Diakses 1 2017. <http://dx.doi.org/10.1002/widm.1048>.
- Onyx, J. 1996. The Measure of Social Capital. *Paper presented to Auatralian and New Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion,Justice and Citizenship: Role of Voluntary Sector.Justice and Citizenship: Role of Voluntary Sector. Justice and Citizenship* (Victoria University).

- Putnam, R. D. 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
- Robins, G., & Kashima. 2008. Social psychology and social networks: Individuals and social systems. *Asian Journal of Social Psychology* 11 (1): 1-12.
- Rohe, W. M. 2009. From Local to Global: One Hundred Years of Neighborhood Planning. *Journal of the American Planning Association* 75 (2): 209-230.
- Schuller, Tom, Angela Brassett Grundy, Andy Green, Cathie Hammond, dan John Preston. 2002. *Wider Benefits of Learning Reports: Learning, Continuity and Change in Adult Life*. London: The Centre for Research on The Wider Benefits of Learning Institute of Education.
- Serrat, O. 2009. *Understanding and developing emotional intelligence*. Diakses dari <http://www.adb.org/documents/information/knowledgesolutions/understanding-developing-emotional-intelligence.pdf>
- Shaw, A. G. L. 1954. *The Story of Australia*. London: Faber & Faber Ltd.
- Shimbel, A. 1953. Structural Parameters of Communication Networks. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 15, 501- 507
- Soekamto, S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stark, T. 2016. The density of social networks moderates effects of intergroup contact. *International Journal of Intercultural Relations*. 55:133-147.
- Stephenson, K. A., Zelen, M. 1989. Rethinking Centrality: Methods and Examples. *Social Networks*: 11(1)
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tausch, N, M Hewstone, K Schmid, J Hughes, dan E. Cairns. 2011. Extended contact effects as a function of closeness of relationship with ingroup contacts. *Group Processes & Intergroup Relations* 14 (2): 239-254.
- Todd, N. R., Jaclyn D. H., Rachael L. 2015. Applying Affiliation Social Network Analysis to Understand Interfaith groups. *Psychosocial Intervention*. 24 (3)
- Valente, T. W., Coronges, K., Lakon., C., Costenbader, E. 2008. How correlated are network centrality measures?. *Connections*: 28(1).
- Walikota Malang. 2015. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Luas Permukiman Kumuh.
- Wheeler, S. M. 2004. *Planning for Sustainability: Creating livable, equitable, and ecological communities*. New York: Routledge.



- Wasserman, Stanley, dan Katherine Faust. 2008. *Social Network Analysis. Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wasserman, S., dan K. Faust. 1994. *Social network analysis: Methods and applications*. New York: Cambridge University Press.
- Xua, W., Zhoua, C., Caoa, A., Luo, M. 2016. Understanding the mechanism of food waste management by using stakeholder analysis and social network model: An industrial ecology perspective. *Ecological Modelling*. 337:63-72



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

